



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2026 sampai dengan Desember 2026.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam :

- a. penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026;
- b. penyusunan rencana kerja perangkat Daerah tahun anggaran 2026; dan
- c. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. bab I berisi pendahuluan;
- b. bab II berisi gambaran umum kondisi Daerah;
- c. bab III berisi kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. bab IV berisi sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah;
- e. bab V berisi rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. bab VI berisi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- g. bab VII berisi penutup.

Pasal 5

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 10-7-2025

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

AMALIA DESIANA

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 10-7-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 34

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian daerah menghadapi tekanan yang cukup besar akibat dinamika global dan nasional yang tidak menentu. Ketidakpastian tersebut menyebabkan kontraksi pada perekonomian secara makro dan mengubah pola interaksi di antara para pelaku kegiatan ekonomi. Secara global, tekanan terhadap perekonomian semakin bertambah dengan adanya ketegangan geopolitik di negara-negara yang memiliki hubungan perdagangan dengan Indonesia.

Meskipun kondisi saat ini menunjukkan perbaikan secara bertahap, berbagai tantangan struktural masih menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor utama adalah belum optimalnya pemulihan daya beli masyarakat, yang berdampak pada terbatasnya permintaan domestik. Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi isu penting yang perlu segera ditangani. Untuk menjaga sisi permintaan agar sektor riil tetap bergerak, daya beli masyarakat perlu terus diperkuat, antara lain melalui kebijakan perlindungan sosial dan dukungan terhadap kelompok rentan. Di sisi lain, belanja pemerintah juga diarahkan untuk memperkuat sisi penawaran (*supply*) dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perekonomian daerah. Pemulihan ekonomi akan dilakukan secara simultan dengan agenda peningkatan kesejahteraan lainnya, seperti penanganan kemiskinan—khususnya kemiskinan ekstrem—dan penurunan prevalensi stunting.

Penyusunan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 sudah dilaksanakan dengan berdasarkan pada tahapan yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan ini diawali oleh pelaksanaan Forum Konsultasi Publik atas rancangan awal RKPD pada tanggal 16 Januari 2025, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di kecamatan yang direncanakan pada tanggal 4-11 Februari 2025, hingga pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten pada tanggal 27 Maret 2025.

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin ketertakutan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan

pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 306);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 302);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjarnegara 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 309);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Banjarnegara yang disusun berpedoman pada RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dan rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 yang sedang disusun saat ini. Selain itu, RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 juga disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, program strategi nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Dalam perencanaan pembangunan, RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 menggunakan RTRW Kabupaten yang mengacu pada RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Nasional sebagai pedoman dalam menetapkan lokasi program pembangunan daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, baik dari sisi pola maupun struktur ruangnya.

RKPD Kabupaten Banjarnegara dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara disusun secara simultan, dimana penyusunan Renja-PD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 dilaksanakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026. Mengingat bahwa setiap Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk menjabarkan RPJMD pada tingkatan OPD, maka Renja-PD juga harus mengacu pada Renstra-PD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya didahului oleh penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. RKPD Tahun 2026 telah disusun melalui proses teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*) yang terdiri dari 7 (tujuh) bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografis dan demografis, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2024, serta permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi ekonomi daerah dan prospek perekonomian daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan belanja daerah.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tentang tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan.

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci pada tahun 2026.

BAB VII : PENUTUP

Memuat harapan pada para pemangku kepentingan dalam rangka menyikapi RKPD Tahun 2026.

1.5. Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

- Menjabarkan RPD Tahun 2023–2026 dan rancangan RPJMD Tahun 2025–2029 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 dan menyelaraskan dengan sasaran dan program RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Menciptakan sinergi antara program dan kegiatan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan;
- Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- Menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
- Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026;
- Menjadi acuan bagi badan usaha (BUMN/BUMD/Swasta) dan Lembaga lainnya untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian prioritas daerah;

- d. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB II

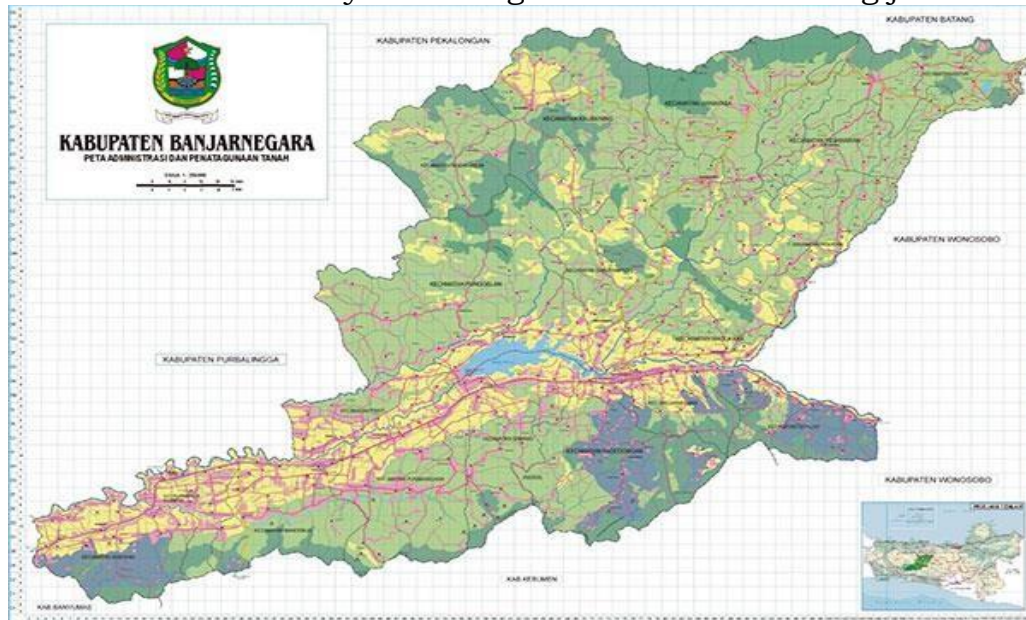
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Wilayah Kabupaten Banjarnegara terletak pada jalur pengunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah bagian barat yang membujur dari barat ke timur. Kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara yang 30% wilayah kecamatan berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter di bawah permukaan laut sangat cocok untuk pengembangan berbagai jenis tanaman kopi, carica, kentang, kubis, wortel, salak, ketela pohon, dan juga perikanan gurami serta peternakan domba/kambing. Sedangkan disektor pariwisata juga terdapat obyek wisata unggulan berskala nasional yaitu Dieng serta wisata air arung jeram.



Sumber: DPUPR Kab. Banjarnegara

Gambar 2. 1

Peta Kabupaten Banjarnegara

2.1.1.2. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas Kabupaten Banjarnegara sebesar 106.971,01 ha atau sekitar 3,39% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3,25 juta ha). Secara administratif Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Punggelan dengan luas 10.284,01 ha atau 9,61% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purwareja Klampok dengan luas 2.186, 67 ha atau 2,04% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Kabupaten Banjarnegara berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi:

Sebelah utara : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang

Sebelah timur : Kabupaten Wonosobo

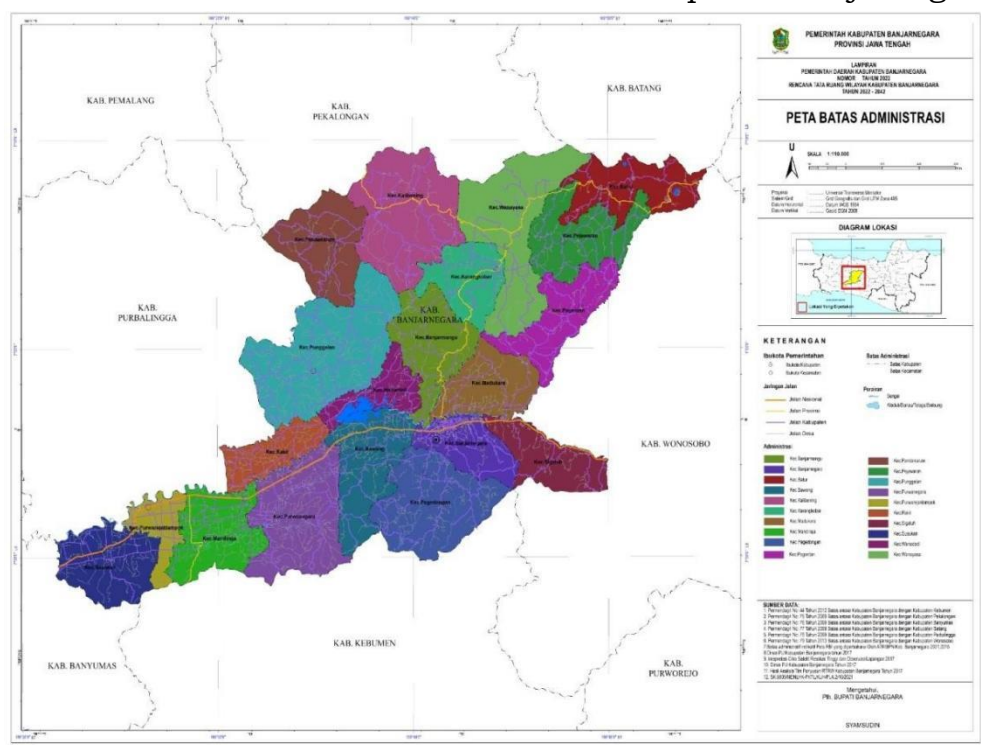
Sebelah Selatan: Kabupaten Kebumen

Sebelah barat : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga

Sumber: DPUPR Kabupaten Banjarnegara

Gambar 2. 2

Peta Batas Administrasi Kabupaten Banjarnegara



Adapun pembagian wilayah administratif Kabupaten Banjarnegara menurut kecamatan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Data Wilayah Administratif

Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
Susukan	52,66	15	-
Purwareja Klampok	21,87	8	-
Mandiraja	52,62	16	-
Purwanegara	73,87	13	-
Bawang	55,21	18	-
Banjarnegara	26,24	4	9
Sigaluh	39,56	14	1
Madukara	48,20	18	2
Banjarmangu	46,36	17	-
Wanadadi	28,27	11	-
Rakit	32,45	11	-
Punggelan	102,84	17	-
Karangkobor	39,07	13	-
Pagentan	46,19	16	-
Pejawaran	52,25	17	-
Batur	47,17	8	-
Wanayasa	82,01	17	-
Kalibening	83,78	16	-
Pandanarum	58,56	8	-
Pagedongan	80,53	9	-
Total	1.069,71	266	12

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah

2.1.1.3. Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis

Secara astronomis Kabupaten Banjarnegara berada pada koordinat $7^{\circ}12'-7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}20'10''-109^{\circ}45'50''$ Bujur Timur.

b. Posisi Geostrategis

Wilayah Jawa Tengah terbagi menjadi 3 wilayah yaitu wilayah pantura, wilayah pansela, dan wilayah tengah dimana posisi Kabupaten Banjarnegara berada di wilayah tengah yang merupakan daerah penyangga sebagai kawasan konservasi dan perlindungan sumber mata air, sedangkan wilayah pantura dan pansela merupakan daerah industri.

c. Topografi

Secara topografi Kabupaten Banjarnegara berada pada jalur pengunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur, dengan sebagian besar wilayah Kabupaten Banjarnegara (37,04% berada pada ketinggian antara 100 -500 m dpl.

Ditinjau dari ketinggian dari permukaan laut Kabupaten Banjarnegara secara umum terbagi menjadi empat kategori yaitu:

1. Ketinggian kurang dari 100 m dpl sebesar 9,82%, terdapat di daerah Susukan dan Purwareja Klampok.
2. Ketinggian 100-500 m dpl sebesar 37,04%, terdapat di daerah Mandiraja, Rakit, Punggelan, Wanadadi, Banjarmangu, Purwanegara, Bawang, Banjarnegara dan Madukara.
3. Ketinggian antara 500-1.000 m dpl sebesar 28,74%, terdapat di daerah Pagedongan, Sigaluh dan Pagentan.
4. Ketinggian lebih besar dari 1.000 m dari permukaan laut sebesar 24,40%, terdapat di daerah Karangkoobar, Pejawaran, Batur, Wanayasa, Kalibening, dan Pandanarum.

Sedangkan ditinjau dari kemiringan wilayah Kabupaten Banjarnegara dikelompokkan dalam tiga kelas yaitu:

1. Kelas lereng 1 (kemiringan 0-15%): 24,61% dari luas Kabupaten Banjarnegara, terdapat di daerah Susukan, Purwareja Klampok, Mandiraja, Purwanegara, Pagedongan, Bawang, dan Rakit.
2. Kelas lereng 2 (kemiringan di atas 15-40%): 45,04% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu daerah Madukara, Banjarmangu, Wanadadi, Punggelan, Karangkoobar, Pagentan, Wanayasa, dan Kalibening.
3. Kelas lereng 3 (Kemiringan lebih dari 40%): 30,35% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu Susukan, Banjarnegara, Sigaluh, Banjarmangu, Pejawaran, dan Batur.

Berdasarkan pembagian zona fisiografi, Kabupaten Banjarnegara masuk dalam 3 (tiga) zona yang berbeda yaitu Zona Pegunungan Serayu Utara dengan morfologi berupa rangkaian pegunungan dengan lereng dan lembah yang curam, Zona Depresi Sentral yang merupakan dataran dengan lembah Sungai Serayu yang subur, dan Zona Pegunungan Serayu Selatan yang berupa lereng yang terjal dan curam, umumnya tidak subur dan sering kekurangan air.

d. Geologis

Secara geologis Kabupaten banjarnegara memiliki jenis tanah, struktur, dan gerakan tanah yang dapat diklasifikasikan sebaai berikut:

- Tanah alluvial : terdapat di Kecamatan Batur, Karangkoobar, Purwareja Klampok dan Wanadadi.
- Tanah latosol : terdapat di Kecamatan Susukan, Purwareja Klampok, Purwanegara, Wanadadi, Rakit, Bawang, Sigaluh, Madukara, Banjarnegara, Wanayasa, Pejawaran dan Pagentan.
- Tanah andosol : terdapat di Kecamatan Kalibening, Wanayasa, Pejawaran dan Batur.

- Tanah grumol : terdapat di Kecamatan Purwanegara, Mandiraja, Kalibening, Karangobar, Pagentan dan Banjarnegara.
- Tanah organosol : terdapat di Kecamatan Batur.
- Tanah litosol : terdapat di Kecamatan Banjarnegara dan Punggelan.
- Formasi endapan : Banjarnegara termasuk wilayah jalur fisiografi pegunungan Serayu Selatan. Adapun stratigrafi daerah terdiri dari batuan yang tertua yaitu batuan molion yang terdiri dari sekis kristalin, sabak, serpil hitam, filit, kwarsit, dan batu gamping.
- Formasi batuan:
 - Batuan grewake dan lempung hitam tersingkap di daerah Kalitengah sampai Merden.c
 - Batuan metasedimen tersingkap di daerah Kalitengah hingga daerah Kebutuhan Duwur.
 - Batuan filit dan sekis singkapannya banyak ditemukan di lereng selatan pegunungan Serayu Selatan.

e. Hidrologi

Secara hidrologi wilayah kabupaten Banjarnegara termasuk wilayah aliran Sungai Serayu, Pekacangan, Gintung, Merawu, dan Sungai Tulis dengan anak-anak sungainya. Sifat sungai tersebut umumnya adalah prenil (mengalir sepanjang tahun) dan merupakan bagian DAS (Daerah Aliran Sungai) Serayu. Adapun jumlah mata air dan sungai yang mengalir di daerah resapan Kabupaten Banjarnegara antara lain:

- Kecamatan Rakit: memiliki 42 mata air yang dialiri oleh Sungai Serayu dan Pekacangan.
- Kecamatan Punggelan: memiliki 6 mata air yang dialiri oleh Sungai Pekacangan, Kedawung, Pandanaran, Wujil, Cacaban, dan Gintung.
- Kecamatan Wanadadi: memiliki 4 mata air yang dialiri oleh Sungai Serayu dan Pekacangan.
- Kecamatan Banjarmangu: memiliki 9 mata air yang dialiri Pekacangan, Serayu, Merawu, Kandangwangi, dan Lumajang.
- Kecamatan Madukara: memiliki 20 mata air yang dialiri Serayu, Merawu, Langkrang, dan Bangbang.
- Kecamatan Pagentan: memiliki 9 mata air yang dialiri Merawu, Bojong, dan Jawar.
- Kecamatan Pejawaran: memiliki 13 mata air yang dialiri oleh sungai Bojong, Penaraban, Putih, dan Dalak.

f. Klimatologi

Secara klimatologis wilayah Kabupaten Banjarnegara beriklim tropis, musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun. Bulan basah umumnya lebih banyak dari bulan kering. Curah hujan pada bulan Desember 2022 sebanyak 20,68mm per tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari sebanyak 26,94mm dengan 24 hari hujan. Suhu udara selama tahun 2022 berkisar diantara 23,3-25,1°C dengan tingkat kelembaban udara 79,50-89,20% dan kecepatan angin rata-rata 2,30 m/det.

g. Penggunaan Lahan

Dari sisi penggunaan lahan di Kabupaten Banjarnegara menurut jenisnya pada 2024 dibagi menjadi 3 yaitu lahan sawah, bukan lahan sawah, dan lahan pertanian. Lahan sawah terdiri dari lahan irigasi, lahan tadah hujan, dan lahan pasang surut. Sedangkan bukan lahan sawah terdiri dari tegal/kebun, perkebunan, hutan rakyat, lainnya, dan lahan yang tidak diusahakan.

Perincian penggunaan lahan tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 2
Penggunaan Lahan Tahun 2020-2024

Penggunaan Lahan	2020	2021	2022	2023	2024
I. Lahan Sawah	14.049,07	13.291,58	12.939,64	12.645,53	12.057,34
a. Lahan Irigasi	11.101,11	10.981,69	10.639,07	10.502,89	9.912,34
b. Lahan Tadah Hujan	2.882,76	2.244,69	2.238,87	2.088,94	2.091,30
c. Lahan Pasang Surut	65,20	65,20	61,70	53,70	53,70
II. Bukan Lahan Sawah	72.140,12	75.615,92	74.520,92	71.702,63	75.466,38
a. Tegal/Ke bun	42.820,13	46.296,13	46.175,03	43.144,89	45.800,23
b. Perkebun an	3.088,92	3.088,92	3.088,92	3.083,42	2.601,29
c. Hutan Rakyat	7.362,85	7.362,85	6.066,55	6.062,25	6.502,92
d. Lainnya	18.857,22	18.857,02	19.179,42	19.401,07	19.914,54
e. Lahan Yang Tidak Diusahak an	11,00	11,00	11,00	11,00	647,40
III. Lahan Bukan Pertanian	20.782,51	18.064,20	19.511,15	22.623,54	19.447,98
Jumlah (I+II+III)	106.971,70	106.971,70	106.971,71	106.971,70	106.971,70

Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2025 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa lahan sawah di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 mempunyai luas 12.057,34 ha atau 11,27% dari wilayah keseluruhan Kabupaten Banjarnegara dengan luas penggunaan lahan terbesar adalah lahan irigasi sebesar 9.912,34 ha. Kemudian, lahan bukan sawah memiliki luas sebesar 75.466,38 ha atau 70,55% dari total luas wilayah kabupaten dengan luas terbesar pada lahan tegal/kebun sebesar 45.800,23 ha. Sedangkan lahan bukan pertanian memiliki luas sebesar 19.447,98 atau 18,18% dari total luas wilayah kabupaten. Lahan bukan pertanian ini terdiri dari bangunan/pekarangan, hutan negara, rawa-rawa tidak ditanami padi, dan sebagainya.

2.1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah

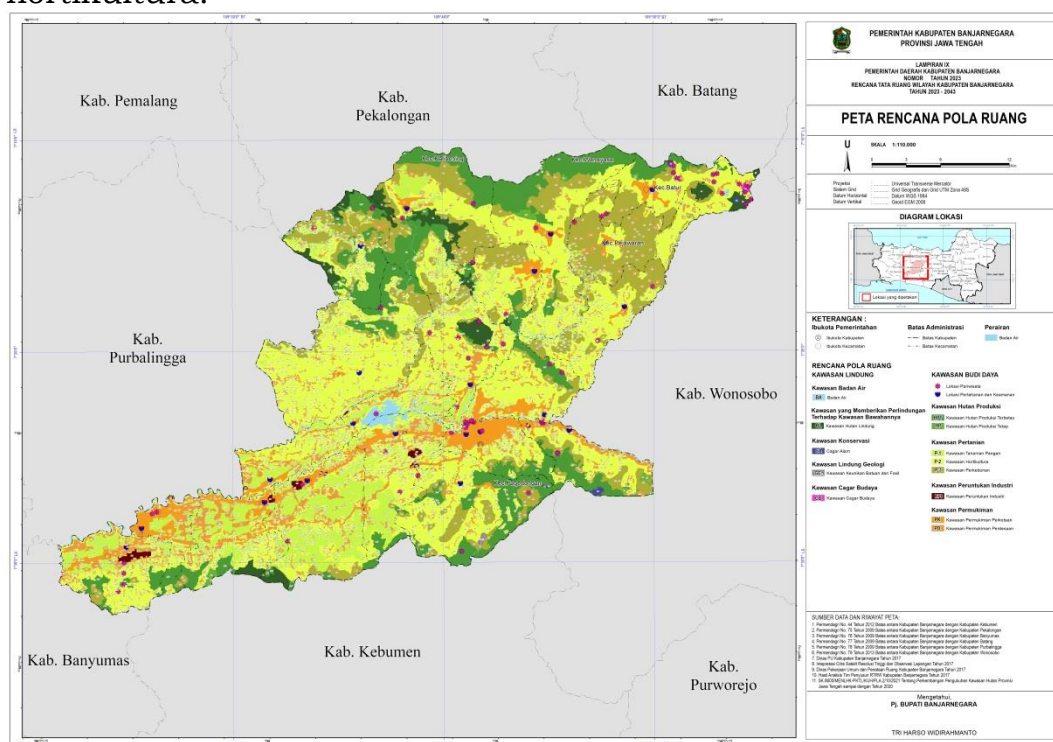
Berdasarkan RTRW Banjarnegara Tahun 2011-2031, potensi wilayah yang dikembangkan sebagai kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, dan permukiman. Luas areal hutan di Kabupaten Banjarnegara 17.136,15 hektar (15 kecamatan) yang terdiri dari Suaka Alam Hutan Wisata seluas 32,10 hektar (3 kecamatan), Hutan Lindung seluas 2.129,47 hektar (8 kecamatan) dan Hutan Produksi seluas 14.974,58 hektar (15 kecamatan).

Potensi pengembangan tanaman Hortikultura kurang lebih 13.779,8 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Untuk potensi pengembangan tanaman pangan padi sawah/Padi ladang seluas 23.452,80 hektar dengan total produksi 145.543,82 Ton yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Batur. Potensi pengembangan tanaman pangan jagung kurang lebih 9.117,30 hektar dengan total produksi 53.474 Ton yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Banjarmangu. Potensi pengembangan tanaman pangan ubi kayu kurang lebih 3.476 hektar dengan total produksi 90.200 Ton yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kalibening, Madukara dan Batur. Sedangkan potensi pengembangan tanaman pangan ubi jalar kurang lebih 102 hektar dengan total produksi 2.138,98 Ton yang tersebar hanya di 6 kecamatan yaitu Purwanegara, Banjarnegara, Pagentan, Pejawaran, Wanayasa dan Kalibening. Potensi pengembangan tanaman kacang tanah seluas 534,10 hektar dengan total produksi sebesar 582,56 Ton yang tersebar di 13 kecamatan yaitu Purwareja Klampok, Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Banjarnegara, Pagedongan, Sigaluh, Madukara, Wanadadi, Rakit, Punggelan, Karangkobor, dan Pejawaran. Sedangkan potensi pengembangan tanaman kedelai seluas 589,10 hektar dengan total produksi sebesar 661,44 Ton yang tersebar di 7 kecamatan yaitu Susukan, Purwareja Klampok, Purwanegara, Bawang, Pagedongan, Rakit dan Kalibening.

Potensi pengembangan tanaman perkebunan yang meliputi Kelapa seluas 11.085,59 hektar, Kopi seluas 1.589,53 hektar, Karet seluas 460,68 hektar, Teh seluas 1.713 hektar, Kakao seluas 208,08 hektar, Tembakau seluas 303 hektar dan Tebu seluas 15,03 hektar yang tersebar hanya di beberapa kecamatan saja untuk masing-masing jenis tanaman.

Potensi kawasan untuk pertambangan di Kabupaten Banjarnegara untuk kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara terdiri dari mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara. Mineral logam terdapat di Kecamatan Banjarmangu, Pegentan, Karangkobor, Batur, Pejawaran, Wanayasa, Kalibening, Pandanarum, Punggelan, Sigaluh, Pagedongan, Bawang, Purwanegara, dan Susukan. Mineral bukan logam di Kabupaten Banjarnegara terdapat pula di seluruh kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banjarnegara. Batuan di Kabupaten Banjarnegara terdiri atas batuan trass (Kecamatan Karangkobor, Sigaluh, Wanayasa, Punggelan, Pagentan, dan Pejawaran), batuan marmer (Kecamatan Bawang, Pagedongan, Purwanegara, dan Banjarnegara), batu lempeng (Kecamatan Pejawaran), batu granit (Kecamatan Kalibening, Pandanarum, Banjarmangu, Karangkobor, Pagentan, dan Sigaluh), batu gamping (Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Punggelan, Wanayasa, dan Pejawaran), lempung (Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara, Banjarmangu, Punggelan, Wanayasa, Karangkobor, Kalibening, Pagetan, dan Pejawaran), batu tulis (Kecamatan Purwanegara), andesit (Kecamatan Sigaluh, Banjarmangu, Kalibening, Karangkobor, dan Pagentan), diorite (Kecamatan Bawang, Banjarmangu, Wanayasa, Pagentan, dan Karangkobor), Pasir dan Batu meliputi Sepanjang Sungai serayu, sepanjang Sungai Merawu, sepanjang Sungai Pekacangan, sepanjang Sungai Brukah, sepanjang Sungai Sapi, sepanjang Sungai Bombong, sepanjang Sungai Tulis, dan sepanjang Sungai Bermali. Kawasan peruntukan Batubara terletak di Kecamatan Karangkobor.

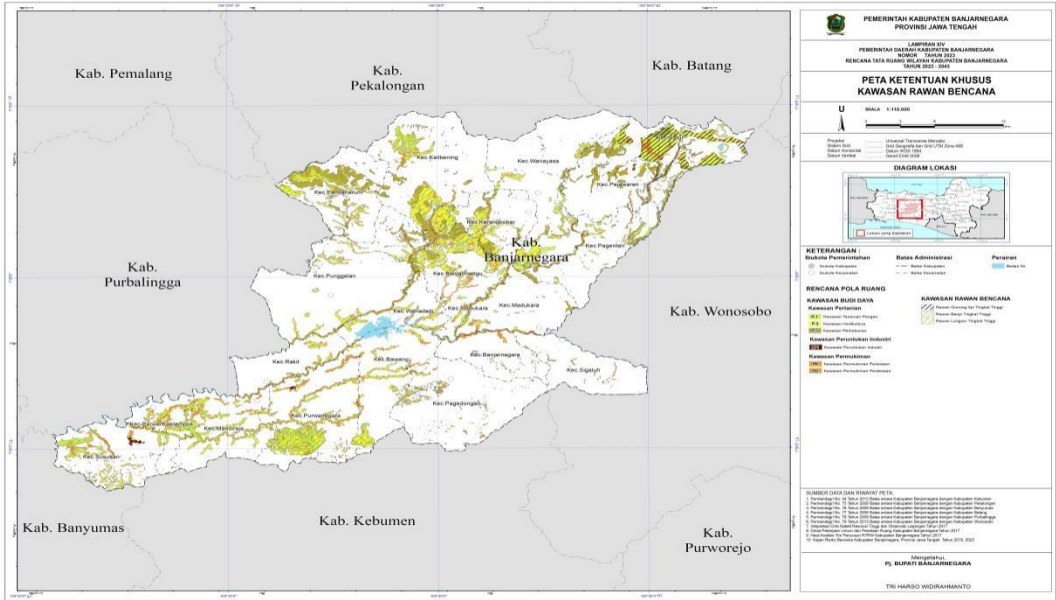
Potensi kawasan pariwisata di Kabupaten Banjarnegara meliputi kawasan wisata alam, kawasan pariwisata budaya, dan kawasan wisata buatan. Kawasan pariwisata alam terletak di kawasan dataran tinggi Dieng, kawasan wisata arung jeram Sungai Serayu, kawasan wisata Gunung Lawe, kawasan wisata alam Curug Pitu, kawasan wisata Curug Sikopel, kawasan wisata Gunung Mandala, kawasan wisata pemandian air panas, dan kawasan wisata hutan pinus di Kecamatan Pagedongan. Kawasan pariwisata budaya terletak di kawasan Candi Dieng, kawasan wisata sentra seni kerajinan Klampok, dan kawasan wisata sentra batik di Kecamatan Susukan. Kawasan pariwisata buatan terletak di kawasan wisata Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas (TRMS), kawasan wisata Waduk Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan kawasan agrowisata hortikultura.



Gambar 2. 3

2.1.1.5. Wilayah Rawan Bencana

- Kawasan rawan longsor. Mayoritas wilayah di Kabupaten Banjarnegara merupakan kawasan/daerah rawan bencana longsor. Dari 20 kecamatan, yang daerahnya tidak termasuk kategori rawan longsor, yaitu Kecamatan Rakit, Wanadadi, Purwareja Klampok dan Banjarnegara.
- Kawasan rawan gas beracun, meliputi:
Kecamatan Batur, Wanayasa, dan Pejawaran.
- Kawasan rawan kekeringan, meliputi:
Kecamatan Susukan, Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Punggelan, Pagedongan, dan Madukara
- Kawasan termasuk rawan banjir, meliputi:
Kecamatan Kalibening, Pejawaran, Susukan, dan Purwareja Klampok.



Sumber: DPUPR Kabupaten Banjarnegara
Gambar 2. 4
Peta Kawasan Rawan Bencana

2.1.1.6. Aspek Demografi
2.1.1.6.1. Jumlah dan Sebaran Penduduk
Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 sejumlah 1.071.977 jiwa, yang berarti mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2023) yang sebesar 1.047.226 jiwa. Hal ini menunjukkan pada tahun 2024 mengalami laju pertumbuhan sebesar 1,01% dari jumlah penduduk tahun 2023. Laju pertumbuhan ini dipengaruhi oleh fluktuasi dari kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk yang masuk atau keluar dari wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Tabel berikut ini menyajikan jumlah penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Banjarnegara:

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024				
Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio (%)
	L	P	Total	
SUSUKAN	33.181	32.520	65.701	102,03
PURWAAREJA KLAMPOK	24.801	24.632	49.433	100,69
MANDIRAJA	42.202	41.260	83.462	102,28
PURWANEGARA	43.754	43.025	86.779	101,69
BAWANG	33.746	33.003	66.749	102,25
BANJARNEGARA	35.986	35.472	71.458	101,45
SIGALUH	16.707	16.396	33.103	101,90
MADUKARA	24.086	23.222	47.308	103,72
BANJARMANGU	24.489	23.350	47.839	104,88
WANADADI	18.026	17.678	35.704	101,97
RAKIT	28.786	28.188	56.974	102,12
PUNGCELAN	47.634	45.311	92.945	105,13
KARANGKOBAR	17.130	16.044	33.174	106,77
PAGENTAN	20.831	19.818	40.649	105,11
PEJAWARAN	24.278	22.552	46.830	107,65
BATUR	22.352	21.031	43.383	106,28
WANAYASA	27.154	25.388	52.542	106,96
KALIBENING	25.148	24.040	49.188	104,61
PANDANARUM	12.223	11.599	23.822	105,38
PAGEDONGAN	22.999	21.935	44.934	104,85

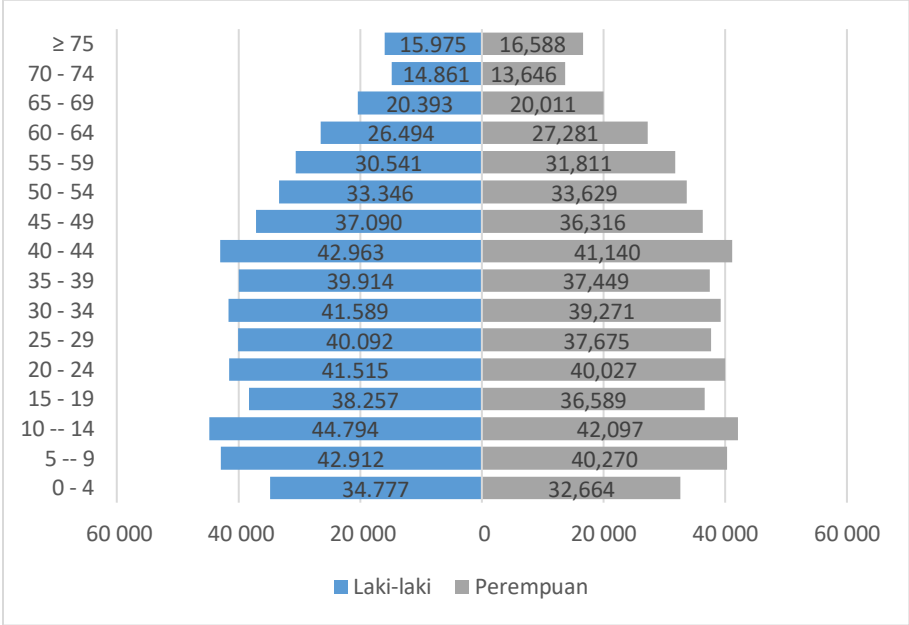
Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio (%)
	L	P	Total	
Jumlah	545.513	526.464	1.071.977	103,62

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Banjarnegara sebesar 545.513 jiwa lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan sebesar 526.464 jiwa. Kondisi ini menghasilkan *sex ratio* penduduk Kabupaten Banjarnegara nilainya lebih besar dari 100 yaitu 103,62%. Pada tahun 2024, kecamatan dengan jumlah penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Punggelan yaitu sejumlah 92.945 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Pandanarum yaitu sejumlah 23.822 jiwa.

2.1.1.6.2. Struktur Penduduk

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara

Gambar 2. 5

Piramida Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

Berdasarkan piramida penduduk di Kabupaten Banjarnegara menurut umur dan jenis kelamin, struktur penduduk di Kabupaten Banjarnegara termasuk ke dalam piramida ekspansif, dimana angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjarnegara berada dalam posisi bertumbuh. Jumlah penduduk paling tinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu sebesar 86.298 jiwa. Sedangkan kelompok umur dengan jumlah terendah terdapat pada rentang usia 70-74 tahun, yaitu sebesar 28.981 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara berdasarkan rentang usia dan jenis kelamin disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 4

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2024

Sumber: Dindukcapil Kab. Banjarnegara

Perkembangan rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Banjarnegara saat ini sebesar 45,36% yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kependudukan di Kabupaten Banjarnegara memiliki proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar.

2.1.1.6.3. Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk yang menggambarkan bentuk penyebaran dan pemerataan penduduk di suatu wilayah. Data terkait jumlah dan kepadatan penduduk pada masing-masing kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2. 5

Jumlah Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024

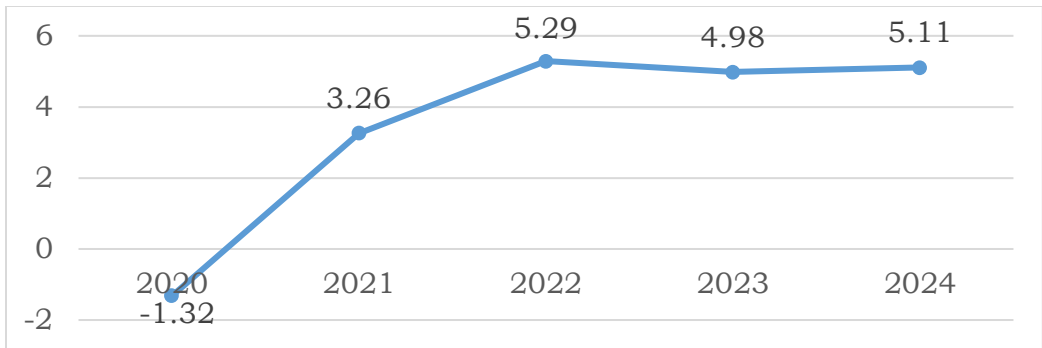
Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
SUSUKAN	52,66	65.701	1.247,72
PURWAREJA KLAMPOK	21,87	49.433	2.260,65
MANDIRAJA	52,61	83.462	1.586,25
PURWANEGARA	73,86	86.779	1.174,83
BAWANG	55,25	66.749	1.209,08
BANJARNEGARA	26,24	71.458	2.723,04
SIGALUH	39,56	33.103	836,79
MADUKARA	48,2	47.308	981,46
BANJARMANGU	46,36	47.839	1.031,99
WANADADI	28,27	35.704	1.262,78
RAKIT	32,45	56.974	1.755,95
PUNGGELAN	102,84	92.945	903,78
KARANGKOBAR	39,07	33.174	849,10
PAGENTAN	46,19	40.649	880,04
PEJAWARAN	52,25	46.830	896,27
BATUR	47,17	43.383	919,70
WANAYASA	82,01	52.542	640,67
KALIBENING	83,78	49.188	587,14
PANDANARUM	58,56	23.822	406,79
PAGEDONGAN	80,51	44.934	557,77
Jumlah	1.069,71	1.071.977	1.002,11

Sumber: Dindukcapil Kab. Banjarnegara

Secara umum tingkat kepadatan penduduk pada Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar 1.002,11 jiwa per km². hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 km² luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, rata-rata dihuni oleh sekitar 1.002,11 jiwa. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kecamatan yang memiliki tingkat penduduk tertinggi pada Kabupaten Banjarnegara adalah Kecamatan Banjarnegara dengan jumlah kepadatan penduduk 2.723,04 jiwa per km². sementara itu kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduknya rendah adalah kecamatan Pandanarum yaitu sebesar 406,79 jiwa per km².

- 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
- 2.1.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator vital yang mencerminkan kesehatan dan dinamika perekonomian suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Berikut disajikan grafik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara selama 5 tahun terakhir:



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.1

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2020-2024

Dinamika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan pola pemulihan dan pertumbuhan yang kearah positif. Pada tahun 2022 menjadi titik balik dalam kondisi pertumbuhan ekonomi Banjarnegara, dengan pertumbuhan melonjak hingga 5,29%. Peningkatan ini menunjukkan ekspansi ekonomi yang kuat setelah pembukaan kembali aktivitas ekonomi secara penuh. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi kembali menguat menjadi 5,11%. Terjadinya penguatan dalam pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai sektor utama di Banjarnegara seperti pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan lokal.

2.1.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto

Keadaan ekonomi suatu daerah dapat terlihat dari PDRB. PDRB terbagi menjadi dua kategori utama yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB mencerminkan kapasitas sumber daya ekonomi yang dihasilkan dalam suatu wilayah. Ketika dianalisis menurut sektor, distribusi PDRB ADHB memperlihatkan struktur ekonomi atau kontribusi relatif setiap sektor dalam perekonomian daerah tersebut. Sektor-sektor dengan kontribusi signifikan menjadi indikator basis ekonomi daerah tersebut. Di sisi lain, PDRB ADHK berfungsi untuk mengukur Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), baik secara keseluruhan maupun per sektor dari tahun ke tahun. Besarnya nilai PDRB mengindikasikan besarnya potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah tersebut.

Total PDRB Kabupaten Banjarnegara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki nilai PDRB paling tinggi di Kabupaten Banjarnegara, namun kontribusinya mengalami penurunan secara konsisten dari 30,58% menjadi 28,48%, mengindikasikan pergeseran bertahap dari ekonomi agraris menuju ekonomi yang lebih terdiversifikasi. Adapun nilai PDRB paling rendah pada sektor pengadaan listrik dan gas.

Fenomena pemulihan ekonomi terlihat jelas dari transformasi laju pertumbuhan total PDRB yang beranjak dari kontraksi -1,32% pada 2020 menjadi 5,11% pada 2024, melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menggambarkan ketahanan ekonomi daerah dan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan pasca pandemi. Pergeseran bertahap ke arah sektor tersier seperti jasa pendidikan yang tumbuh 8,48% pada 2024 juga mengindikasikan peningkatan investasi pada pembangunan sumber daya manusia yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Kabupaten Banjarnegara.

Nilai dan kontribusi PDRB Kabupaten Banjarnegara atas dasar harga berlaku maupun nilai dan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 6
 Nilai dan Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)

Keterangan	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.633,23	30,58	6.820,73	29,88	7.402,19	29,61	7.788,45	28,62	8.326,34	28,48
B	Pertambangan dan Penggalian	1.299,99	5,99	1.369,12	6,00	1.321,38	5,29	1.387,69	5,10	1.465,99	5,02
C	Industri Pengolahan	3.289,33	15,16	3.552,55	15,56	3.931,62	15,73	4.460,04	16,40	4.844,15	16,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,05	0,03	7,41	0,03	7,73	0,03	8,36	0,03	8,93	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,81	0,04	9,41	0,04	9,66	0,04	10,20	0,04	11,02	0,04
F	Konstruksi	1.561,73	7,2	1.740,83	7,63	1.894,95	7,58	2.136,68	7,86	2.297,61	7,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.139,23	14,47	3.388,30	14,84	3.675,47	14,70	3.979,35	14,64	4.250,45	14,54
H	Transportasi dan Pergudangan	590,36	2,72	628,89	2,75	1.097,54	4,39	1.276,78	4,70	1.351,24	4,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	405,06	1,87	437,51	1,92	509,90	2,04	582,54	2,16	635,62	2,17
J	Informasi dan Komunikasi	701,40	3,23	744,06	3,26	763,13	3,05	850,27	3,13	921,27	3,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	631,07	2,91	672,13	2,94	734,15	2,94	767,44	2,82	790,63	2,70
L	Real Estate	332,02	1,53	342,57	1,50	363,86	1,46	392,73	1,44	417,82	1,43

M,N	Jasa Perusahaan	85,74	0,4	89,60	0,39	98,99	0,40	110,08	0,40	121,99	0,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	732,62	3,38	720,39	3,16	756,45	3,03	808,56	2,97	892,85	3,05
P	Jasa Pendidikan	1.480,56	6,82	1.497,09	6,56	1.534,56	6,14	1.650,48	6,07	1.827,43	6,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	320,32	1,48	323,72	1,42	335,19	1,34	362,21	1,33	392,42	1,34
R,S,T,U	Jasa lainnya	475,86	2,19	483,55	2,12	559,71	2,24	620,46	2,28	675,46	2,31
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	21.694,38	100	22.827,89	100	24.996,48	100	27.192,31	100	29.231,22	100

Sumber: Badan Pusat Statiiistik

Tabel 2. 7
Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)

Ketera ngan	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.389,95	3,06	4.433,51	0,99	4.604,32	3,86	4.631,63	0,59	4.807,56	3,8
B	Pertambangan dan Penggalian	793,91	0,37	825,80	4,02	774,02	-6,27	790,59	2,14	835,03	5,62
C	Industri Pengolahan	2.068,49	-1,94	2.162,88	4,56	2.264,25	4,68	2.438,36	7,67	2.544,98	4,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,55	2,16	5,86	5,54	6,08	3,81	6,51	7,12	6,90	5,94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,29	2,22	7,70	5,65	7,79	1,18	8,14	4,4	8,32	2,27
F	Konstruksi	1.064,51	-0,19	1.145,23	7,58	1.165,93	1,81	1.262,84	8,31	1.344,40	6,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.455,38	-4,82	2.604,99	6,09	2.711,05	4,07	2.846,55	4,98	2.977,75	4,61
H	Transportasi dan Pergudangan	477,71	-28,78	492,24	3,04	811,10	64,74	874,51	7,83	912,55	4,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	318,75	-6,2	338,01	6,05	387,68	14,69	439,15	13,28	470,52	7,14
J	Informasi dan Komunikasi	716,46	11,45	759,43	6	777,49	2,38	864,90	11,24	931,73	7,73

K	Jasa Keuangan dan Asuransi	429,24	2,18	435,23	1,4	437,22	0,46	447,46	2,34	457,06	2,14
L	Real Estate	270,17	-0,43	275,92	2,13	288,22	4,46	307,92	6,84	325,36	5,66
M,N	Jasa Perusahaan	59,11	-6,93	60,93	3,08	64,55	5,95	69,10	7,05	74,91	8,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	496,67	-1,47	493,08	-0,72	501,29	1,67	523,66	4,46	565,31	7,95
P	Jasa Pendidikan	897,46	-0,6	897,86	0,04	913,09	1,7	973,41	6,61	1.055,93	8,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	223,92	6,59	224,20	0,12	229,61	2,42	243,18	5,91	259,08	6,54
R,S,T,U	Jasa lainnya	371,30	-7,81	373,61	0,62	415,40	11,19	446,46	7,48	474,44	6,27
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	15.045,88	-1,32	15.536,48	3,26	16.359,11	5,29	17.174,39	4,98	18.051,84	5,11

Sumber: Badan Pusat Statistik

Setelah melihat dinamika PDRB menurut lapangan usaha yang menunjukkan transformasi struktur ekonomi dari sektor primer ke arah sektor sekunder dan tersier, penting juga untuk menganalisis PDRB dari sisi pengeluaran. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi perekonomian daerah. Jika PDRB menurut lapangan usaha menjelaskan bagaimana nilai tambah dihasilkan dalam proses produksi, maka PDRB menurut pengeluaran menunjukkan bagaimana nilai tambah tersebut digunakan atau dibelanjakan oleh berbagai pelaku ekonomi. Berikut disajikan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Banjarnegara tahun 2020-2024 menurut jenis pengeluaran sebagai berikut:

Tabel 2. 8

PDRB ADHB menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16.648,15	17.349,83	19.105,12	21.051,60	22.804,41
Pengeluaran Konsumsi LNRT	419,14	436,81	493,23	551,70	654,00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.769,82	1.817,24	1.839,70	1.924,67	2.015,47
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.804,14	5.176,75	5.507,09	5.855,86	6.277,33
Perubahan Inventori	81,03	72,57	94,47	104,72	64,93
Net Ekspor Barang dan Jasa	-2.027,90	-2.025,31	-2.042,92	-2.296,24	-2.584,91

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Banjarnegara tahun 2020-2024, terlihat bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga mendominasi struktur perekonomian daerah dengan kontribusi sekitar 76,74% pada PDRB ADHB tahun 2024. Dominasi ini menunjukkan ketergantungan ekonomi Banjarnegara pada daya beli masyarakat dan mencerminkan karakter ekonomi yang masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan domestik. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang konsisten dari tahun ke tahun mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi mikro di tengah berbagai gejolak ekonomi makro.

Tabel 2. 9

PDRB ADHK menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	11.067,60	11.264,44	11.859,58	12.559,54	13.299,66
Pengeluaran Konsumsi LNRT	265,57	268,54	281,65	303,29	352,03

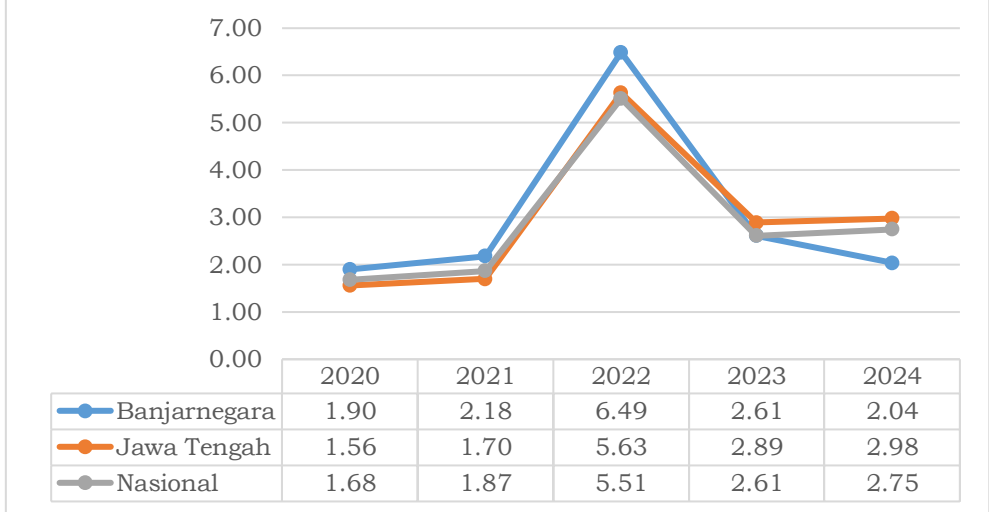
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.078,81	1.085,63	1.088,15	1.105,74	1.135,43
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.117,31	3.328,19	3.407,30	3.544,28	3.734,95
Perubahan Inventori	91,23	60,97	76,53	79,88	47,56
Net Ekspor Barang dan Jasa	-574,64	-471,30	-353,99	-461,09	-517,79

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pembentukan modal tetap bruto sebagai indikator investasi menunjukkan tren positif yang menggembirakan, meningkat dari Rp3.117,31 milyar pada 2020 menjadi Rp3.734,95 milyar pada 2024 dalam nilai riil (ADHK). Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya kapasitas produksi daerah dan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Banjarnegara. Walaupun demikian, proporsinya terhadap total PDRB masih relatif kecil dibandingkan konsumsi rumah tangga, mengindikasikan perlunya dorongan lebih lanjut pada iklim investasi daerah.

2.1.2.1.3. Laju Inflasi

Tingkat inflasi menunjukkan perubahan, baik peningkatan maupun penurunan, dari satu periode ke periode lainnya atau dari tahun ke tahun. Inflasi menjadi salah satu indikator yang memiliki keterkaitan erat dengan harga barang dan jasa yang diperlukan oleh penduduk di suatu wilayah.



Sumber: Badan Pusat Statistik

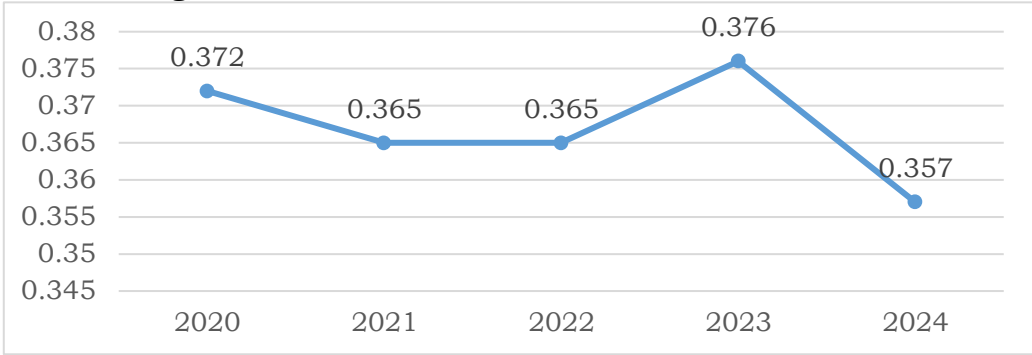
Grafik 2.2

Perkembangan Laju Inflasi Tahun 2020-2024

Inflasi nasional mengalami kenaikan dari 2,61% di tahun 2023 menjadi 2,75% di tahun 2024, sejalan dengan peningkatan inflasi di tingkat Jawa Tengah dari 2,89% di tahun 2023 menjadi 2,98% di tahun 2024. Di sisi lain, inflasi Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 tercatat sebesar 2,04% turun 0,57 poin dari inflasi pada tahun 2023. Faktor penetapan kenaikan harga BBM pada tahun 2022, sudah tidak memicu inflasi pada tahun 2024. Pemicu kenaikan harga pada tahun 2024 terbesar di Kabupaten Banjarnegara terutama disebabkan oleh komoditas pangan, seperti beras, cabai, dan minyak goreng. Faktor utama yang mempengaruhi adalah gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem seperti fenomena El Nino yang menyebabkan penurunan hasil panen. Hal ini diperparah dengan fluktuasi harga bahan bakar yang turut memengaruhi biaya produksi dan distribusi barang.

2.1.2.1.4. Indeks Gini

Indeks gini merupakan indikator yang umum dipakai untuk mengevaluasi ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi. Berikut ini disajikan perkembangan data indeks gini di Kabupaten Banjarnegara tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara

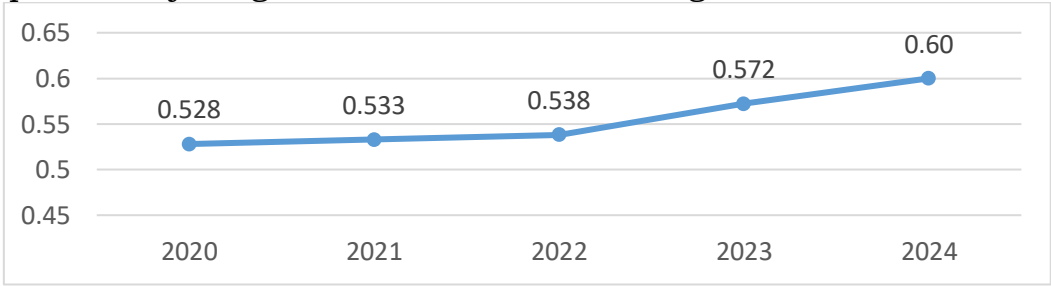
Grafik 2.3

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Banjarnegara 2020 – 2024

Grafik perkembangan Indeks Gini Kabupaten Banjarnegara periode 2020–2024 mencerminkan dinamika ketimpangan ekonomi di wilayah tersebut. Pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan Indeks Gini menjadi 0,357, yang merupakan nilai terendah selama periode pengamatan. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan distribusi pendapatan, kemungkinan sebagai hasil dari kebijakan fiskal yang lebih progresif, perluasan program perlindungan sosial, atau peningkatan akses terhadap lapangan kerja berkualitas dan sumber daya ekonomi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

2.1.2.1.5. Indeks Williamson

Indeks Williamson adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah, dengan nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan maksimal. Berikut ini disajikan perkembangan nilai indeks williamson di Kabupaten Banjarnegara tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.4

Perkembangan Indeks Williamson Kabupaten Banjarnegara 2020-2024

Dari data tersebut, terlihat bahwa Indeks Williamson di Banjarnegara mengalami peningkatan konsisten selama periode lima tahun. Kenaikan ini menunjukkan adanya tren peningkatan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Banjarnegara. Tren kenaikan Indeks Williamson ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara selama periode 2020-2024 belum sepenuhnya inklusif dan merata di semua wilayahnya. Hal ini memerlukan perhatian dari pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah di Kabupaten Banjarnegara.

2.1.2.1.6. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan indikator krusial dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan efektivitas program pembangunan suatu daerah. Data perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang menarik. Penurunan yang konsisten sejak tahun 2022 hingga 2024 mengindikasikan keberhasilan program pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah, seperti bantuan sosial tepat sasaran, pemberdayaan UMKM, dan program padat karya. Meskipun tren penurunan angka kemiskinan menunjukkan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, persentase penduduk miskin yang masih di atas 14% mengisyaratkan perlunya penguatan program pengentasan kemiskinan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Fokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan di masa mendatang.

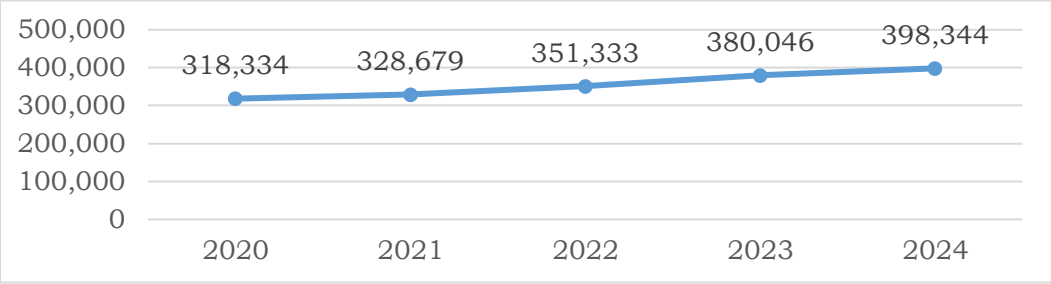
Tabel 2. 10
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Tahun	Penduduk Miskin	
	Ribu Jiwa	(%)
2020	144,95	15,64
2021	150,19	16,23
2022	141,25	15,20
2023	138,99	14,90
2024	137,68	14,71

Sumber: Badan Pusat Statistik

2.1.2.1.6.1 Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan Kabupaten Banjarnegara selama periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan. Peningkatan ini mencerminkan dinamika standar hidup layak dan pola konsumsi masyarakat yang terus berkembang, serta dampak dari inflasi dan perubahan harga kebutuhan pokok di wilayah tersebut.



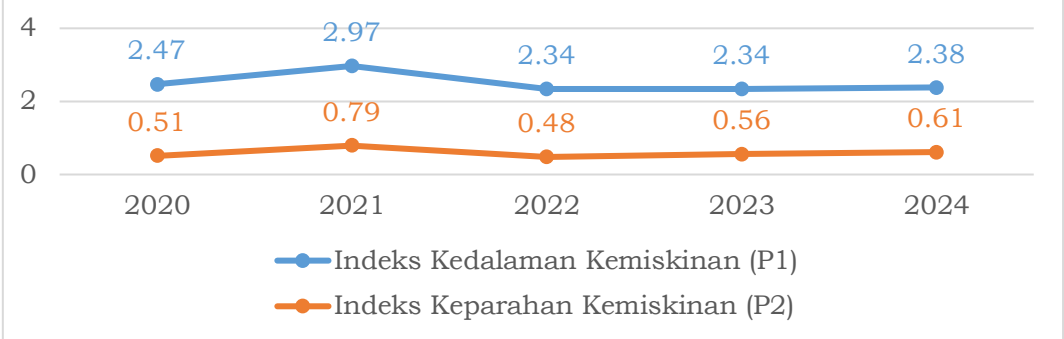
Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.5
Garis Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara (Rp/Kapita/Bulan)
Tahun 2020-2024

Kenaikan garis kemiskinan yang stabil dari tahun ke tahun mengindikasikan adanya perubahan struktural dalam penentuan standar kehidupan minimal masyarakat. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, terus mengalami peningkatan. Fenomena ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.

2.1.2.1.6.2 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara selama periode 2020-2024 dapat dianalisis melalui dua indikator penting, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Kedua indikator ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dimensi kemiskinan dibandingkan sekadar angka kemiskinan absolut, karena menunjukkan seberapa jauh penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan dan bagaimana distribusi pendapatan di antara mereka.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.6

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Pola fluktuasi yang serupa antara kedua indeks menunjukkan keterkaitan struktural dalam dinamika kemiskinan di Banjarnegara. Ketika kedalaman kemiskinan meningkat, keparahan kemiskinan juga turut membesar, mengindikasikan bahwa tekanan ekonomi tidak hanya membuat jarak ke garis kemiskinan semakin lebar tetapi juga memperburuk ketimpangan di antara penduduk miskin itu sendiri.

Fluktuasi pada indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan di Banjarnegara bersifat multidimensional dan membutuhkan pendekatan lebih dari sekadar bantuan jangka pendek. Kesenjangan yang konsisten antara kedua indeks mencerminkan adanya kelompok masyarakat yang secara persisten terjebak dalam kemiskinan kronis dan memerlukan intervensi yang lebih terarah.

Berdasarkan dinamika tersebut, upaya pengentasan kemiskinan di Banjarnegara perlu diarahkan tidak hanya pada pengurangan jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan dan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Kebijakan yang memadukan pendekatan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat akan lebih efektif dalam mengatasi permasalahan kedalaman dan keparahan kemiskinan secara berkelanjutan.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah alat ukur komprehensif yang mengevaluasi kemajuan pembangunan non-fisik suatu wilayah. Dalam perhitungannya, IPM menggunakan empat indikator kunci: Angka Harapan Hidup untuk mengukur dimensi kesehatan, Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah untuk dimensi pendidikan, serta Pengeluaran per Kapita untuk menilai standar hidup masyarakat. Keempat komponen ini menjadi dasar evaluasi yang menyeluruh dalam menilai kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah.

Perkembangan IPM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,21	74,31	74,40	74,50	74,70
Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,46	11,63	11,81	11,82	11,83
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,74	6,75	6,84	6,86	6,87
Pengeluaran per Kapita disesuaikan	9.263	9.407	9.776	10.226	10.595
IPM	67,46	67,87	68,62	69,16	69,62

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan atas fokus kesejahteraan sosial dapat diketahui melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 mencapai 69,62. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasinya lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.

Representasi dari dimensi umur yang panjang adalah Umur Harapan Hidup (UHH). UHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, sehingga UHH dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya serta meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Banjarnegara mengalami tren positif setiap tahunnya walaupun peningkatannya tidak terlalu besar. Pada tahun 2024, UHH Kabupaten Banjarnegara mencapai 74,70 tahun, menggambarkan bahwa jika bayi baru lahir di Banjarnegara memiliki harapan dapat hidup hingga usia 74,70 tahun. Meningkatnya nilai UHH Kabupaten Banjarnegara dari waktu ke waktu mengindikasikan perbaikan pembangunan bidang kesehatan dengan tingkat pertumbuhan yang relatif stabil.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 naik 0,01 tahun dari tahun 2023 sehingga diperkirakan pada tahun 2024 rata-rata anak yang berusia 7 (tujuh) tahun dan sudah masuk jenjang pendidikan formal dapat memiliki harapan untuk menikmati pendidikan selama 11,83 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menyelesaikan Pendidikan hingga kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA.

Komponen lain dari IPM yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) yang mempunyai penjelasan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. RLS digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Pada tahun 2024, RLS Kabupaten Banjarnegara sebesar 6,87 tahun, yang berarti rata-rata penduduk Kabupaten Banjarnegara yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 6,87 tahun.

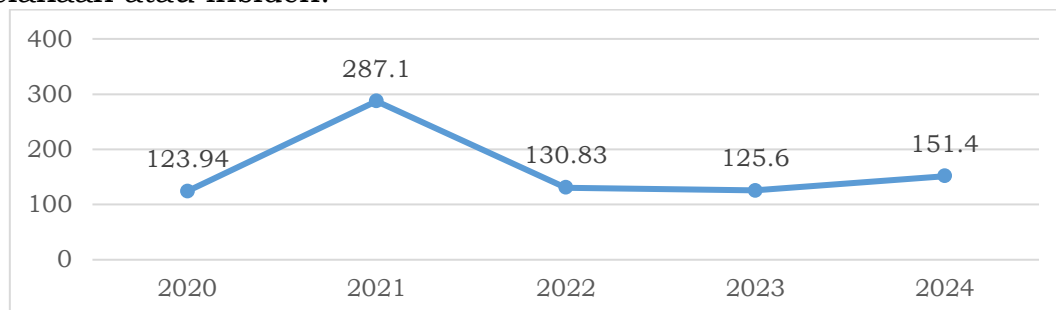
Komponen terakhir IPM adalah meningkatnya standar hidup layak yang di representasikan oleh pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tersebut.

Pengeluaran per kapita Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 telah mencapai Rp10.595.000. Pengeluaran per kapita cenderung mengalami

peningkatan tiap tahunnya seiring dengan semakin pulihnya perekonomian global, memberikan dampak positif terhadap nilai pengeluaran per kapita.

2.1.2.2.2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) mencakup seluruh kematian wanita yang terjadi selama kehamilan, saat melahirkan, dan periode nifas yang diakibatkan oleh kondisi kehamilan, proses persalinan, masa nifas, atau penanganan yang diberikan, bukan dari penyebab eksternal seperti kecelakaan atau insiden.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.7

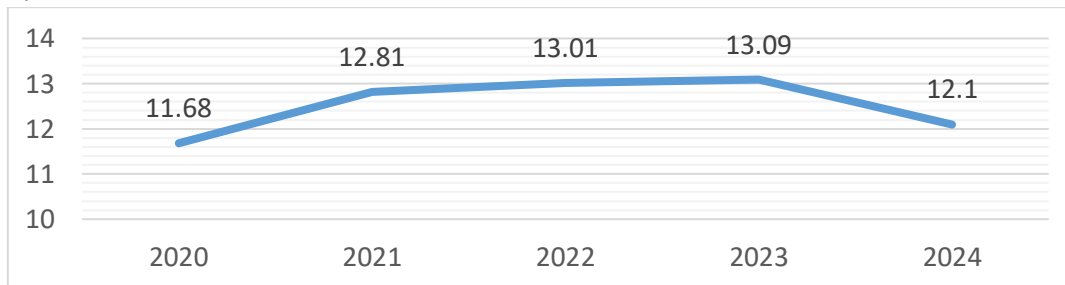
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Angka kematian ibu di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sejumlah 151,4 per 100.000 kelahiran hidup (KH), itu menunjukkan bahwa angka kematian ibu masih tergolong tinggi. Hal ini dapat menjadi indikator adanya tantangan serius dalam sistem kesehatan, khususnya terkait kesehatan ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebanyak 16 (enam belas) kasus (151,4 per 100.000 KH), dimana jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2023 yaitu sebanyak 15 (lima belas) kasus (125,63 per 100.000 KH). Jumlah kematian ibu tahun 2024 adalah sebanyak 16 (enam belas) kasus, dengan rincian 2 (dua) orang fase kehamilan, 1 (satu) orang pada fase persalinan, dan 13 (tiga belas) orang pada saat masa nifas.

2.1.2.2.3. Angka Kematian Bayi

Berdasarkan data yang disajikan, Angka Kematian Bayi (AKB) di tahun 2024 menunjukkan angka 12,1 per 1000 kelahiran hidup, yang mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius. Angka ini memberikan gambaran kompleks tentang berbagai aspek kesehatan dan sosial dalam masyarakat, khususnya berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak.

Berikut ini disajikan grafik Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2020-2024:



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.8

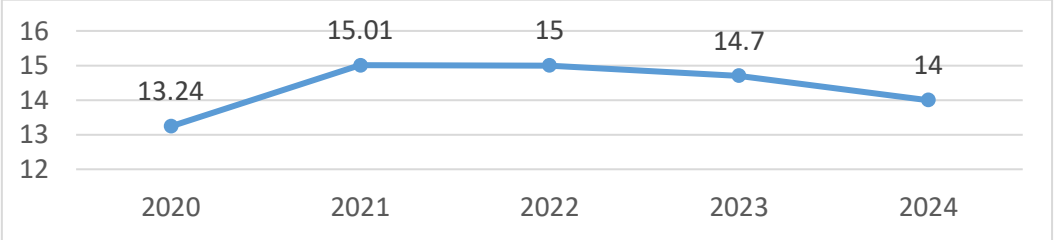
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Untuk menurunkan AKB, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan program KIA dan KB, perbaikan status gizi masyarakat, serta peningkatan kondisi sosial

ekonomi secara menyeluruh. Intervensi yang tepat sasaran dan berkelanjutan, disertai dengan monitoring dan evaluasi yang ketat, akan membantu dalam mencapai target penurunan angka kematian bayi di masa mendatang.

2.1.2.2.4. Angka Kematian Balita (AKABA)

Perkembangan Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Banjarnegara hingga tahun 2024 cenderung mengalami penurunan yang didukung dengan adanya peningkatan standar hidup, kontrol sanitasi dan kesehatan serta adanya intervensi kesehatan yang efektif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik

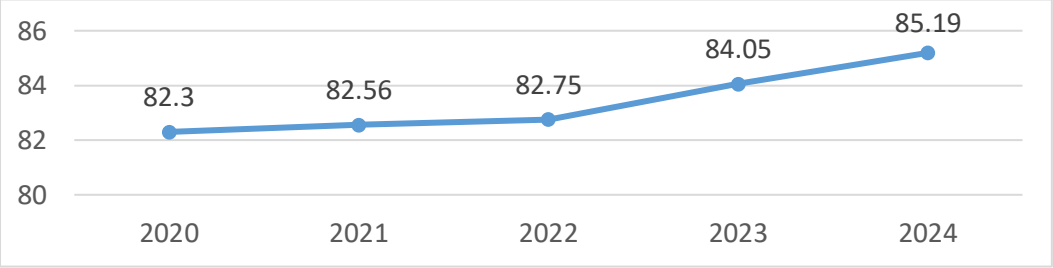
Grafik 2.9

Perkembangan Angka Kematian Balita di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.1.2.2.5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan parameter kunci dalam mengukur kualitas pelayanan publik dan efektivitas tata kelola pemerintahan di suatu daerah. Data IKM Kabupaten Banjarnegara periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dimulai dari nilai 82,3 pada tahun 2020 hingga mencapai 85,19 di tahun 2024, mencerminkan keberhasilan upaya perbaikan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah.

Meski menunjukkan tren positif, pemerintah daerah perlu terus melakukan evaluasi berkala dan pengembangan inovasi pelayanan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengembangan pelayanan, menjadi faktor kunci dalam menjaga momentum peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kabupaten Banjarnegara.



Sumber: Badan Pusat Statistik

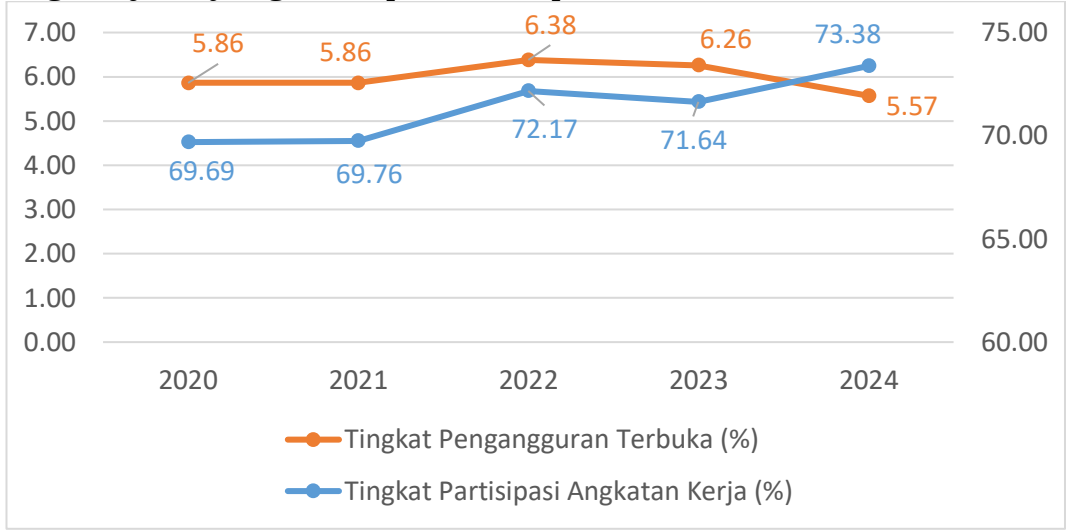
Grafik 2.10

Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.1.2.2.6. Indikator Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan ekonomi suatu daerah, dimana tingkat pengangguran dan partisipasi

angkatan kerja menjadi indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Kedua indikator ini saling berkaitan dan memberikan gambaran tentang dinamika pasar tenaga kerja serta efektivitas kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik

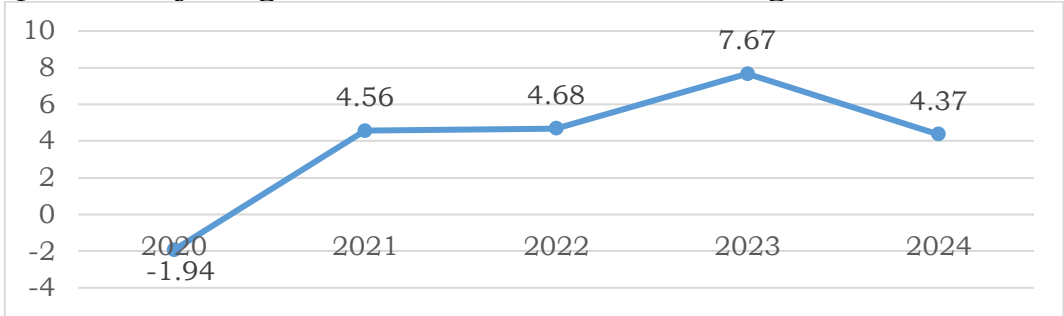
Grafik 2.11

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Memasuki tahun 2023-2024, terjadi perubahan tren yang signifikan dimana TPT mengalami penurunan dari 6,26% menjadi 5,57%, sedangkan TPAC terus meningkat hingga mencapai 73,38%. Semakin tinggi nilai TPAC, semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Pola ini menunjukkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan dimana peningkatan partisipasi angkatan kerja diikuti dengan penurunan pengangguran, yang mengindikasikan terciptanya lebih banyak kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang lebih baik. Hal ini dapat mencerminkan keberhasilan program pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Banjarnegara pada periode tersebut.

2.1.2.2.7. Pertumbuhan Sektor Industri

Sektor industri merupakan salah satu sektor dalam PDRB yang dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam meningkatkan nilai produknya. Berikut ini disajikan perkembangan pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.12

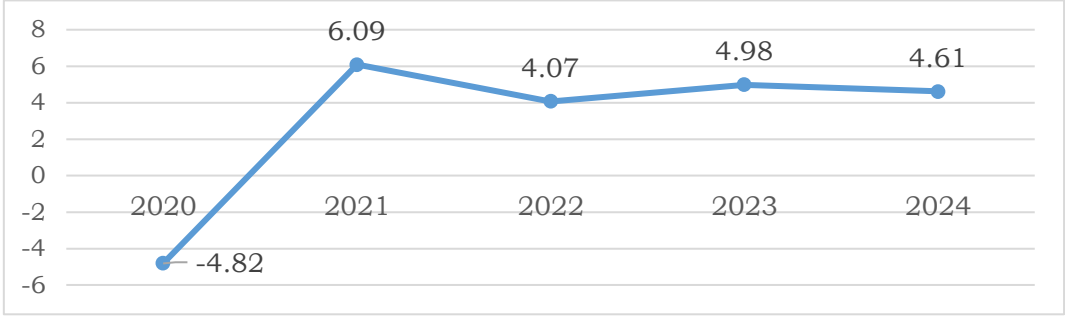
Perkembangan Pertumbuhan Sektor Industri Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024 terjadi penurunan cukup tajam menjadi 4,37%, hampir kembali ke level tahun 2021, yang mungkin disebabkan oleh tantangan eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global, kenaikan harga energi, atau faktor domestik lainnya. Meskipun terjadi fluktuasi, sektor

industri Kabupaten Banjarnegara menunjukkan ketahanan dengan mampu mempertahankan pertumbuhan positif sejak 2021. Pola pertumbuhan ini mencerminkan transformasi struktural ekonomi daerah, namun penurunan terbaru menunjukkan perlunya strategi penguatan daya saing industri dan diversifikasi produk untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan di masa mendatang. Tantangan utama bagi pemerintah daerah adalah memastikan pertumbuhan yang lebih stabil dan inklusif di sektor industri untuk mendukung peningkatan PDRB secara keseluruhan.

2.1.2.2.8. Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan lapangan usaha terbesar dalam sektor tersier yang membentuk struktur perekonomian daerah. Berikut ini disajikan perkembangan pertumbuhan sektor perdagangan selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.13

Perkembangan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Sektor perdagangan di Kabupaten Banjarnegara mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode 2020-2024. penurunan tipis menjadi 4,61% pada tahun 2024 mencerminkan tantangan ekonomi makro seperti tekanan inflasi, penyesuaian suku bunga, atau faktor eksternal lain yang memengaruhi daya beli masyarakat dan aktivitas perdagangan di Kabupaten Banjarnegara. Meskipun mengalami beberapa fluktuasi, stabilitas pertumbuhan positif dalam tiga tahun terakhir (2022-2024) dengan rata-rata sekitar 4,5% menunjukkan ketahanan sektor perdagangan daerah ini dan kemampuan adaptasi pelaku usaha lokal dalam menghadapi dinamika ekonomi pasca-pandemi.

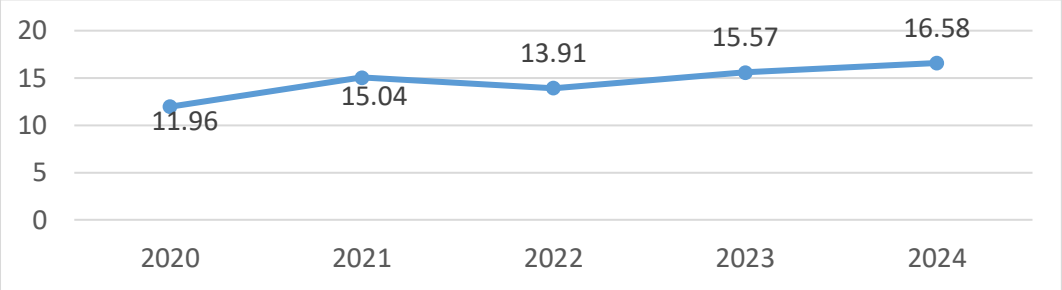
2.1.2.2.9. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah merupakan indikator krusial yang menggambarkan kapasitas suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat melalui pendapatan asli daerahnya. Indikator ini menjadi cerminan tingkat kemandirian fiskal dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam era otonomi daerah. Capaian rasio kemandirian yang terus meningkat hingga mencapai 16,58% pada tahun 2024 menggambarkan keberhasilan berbagai inisiatif penguatan fiskal daerah.

Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor strategis, seperti diversifikasi sumber pendapatan daerah, efisiensi dalam pengelolaan aset daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal. Implementasi teknologi dalam administrasi perpajakan dan retribusi daerah juga berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pendapatan asli daerah.

Meski menunjukkan tren positif, rasio kemandirian yang masih di bawah 20% mengindikasikan bahwa Kabupaten Banjarnegara masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan

dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber PAD, perbaikan tata kelola keuangan daerah, serta penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM perlu terus didorong untuk meningkatkan basis pajak dan retribusi daerah di masa mendatang.



Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara

Grafik 2.14

Perkembangan Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2020-2024

2.1.2.2.10. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pada periode 2020-2024 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah meraih WTP ke 11 secara berturut-turut sejak tahun 2013-2024. WTP merupakan opini audit yang diberikan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah satu material. Auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/ pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak materiat dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Tabel 2. 12

Hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2020-
2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Kab. Banjarnegara

2.1.2.2.12. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi berdasarkan kontribusi zat gizi energi masing-masing kelompok pangan (Permenkes No 75 Tahun, 2013). Selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 Pola Pangan Harapan Kabupaten Banjarnegara menunjukkan trend fluktuatif. Dari hasil analisis PPH diketahui bahwa kelompok pangan yang mencapai skor PPH maksimal adalah kelompok padi-padian, pangan hewani, sayur dan buah dan kacang-kacangan. Sedangkan kelompok pangan yang belum mencapai skor maksimal adalah kelompok minyak dan lemak, gula, umbi-umbian, buah/biji berminyak.

Tabel 2. 13

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

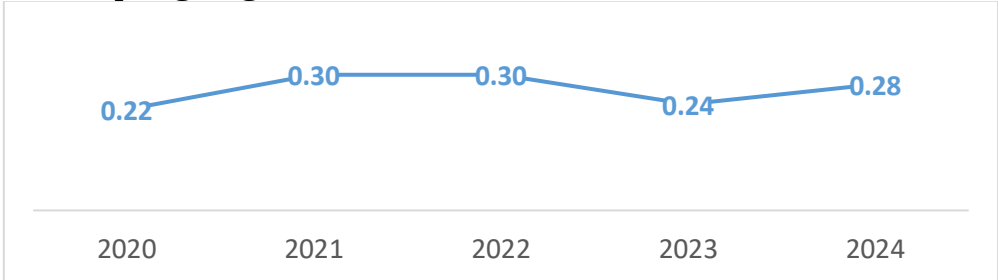
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Padi-padian	25	25	24.1	25	25
Umbi-umbian	1.3	1.5	1.2	1,5	1,09
Pangan hewani	20.4	17.2	21.7	24,0	21,89
Minyak dan lemak	5	5	5	5,0	5
Buah/biji berminyak	0.5	0.2	0.4	0,5	0,43
Kacang-kacangan	7	9.2	7.9	8,2	8,23
Gula	2.4	2	2.3	2,0	2,21
Sayur dan buah	30	28.9	30	30,0	30
lain-lain	-	-	-	-	-
Skor PPH	91.6	89	92.6	96,2	93,86

Sumber: Distankan dan KP KP Kab. Banjarnegara

2.1.2.2.13. Pembangunan Gender

1. Indeks Ketimpngan Gender

Indeks Ketimpangan Gender ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender yang dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Banjarnegara selama rentang tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi, dimana pada tahun 2024 IKG kembali meningkat menjadi 0,28. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesetaraan gender Kabupaten Banjarnegara berfluktuasi dan telah menunjukkan perbaikan kesetaraan gender. Berikut disajikan Indeks Ketimpangan gender selama 5 tahun terakhir:



Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara 2024

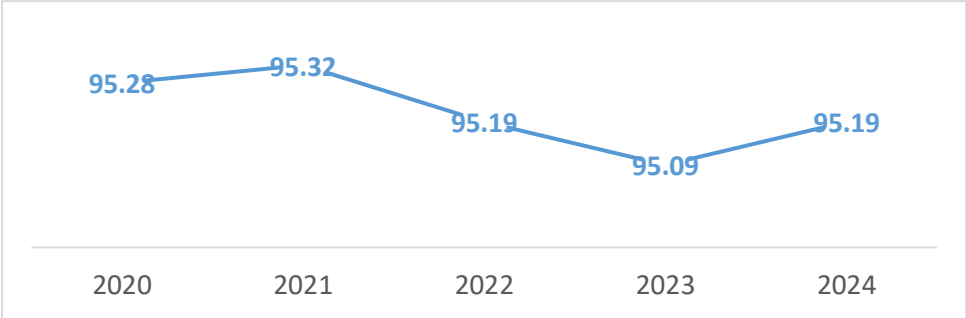
Grafik 2.15 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

Capaian IPG Kabupaten Banjarnegara dalam 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif dan pada tahun 2024 capaian IPG mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang menunjukkan arah yang lebih

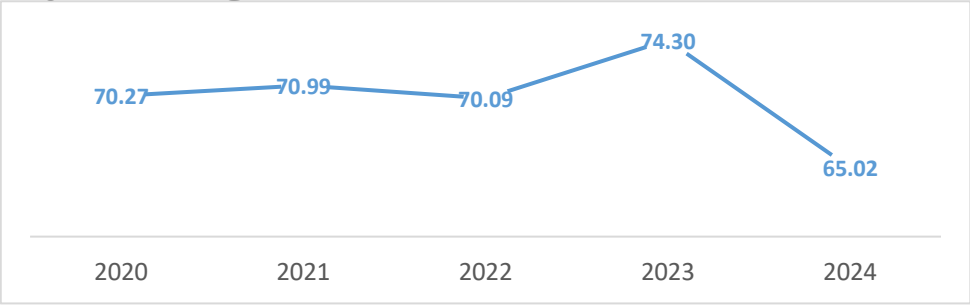
baik. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai aspek pembangunan.



Sumber: SiPerindu BKKBN
Grafik 2.16 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

3. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Nilai IDG mengalami penurunan tajam menjadi 65,02 di tahun 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan menurunnya partisipasi perempuan dalam bidang politik, ekonomi, atau pengambilan keputusan, yang merupakan aspek utama dalam IDG. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya keterlibatan perempuan dalam posisi strategis, rendahnya perlindungan terhadap pekerja perempuan, atau minimnya program pemberdayaan lanjutan di tingkat lokal.



Sumber: SiPerindu BKKBN
Grafik 2.17 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Seni Budaya

Unsur kebudayaan dan kesenian tradisional Kabupaten Banjarnegara tergambar dalam persentase kelompok seni yang melakukan registrasi, dimana pada tahun 2024 terdapat 171 kelompok kesenian yang teregistrasi di Kabupaten Banjarnegara dengan 47,8% fasilitasi *event* seni dan budaya yang dilaksanakan atau terdapat 22 *event* budaya yang terfasilitasi oleh pemerintah daerah.

Cagar budaya merupakan warisan budaya yang dapat berupa benda, bangunan, situs, dan kawasan yang perlu dilestarikan. Cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agaman, dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Perkembangan Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 tercatat mencapai 94 objek cagar budaya dan 1 objek WBTB. Objek cagar budaya tersebut juga diperlukan perawatan dan pemeliharaan agar tetap lestari. Berikut disajikan tabel persentase benda cagar budaya yang dipelihara selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 14
Persentase Benda Cagar Budaya dipelihara

Tahun	%
2020	24
2021	46
2022	47,95
2023	54
2024	62,06

Sumber: Disparbud Kabupaten Banjarnegara

2. Olahraga

Keolahragaan merupakan indikator penting dalam mengukur perkembangan dan potensi pembinaan olahraga di suatu daerah. Kabupaten Banjarnegara memiliki ekosistem olahraga yang tercermin melalui ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Tabel 2.15 menyajikan data terkini mengenai kapasitas organisasi KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024, yang mencakup jumlah atlet, pelatih, wasit, dan klub yang terdaftar secara resmi. Informasi ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan strategis bagi pengembangan olahraga di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 2. 15
Jumlah Atlet, Pelatih, Wasit dan Klub KONI Kabupaten Banjarnegara 2024

No	Uraian	Tahun
1	Jumlah Atlet	231
2	Jumlah Pelatih	57
3	Jumlah Wasit	33
4	Jumlah Klub	4

Sumber: KONI Jawa Tengah

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar

1. Pendidikan

1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Pendidikan berperan sebagai urusan yang harus diprioritaskan dalam mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, serta menjadi salah satu target penting yang menjamin kesetaraan akses terhadap layanan dasar bagi seluruh masyarakat tanpa memandang gender, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Untuk mengukur efektivitas sistem pendidikan dalam menjangkau populasi usia sekolah, digunakan beberapa parameter penting, di antaranya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang berfungsi sebagai indikator utama dalam menilai tingkat penyerapan penduduk usia sekolah ke dalam sistem pendidikan yang tersedia.

Tabel 2. 16
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APK PAUD	74,79	74,84	102,46	159,49	104,68
APK SD/MI/Paket A	107,07	92,24	92,61	99,07	93,68
APK SMP/MTs/Paket B	96,69	90,78	87,03	81,66	85,50
APM SD/MI/Paket A	97,48	86,76	87,92	85,12	87,18
APM SMP/ MTs/Paket B	74,57	79,42	71,08	69,71	72,05

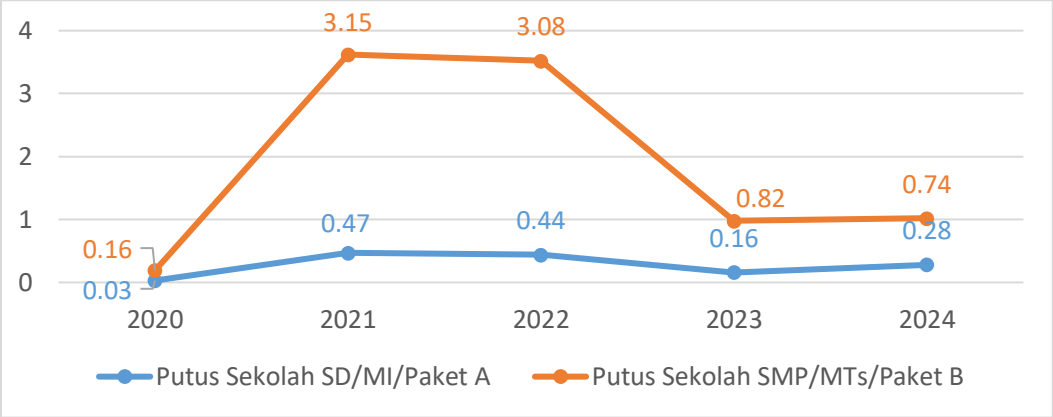
Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

Tren menurun pada jenjang SMP dengan APM yang hanya 72,05% menyoroti adanya hambatan serius dalam transisi dari pendidikan dasar ke menengah. Hampir sepertiga anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang yang sesuai, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor geografis wilayah bergunung, keterbatasan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, tekanan ekonomi, dan fenomena sosial seperti pernikahan dini.

1.2. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah didefinisikan sebagai persentase anak dalam kelompok usia sekolah tertentu yang telah berhenti mengikuti pendidikan formal atau tidak menyelesaikan suatu tingkat pendidikan. Kelompok usia yang menjadi acuan dalam pengukuran ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Indikator ini sangat bergantung pada banyaknya anak yang mengalami putus sekolah. Masalah anak yang tidak melanjutkan pendidikan tetap menjadi fokus utama Pemerintah Daerah, karena adanya harapan bahwa seluruh anak di Kabupaten Banjarnegara dapat memperoleh layanan pendidikan yang memenuhi standar minimal serta mampu menuntaskan program wajib belajar 12 tahun yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan perkembangan angka putus sekolah jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 sebagai berikut:



Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

Grafik 2.15

Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Selama lima tahun terakhir Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SD dan SMP sama-sama mengalami lonjakan yang cukup tinggi di tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya terus menurun kecuali APS SD tahun 2024 yang mengalami kenaikan menjadi 0,28. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya APS pada siswa SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B umumnya adalah faktor motivasi anak, perhatian/persepsi orang tua siswa, memiliki kebutuhan khusus (anak berkebutuhan khusus), budaya, dan faktor ekonomi orang tua siswa.

Terdapat kaitan yang erat antara angka putus sekolah dengan nilai kemampuan literasi dan numerasi. Kemampuan literasi dan numerasi yang rendah sering menjadi penyebab siswa kesulitan mengikuti pelajaran, yang akhirnya dapat mendorong mereka untuk putus sekolah. Siswa dengan dasar literasi dan numerasi yang lemah cenderung mengalami frustrasi akademik, menurunkan motivasi belajar, dan meningkatkan risiko meninggalkan pendidikan formal. Berikut disajikan data kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang SD dan SMP Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 17

Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

indikator	jenjang	Capaian	Target
Rata-rata Kemampuan Literasi SMP	SD	87,34	65,9
Rata-rata Kemampuan Literasi SMP	SMP	90,4	76,4
Rata-rata Kemampuan Numerasi SD	SD	78,1	48,63
Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP	SMP	88,45	72,23

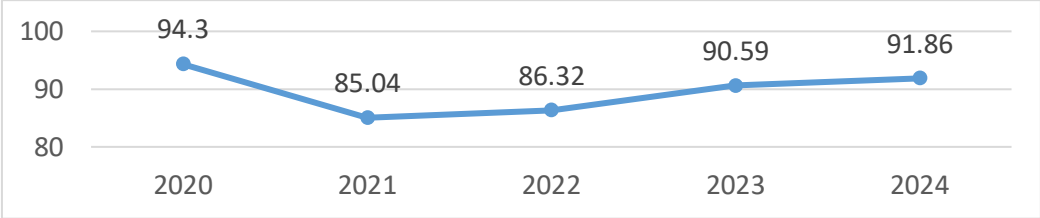
Sumber: Dindikpora Kab.Banjarnegara

Berdasarkan tabel di atas, tergambar bahwa capaian kemampuan literasi dan numerasi siswa pada jenjang SD dan SMP secara konsisten telah melampaui target yang ditetapkan. Hal yang patut diperhatikan adalah besarnya selisih antara capaian dan target, khususnya pada kemampuan numerasi SD yang mencapai 78,1, jauh di atas target 48,63 dengan selisih mencapai 29,47 poin. Ini mengindikasikan adanya keberhasilan signifikan dalam implementasi kebijakan dan program pendidikan di Kabupaten Banjarnegara, khususnya dalam pengembangan kompetensi dasar siswa.

Kemampuan literasi pada kedua jenjang menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan kemampuan numerasi, mencerminkan pola umum di Kabupaten Banajrnegara dimana penguasaan literasi sering lebih baik dibandingkan numerasi. Secara keseluruhan, data tersebut merefleksikan fondasi pendidikan yang cukup kuat di Kabupaten Banjarnegara, yang dapat menjadi modal penting dalam upaya menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

1.3. Angka Melanjutkan Sekolah

Berikut ini disajikan perkembangan angka melanjutkan sekolah SD/MI/Paket A ke SMP selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024:



Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

Grafik 2.16

Perkembangan Angka Melanjutkan SD ke SMP di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Hingga tahun 2024 angka melanjutkan sekolah belum kembali ke level pra-pandemi tahun 2020. Pola ini mengartikan bahwa meskipun angka kelulusan mencapai 100% seperti pada grafik sebelumnya, tidak semua lulusan SD di Kabupaten Banjarnegara melanjutkan ke jenjang SMP. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya tantangan aksesibilitas, keterjangkauan ekonomi, atau persepsi terhadap nilai pendidikan menengah yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Upaya pemulihan yang konsisten ini, meski belum optimal menunjukkan efektivitas intervensi kebijakan pendidikan yang dilakukan pasca-pandemi, namun masih diperlukan strategi komprehensif untuk mengatasi faktor-faktor penghambat yang menyebabkan sekitar 8,14% lulusan SD di tahun 2024 tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

1.4. Sarana Prasarana dan Sumber Daya Pendidikan

Salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Banjarnegara adalah tersedianya sarana prasarana ber kondisi baik serta SDM yang memadai.

Tabel 2. 18
Perkembangan Sarana Prasarana dan Sumber daya Pendidikan
di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	83,86	48,23	94,73	77,58	92,55
Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	76,67	32,25	91,94	77,51	97,05
Rasio ketersediaan SD	69,91	0,80	0,80	81,14	81,89
Rasio ketersediaan SMP	22,66	0,29	0,28	27,66	27,26

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

Rasio ketersediaan SD tahun 2024 sebesar 81,89 artinya dari total kebutuhan sekolah dasar yang seharusnya tersedia di Kabupaten Banjarnegara (berdasarkan jumlah penduduk usia sekolah dasar dan standar layanan minimal pendidikan), sebanyak 81,89% sudah terpenuhi. Dengan kata lain, sekitar 81,89% dari jumlah sekolah dasar yang idealnya dibutuhkan di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara sudah tersedia.

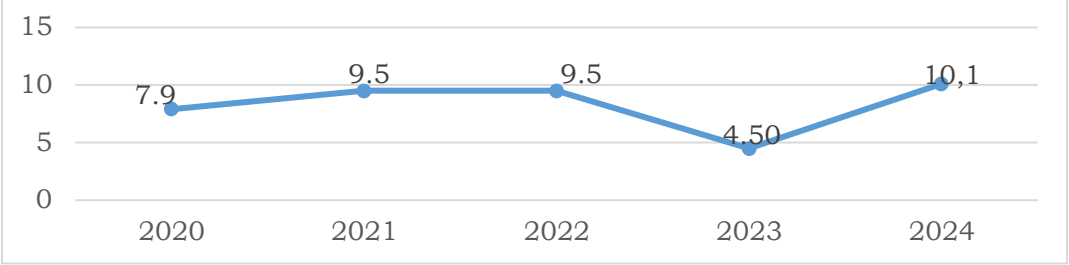
Adapun untuk rasio ketersediaan SMP di tahun 2024 baru sebesar 27,26. Angka ini mengindikasikan kesenjangan yang cukup besar dalam penyediaan infrastruktur pendidikan tingkat menengah pertama, dengan sekitar 72,74% kebutuhan yang belum terpenuhi. Kondisi ini dapat menjadi salah satu faktor utama yang menjelaskan mengapa angka melanjutkan dari SD ke SMP di Kabupaten Banjarnegara belum optimal, seperti yang ditunjukkan pada grafik sebelumnya. Keterbatasan jumlah SMP ini kemungkinan berdampak pada jarak tempuh yang jauh untuk sebagian siswa, biaya transportasi yang tinggi, dan aksesibilitas yang rendah, yang pada akhirnya dapat mengurangi minat atau kemampuan lulusan SD untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.

2. Kesehatan

2.1. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Gizi kurang pada balita diartikan sebagai kondisi dimana asupan nutrisi yang diterima oleh balita tidak mencukupi kebutuhan tubuh untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Prevalensi yang menunjukkan peningkatan ini menunjukkan semakin banyak anak-anak di bawah usia lima tahun yang mengalami defisit gizi. Hal ini dipengaruhi pula oleh meningkatnya kemiskinan dan pengangguran sehingga mengurangi kemampuan keluarga membeli makanan bergizi dan praktik pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang tidak sesuai usia. Upaya

untuk mengurangi tingkat prevalensi balita gizi kurang adalah dengan melakukan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita gizi kurang.

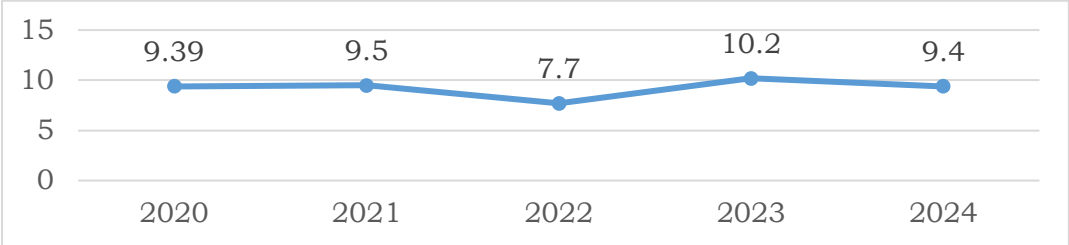


Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

Grafik 2.17
Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2020-2024

2.2. Angka Kematian Neonatal

Angka kematian neonatal (AKN) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada waktu tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Berikut disajikan perkembangan angka kematian neonatal selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 sebagai berikut:



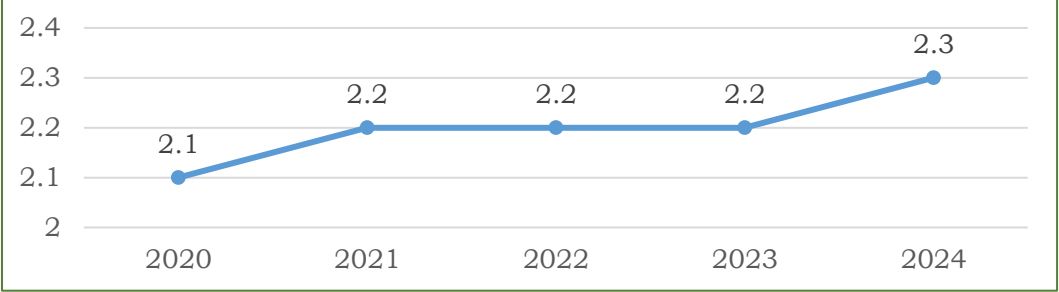
Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

Grafik 2.18
Perkembangan Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024, AKN kembali menurun menjadi 9,4 per 1.000 kelahiran hidup, yang menunjukkan adanya respons positif dari intervensi kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara. Meski demikian, angka ini masih relatif tinggi dan mengindikasikan perlunya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, penguatan sistem rujukan, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan secara teratur dan penanganan komplikasi secara dini. Fluktuasi yang terlihat dalam periode lima tahun ini menggarisbawahi kompleksitas tantangan dalam menurunkan angka kematian neonatal dan pentingnya pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai sektor untuk mencapai perbaikan yang berkelanjutan dalam kesehatan ibu dan bayi di Kabupaten Banjarnegara.

2.3. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yang menunjukkan adanya peningkatan ketersediaan posyandu di Kabupaten Banjarnegara yang dapat melayani balita.



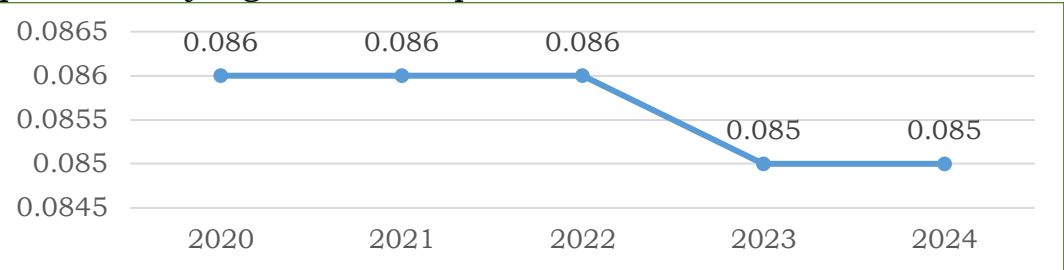
Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

Grafik 2.19

Perkembangan Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.4. Rasio Puskesmas/ Poliklinik per satuan penduduk

Rasio Puskesmas/Poliklinik per satuan penduduk di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 menunjukkan kondisi yang sama dengan tahun sebelumnya. Namun, jika ditinjau selama 5 tahun terakhir, rasio puskesmas/poliklinik per satuan penduduk cenderung mengalami penurunan. Tren penurunan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di Banjarnegara lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan jumlah puskesmas sehingga semakin banyak orang yang harus dilayani oleh jumlah puskesmas yang relative tetap.



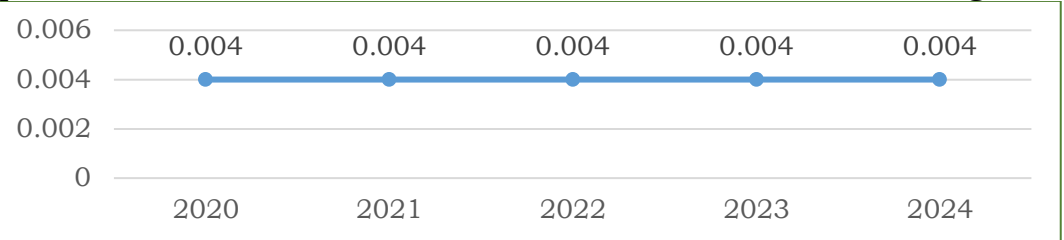
Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

Grafik 2.20

Perkembangan Rasio Puskesmas/Poliklinik Per Satuan Penduduk di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.5. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 stabil di 0.004. Hal ini disebabkan oleh jumlah rumah sakit umum daerah yang tetap pada setiap tahunnya. Berikut ini disajikan perkembangan rasio Rumah Sakit per satuan penduduk selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 sebagai berikut:



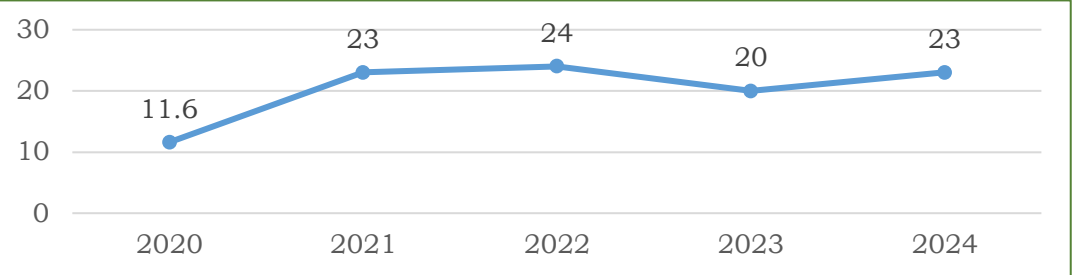
Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

Grafik 2.21

Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.6. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio Dokter per satuan penduduk di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 23 yang disajikan dalam grafik sebagai berikut.



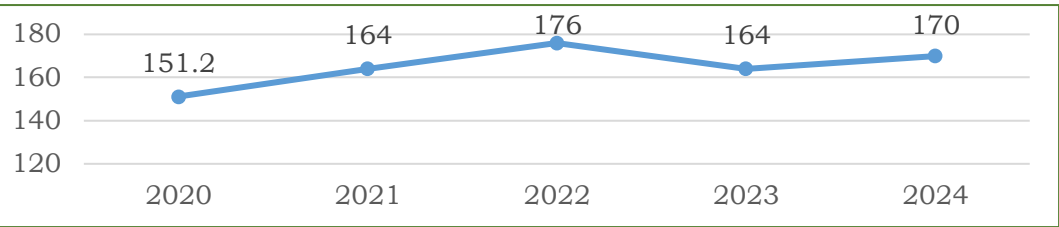
Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

Grafik 2.22

Perkembangan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.7. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 170 per satuan penduduk. Hal ini menunjukkan semakin tercukupinya ketersediaan jumlah tenaga medis yang menangani penduduk Banjarnegara. Berikut disajikan grafik perkembangan rasio tenaga medis per satuan penduduk selama 5 tahun terakhir.



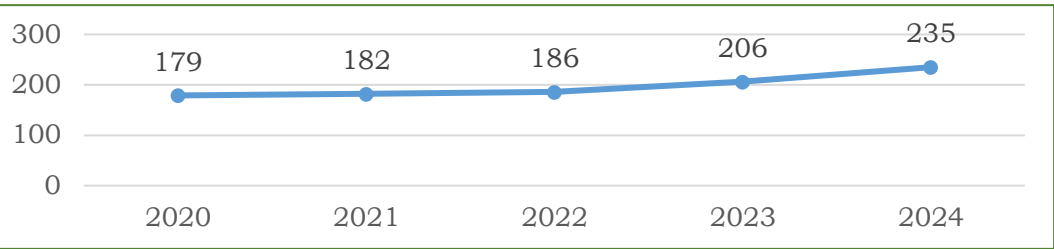
Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

Grafik 2.23

Perkembangan Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.8. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Tertangani

Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Tertangani di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami trend fluktuatif. Dari 179 pada tahun 2020 meningkat menjadi 235 di tahun 2024.



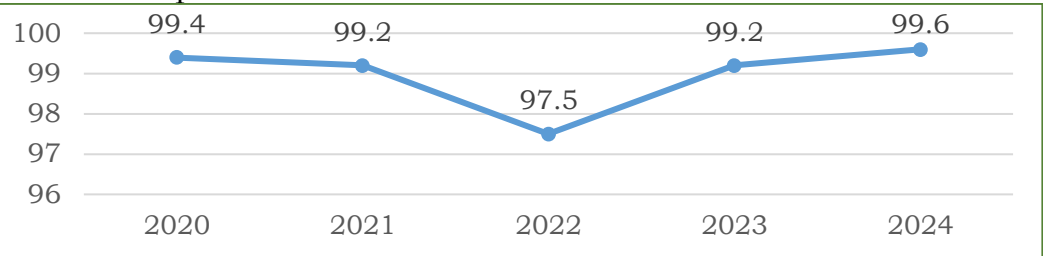
Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

Grafik 2.24

Perkembangan Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Tertangani di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.9. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 99,6. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pertolongan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sehingga risiko angka kematian bayi dan ibu semakin dapat ditekan.



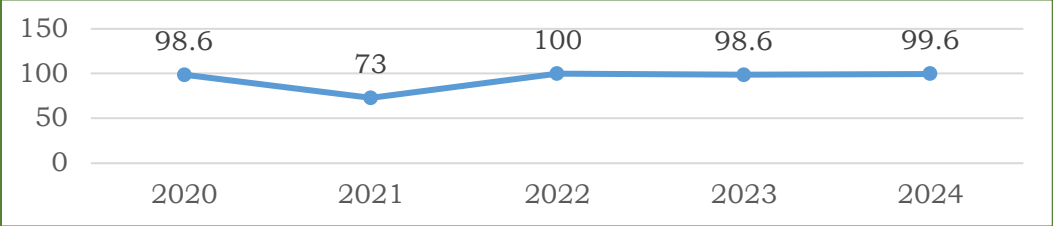
Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

Grafik 2.25

Perkembangan Cakupan Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.10. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 99,6. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak desa/kelurahan yang tercakup Universal Child Immunization (UCI atau dapat dikatakan semakin banyak bayi di bawah umur satu tahun dalam suatu desa yang telah mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap.



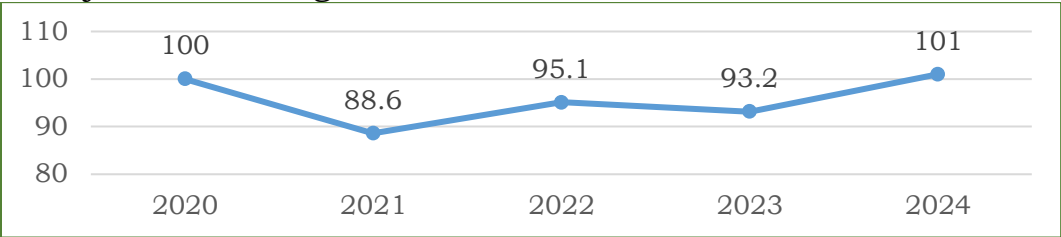
Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

Grafik 2.26

Perkembangan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.11. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang diimunisasi Campak

Persentase Anak Usia 1 Tahun yang diimunisasi Campak di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami trend fluktuatif. Pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan ketercakupan anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak yang ditunjukkan dalam grafik berikut.



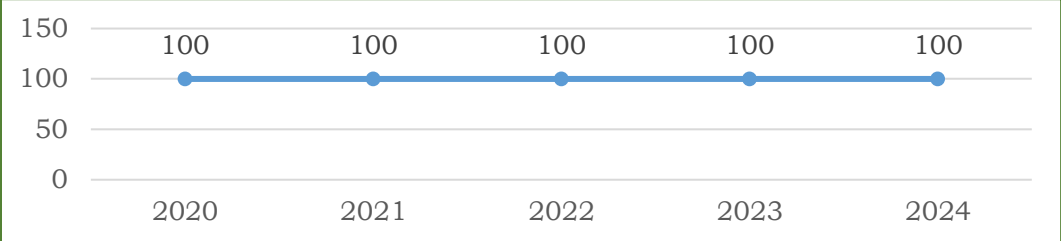
Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

Grafik 2.27

Perkembangan Persentase Anak Usia 1 Tahun yang diimunisasi Campak di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.12. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung stabil pada angka capaian 100%. Hal ini menunjukkan seluruh balita gizi buruk telah mendapatkan perawatan.



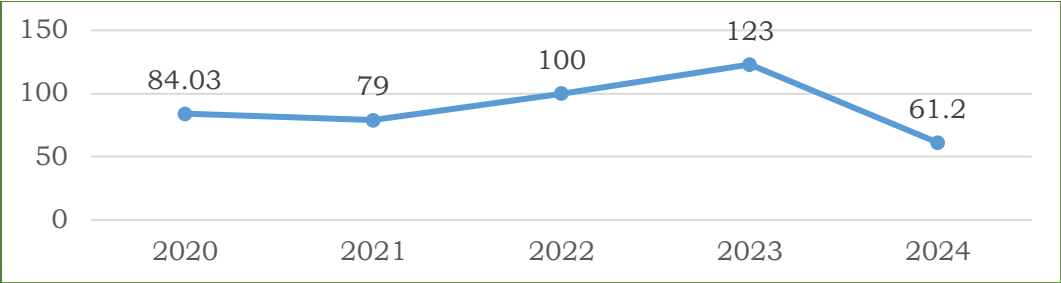
Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

Grafik 2.28

Perkembangan Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.13. Tingkat Prelevensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)

Tingkat Prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 menunjukkan penurunan yang signifikan menjadi 61,2. Hal ini menunjukkan jumlah penderita tuberkolosis yang semakin sedikit di Kabupaten Banjarnegara.



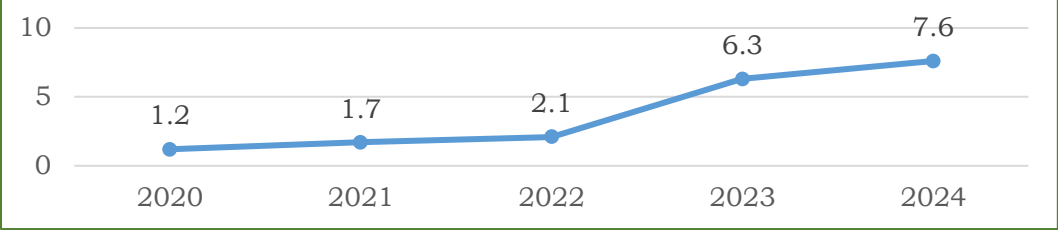
Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

Grafik 2.29

Perkembangan Tingkat Prevalensi Tuberkolosis di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.14. Non Polio AFP Rate (per 100.000 penduduk)

NonPolio AFP Rate per 100.000 penduduk di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mnunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus kelumpuhan akut yang bukan disebabkan oleh virus polio di wilayah Kabupaten Banjarnegara.



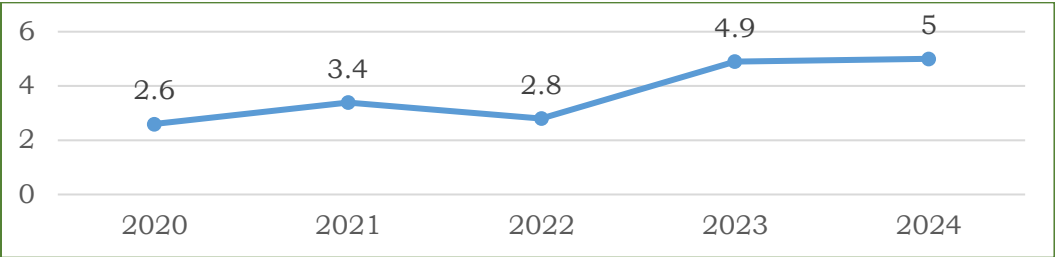
Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

Grafik 2.30

Perkembangan Non Polio AFP Rate di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.15. Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)

Tingkat kematian karena Tuberkolosis per 100.000 penduduk di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 5 per 100.000 penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi angka kematian akibat tuberkolosis di Kabupaten Banjarnegara.



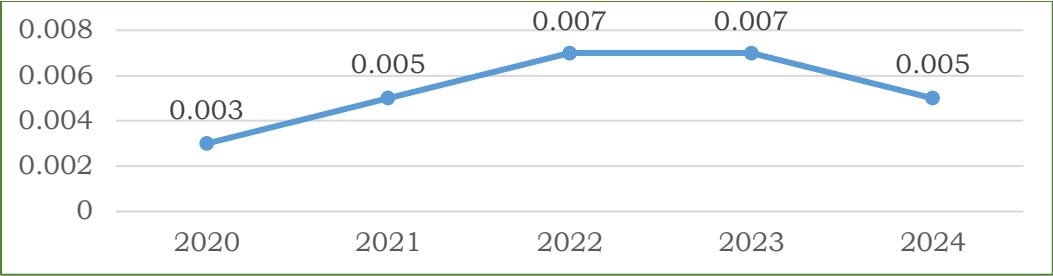
Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

Grafik 2.31

Perkembangan Tingkat Kematian Karena Tuberculosis di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.16. Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi

Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif dari tahun 2020 dan naik menjadi 0.005 pada tahun 2024.



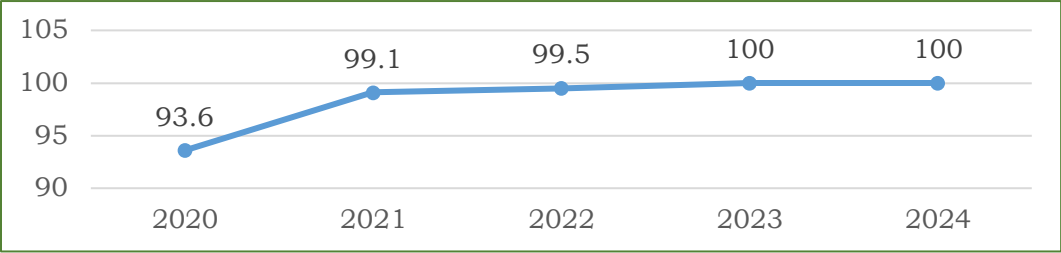
Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

Grafik 2.32

Perkembangan Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.17. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Banjarnegara hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan semakin banyak proporsi bayi yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar dalam tahun tersebut.



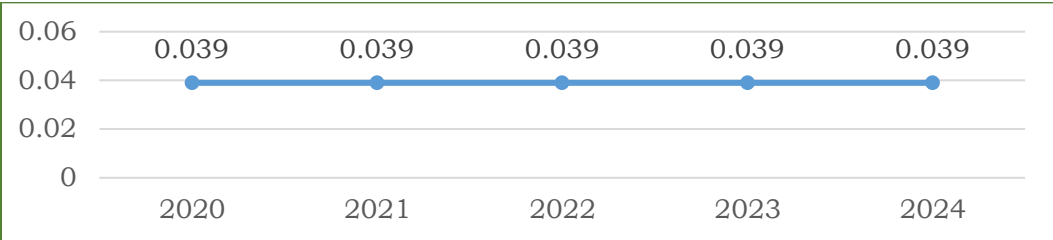
Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

Grafik 2.33

Perkembangan Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.18. Cakupan Puskesmas Pembantu

Cakupan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 menunjukkan pencapaian yang stabil pada angka 0,039 yang disajikan dalam grafik berikut:



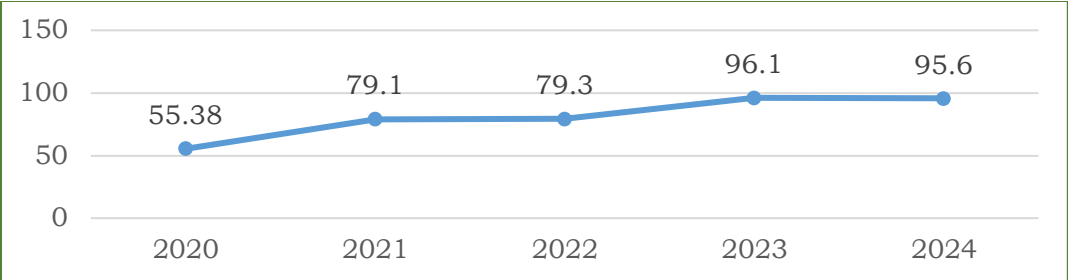
Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

Grafik 2.34

Perkembangan Cakupan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.19. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan semakin banyak anak balita yang mendapatkan pelayanan di Kabupaten Banjarnegara yang ditampilkan pada grafik sebagai berikut:



Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

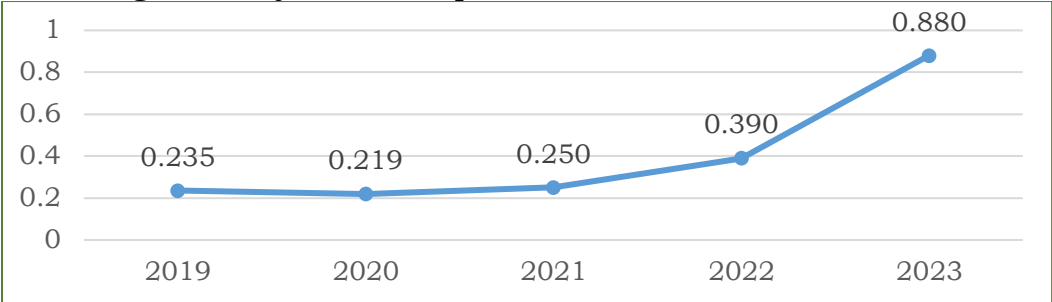
Grafik 2.35

Perkembangan Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

3. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

3.1. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio Rumah layak Huni di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019-2023 cenderung meningkat dari tahun 2019 sebesar 0.235% meningkat menjadi 0.88% pada tahun 2023.



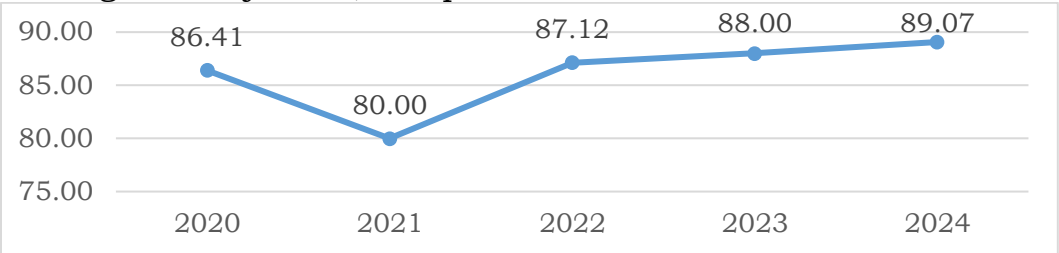
Sumber: DPKLH Kab. Banjarnegara

Grafik 2.36

Perkembangan Rasio Rumah layak Huni di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

3.2. Rasio Permukiman Layak Huni

Kriteria permukiman layak huni tergantung dari adanya ketersediaan berbagai macam kelengkapan dan pelayanan tertentu. Permukiman layak huni setidaknya harus memiliki kelengkapan minimal berupa fasilitas sarana dan prasarana sehingga menumbuhkan keadaan yang baik secara fisik, mental, maupun sosial budaya. Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat menjadi 89,07% pada tahun 2024.



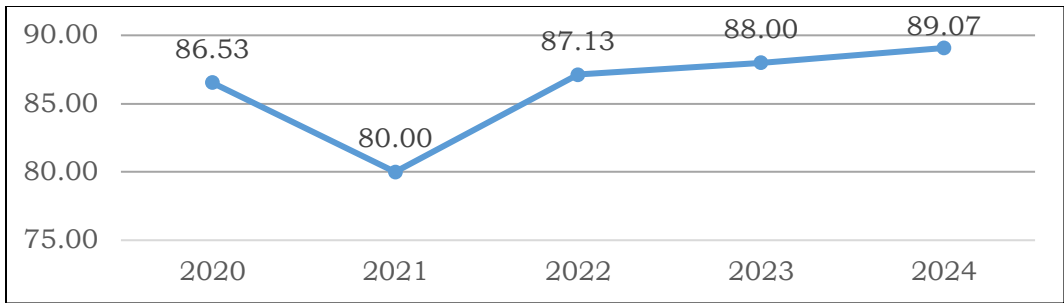
Sumber: DPKLH Kab. Banjarnegara

Grafik 2.37

Rasio Permukiman layak Huni di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

3.3. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat menjadi 89,07%. Kondisi ini menunjukkan semakin terpenuhinya ketersediaan rumah layak huni di kabupaten Banjarnegara.



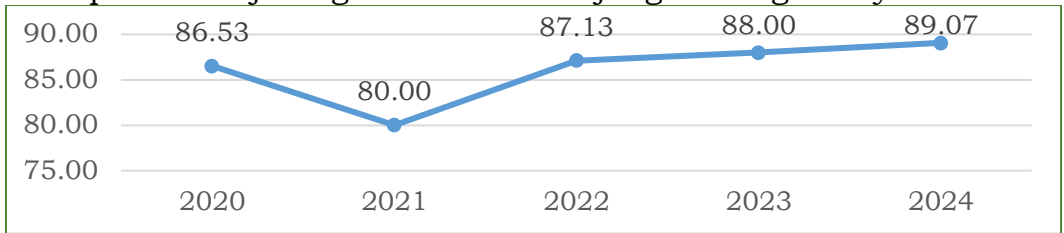
Sumber: DPKLH Kab. Banjarnegara

Grafik 2.38

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

3.4. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau

Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat menjadi 89,07%. Kondisi ini menunjukkan rumah layak huni di Kabupaten Banjarnegara semakin terjangkau bagi masyarakat.



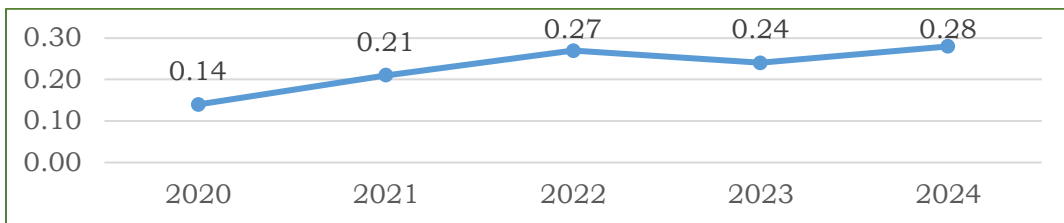
Sumber: DPKLH Kab. Banjarnegara

Grafik 2.39

Perkembangan Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

3.5. Persentase permukiman Yang Tertata

Persentase permukiman yang tertata di Kabupaten Banjarnegara terus mengalami peningkatan menjadi 0,28 pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permukiman di Kabupaten Banjarnegara memiliki tata ruang yang terencana dan teratur.



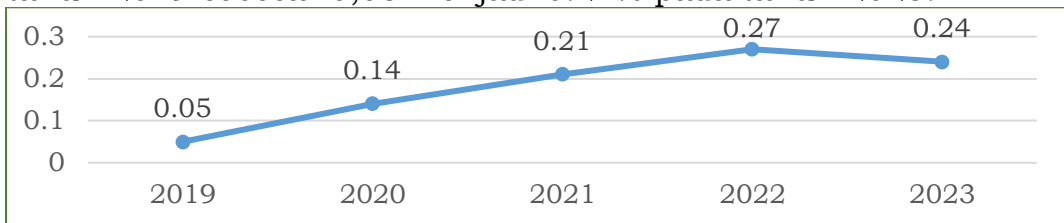
Sumber: DPKLH Kab. Banjarnegara

Grafik 2.40

Perkembangan Persentase permukiman Yang Tertata di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

3.6. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019-2023 cenderung meningkat dari tahun 2019 sebesar 0,05 menjadi 0.24% pada tahun 2023.



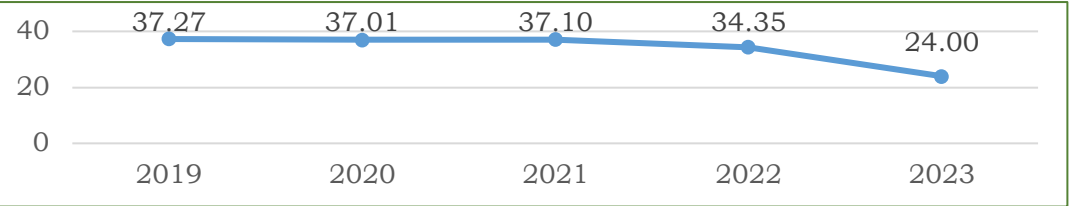
Sumber: DPKLH Kab. Banjarnegara

Grafik 2.41

Perkembangan Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

3.7. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019-2023 cenderung menurun dari sebesar 37.27% pada tahun 2019 menjadi 24% pada tahun 2023.



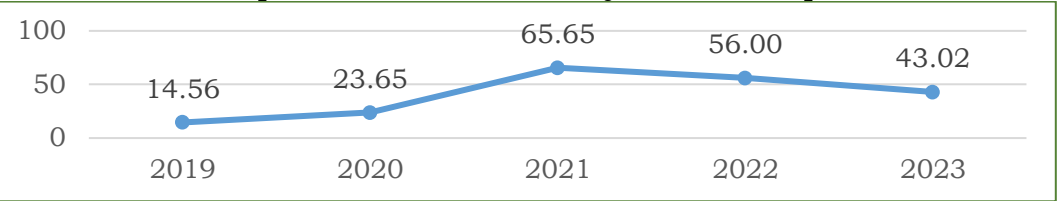
Sumber: DPKLH Kab. Banjarnegara

Grafik 2.42

Perkembangan Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

3.8. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif dari sebesar 14.56% pada tahun 2019 menjadi 43.02% pada tahun 2023.



Sumber: DPKLH Kab. Banjarnegara

Grafik 2.43

Perkembangan Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

4. Trantibum

4.1. Jumlah Kejadian Bencana Alam

Jumlah kejadian bencana alam di Kabupaten Banjarnegara di tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Kejadian bencana alam yang paling banyak terjadi yaitu tanah longsor.

Tabel 2. 19

Jumlah Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Jenis Bencana Alam	Jumlah Kejadian Bencana Alam				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Longsor	5	12	9	10	2
Banjir	2	-	-	1	-
Cuaca Ekstrem	1	1	1	2	1
Gempa Bumi	-	-	-	1	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

4.2. Jumlah Korban yang diakibatkan Bencana Alam

Jumlah korban yang diakibatkan bencana alam menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah korban dalam lima tahun terakhir, terutama untuk bencana banjir yang sempat menjadi penyebab korban terbanyak kedua pada 2020.

Tabel 2. 20

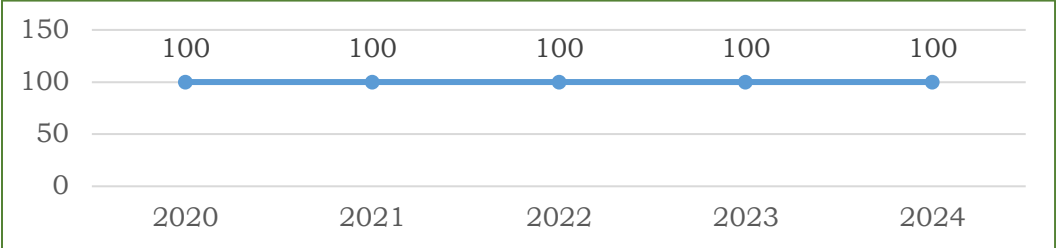
Jenis Bencana Alam dan Jumlah Korban Bencana Alam
di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Jenis Bencana Alam	Jumlah Korban yang diakibatkan Bencana Alam (orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Longsor	426	106	2.275	159	317
Banjir	917	-	-	5	-
Cuaca Ekstrem	58	-	103	35	113
Gempa Bumi	-	-	-	10	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

4.3. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan) di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan pencapaian konsisten 100% selama 5 (lima) tahun berturut-turut yang menunjukkan adaptabilitas aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi penertiban. Kemungkinan besar pencapaian ini didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran serta koordinasi yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja, kecamatan, dan kelurahan/desa. Fenomena ini juga mengisyaratkan kepatuhan masyarakat yang cukup tinggi ketika diberi sanksi atau teguran, sehingga proses penyelesaian pelanggaran dapat tuntas.



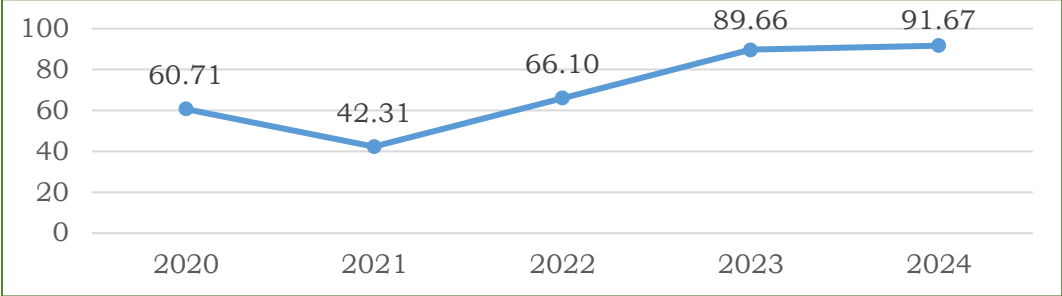
Sumber: Satpol PP Kab. Banjarnegara

Grafik 2.44

Perkembangan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2020-2024

4.4. Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota

Cakupan pelayanan bencana kebakaran ialah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran yang membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) oleh daerah Kabupaten/Kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.



Sumber: Satpol PP Kab. Banjarnegara

Grafik 2.45

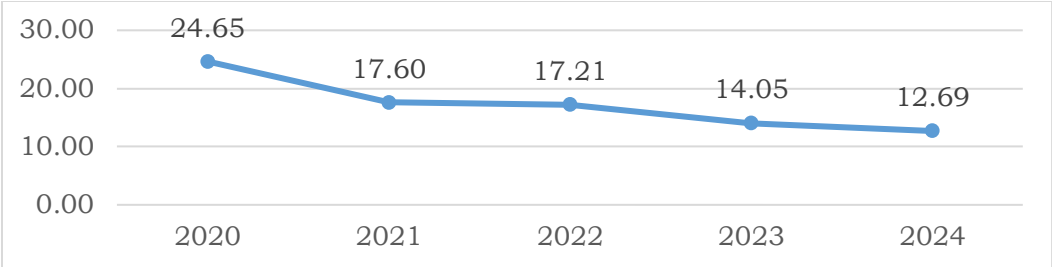
Perkembangan Cakupan pelayanan bencana kebakaran
di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Terlihat bahwa cakupan pelayanan bencana kebakaran ditiap tahunnya cenderung terus meningkat yang mana di tahun 2024 bernilai 91,67% atau dari 84 kejadian kebakaran di Kabupaten Banjarnegara, sebanyak 77 berhasil ditangani oleh Damkar. Pencapaian ini mencerminkan peningkatan kapabilitas

operasional dan responsivitas Damkar Banjarnegara dalam menjalankan fungsi penanggulangan kebakaran. Meski demikian, masih terdapat sekitar 8,33% (7 kasus) kejadian kebakaran yang belum dapat ditangani dengan optimal. Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab antara lain kendala geografis Banjarnegara yang berbukit dan memiliki wilayah terpencil dengan aksesibilitas terbatas, keterbatasan sumber daya air di lokasi tertentu, atau kemungkinan pelaporan yang terlambat sehingga api telah menyebar luas saat petugas tiba.

4.5. Tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri yang tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.



Sumber: Satpol PP Kab. Banjarnegara

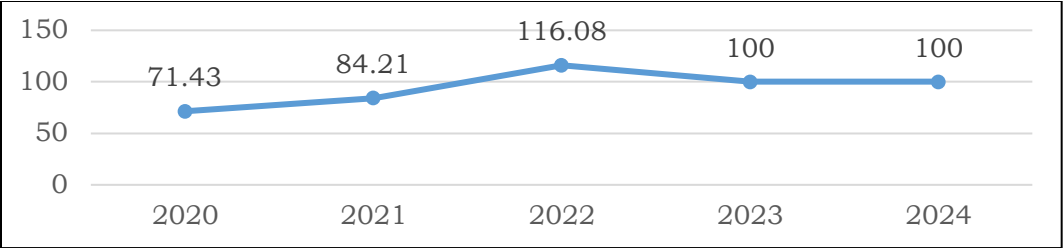
Grafik 2.46

Perkembangan Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Pencapaian waktu tanggap 12,69 menit pada tahun 2024 merupakan prestasi signifikan, mengingat standar waktu tanggap yang baik untuk pemukiman dan gedung adalah tidak lebih dari 15 menit. Ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, Damkar Banjarnegara telah berhasil memenuhi bahkan melampaui standar pelayanan minimal nasional. Peningkatan kinerja ini didukung oleh beberapa faktor strategis, seperti redistribusi pos pemadam kebakaran yang lebih optimal, peningkatan jumlah dan kualitas armada, implementasi teknologi komunikasi yang lebih canggih, serta pelatihan petugas untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan efisiensi mobilisasi.

4.6 Persentase penegakan perda

Penegakkan atas Perda/ Perkada yang diampu di tahun 2024 mencapai 100% yang mana keseluruhan yang ditegaskan meliputi 12 Perda dan 6 Perkada sesuai dari target 100% yang ditetapkan. Akan tetapi masih ditemui beberapa kendala berupa masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai peraturan-peraturan daerah yang memuat sanksi, keterbatasan jumlah PPNS dan belum optimalnya pelaksanaan tugas PPNS penegak undang-undang di OPD, kurangnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan tugas PPNS memiliki resiko hukum dan resiko ancaman keselamatan jiwa yang tinggi namun dukungan sarana dan prasarana operasional belum memadai.



Sumber: Satpol PP Kab. Banjarnegara

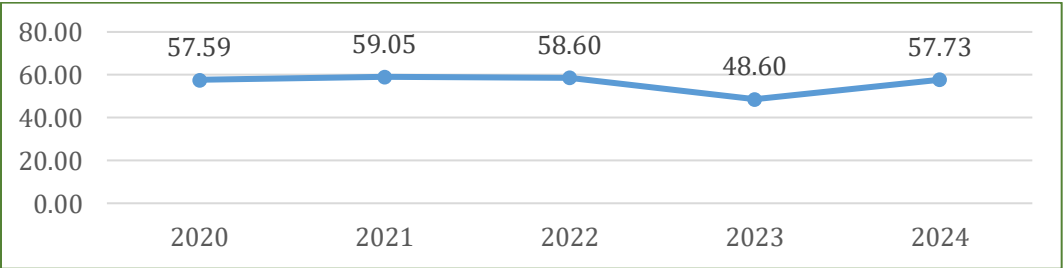
Grafik 2.47

Perkembangan Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

5. Sosial

5.1. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan tren yang relatif stabil selama periode 2020-2024. Yang menarik adalah peningkatan signifikan pada tahun 2024 menjadi 57,73%, naik hampir 10 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh perbaikan sistem pelayanan sosial, penambahan anggaran untuk program kesejahteraan, atau implementasi kebijakan baru yang lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menangani PMKS/ PPKS. Selain itu, pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait juga dapat berkontribusi pada peningkatan persentase penanganan PMKS/ PPKS di tahun 2024.



Sumber: Dinsos PPPA Kab. Banjarnegara

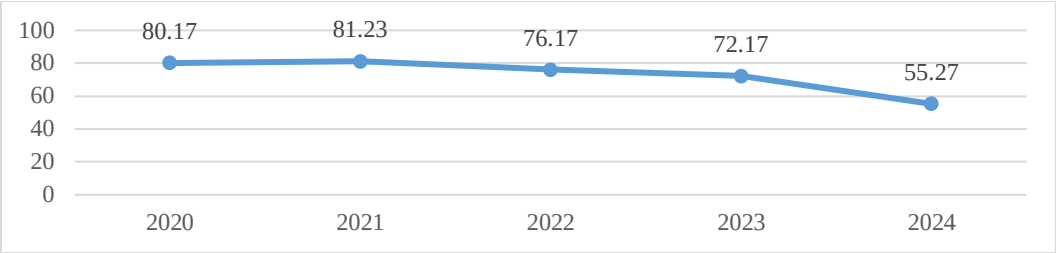
Grafik 2.48

Perkembangan Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Banjarnegara 2020-2024

6. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

6.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung menurun dari sebesar 80,17% pada tahun 2020 menjadi 55,27% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya perbaikan jaringan jalan agar kembali dalam kondisi baik. Berikut disajikan grafik kondisi jalan dalam kurun wktu 5 tahun terakhir:



Sumber: DPUPR Kab. Banjarnegara

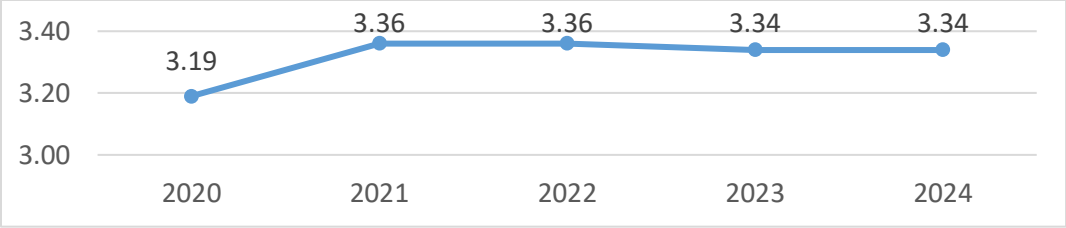
Grafik 2.50

Perkembangan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Data di atas merupakan proporsi panjang jaringan jalan kabupaten yang memiliki kondisi fisik dan permukaan jalan baik sehingga dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam. Kecepatan tersebut digunakan sebagai batas bawah kecepatan normal yang mencerminkan kelancaran lalu lintas dan kualitas jalan. Jika kendaraan bisa melaju dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam, maka bisa diasumsikan jalan tersebut tidak mengalami kerusakan berat.

6.2. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m).

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 baru tercapai sebesar 3,34%.



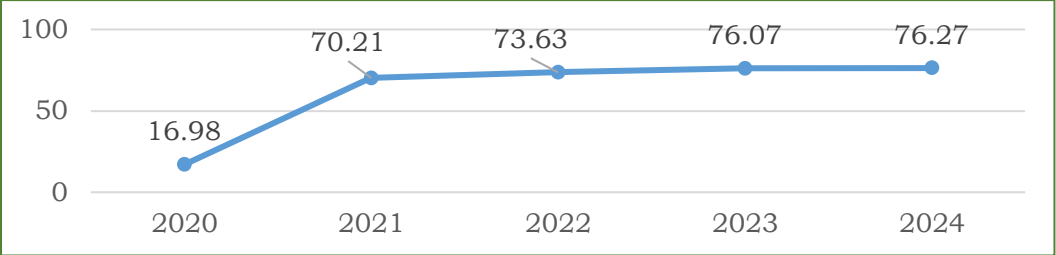
Sumber: DPUPR Kab. Banjarnegara

Grafik 2.52

Perkembangan Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Tahun 2020 – 2024

6.3. Rasio Jaringan Irigasi.

Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Rasio jaringan irigasi melonjak drastis menjadi 70,21% di tahun 2021, kemudian terus mengalami kenaikan bertahap hingga mencapai 76,27% pada tahun 2024. Peningkatan tajam pada tahun 2021 kemungkinan disebabkan oleh implementasi program pembangunan infrastruktur irigasi yang masif, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Kenaikan yang relatif stabil di tahun-tahun berikutnya menunjukkan adanya komitmen berkelanjutan dalam pengembangan jaringan irigasi, meskipun dengan laju yang lebih moderat karena fokus beralih pada optimalisasi dan pemeliharaan jaringan yang sudah ada.

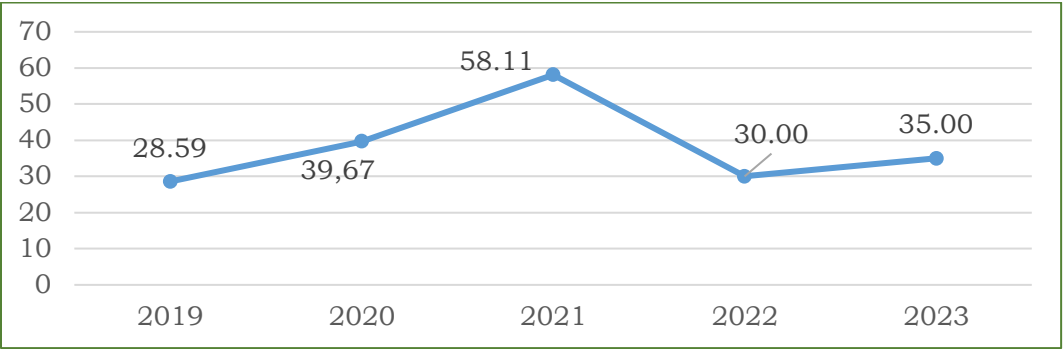


Sumber: DPUPR Kab. Banjarnegara

Grafik 2.53
Perkembangan Rasio Jaringan Irigasi Di Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2020-2024

6.4. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif dari sebesar 28,59% pada tahun 2019 meningkat menjadi 35% pada tahun 2023.



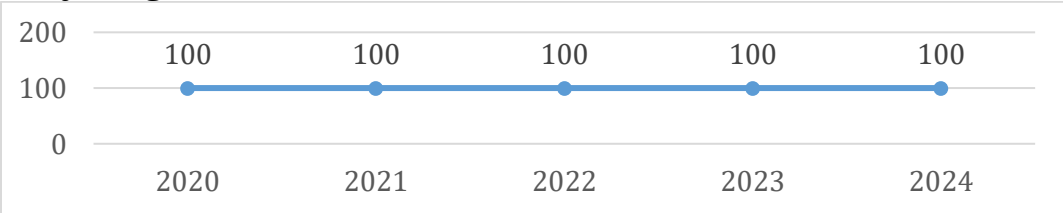
Sumber: DPUPR Kab. Banjarnegara

Grafik 2.54
Perkembangan Rasio bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

- 1. Ketenagakerjaan
 - 1.1. Persentase Penyelesaian Perselisihan Pekerja dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah

Persentase penyelesaian perselisihan pekerja dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 2020-2024 cenderung stabil dan dapat diselesaikan 100%. Hal ini berarti perselisihan pekerja dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah diselesaikan secara keseluruhan.

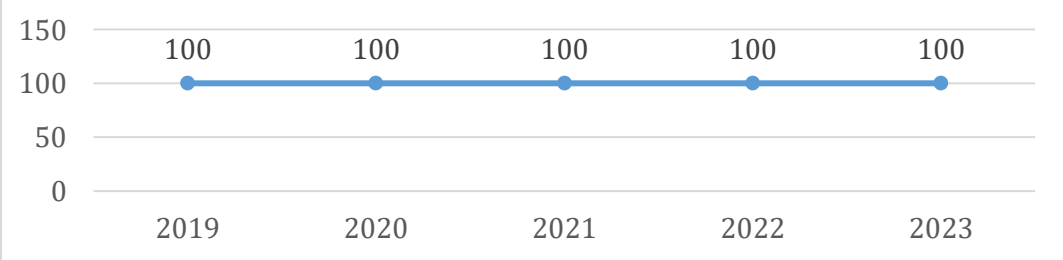


Sumber: Disnaker PMPTSP Kab. Banjarnegara

Grafik 2.55
Perkembangan Persentase penyelesaian perselisihan pekerja dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

1.2. Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3

Persentase perusahaan yang menerapkan K3 di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019-2023 cenderung stabil sudah menerapkan K3 100%. Hal ini berarti seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Banjarnegara telah menerapkan K3 dalam proses produksinya.



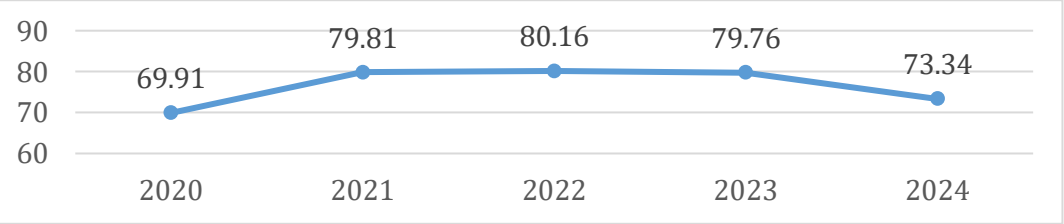
Sumber: Disnaker PMPTSP Kab. Banjarnegara

Grafik 2.56

Perkembangan Persentase perusahaan yang menerapkan K3 di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

1.3. Persentase Pekerja yang Mendapatkan Jaminan Ketenagakerjaan

Terjadi Penurunan persentase pekerja yang mendapatkan jaminan ketenagakerjaan pada tahun 2023 dan 2024 yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti berkurangnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan, meningkatnya jumlah pekerja informal yang tidak terdaftar dalam sistem jaminan, atau adanya penyesuaian kebijakan yang berdampak pada cakupan perlindungan. Selain itu, kondisi ekonomi pascapandemi juga bisa memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menyediakan jaminan bagi pekerjaanya secara konsisten.



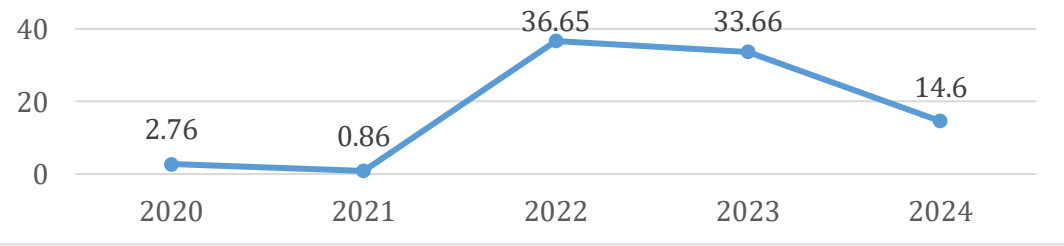
Sumber: Disnaker PMPTSP Kab. Banjarnegara

Grafik 2.57

Perkembangan Persentase pekerja yang mendapatkan jaminan ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

1.4. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan

Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan mengalami penurunan setelah tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh perubahan prioritas program ketenagakerjaan dan terbatasnya akses terhadap pelatihan di tingkat lokal. Kenaikan tajam pada 2022 menunjukkan adanya intervensi besar atau program khusus, namun penurunan berikutnya mengindikasikan bahwa upaya tersebut belum bersifat berkelanjutan atau merata bagi seluruh tenaga kerja.



Sumber: Disnaker PMPTSP Kab. Banjarnegara

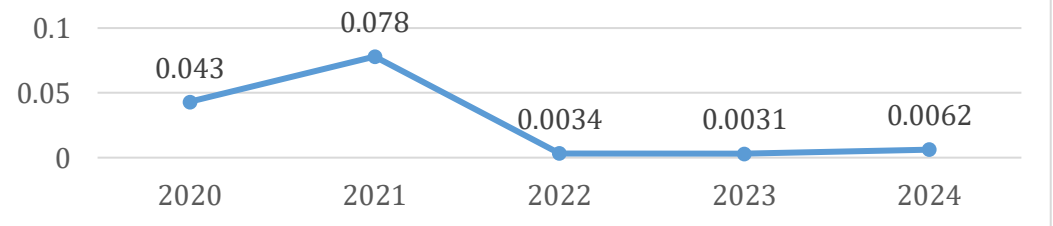
Grafik 2.58

Perkembangan Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1 Ratio KDRT (Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Ratio KDRT (Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019-2023 menurun dari sebesar 0,043% pada tahun 2020 menjadi 0,0062% pada tahun 2024.



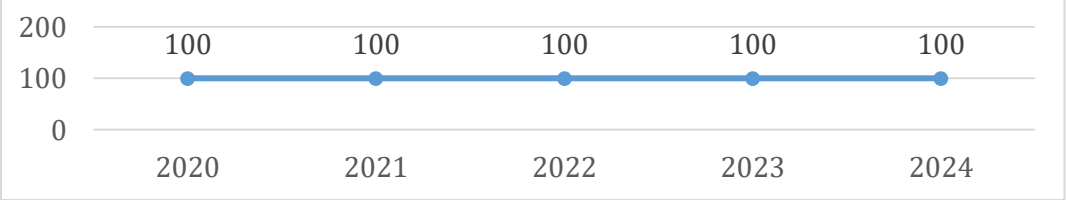
Sumber: Dinsos PPPA Kab. Banjarnegara

Grafik 2.59

Perkembangan Ratio KDRT di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.2 Persentase Perempuan KDRT dan TPPO yang terlayani sesuai standar

Persentase Perempuan KDRT (Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terlayani sesuai standar di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 terlayani semua (100%).



Sumber: Dinsos PPPA Kab. Banjarnegara

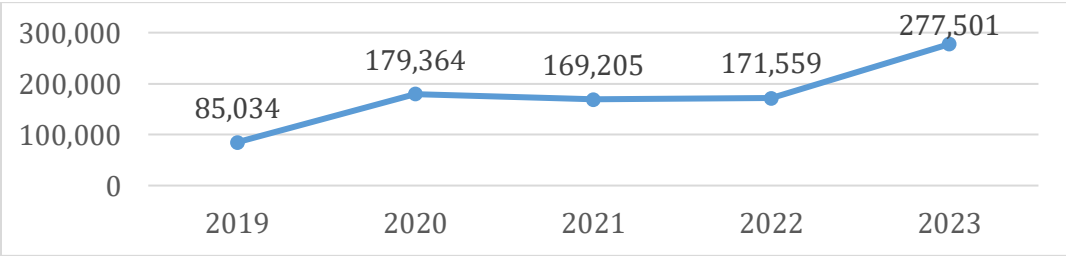
Grafik 2.60

Perkembangan Persentase Perempuan KDRT dan TPPO yang terlayani sesuai standar di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

3. Pangan

3.1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019-2023 cenderung meningkat dari sebesar 85,034 meningkat menjadi sebesar 277,501 Ton/tahun pada tahun 2023.



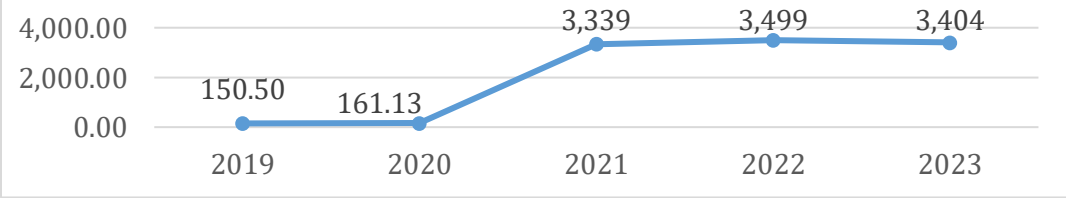
Sumber: Distankan dan KP Kab. Banjarnegara

Grafik 2.61

Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

3.2. Ketersediaan Energi

Ketersediaan Energi di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019-2023 cenderung meningkat dari sebesar 150,5 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 meningkat menjadi 3.404 kkal/kapita/hari pada tahun 2023.



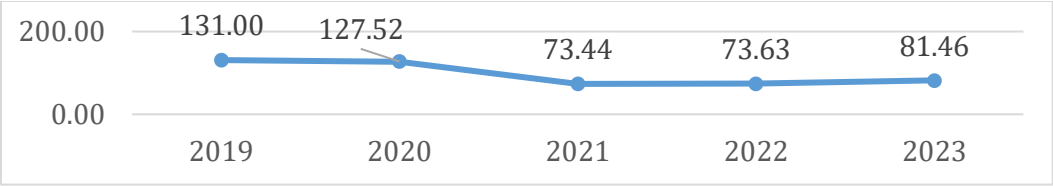
Sumber: Distankan dan KP Kab. Banjarnegara

Grafik 2.62

Perkembangan Ketersediaan Energi di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

3.3. Ketersediaan Protein Perkapita

Ketersediaan Protein Perkapita di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif dari sebesar 131 gram/kapita/hr pada tahun 2019 meningkat menjadi 81,46 gram/kapita/hr pada tahun 2023.



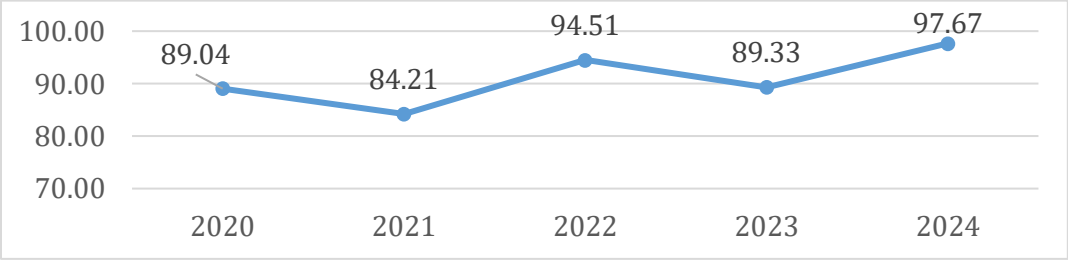
Sumber: Distankan dan KP Kab. Banjarnegara

Grafik 2.63

Perkembangan Ketersediaan Protein Per Kapita di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

3.4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Banjarnegara mencapai 97,67%.



Sumber: Distankan dan KP Kab. Banjarnegara

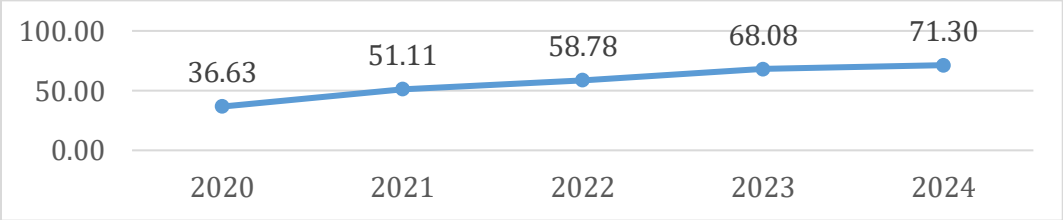
Grafik 2.64

Perkembangan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

4. Pertanian

4.1. Persentase Tanah Yang Bersertifikat

Persentase Tanah Yang Bersertifikat di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang semakin meningkat terhadap aset yang dimilikinya. Tanah yang telah bersertifikat diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset serta berfungsi menopang utama pendapatan asli daerah.



Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara

Grafik 2.65

Perkembangan Persentase Tanah Yang Bersertifikat di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

5. Lingkungan Hidup

5.1. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tersusun dari Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$$

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 3 indikator yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air menggambarkan kualitas air dalam suatu wilayah. Hasil capaian IKA Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 mengalami

peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan kualitas air yang ada di Kabupaten Banjarnegara semakin baik, dimana memiliki kekeruhan kurang dari 5 NTU, tidak berbau, dan tidak berwarna.

b. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU)

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Indeks Kualitas Udara (IKU) ini digunakan untuk menilai tingkat polusi udara. Pada tahun 2024, hasil pengukuran menunjukkan kenaikan nilai IKU menjadi 92,00. Angka tersebut perlu menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan upaya-upaya mengurangi tingkat polusi udara diantaranya melalui pengurangan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil dengan menggunakan transportasi ramah lingkungan. Selain itu, dapat dilakukan reboisasi untuk mengurangi polusi udara yang terjadi.

c. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Pada tahun 2024, IKTL mengalami penurunan yang berarti terjadi penurunan tutupan hutan, belukar, dan tanaman. Kondisi ini terjadi akibat adanya alih fungsi lahan yang diperuntukan menjadi lahan perumahan.

Berdasarkan 3 Indeks yang telah dijelaskan di atas, dapat dilakukan pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tabel 2. 21
Perkembangan Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

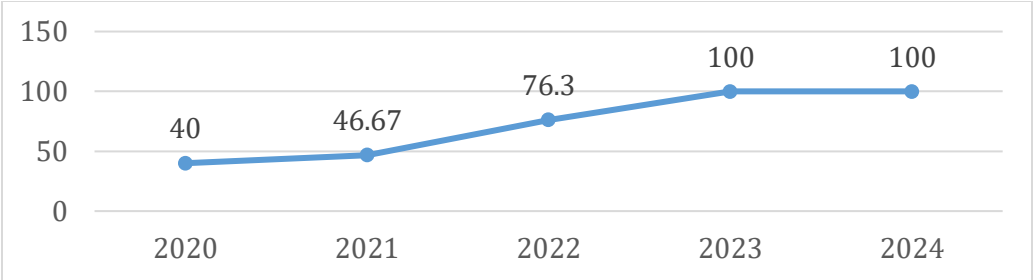
No	Uraian	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	IKU	89,39	88,62	87,91	89,36	92,00
2	IKA	59,31	47,50	52,86	42,68	51,24
3	IKTL	65,16	39,30	39,30	42,39	42,18
IKLH		72,77	62,36	64,09	61,52	65,76
Klasifikasi		Baik	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: DPKLH Kabupaten Banjarnegara

Tabel di atas menunjukkan IKLH Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan berada pada posisi sedang. Peningkatan ini dipengaruhi karena adanya peningkatan kualitas udara dan air di Kabupaten Banjarnegara.

5.2. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2024 capaian mencapai 100%. Hal ini berarti seluruh kegiatan di Kabupaten Banjarnegara telah taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PPU LH yang telah diterbitkan Pemda yang disajikan pada grafik sebagai berikut:



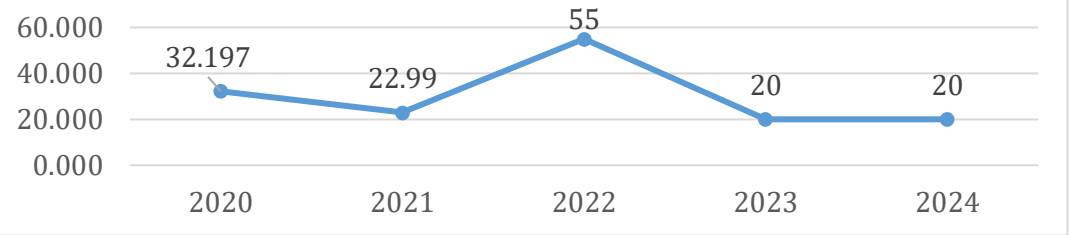
Sumber: DPKLH Kab. Banjarnegara

Grafik 2.66

Perkembangan Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Penanggungjawab dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

5.3. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R

Program *Reduce, Reuse, dan Recycle* merupakan program pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi sampah, menghemat sumber daya, dan menjaga kelestarian lingkungan. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui program 3R di Kabupaten Banjarnegara pada 2 tahun terakhir mengalami penurunan, dimana pada tahun 2024 hanya mencapai 20% sampah yang berkurang dari program 3R. Hal ini disebabkan kurangnya partisipasi dari masyarakat Kabupaten Banjarnegara untuk menerapkan program 3R dalam menangani sampah rumah tangganya.



Sumber: DPKLH Kab. Banjarnegara

Grafik 2.67

Perkembangan Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

5.4. Persentase pelayanan sampah

Area pelayanan sampah meliputi Tempat Penampungan Sampah (TPS), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan tempat pendauran ulang. Pada tahun 2024, persentase cakupan area pelayanan sampah berkurang yang menyebabkan masalah sampah belum tertangani dengan maksimal. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk menambah jumlah TPS di setiap daerah di Kabupaten Banjarnegara sehingga masalah sampah di Kabupaten Banjarnegara semakin tertangani dengan baik.

Tabel 2. 22

Perkembangan pelayanan sampah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Persentase				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan area pelayanan sampah	19,94	22,99	55	77,64	72,32
2.	Jumlah sampah yang tertangani	11,22	76,33	77	77,64	72,32
3.	Timbunan sampah yang ditangani	11,22	76,33	77	77,64	72,32

Sumber: DPKPLH Kabupaten Banjarnegara

5.5. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup

Pemberian penghargaan lingkungan hidup di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 selalu dilaksanakan. Peghargaan ini dilakukan untuk memberikan semangat dalam menjaga

lingkungan di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan mendukung program-program pemerintah terkait lingkungan hidup.

Tabel 2. 23

Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Banjarnegara Selama Tahun 2020-2024

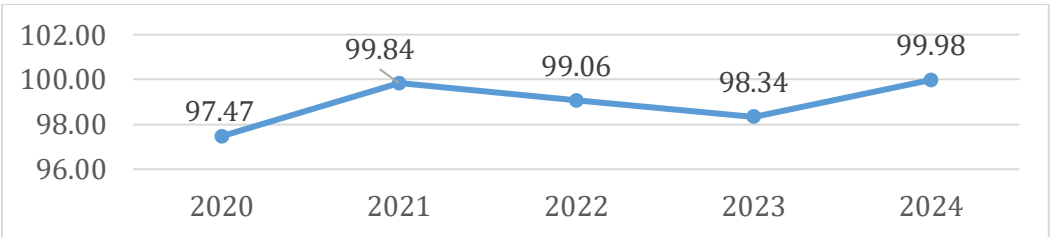
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: DPKLH Kab.Banjarnegara

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6.1. Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk

Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif dari tahun 2020 sebesar 97,47 per satuan penduduk meningkat menjadi 99,98 pada tahun 2024



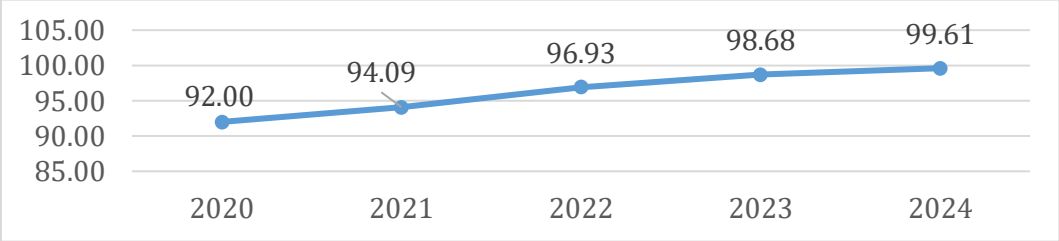
Sumber: Dindukcapil Kab. Banjarnegara

Grafik 2.68

Perkembangan Rasio Penduduk Ber KTP di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

6.2. Rasio Bayi Ber AKTE Kelahiran

Rasio Bayi Ber AKTE Kelahiran di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari tahun 2020 sebesar 92% meningkat menjadi 99,61% pada tahun 2024.



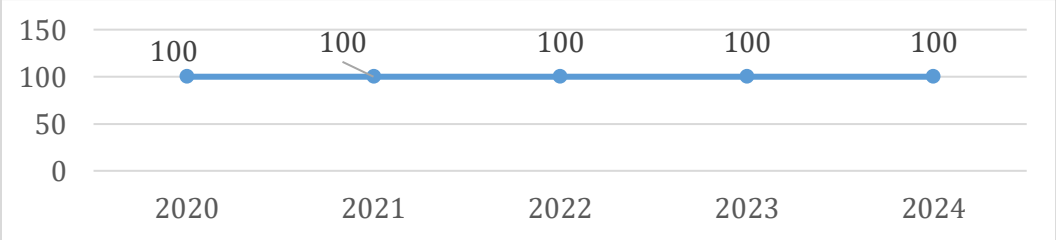
Sumber: Dindukcapil Kab. Banjarnegara

Grafik 2.69

Perkembangan Rasio Bayi Ber AKTE Kelahiran di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

6.3. Rasio Pasangan Ber Akte Nikah

Rasio pasangan ber Akte Nikah di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung stabil terlayani 100%.

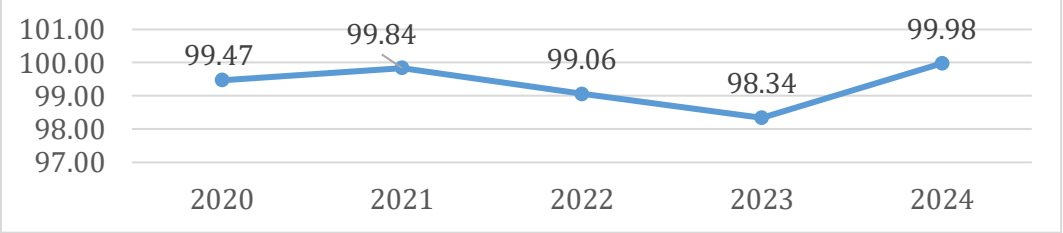


Sumber: Dindukcapil Kab. Banjarnegara

Grafik 2.70
Perkembangan Rasio Pasangan Ber Akte Nikah di Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2020-2024

6.4. Cakupan Penerbitan KTP

Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif dari 99,47 pada tahun 2020 meningkat menjadi 99,98 di tahun 2024.

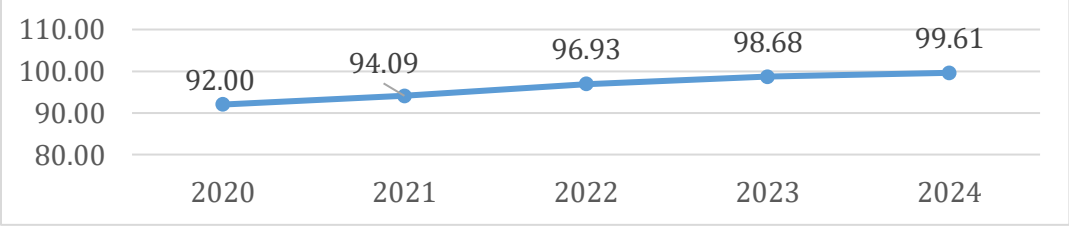


Sumber: Dindukcapil Kab. Banjarnegara
Grafik 2.71

Perkembangan Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2020-2024

6.5. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran

Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari tahun 2020 sebesar 92% meningkat menjadi 99,61% pada tahun 2024:



Sumber: Dindukcapil Kab. Banjarnegara
Grafik 2.72

Perkembangan Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran di Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2020-2024

6.6. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 sudah dilaksanakan Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK.

Tabel 2. 24

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2020-2024

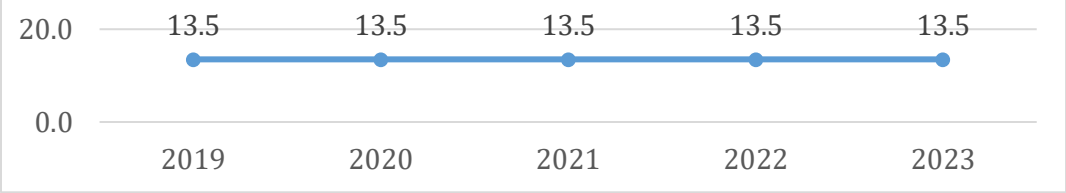
Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
Penerapan Nasional	KTP	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: DPKLH Kab.Banjarnegara

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

7.1. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019-2023 cenderung stabil sebesar 13,5%.

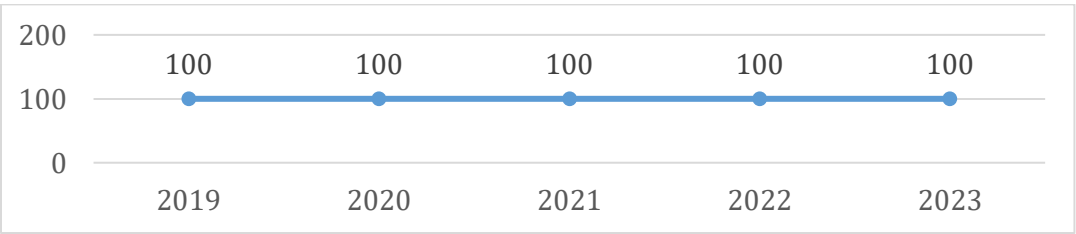


Sumber: Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara
Grafik 2.73

Perkembangan Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

7.2. Persentase LSM aktif

Persentase LSM aktif di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019-2023 cenderung stabil tercapai sebesar 100%.



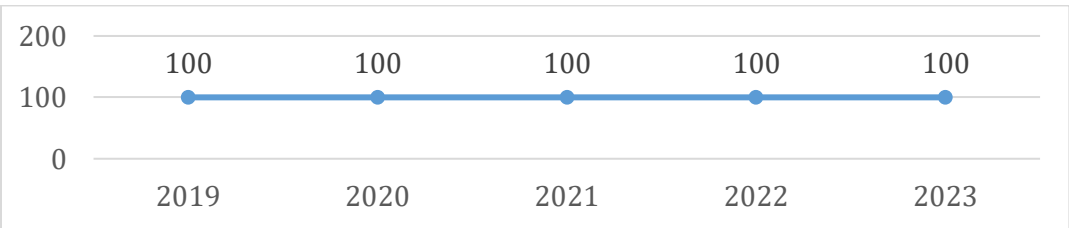
Sumber: Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara

Grafik 2.74

Perkembangan Persentase LSM Aktif di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

7.3. Persentase PKK aktif

Persentase PKK aktif di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019-2023 cenderung stabil tercapai sebesar 100%.



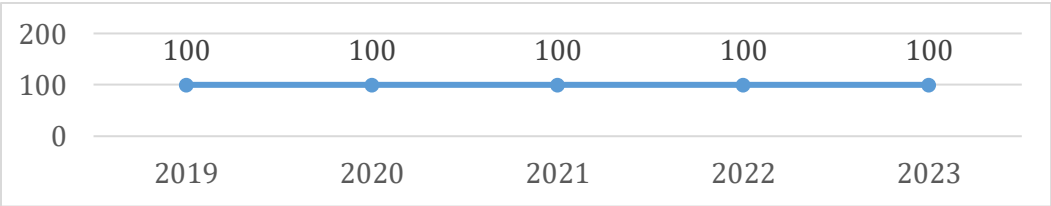
Sumber: Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara

Grafik 2.75

Perkembangan Persentase PKK Aktif di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

7.4. Persentase Posyandu aktif

Persentase Posyandu aktif di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019-2023 cenderung stabil tercapai sebesar 100%.



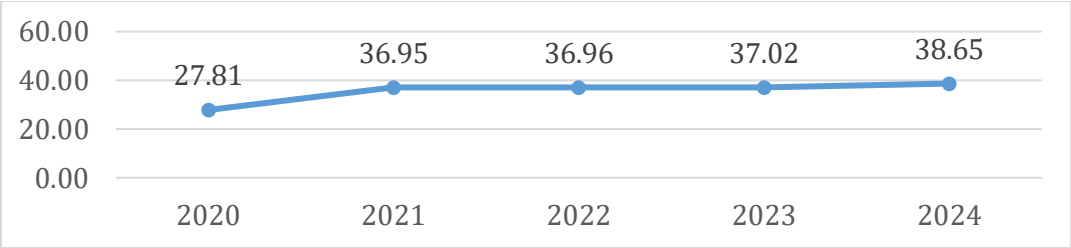
Sumber: Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara

Grafik 2.76

Perkembangan Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

7.5. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan Masyarakat

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Tahun 2020 sebesar 27,81%, terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 38,65%.



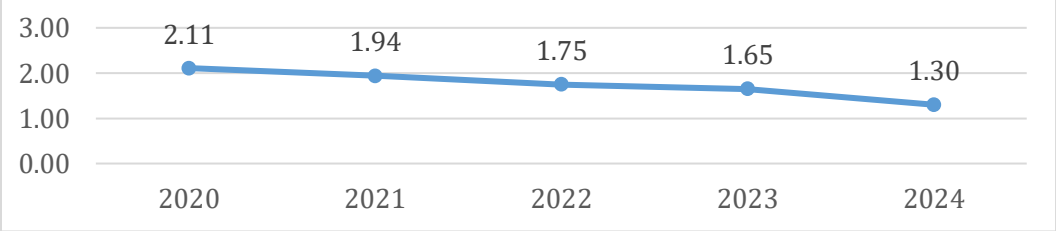
Sumber: Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara
Grafik 2.77

Perkembangan Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

8.1. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung menurun tahun 2020 sebesar 2,11 menurun menjadi 1,30 pada tahun 2024.

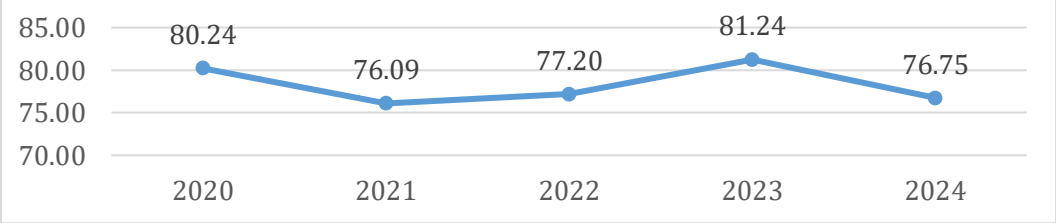


Sumber: Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara
Grafik 2.78

Perkembangan Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

8.2. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15–49 di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2024 mengalami penurunan. Penurunan ini dapat berpengaruh pada peningkatan angka kelahiran, risiko kehamilahn tidak direncanakan di Kabupaten Banjarnegara.

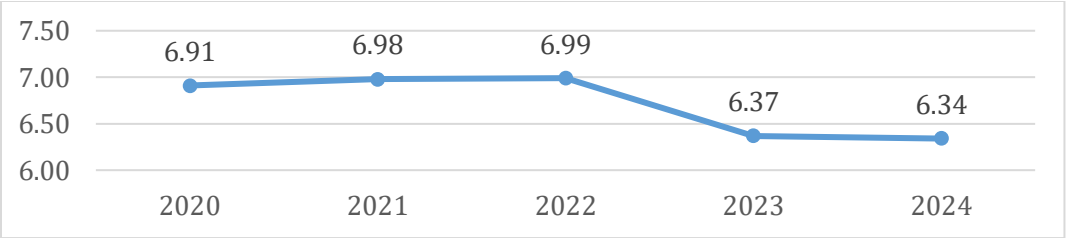


Sumber: Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara
Grafik 2.79

Perkembangan Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15–49 di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

8.3. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 semakin menurun. Kondisi ini mengindikasikan semakin terpenuhinya PUS yang ingin ber-KB di Kabupaten Banjarnegara.

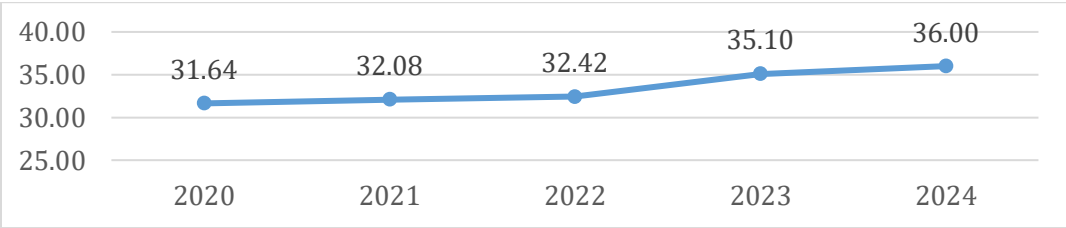


Sumber: Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara
Grafik 2.80

Perkembangan Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

8.4. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari tahun 2020 sebesar 31,64% meningkat menjadi 36% pada tahun 2024.

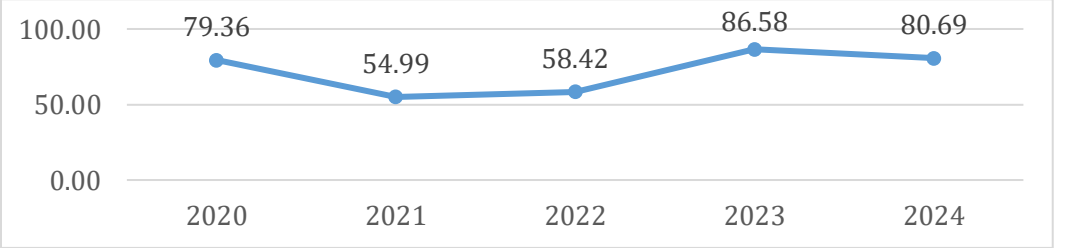


Sumber: Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara
Grafik 2.81

Perkembangan Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

8.5. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari tahun 2020 sebesar 79,36% menjadi 80,69% pada tahun 2024.



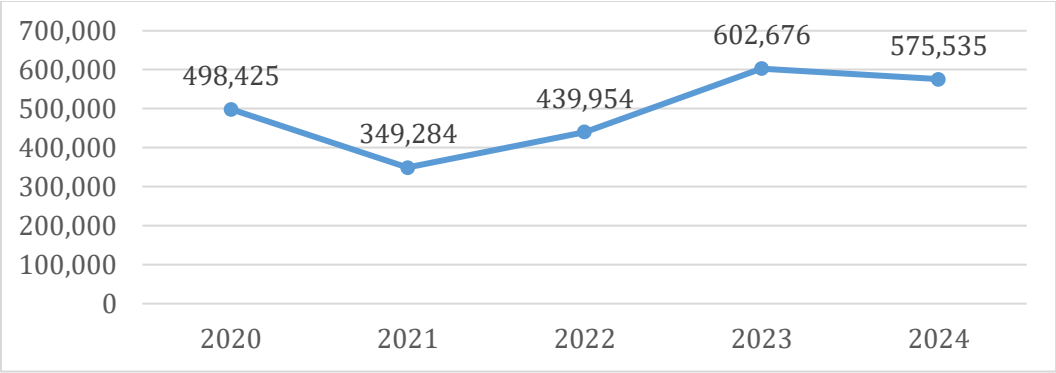
Sumber: Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara
Grafik 2.82

Perkembangan Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

9. Perhubungan

9.1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif dari 498.425 orang pada tahun 2020 meningkat menjadi 575.534 orang pada tahun 2024. Namun, jumlah tersebut turun dari tahun sebelumnya. Salah satu faktornya adalah semakin banyaknya kendaraan pribadi di Kabupaten Banjarnegara.



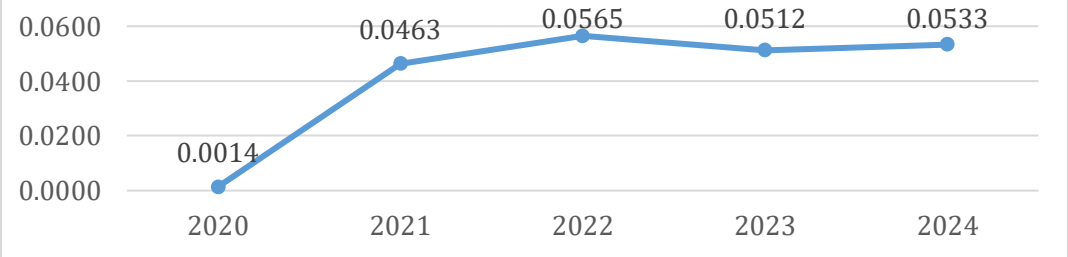
Sumber: Dinhub PPKB Kab. Banjarnegara

Grafik 2.83

Perkembangan Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

9.2. Rasio Ijin Trayek

Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif dari 0,0014% pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,0533% pada tahun 2024.



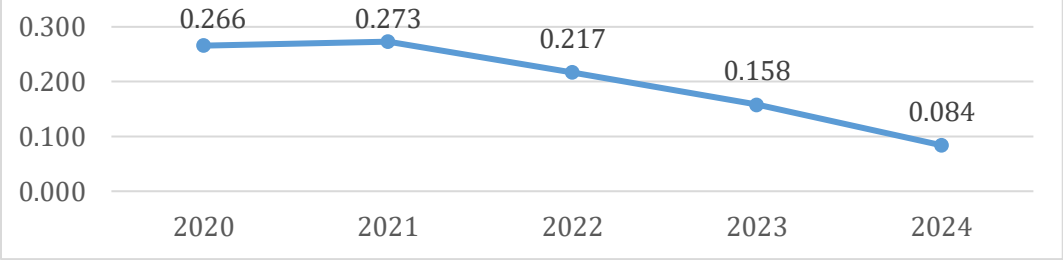
Sumber: Dinhub PPKB Kab. Banjarnegara

Grafik 2.84

Perkembangan Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

9.3. Persentase layanan angkutan darat

Persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif dari 0,266% tahun 2020 turun menjadi 0,084 tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya kemungkinan penurunan jumlah penumpang angkutan umum, berkurangnya minat masyarakat terhadap transportasi publik, dan adanya peningkatan penggunaan transportasi pribadi.



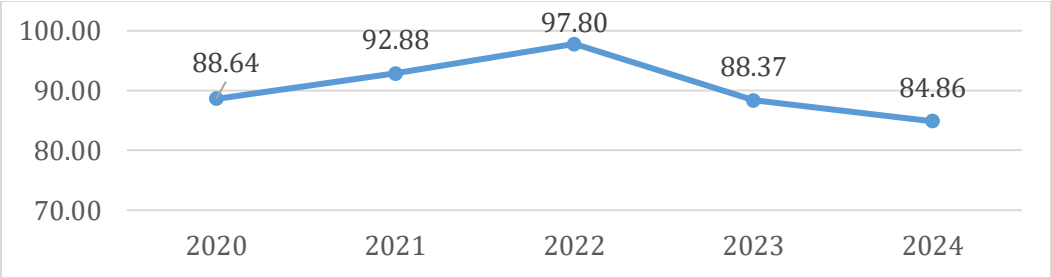
Sumber: Dinhub PPKB Kab. Banjarnegara

Grafik 2.85

Perkembangan Persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

9.4. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif dari 88,64% pada tahun 2020 turun menjadi 84,86% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa semakin sedikit angkutan umum yang telah melewati uji KIR atau pengujian berkala. Hal ini dapat disebabkan kurangnya pemeliharaan kendaraan yang dilakukan oleh pengusaha angkutan umum di Kabupaten Banjarnegara.



Sumber: Dinhub PPKB Kab. Banjarnegara

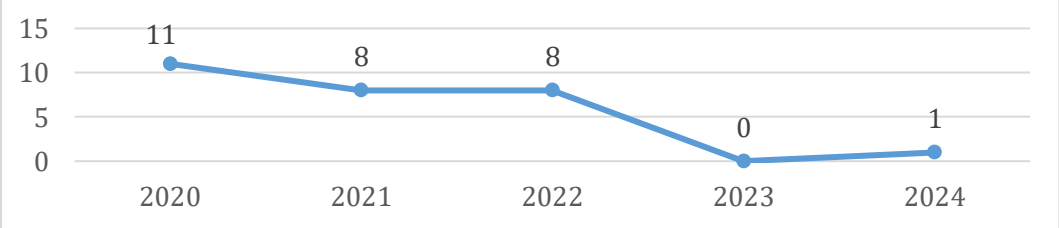
Grafik 2.86

Perkembangan Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

10. Komunikasi dan Informatika

10.1 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.

Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung menurun. Pada tahun 2023, Kelompok Informasi Masyarakat tidak melaporkan kegiatan atau kepengurusan baru sehingga terdata nol (0).



Sumber: Dinkominfo Kab. Banjarnegara

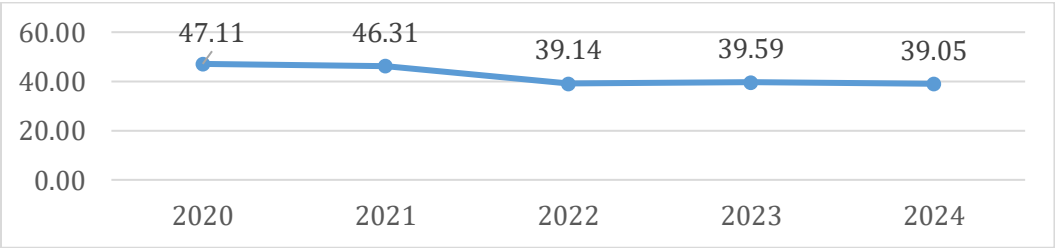
Grafik 2.87

Perkembangan Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

11.1 Persentase Koperasi Aktif

Persentase persentase koperasi mengalami penurunan dari 47,11% di 2020 menjadi hanya 39,05% di 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam mempertahankan keberlanjutan operasional koperasi yang sudah terbentuk, kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pendampingan berkelanjutan atau kesulitan adaptasi terhadap perubahan ekonomi.



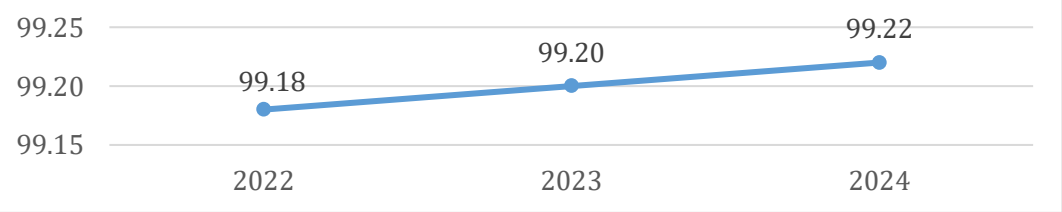
Sumber: Disperindagkop UKM Kab. Banjarnegara

Grafik 2.88

Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

11.2 Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banjarnegara cenderung stabil dan tinggi dari tahun 2022 hingga 2024, dengan sedikit peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor usaha kecil masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan memiliki daya tahan yang kuat. Kenaikan ini juga bisa mencerminkan tingginya minat masyarakat untuk berwirausaha, meskipun tantangan skala usaha dan akses terhadap pembiayaan atau pasar masih mungkin menjadi isu yang dihadapi.

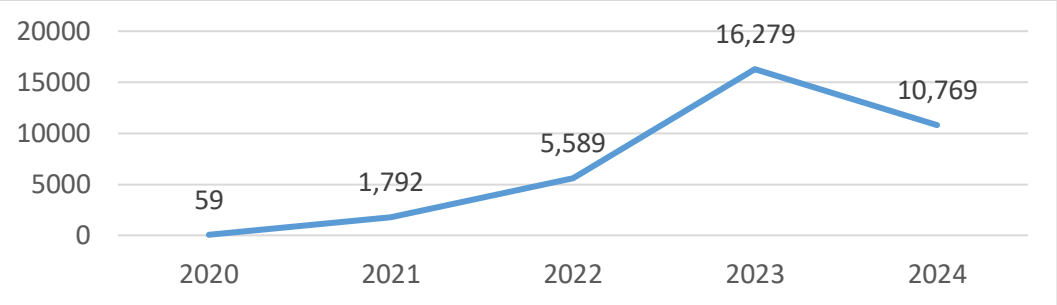


Sumber: Disperindagkop UKM Kab. Banjarnegara
Grafik 2.89
Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2022-2024

12. Penanaman Modal

12.1 Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)

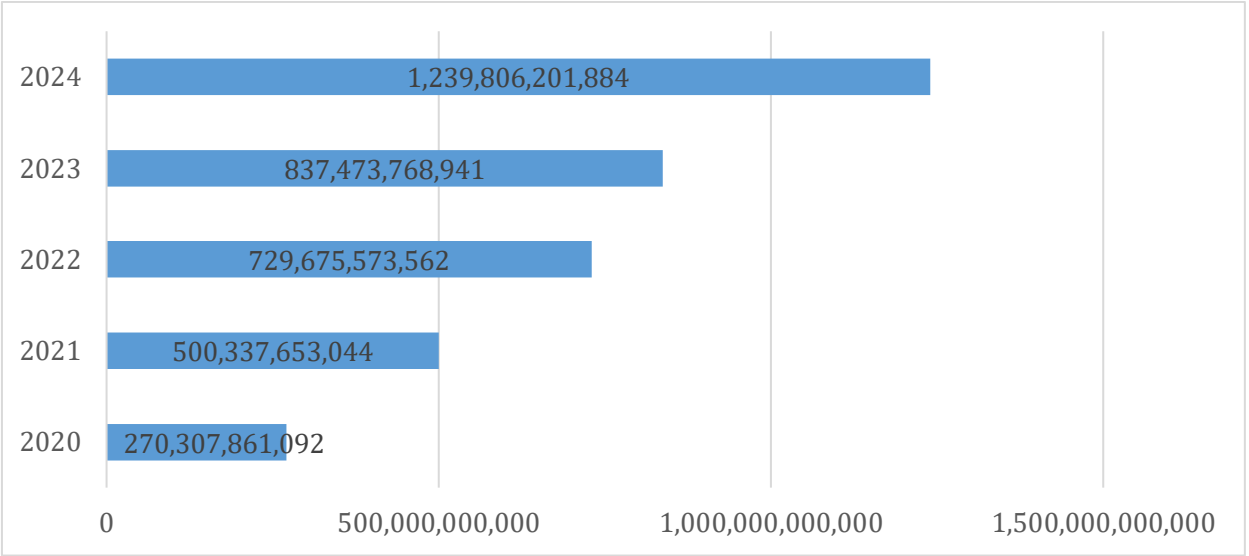
Jumlah investor berskala nasional mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Dari 59 investor di tahun 2020, terjadi peningkatan menjadi ribuan pada tahun-tahun berikutnya, dengan puncaknya mencapai 16.279 investor di tahun 2023. Lonjakan ini mengindikasikan keberhasilan Kabupaten Banjarnegara dalam mempromosikan potensi daerah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Faktor pendukung kemungkinan meliputi kebijakan insentif yang menarik, perbaikan infrastruktur, serta reformasi birokrasi yang memudahkan proses investasi.



Sumber: Disnaker PMPTSP Kab. Banjarnegara
Grafik 2.90
Perkembangan Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2020-2024

12.2 Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 cenderung meningkat dari sebesar Rp270.307.861.092,- pada tahun 2020, terus meningkat menjadi Rp1.239.806.201.884,- di 2024.

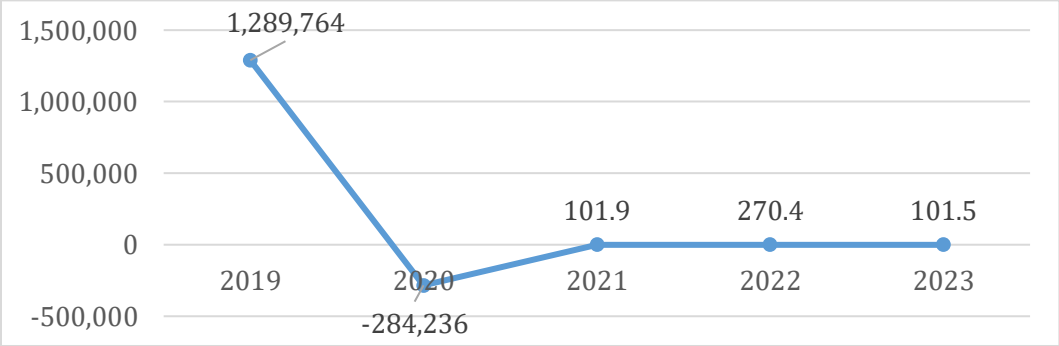


Sumber: Disnaker PMPTSP Kab. Banjarnegara

Grafik 2.91

Perkembangan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

12.3 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2019-2023 cenderung fluktuatif dari sebesar -284,236 milyar pada tahun 2020, turun menjadi 101,5 milyar pada tahun 2023.



Sumber: Disnaker PMPTSP Kab. Banjarnegara

Grafik 2.92

Perkembangan Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

13. Statistik
13.1 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
Selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 di Kabupaten Banjarnegara tidak tersedia sistem data dan statistik yang terintegrasi, sistem data dan statistik yang terintegrasi ini baru akan dilaksanakan di tahun 2025.

Tabel 2. 25

Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi Selama Kurun Waktu 5 Tahun dari 2019-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya sistem data dan statistik terintegrasi	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia

Sumber: Baperlitbang dan Dinkominfo Kab.Banjarnegara

13.2 Buku Kabupaten Dalam Angka

Selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 di Kabupaten Banjarnegara sudah menyusun Buku Kabupaten Dalam Angka bekerjasama

dengan BPS yang berisi berbagai data dan informasi mengenai Kabupaten Banjarnegara pada tahun tersebut.

Tabel 2. 26
Penyusunan Buku Kabupaten dalam Angka selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Baperlitbang dan Dinkominfo Kab.Banjarnegara

13.3 Buku PDRB

Semenjak tahun 2022, buku PDRB tidak dicetak oleh Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara dan menggunakan data rilis BPS yang tersedia di laman *website* BPS.

Tabel 2. 27
Penyusunan Buku PDRB Selama Kurun Waktu 5 Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Buku PDRB	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Baperlitbang dan Dinkominfo Kab.Banjarnegara

14. Persandian

14.1 Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.

Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah selama kurun 2020-2024 cenderung meningkat. Hal ini karena mulai tahun 2023 sudah diberlakukan menggunakan TTE disetiap kegiatan komunikasi perangkat daerah sehingga capain pada tahun 2024 bernilai 100%.

Tabel 2. 28
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah 2020-2024

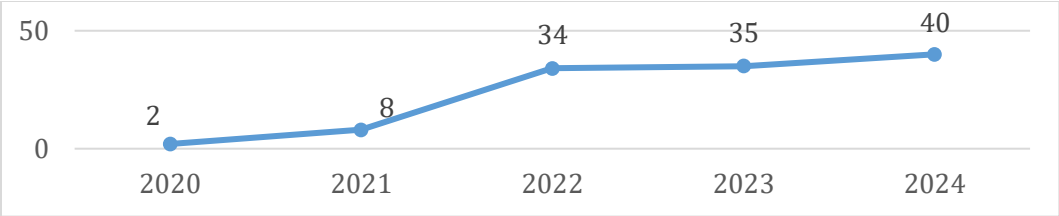
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	25	25	25	100	100

Sumber: Dinkominfo Kab.Banjarnegara

15. Kebudayaan

15.1 Penyelenggaraan festival seni budaya

Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif dari sebanyak 2 kegiatan pada tahun 2020, meningkat menjadi 40 kegiatan pada tahun 2024.

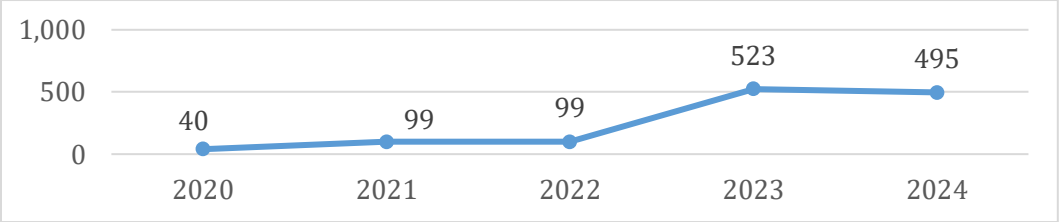


Sumber: Disparbud Kab. Banjarnegara
Grafik 2.93

Perkembangan Penyelenggaraan festival seni budaya di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

15.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari 40 buah pada tahun 2020 menjadi 495 buah pada tahun 2024.

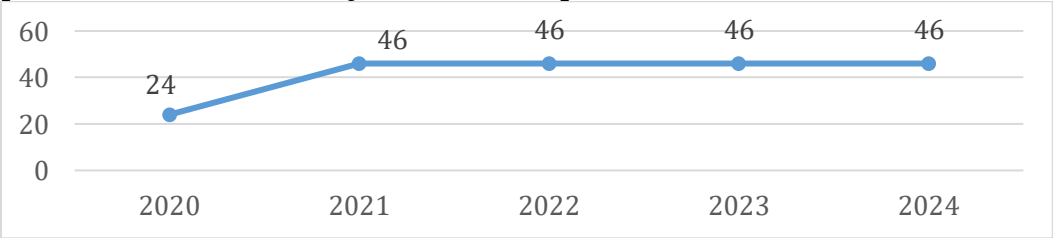


Sumber: Disparbud Kab. Banjarnegara
Grafik 2.94

Perkembangan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

15.3 Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu

Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun cenderung meningkat dari 24 buah pada tahun 2020 menjadi 46 buah pada tahun 2024.

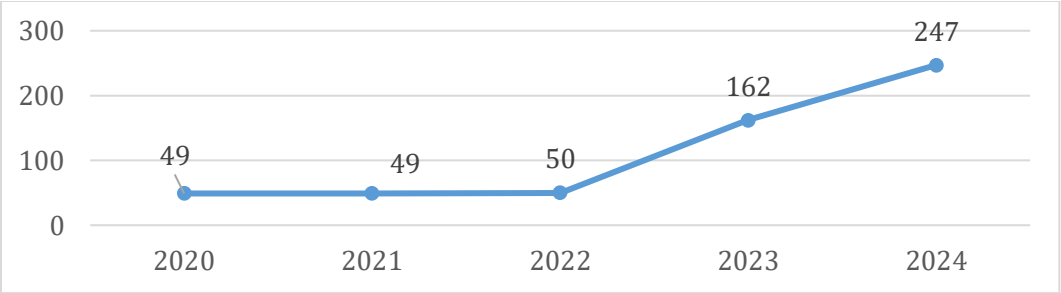


Sumber: Disparbud Kab. Banjarnegara
Grafik 2.95

Perkembangan Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

15.4 Jumlah Karya Budaya yang sudah direvitalisasi dan diinventarisasi.

Jumlah Karya Budaya yang sudah direvitalisasi dan diinventarisasi di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari 49 buah pada tahun 2020 menjadi 247 pada tahun 2024.



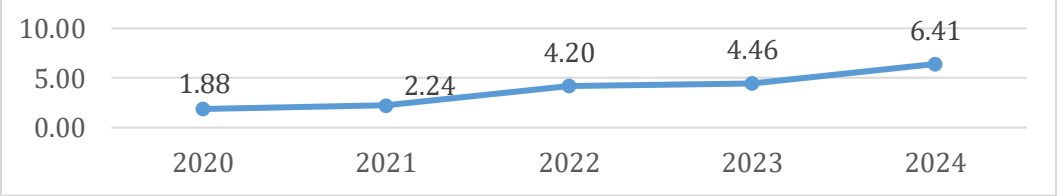
Sumber: Disparbud Kab. Banjarnegara
Grafik 2.96

Perkembangan Jumlah Karya Budaya yang sudah direvitalisasi dan diinventarisasi di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

16. Perpustakaan

16.1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun

Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun cenderung meningkat dari 1,88% pada tahun 2020, terus meningkat menjadi 6,41% pada tahun 2024. Kondisi ini terlihat dari rata-rata pengunjung perpustakaan pada tahun 2024 mencapai 43.478 orang.

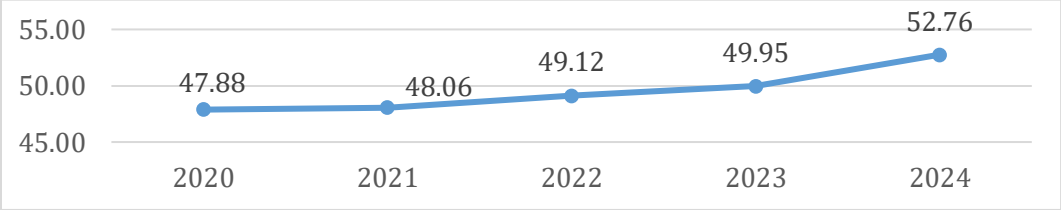


Sumber: Disarpus Kab. Banjarnegara
Grafik 2.97

Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

16.2 Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan semakin lengkap koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan daerah.

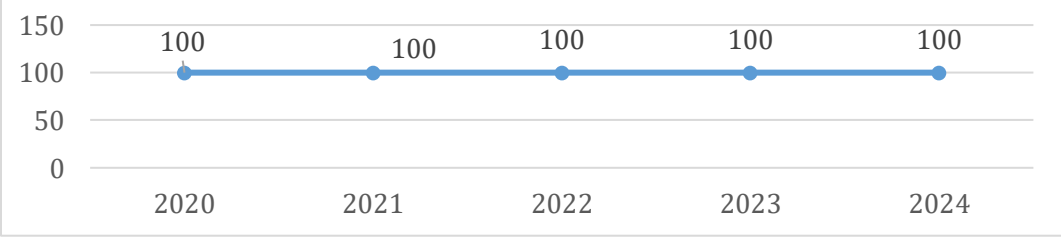


Sumber: Disarpus Kab. Banjarnegara
Grafik 2.98

Perkembangan Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

16.3 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki sertifikat

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki sertifikat di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun cenderung tetap pada capaian sebesar 100% yang berarti seluruh pustakawan, tenaga teknis, dan penilai telah memiliki sertifikat yang dipersyaratkan.



Sumber: Disarpus Kab. Banjarnegara

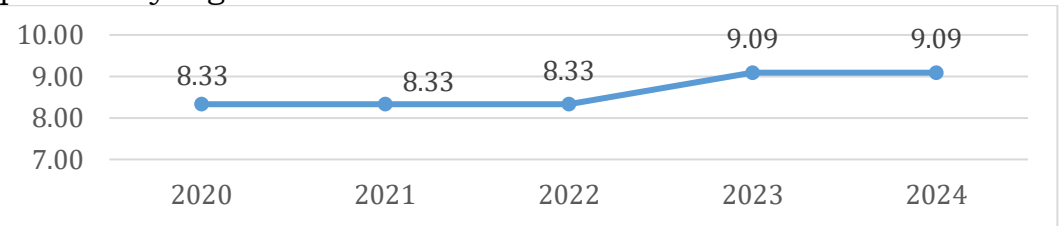
Grafik 2.9

Perkembangan Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki sertifikat di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

17. Kearsipan

17.1 Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip secara Baku

Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip secara Baku di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 menunjukkan kenaikan yang mengindikasikan bahwa perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara telah mengelola arsip secara baku sesuai dengan prosedur yang berlaku.



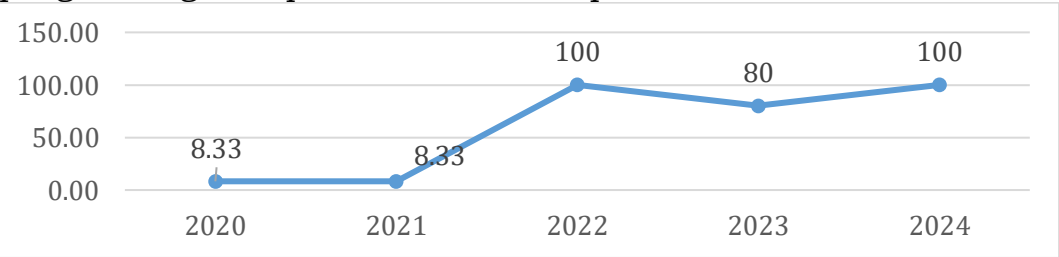
Sumber: Disarpus Kab. Banjarnegara

Grafik 2.100

Perkembangan Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip secara Baku di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

17.2 Persentase Tata Kelola Kearsipan yang Baik

Persentase Tata Kelola Kearsipan yang Baik di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Transformasi paling signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan lonjakan drastis mencapai angka 100, yang merepresentasikan peningkatan lebih dari 10 kali lipat. Peningkatan drastis ini mengindikasikan adanya perubahan kebijakan strategis, implementasi program transformasi digital kearsipan, atau alokasi anggaran khusus untuk pengembangan SDM kearsipan. Selisih yang sangat besar antara periode sebelum dan sesudah tahun 2022 menunjukkan adanya terobosan program atau regulasi baru yang mendorong percepatan pengembangan kapasitas SDM kearsipan.



Sumber: Disarpus Kab. Banjarnegara

Grafik 2.101

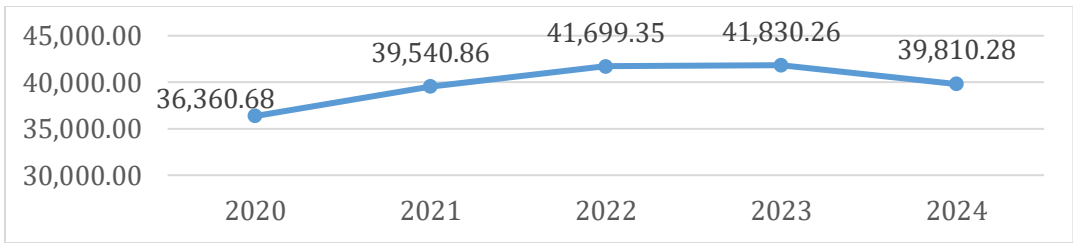
Perkembangan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

1.1. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Namun, pada tahun 2024 produksi perikanan mengalami penurunan menjadi 39.810,28 ton/tahun. Produktifitas ini menurun terutama pada semester ke II yang disebabkan terbatasnya sumber air akibat pengeringan, tingginya harga pakan sedangkan alternatif pakan alami dan pakan mandiri jumlahnya masih belum mencukupi, wabah penyakit yang belum terkendali, kualitas air yang menurun akibat perubahan cuaca yang ekstrim, kurang memadainya sarana dan prasarana produksi budidaya yang lebih intensif, dan harga ikan yang terus menurun.



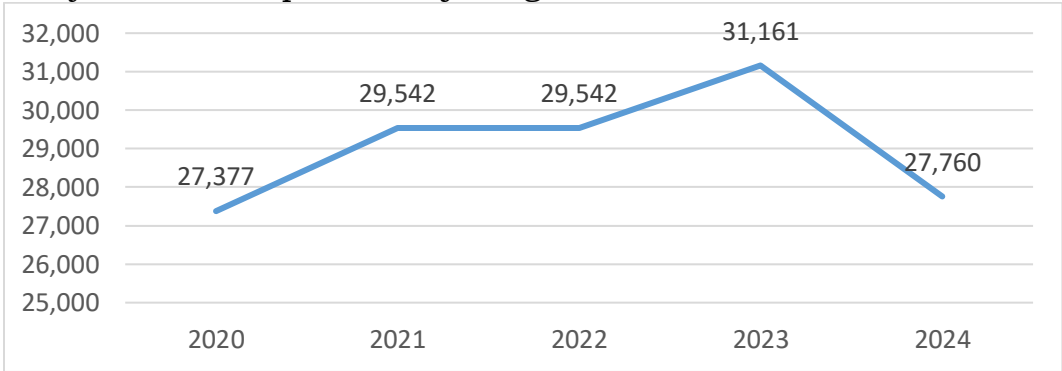
Sumber: Distankan dan KP Kab. Banjarnegara

Grafik 2.102

Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

1.2. Konsumsi Ikan

Konsumsi Ikan di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2024 jumlah konsumsi ikan Kabupaten Banjarnegara cenderung mangalami penurunan sehingga angka konsumsi pada tahun 2024 hanya mencapai 27.760 ton/tahun. Kondisi ini dikarenakan menurunnya daya beli masyarakat dalam mengkonsumsi ikan dan kurang memadainya edukasi dan sosialisasi gemar makan ikan terhadap masyarakat Kabupaten Banjarnegara.



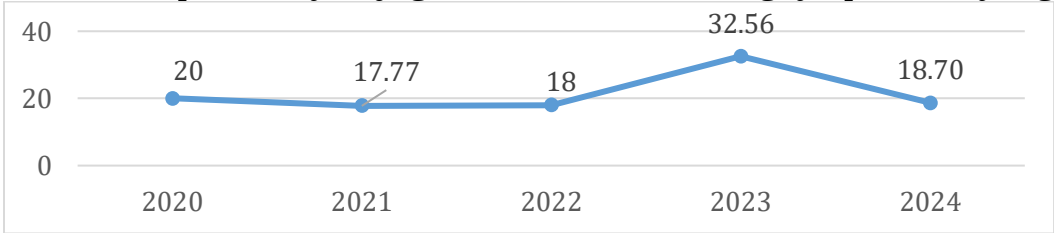
Sumber: Distankan dan KP Kab. Banjarnegara

Grafik 2.103

Perkembangan Konsumsi Ikan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

1.3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2024, persentase cakupan bina kelompok nelayan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Walaupun demikian, pada 2024 terjadi peningkatan frekuensi kelompok yang dibina. Hal ini dikarenakan adanya pendampingan teknis penerapan teknologi yang lebih intensif. Berkurangnya jumlah cakupan bina kelompok nelayan juga dikarenakan kurangnya personil yang menangani.



Sumber: Distankan dan KP Kab. Banjarnegara

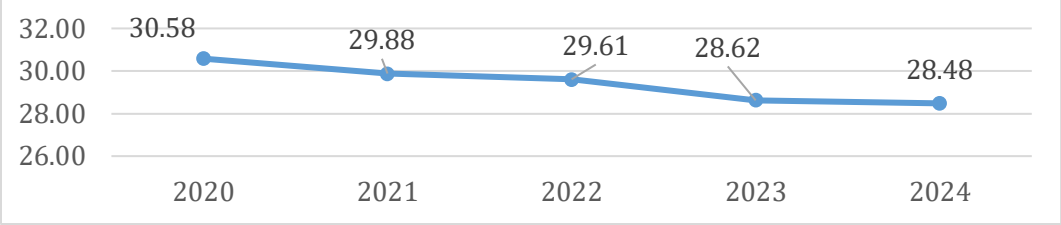
Grafik 2.104

Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2. Pertanian

2.1 Kontribusi sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun cenderung fluktuatif dari 30,58% pada tahun 2020, menurun menjadi 28,48% di 2024.

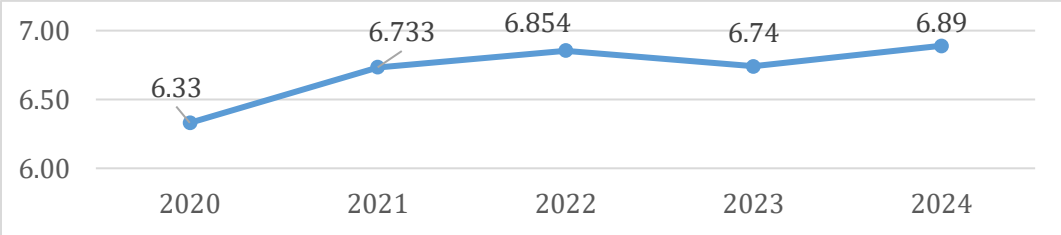


Sumber: Distankan dan KP Kab. Banjarnegara
Grafik 2.105

Perkembangan Kontribusi sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.2 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal

Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2024 produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal meningkat menjadi 6,89%. Walaupun peningkatan tersebut tidak signifikan, tetapi menjadi sinyal positif bagi perkembangan produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya yang ada di Kabupaten Banjarnegara.



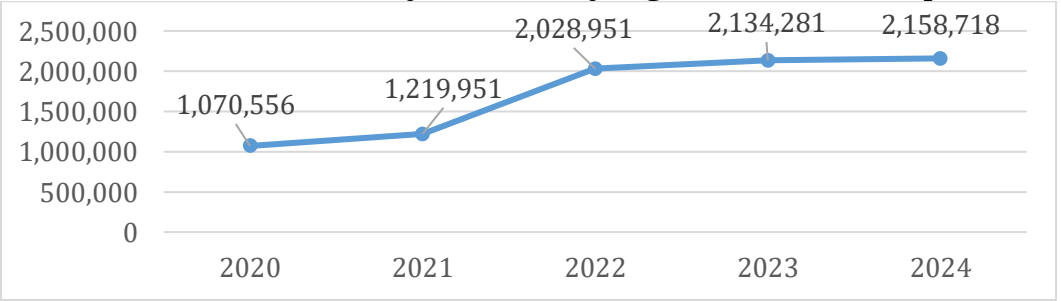
Sumber: Distankan dan KP Kab. Banjarnegara
Grafik 2.106

Perkembangan Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

3. Pariwisata

3.1. Kunjungan Wisata

Keberhasilan dalam bidang pariwisata dicerminkan dengan semakin meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024 tercatat jumlah kunjungan wisata mencapai 2.158.718 orang.

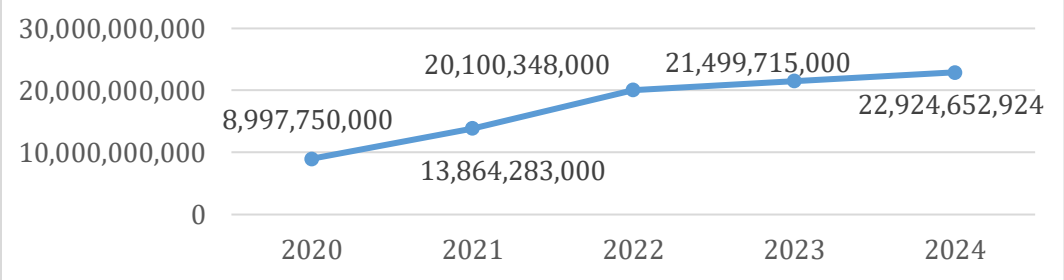


Sumber: Disparbud Kab. Banjarnegara
Grafik 2.107

Perkembangan Kunjungan Wisata di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

3.2. PAD Sektor Pariwisata

PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun cenderung meningkat dari Rp. 8.997.750.000,- pada tahun 2020 menjadi Rp. 22.924.652.924,- di tahun 2024.



Sumber: Disparbud Kab. Banjarnegara

Grafik 2.108

Perkembangan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2020-2024

2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang

1. Perencanaan

1.1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku pada 2020-2023 adalah RPJPD tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui PERDA Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009. Kemudian, pada tahun 2024 telah dibuat dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan melalui PERDA Nomor 5 Tahun 2024.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku pada tahun 2020-2023 adalah RPJMD Tahun 2019-2023 yang ditetapkan melalui PERDA Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017. Kemudian, pada tahun 2022 disusun dokumen RPD Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022. Pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari dokumen RPJMD dan RPD. Kabupaten Banjarnegara telah membuat dokumen RKPD secara rutin dan telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Pada RKPD tahun 2024 ditetapkan melalui Perkada Nomor 35 Tahun 2023.

Dokumen perencanaan RTRW di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 adalah menggunakan dokumen RTRW Tahun 2023-2045 yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023 yang mana mencabut Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031.

Tabel 2. 29

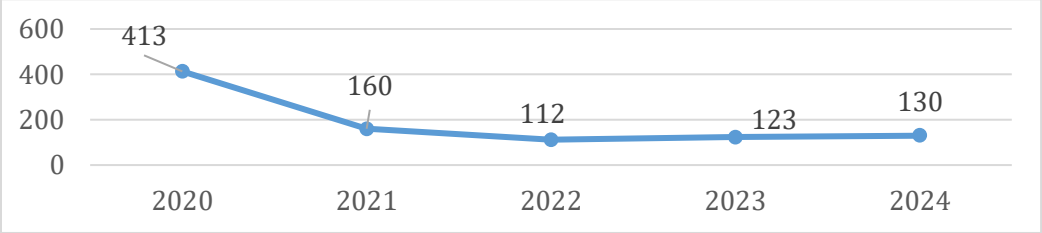
Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA di Kab. Banjarnegara

Jenis Dokumen	Ketersediaan Dokumen				
	2020	2021	2022	2023	2024
RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
RPJMD /RPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
RTRW	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Baperlitbang Kab.Banjarnegara

1.2. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD

Pada tahun 2024, dari 135 program pada RPD 2023-2026, terdapat 130 program yang telah tertuang di dalam RKPD Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa program program yang ada dalam RPJMD namun tidak ada dalam RKPD semakin menurun.

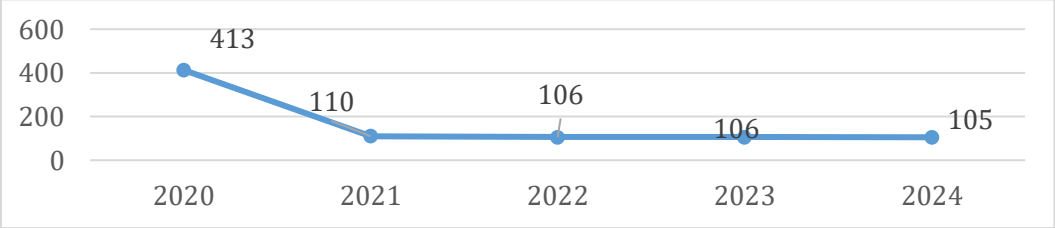


Sumber: Baperlitbang Kab. Banjarnegara
Grafik 2.109

Perkembangan Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

1.3. Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD

Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 terjadi penyesuaian dalam penghitungan program. Pada tahun 2021 hingga saat ini dilakukan penghitungan hanya pada program dan tidak menghitung kegiatan serta sub kegiatannya, sehingga pada tahun 2024 tertera terdapat 105 program RKPD yang tercantum dalam APBD.

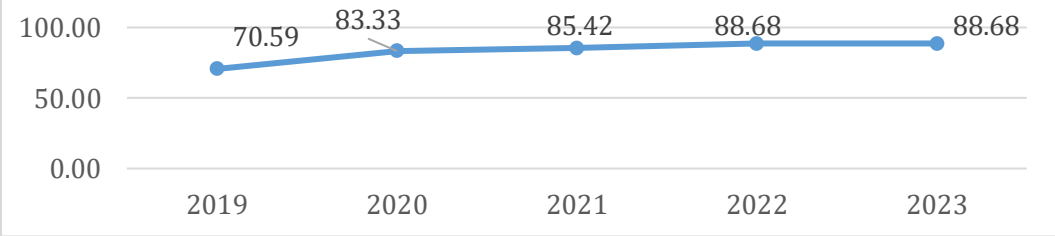


Sumber: Baperlitbang Kab. Banjarnegara
Grafik 2.110

Perkembangan Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

1.4. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2019-2023 cenderung meningkat dari sebesar 70,59% pada tahun 2019 meningkat menjadi 88,68% di tahun 2022 dan stabil hingga 2023.



Sumber: Baperlitbang Kab. Banjarnegara
Grafik 2.111

Perkembangan Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

2. Keuangan

2.1 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 memperoleh Opini dari BPK RI dengan status

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara menyajikan informasi keuangan secara wajar sesuai dengan SAP yang berlaku. Berikut ini disajikan perkembangan Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah.

Tabel 2. 30

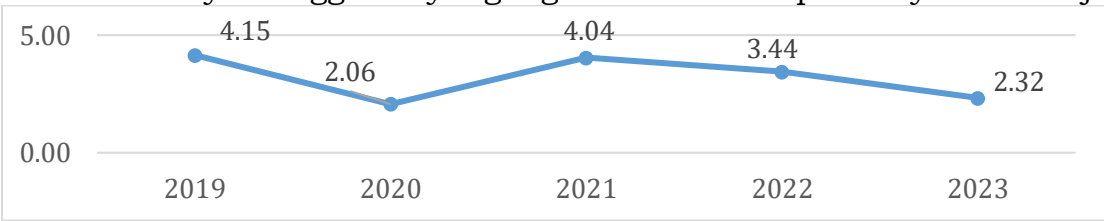
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selama 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara

2.2 Persentase SILPA

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode. Adanya SILPA menandakan bahwa terdapat sejumlah dana yang tidak digunakan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat. Semakin tinggi jumlah SILPA maka dana yang tidak digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat juga semakin besar. Persentase SILPA pada APBD Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2019-2023 cenderung menurun. Pada tahun 2023 persentase SILPA turun menjadi 2,32%. Hal ini tentunya sangat positif karena semakin kecil persentase SILPA berarti semakin banyak anggaran yang digunakan untuk pembiayaan belanja daerah.



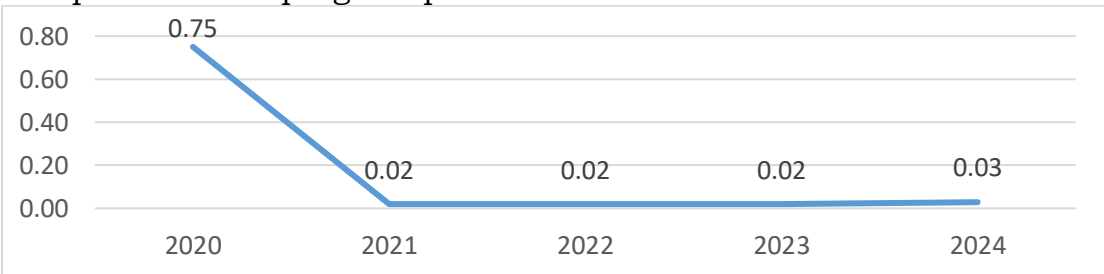
Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara

Grafik 2.112

Perkembangan Persentase SILPA di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

2.3 Persentase Program Yang Tidak Terlaksana

Persentase Program Yang Tidak Terlaksana dalam APBD Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0,03%. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan dalam reformasi sistem perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah.



Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara

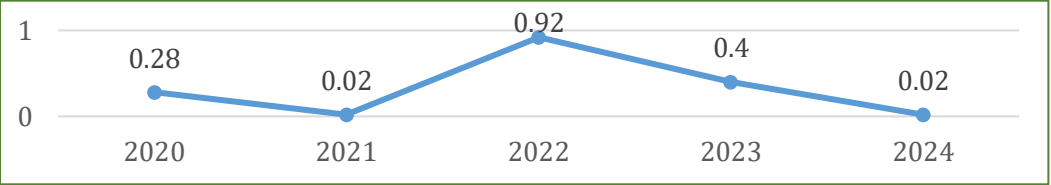
Grafik 2.113

Perkembangan Persentase Program Yang Tidak Terlaksana dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.4 Persentase Kegiatan Yang Tidak Terlaksana dalam APBD

Persentase Kegiatan Yang Tidak Terlaksana dalam APBD Kabupaten Banjarnegara salam kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 cenderung

berfluktuasi. Pada tahun 2022 hingga 2024 persentase kegiatan yang tidak terlaksana dalam APBD semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak kegiatan yang telah terlaksana pada tahun tersebut.



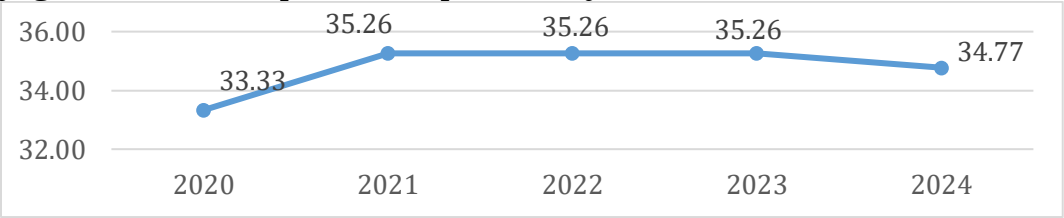
Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara

Grafik 2.114

Perkembangan Persentase Kegiatan Yang Tidak Terlaksana dalam APBD Kabupaten Banjarnegara tahun 2020-2024

2.5 Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Persentase Belanja Pendidikan (20%) dari APBN maupun APBD merupakan amanat di dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pada pasal 31 ayat 4. Persentase Belanja Pendidikan (20%) dalam APBD Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 cenderung fluktuatif. Hal ini sesuai dengan kondisi APBD Kabupaten Banjarnegara yang juga berfluktuasi pada setiap tahunnya.



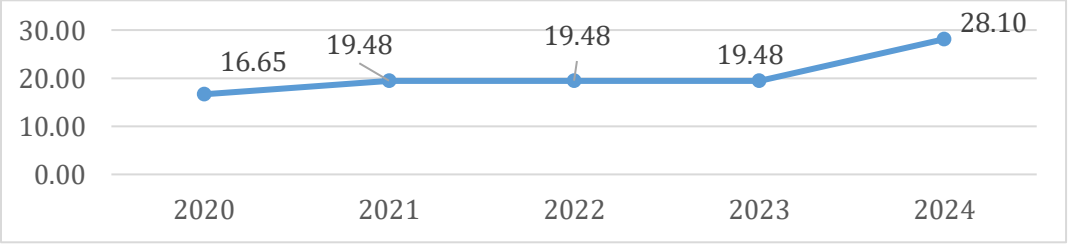
Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara

Grafik 2. 115

Perkembangan Persentase Belanja Pendidikan (20%) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.6 Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Persentase Belanja Kesehatan (10%) dalam APBD Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan dari 16,65% pada tahun 2020 menjadi 28,10% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan APBD yang cenderung meningkat pada tahun 2024.



Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara

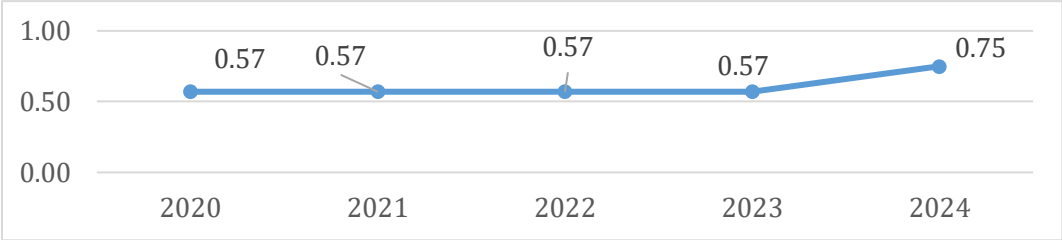
Grafik 2.116

Perkembangan Persentase Belanja Kesehatan (10%) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.7 Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa dalam APBD Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 terus mengalami

peningkatan. Pada tahun 2024, bagi hasil kabupaten dan desa naik menjadi 0,75%.



Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara

Grafik 2.117

Perkembangan Bagi Hasil Kab/Kota dan Desa dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.8 Penetapan APBD

Penetapan APBD Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 selalu tepat waktu sebelum 31 Desember tahun (n-1).

Tabel 2. 31

Perkembangan Penetapan APBD Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024

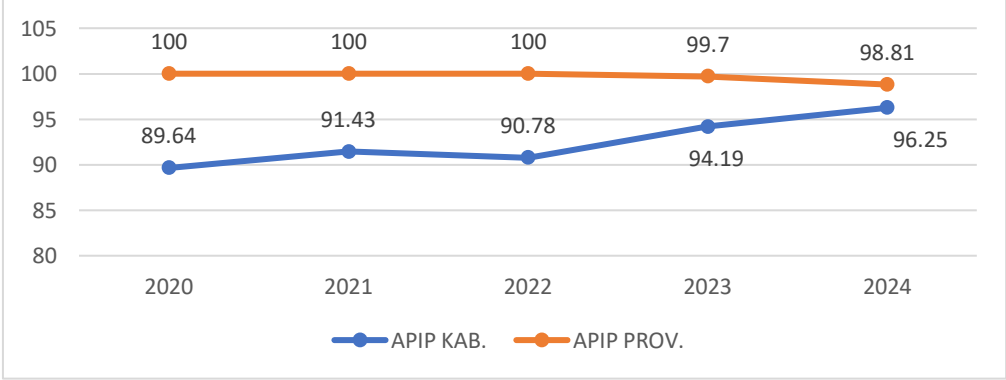
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara

3. Pengawasan

3.1. Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP

Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP pada Kabupaten Banjarnegara selama 5 tahun dari 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, dimana pada tahun 2024 persentase tindak lanjut temuan APIP mencapai 96,25%. Persentase tindak lanjut temuan APIP Provinsi cenderung berada pada angka konstan yaitu mencapai 100%.



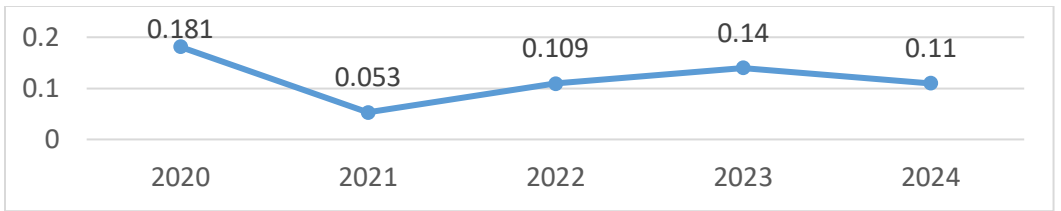
Sumber: Inspektorat Kab. Banjarnegara

Grafik 2.118

Perkembangan Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP (Provinsi dan Kabupaten) di Kabupaten Banjarnegara 2020-2024

3.2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Persentase Pelanggaran Pegawai di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 cenderung fluktuatif. Namun, pada tahun 2024 menunjukkan penurunan persentase pelanggaran pegawai, dimana hanya terdapat 10 kasus pelanggaran disiplin ASN dari total 8.717 jumlah ASN yang ada di Kabupaten Banjarnegara.



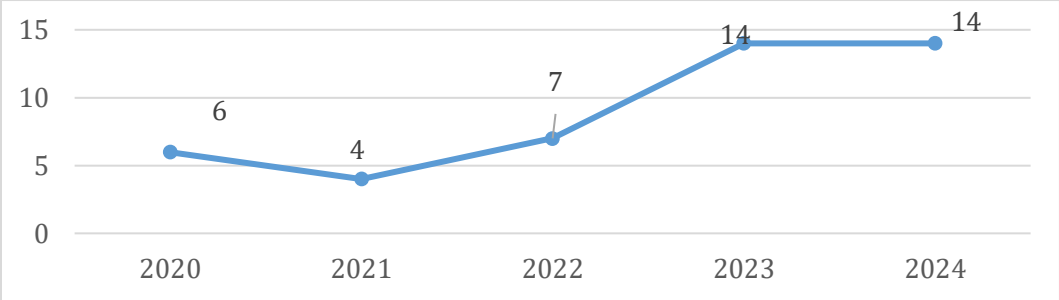
Sumber: BKD Kab. Banjarnegara

Grafik 2.119

Perkembangan Persentase Pelanggaran Pegawai di Kabupaten Banjarnegara 2020-2024

3.3. Jumlah Temuan BPK RI

Jumlah Temuan BPK RI di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 cenderung fluktuatif. Adanya peningkatan temuan BPK RI dari tahun 2022 hingga 2024 menjadi catatan untuk terus dilakukan perbaikan untuk dapat menurunkan angka temuan BPK RI tersebut.



Sumber: Inspektorat Kab. Banjarnegara

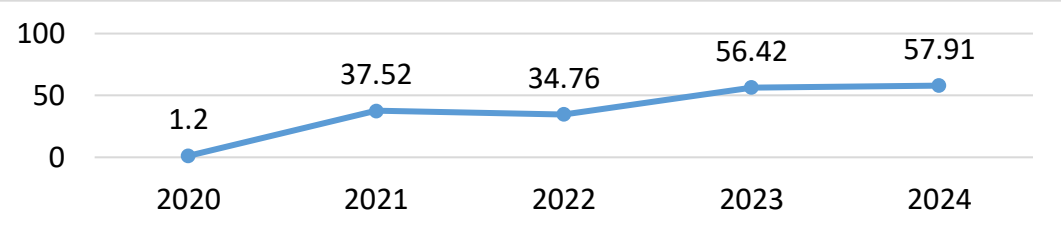
Grafik 2.120

Perkembangan Jumlah Temuan BPK RI di Kab. Banjarnegara 2020-2024

4. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

4.1. Persentase ASN Mengikuti Diklat Formal

Persentase ASN Mengikuti Diklat Formal di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 terus mengalami peningkatan persentase. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan kegiatan orientasi PPPK untuk 1.300 orang, pengiriman PKN 4 orang, PKA 6 Orang, Latsar 3 orang, dan terdapat 108 orang mengikuti diklat teknis/fungsional.



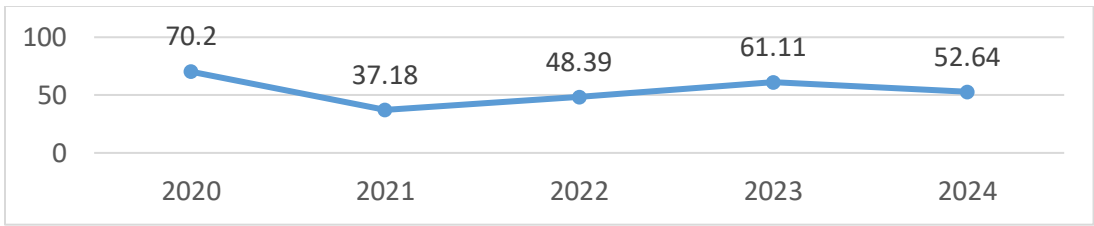
Sumber: BKD Kab. Banjarnegara

Grafik 2.121

Perkembangan Persentase ASN Mengikuti Diklat Formal di Kabupaten Banjarnegara 2020-2024

4.2. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat Struktural

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat Struktural di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2024, terjadi penurunan persentase dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya promosi jabatan struktural sehingga terdapat 13 pejabat eselon II, 38 pejabat eselon III, dan 155 pejabat eselon IV yang belum melaksanakan Diklatpim.



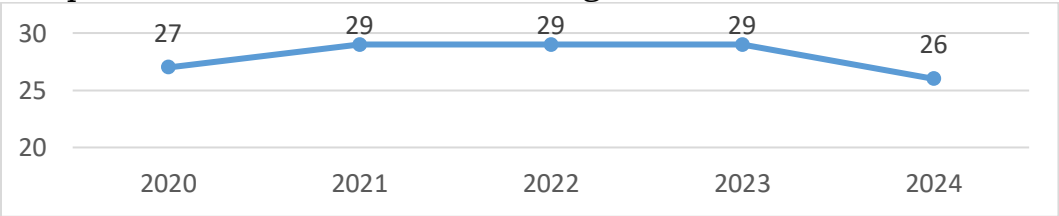
Sumber: BKD Kab. Banjarnegara

Grafik 2.122

Perkembangan Persentase ASN Mengikuti Diklat Struktural di Kabupaten Banjarnegara 2020-2024

4.3. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2024, dari 29 JPT baru terisi 26 JPT. Hal ini disebabkan hasil seleksi terbuka yang telah dilaksanakan belum mendapatkan izin pelantikan dari Menteri Dalam Negeri.



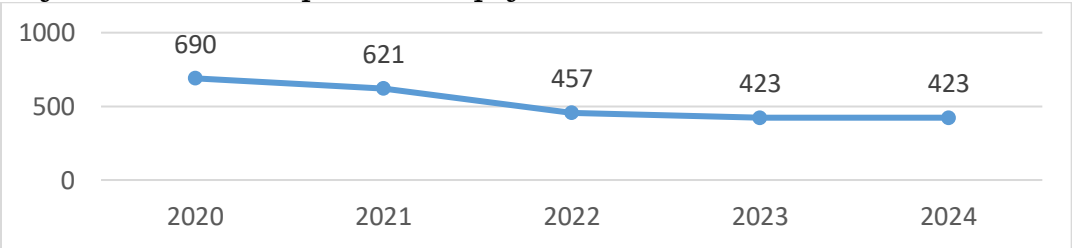
Sumber: BKD Kab. Banjarnegara

Grafik 2.12

Perkembangan Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Banjarnegara 2020-2024

4.4. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah

Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 cenderung menurun. Pada tahun 2024 dari 456 JA, baru terisi 423 JA. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut terdapat ASN yang telah memasuki masa pensiun dan terjadi mutasi maupun rotasi pejabat.



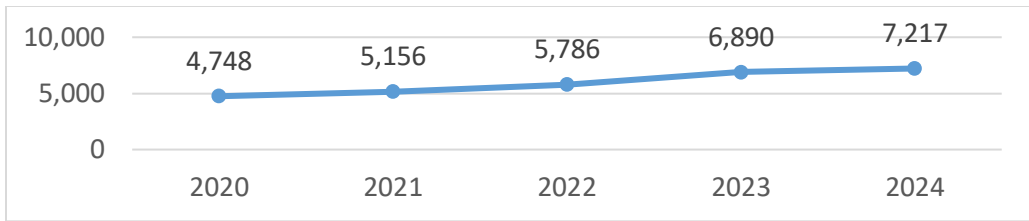
Sumber: BKD Kab. Banjarnegara

Grafik 2.124

Perkembangan Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Banjarnegara 2020-2024

4.5. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah

Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah kabupaten banjarnegara sebesar 7.217 JFT meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan adanya pengangkatan jabatan PPPK dalam jabatan fungsional.



Sumber: BKD Kab. Banjarnegara

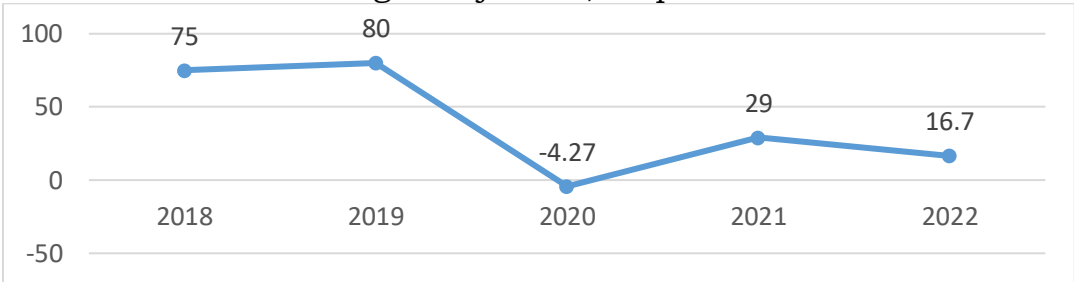
Grafik 2.125

Perkembangan Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

5. Penelitian dan pengembangan

5.1. Persentase peningkatan jumlah penelitian dan inovasi yang terjaring.

Presentase peningkatan jumlah penelitian dan inovasi yang terjaring di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2018-2022 cenderung fluktuatif dari tahun 2018 sebesar 75%, meningkat menjadi 80% pada tahun 2019, kemudian menurun tajam menjadi minus (4,27) pada tahun 2020 dan sedikit meningkat menjadi 29% pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19 namun menurun lagi menjadi 16,7% pada tahun 2022.



Sumber: Baperlitbang Kab. Banjarnegara

Grafik 2.126

Perkembangan Persentase Peningkatan Jumlah Penelitian dan Inovasi yang Terjaring di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2022

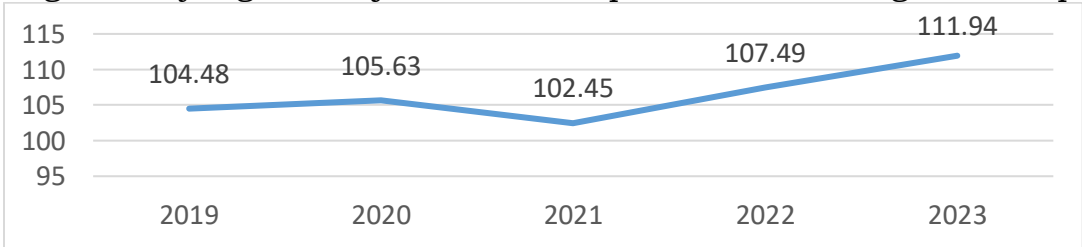
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Daya saing daerah pada bagian fokus kemampuan ekonomi daerah dapat dijelaskan melalui indikator sebagai berikut:

2.1.4.1.1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk yang mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP menunjukkan perbandingan antaran indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB). Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. NTP di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2019-2023 menunjukkan trend meningkat meskipun sempat menurun pada tahun 2021. Penurunan tersebut masih berada di atas angka 100 yang menunjukkan bahwa petani masih mengalami surplus.

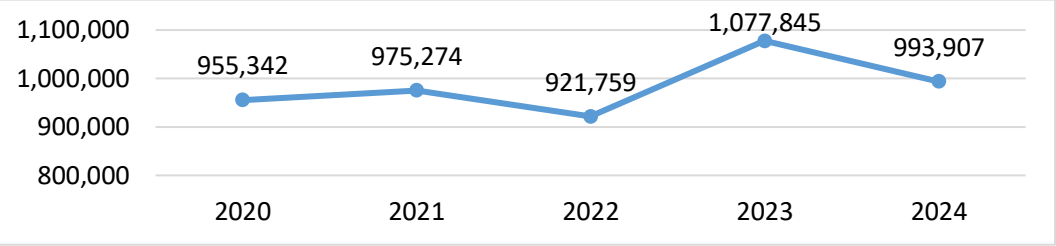


Sumber: Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara
Grafik 2.127

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

2.1.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dapat berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 993.907.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah
Grafik 2.128

Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.1.4.1.3. Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan (pangan) dan pengeluaran non pangan seperti sandang, papan, jasa, elektronik, kesehatan, dan pendidikan. Persentase pengeluaran non pangan yang tinggi menunjukkan kesejahteraan penduduk yang tinggi. Pengeluaran konsumsi masyarakat Kabupaten Banjarnegara selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada 4 tahun terakhir, konsumsi non pangan lebih kecil dibanding konsumsi pangan. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang masih dalam taraf rendah. Namun, dari tahun 2022 hingga 2023 persentase pengeluaran konsumsi non pangan terus mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjarnegara semakin membaik.

Sementara di tahun 2024, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena baik di komoditas pangan maupun non pangan banyak mengalami penurunan pengeluaran. Pada pengeluaran pangan di 2024 hanya komoditas padi-padian, bahan minuman dan buah-buahan yang meningkat dibanding tahun 2023 sementara komoditas lain mengalami penurunan. Adapun pada pengeluaran non pangan di 2024 hanya komoditas pakaian, alas kaki, dan tutup kepala serta keperluan pesta dan upacara/ kenduri, sedangkan komoditas lainnya menurun.

Tabel 2. 32
Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Per Kapita Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Non Pangan	50,75	47,9	46,92	48,25	45,63
Pangan	49,25	52,1	53,08	51,75	54,37

Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur

Daya saing daerah pada bagian fokus fasilitas wilayah infrastruktur menggambarkan ketersediaan fasilitas fisik wilayah Kabupaten Banjarnegara seperti jalan, transportasi, akses air minum, dan lain sebagainya yang menunjang aktivitas masyarakat dalam meningkatkan perekonomian yang

menyeluruh dan berdaya saing. Ketersediaan fasilitas infrastruktur dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 33

Kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	80,17%	81,23%	76,17%	72,17%	55,27%
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak	85,54%	82,61%	89,21%	87,56%	91,75%
3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	46,25%	40,75%	51,66%	46,09%	52,40%
4	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	47,48%	53,54%	62,44%	62,69%	68,11%
5	Jumlah pelanggan listrik	259.194	271.309	279.723	289.402	298.319

Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara
BPS Provinsi Jawa Tengah

Dapat diamati pada tabel di atas, terutama pada tahun terakhir (2024) hanya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik yang mengalami penurunan. Panjang jalan Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2024 adalah 885,800 km dengan jalan kondisi baik adalah 489,630 km (55,27 %).

Penuruna kondisi diantaranya disebabkan oleh kondisi cuaca ekstrim sehingga merusak struktur tanah dan aspal, serta kontur tanah yang labil pada lokasi jalan juga berpengaruh terhadap kerusakan jalan

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Kejahatan yang dilaporkan di Polres Banjarnegara

Berdasarkan data tahun 2024, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah total kejahatan yang dilaporkan di Polres Banjarnegara. Namun yang menarik, meskipun total kejahatan menurun, tingkat penyelesaian kasus juga mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun beban kerja polisi berkurang dari segi kuantitas kasus, efektivitas penyelesaian kasus justru menurun, yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kompleksitas kasus yang meningkat, keterbatasan sumber daya investigasi, atau adanya perubahan dalam metode penanganan kasus yang memerlukan waktu lebih lama untuk diselesaikan.

Tabel 2. 34

Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Polres Banjarnegara Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>)	Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>)	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>)
2020	205	153	22
2021	169	147	0
2022	178	124	0

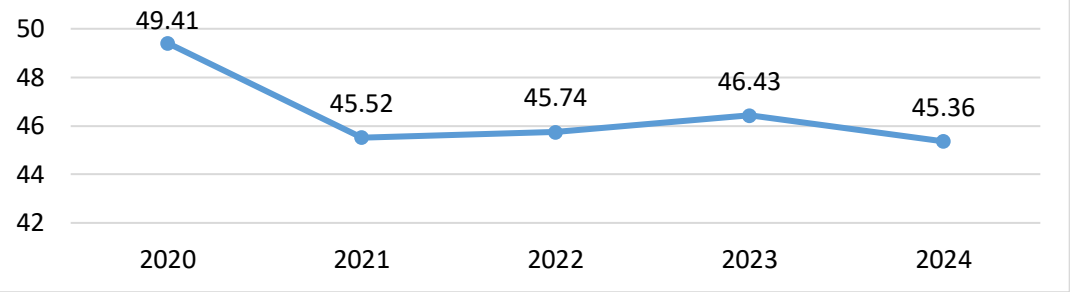
2023	873	832	96
2024	756	642	72

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Banjarnegara

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2024 rasio ketergantungan sebesar 45,36% hal ini menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Banjarnegara harus menanggung 45 orang penduduk yang non produktif. Kondisi tahun 2024 jauh lebih baik karena semakin rendah kelompok non produktif yang yang ditanggung dibanding pada tahun sebelumnya. Tanggungan ini dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun, dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Garfik 2.129

Perkembangan Rasio Ketergantungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.2 Realisasi RPD dan Evaluasi Program RKPD Tahun 2024

2.2.1 Realisasi RPD sampai semester 2 Tahun 2024

Evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk memberi gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

Pada RPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026 telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama yang akan menjadi dasar evaluasi kinerja RKPD setiap semester. Dalam melakukan penilaian capaian kinerja digunakan interpretasi pengukuran dengan skala interval nilai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 35

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria	Keterangan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
76% ≤ 90%	Tinggi	T
66% ≤ 75%	Sedang	S
51% ≤ 65%	Rendah	R
≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Dalam RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 terdapat 25 (dua puluh lima) indikator kinerja utama (IKU) yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Sampai dengan akhir tahun 2024 dari 25 indikator, sebanyak 20 indikator yang telah mencapai kriteria sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan daerah dan mencerminkan kinerja positif dari pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara. Capaian indikator kinerja utama (IKU) semester 2 tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 36
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD Th 2024	Status	OPD
					Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	75,2	74,3	74,2	74,30	100,13	ST	Dinsos P P P A
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	<4,5	6,26	<4,75	5,57	-12,51	SR	Dis naker P MPTSP
3	Indeks Gini	Angka	0,35	0,376	0,36	0,357	102	ST	Baperlitbang
4	Indeks Ketimpangan Williamson	Angka	0,35	0,572	0,4	0,60*	57,14	R	Baperlitbang
5	Laju Inflasi	%	3±1	2,61	3±1	1,28	136	ST	Baperlitbang
6	Nilai Sakip	Huruf	B	B	B	B	100	ST	Bagian Organisasi
7	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100	ST	B P P KAD
8	Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	86,00	84,05	85	85,19	100,22	ST	Bagian Organisasi
9	Menurunnya Angka Kematian Neonatal	Per 1000 KH	8,9	10,2	10	9,3	107	ST	Dinkes
10	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,08	74,34	74,68	74,70	100,13	ST	Baperlitbang
11	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	150	125,6	19 kasus	16 kasus	115,8	ST	Dinkes
12	Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	11,9	13,09	12,3	12,1	101,26	ST	Dinkes
13	Prevalensi Stunting	%	16	17,46	18	17,08	105,3	ST	Dinkes
14	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,69	11,81	11,66	11,83	101,46	ST	Baperlitbang
15	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,01	6,84	6,85	6,87	100,29	ST	Baperlitbang
16	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	88	88	84	89,07	106	ST	DP P KP LH
17	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	0,2	8,3	0,2	11,47	56,35	R	Dinsos-PPPA

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD Th 2024 (%)	Status	OPD
					Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
18	Indeks Kebudayaan	Angka	71	NA	NA	NA	NA		Disparbud
19	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	4	14,77	1,5	48,04	3202,67	ST	Disnaker PMPTSP
20	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,30	3,32	3,1	3,05	98,39	ST	Baperlitbang
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	69	61,52	68,5	65,76	96%	ST	DPKPLH
22	Indeks Kemahalan Konstruksi	Angka	91	NA	NA	NA	NA		DPUPR
C	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR								
	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
23	Persentase penanganan konflik sosial	%	100	100	100	100	100	ST	Bakesbangpol
24	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	44	51,28	42	54,35	129,40	ST	BPBD
25	Persentase Penggunaan Hak Pilih :								
	Pilkades	%	0	0	80,5	0	NA		Bakesbangpol
	Pilgub	%	0	0	75	67,86	90,48%	T	Bakesbangpol
	Pilbup	%	0	0	75	67,86	90,48%	T	Bakesbangpol
	Pileg	%	0	0	75	79,57	106,09%	ST	Bakesbangpol
	Pilpres	%	0	0	77	79,57	103,34%	ST	Bakesbangpol

2.2.2 Evaluasi Program RKPD Tahun 2024

➤ Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan 21 indikator kinerja pembangunan daerah. Secara rinci kinerja pembangunan urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 37
Capaian Indikator Urusan Pendidikan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2024 (%)	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	%	85	77,58	75	92,55	123,40%	ST	Dindikpora
2	Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	90	77,51	88	97,05	110,28%	ST	Dindikpora
3	PKBM terakreditasi	%	100	95	85	81,82	96,26%	ST	Dindikpora

4	Persentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kurikulum muatan lokal	%	50	15	30	60,0	200%	ST	Dindikpora
5	Guru tersertifikasi	%	70	57,74	64	51,32	80,19%	T	Dindikpora
6	Ratio Guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	10	5,38	8	5,63	70,38%	S	Dindikpora
7	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	100	89,75	100	93,72	93,72%	ST	Dindikpora
8	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	100	87,99	100	94,89	94,89%	ST	Dindikpora
9	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	100	80,59	65,9	87,34	132,53%	ST	Dindikpora
10	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	72	65,17	48,63	78,1	160,6%	ST	Dindikpora
11	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	%	70	80,69	76,4	90,4	118,32%	ST	Dindikpora
12	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	%	70	56,74	72,23	88,45	122,46%	ST	Dindikpora
13	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	73,92	72,28	73,9	72,19	97,69%	ST	Dindikpora
14	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/DIV	%	82,05	93,42	82	88,67	108,13%	ST	Dindikpora
15	Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	%	3,27	8,38	3,23	7,54	233,44%	ST	Dindikpora
16	Iklim Keamanan Sekolah SMP	%	88,54	69,04	75,72	72,71	96,02%	ST	Dindikpora
17	Iklim Keamanan Sekolah SD	%	92,31	71,94	79,02	73,75	93,33%	ST	Dindikpora
18	Iklim Inklusivitas SMP	%	82,88	55,83	62,03	59,1	95,28%	ST	Dindikpora
19	Iklim Inklusivitas SD	%	84,04	57,34	63,54	56,27	88,56%	ST	Dindikpora
20	Iklim Kebhinekaan SD	%	96,26	72,19	75,89	74,21	97,79%	ST	Dindikpora
21	Iklim Kebhinekaan SMP	%	91,06	68,31	72,73	75,43	103,71%	ST	Dindikpora

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Berdasarkan evaluasi capaian indikator urusan pendidikan, terlihat adanya dinamika yang saling berkaitan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Tantangan utama masih terlihat dalam aspek sumber daya manusia pendidik. Rasio guru/jurnal sekolah pendidikan dasar hanya mencapai 70.38% dari target, mengindikasikan masih kurangnya tenaga pendidik di lapangan. Permasalahan ini berkaitan erat dengan kondisi guru PAUD dan SMP yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan sertifikat pendidik, dimana capaian guru bersertifikasi belum mencapai target yang ditetapkan. Dindikpora telah berupaya mengatasi hal ini melalui program kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan mendorong guru untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi.

Dalam aspek keamanan dan inklusivitas sekolah, masih ditemukan beberapa kendala. Banyak sekolah yang belum maksimal dalam menyusun program penanganan kekerasan dan belum memiliki tim pencegahan dan penanganan Kekerasan yang optimal. Hal ini tercermin dari capaian indikator iklim inklusivitas sekolah yang belum mencapai target, dengan beberapa sekolah belum memiliki program peningkatan iklim inklusivitas yang memadai.

2. Kesehatan

Kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan 54 indikator kinerja pembangunan daerah. Secara rinci pencapaian target kinerja indikator urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 38
Capaian Indikator urusan Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2024 (%)	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase puskesmas yang memenuhi kriteria sarana, prasarana, Alat Kesehatan sesuai standar peraturan perundang undangan yang berlaku	%	100	79	85	80	94,12%	ST	Dinkes
2	Persentase Puskesmas yang mengalami peningkatan IKS (Indeks Keluarga Sehat)	%	20	82.86	85	63	74,12%	S	Dinkes
3	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi	%	79	90	75	96	128%	ST	Dinkes
4	Persentase Rumah Sakit terakreditasi Paripurna	%	100	94	100	100	100%	ST	Dinkes
5	Persentase ketersediaan obat esensial	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinkes
6	Persentase ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) esensial	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinkes
7	Persentase alat kesehatan yang terkalibrasi	%	100	100	30	30	100%	ST	Dinkes

8	Persentase Desa/kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	10	19.4	23	25	108,70%	ST	Dinkes
9	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat Kesehatan	%	70	55	60	61	101,67%	ST	Dinkes
10	Persentase kesehatan kerja baik sektor formal maupun informal yang dibina	%	100	94	96	97	101,04%	ST	Dinkes
11	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang dibina	%	100	94	96	97	101,04%	ST	Dinkes
12	Persentase puskesmas mampu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinkes
13	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	90.4	100	96,4	96,40%	ST	Dinkes
14	Persentase Ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	99.5	100	98,6	98,60%	ST	Dinkes
15	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	99.1	100	92,6	92,60%	ST	Dinkes
16	Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	96.4	100	95,7	95,70%	ST	Dinkes
17	Persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	95.8	100	99	99,00%	ST	Dinkes
18	Prevalensi Gizi Buruk	%	<1	0.24	<1	0.32	333,3%	ST	Dinkes
19	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	97.7	100	100	100%	ST	Dinkes
20	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinkes
21	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinkes
22	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	90	100	95	95%	ST	Dinkes
23	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinkes
24	Persentase orang terduga TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	100	100	72	72%	S	Dinkes
25	Persentase orang yang resiko tertular HIV mendapat	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinkes

	pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

26	Persentase penderita Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (P2PTVZ) mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinkes
27	Persentase penderita Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML) mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinkes
28	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	98.6	100	99,6	99,60%	ST	Dinkes
29	Persentase anak sekolah SD atau sederajat yang mendapatkan vaksin Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	%	100	96.1	98	98	100%	ST	Dinkes
30	Cakupan Desa atau Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi Kurang dari 24 Jam	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinkes
31	Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate (non polio) < 15 tahun	Kasus	5	14	15	18	120%	ST	Dinkes
32	Persentase Bencana dan Krisis Kesehatan yang ditangani paska penerapan tanggap darurat sesuai standar	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinkes
33	Persentase calon jemaah haji mendapat pelayanan Kesehatan haji sesuai standar	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinkes
34	Persentase Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas	%	100	97	100	100	100%	ST	Dinkes
35	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	%	9,5	13.1	14,5	17,1	117,93%	ST	Dinkes
36	Persentase ibu hamil anemia	%	6	9.1	11	12,8	116,36%	ST	Dinkes
37	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar	Hari	100	100	100	100	100%	ST	Dinkes
38	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Hari	100	100	100	100	100%	ST	Dinkes
39	BOR (Bed Occupancy Rate)/ Pemanfaatan tempat tidur rawat inap	Kali	65	61,33	65	71,9	115,48%	ST	RSUD Hj. Anna Lasmanah
40	LOS (Average Length of Stay/Av LOS)/Rata-rata hari perawatan pasien	Hari	3	2,55	3	2,8	93,33%	ST	RSUD Hj. Anna Lasmanah

41	TOI (Turn Over Interval)/Rata-rata tempat tidur tidak digunakan	Hari	3	1,8	3	1,1	163,33%	ST	RSUD Hj. Anna Lasmanah
42	BTO (Bed Turn Over)/Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	55	80	55	95,3	173,27%	ST	Dinkes
43	GDR (Gross Death Rate)/Angka kematian untuk tiap-tiap 1000 pasien	‰	25	19,24	≤25	15,19	100%	ST	Dinkes
44	NDR (Net Death Rate)/Angka kematian setelah perawatan 48 jam per 1000 pasien	‰	15	8,62	≤15	66,70	100%	ST	Dinkes
45	Persentase terpenuhinya puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	80	65.7	70	63	90%	T	Dinkes
46	Persentase puskesmas yang memiliki dokter	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinkes
47	Persentase Rumah Sakit yang memiliki dokter spesialis dasar dan spesialis lainnya	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinkes
48	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinkes
49	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinkes
50	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memperoleh Sertifikat Laik syarat Kesehatan	%	55	46	47	50	106,38%	ST	Dinkes
51	Persentase Industri Pangan Rumah Tangga yang mendapat rekomendasi izin edar PIRT	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinkes
52	Persentase desa/ kelurahan siaga aktif strata mandiri	%	60	43	40	48	120%	ST	Dinkes
53	Persentase capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) rumah tangga strata utama-paripurna tingkat kabupaten	%	95	92	92	93	101,09%	ST	Dinkes
54	Persentase capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) institusi pendidikan	%	95	97.9	91	98	107,69%	ST	Dinkes

Sumber: Dinkes dan RSUD Hj. Anna Lasmanah Kab. Banjarnegara

Keterangan:

91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
76% ≤ 90%	: Tinggi	T
66% ≤ 75%	: Sedang	S

51% ≤ 65%	: Rendah	R
≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Berdasarkan evaluasi tahun 2024, dari 54 indikator kesehatan, terdapat 13 indikator yang belum mencapai target. Tercatat 1.447 kasus komplikasi neonatal dengan penyebab utama bayi berat lahir rendah. Pelayanan kesehatan balita belum mencapai target karena kurang optimalnya sweeping balita oleh puskesmas. Pelayanan kesehatan lansia mencapai 99% dari target 100%, dengan keterlibatan lansia laki-laki yang masih rendah. Partisipasi penduduk laki-laki usia 15-59 tahun dalam skrining kesehatan juga belum optimal. Meskipun jumlah terduga TB yang ditangani meningkat, target tidak tercapai karena Kemenkes menaikkan standar, dengan hanya 7 puskesmas memiliki test cepat molekuler. Masih ada satu desa yang belum mencapai Universal Child Immunization (UCI). Terjadi peningkatan kasus ibu hamil kurang energi kronis terutama pada kehamilan remaja, serta ibu hamil anemia yang masih di atas target. Dari segi tenaga kesehatan, baru 63% puskesmas yang memenuhi standar 9 jenis tenaga kesehatan, dengan 13 puskesmas masih kekurangan terutama dokter gigi, sanitarian, dan tenaga promosi kesehatan.

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 8 indikator kinerja pembangunan daerah. Data terperinci untuk capaian urusan ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 39
Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2024 (%)	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase luas area sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	80	76.07	76	76,27	100,36%	ST	DPUPR
2	Persentase jalan yang memiliki sistem drainase yang memadai	%	3.36	3.24	3,36	3,34	99,40%	ST	DPUPR
3	Persentase bangunan gedung negara asset daerah yang memenuhi standar teknis	%	14.96	11.33	11,56	14,67	126,90%	ST	DPUPR
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan berkualitas	%	80.75	72.17	80,25	55,270	68,88%	S	DPUPR
5	Persentase kegiatan pemenuhan kebutuhan penataan ruang	%	80	33.33	40	40	100%	ST	DPUPR
6	Persentase tersedianya penyedia jasa konstruksi yang bersertifikat	%	100	51,87	60	51,87	86,45%	T	DPUPR
	Nilai SAKIP DPUPR 2023	Nilai	BB	71,05					DPUPR
	Nilai IKM DPUPR 2024	Nilai	86	81,4	81,50	81,51	101,25		DPUPR

7	Persentase penduduk berakses air minum	%	100	96.76	100	96,86	97%	ST	DPKPLH
8	Persentase Kepala Keluarga Terlayani Pengelolaan Sistem Air Limbah	%	68,15	76.86	66,89	77,23	115%	ST	DPKPLH

Sumber: DPUPR dan DPKPLH Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Berdasarkan evaluasi capaian indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terlihat adanya variasi pencapaian yang signifikan antar indikator. Dalam hal infrastruktur irigasi, capaian sudah sesuai target dengan persentase luas area sawah yang terlayani irigasi mencapai 100.36%. Pencapaian ini sejalan dengan Surat Edaran Bersama Kemendagri dan Bappenas terkait penyelerasan Indikator Utama Pembangunan, dimana target akan ditingkatkan hingga mencapai angka 73 pada tahun 2045.

Namun, terdapat tantangan serius dalam pemeliharaan infrastruktur jalan, dimana persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan berkualitas hanya mencapai 68.88% dari target. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar. Permasalahan ini juga berhubungan dengan sistem drainase yang belum mencapai target (99.40%), menunjukkan perlunya penanganan terintegrasi antara kondisi jalan dan sistem drainasinya. Tantangan lain muncul dalam hal ketersediaan penyedia jasa konstruksi bersertifikat yang baru mencapai 86.45% dari target. Hal ini memerlukan perhatian khusus mengingat pentingnya tenaga konstruksi berkualitas dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Upaya yang dilakukan termasuk penyediaan fasilitas pelatihan dan sertifikasi yang menjadi tupoksi Pemkab sesuai PP No. 14 Tahun 2021.

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Secara rinci kinerja Pembangunan urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 40

Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2024 (%)	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase penanganan rumah korban bencana	%	100	100	100	100	100%	ST	DPKPLH
2	Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	88	88	84	89,07	106,04%	ST	DPKPLH
3	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	%	100	47.6	55,35	55	S99,37%	ST	DPKPLH

4	Persentase Perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	%	66,68	50	59,89	59,89	100%	ST	DPKPLH
5	Persentase Lingkungan Aman dan Sehat yang didukung PSU	%	40	12	20	45,45	227%	ST	DPKPLH

Sumber: DPKPLH Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Keberhasilan penanganan rumah korban bencana yang mencapai 100% melalui penyiapan lahan relokasi di Desa Clapar dan Aribaya telah berkontribusi pada peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni yang mencapai 106,04%. Capaian ini diperkuat dengan dukungan berbagai sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, Provinsi, BSPS, DAK, dan CSR yang berhasil merealisasikan 1.914 unit perbaikan RTLH, menurunkan jumlah RTLH dari 30.418 unit menjadi 28.918 unit.

Namun, tantangan muncul dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang belum mencapai target, meskipun perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh telah mencapai 100%. Kondisi ini mempengaruhi efektivitas pembangunan PSU perumahan yang justru menunjukkan capaian signifikan sebesar 227%. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan pembangunan, dimana fokus pembangunan PSU dan perbaikan rumah di luar kawasan kumuh lebih dominan dibandingkan penanganan kawasan kumuh itu sendiri.

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilakukan oleh Satpol PP dengan 14 indikator kinerja pembangunan daerah.

Tabel 2. 41
Ketenraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2024 (%)	Statu s	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase penanganan gangguan trantibum linmas	%	100	100	100	100	100%	ST	Satpol PP
2	Cakupan pemberdayaan perlindungan masyarakat (satlinmas)	%	17,41	31,03	9,47	82,07	866,63%	ST	Satpol PP
3	Cakupan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP	%	100	100	100	100	100%	ST	Satpol PP
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100%	ST	Satpol PP
5	Persentase penanganan	%	100	100	100	100	100%	ST	Satpol PP

	pelanggaran perda/perkada								
6	Persentase PPNS yang Aktif	%	57,14	23	42,85	23,08	53,86%	R	Satpol PP
7	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	89,66	100	100	100%	ST	Satpol PP
8	Persentase Cakupan Pelayanan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100	100	100	100	100%	ST	Satpol PP
9	Persentase Kecamatan Memiliki Pos Damkar	%	30	15	15	15	100%	ST	Satpol PP
10	Persentase terbentuknya relawan pemadam kebakaran (Redkar) di desa/kelurahan	%	100	35.25	35,25	35,25	100%	ST	Satpol PP
11	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	44	50,79	42	54,35	129,40 %	ST	BPBD
12	Presentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0,56	0,39	8,96	10,85	121,09 %	ST	BPBD
13	Presentase warga negara yang mendapatkan layanan kedaruratan bencana	%	100	100	100	100	100%	ST	BPBD
14	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan pasca bencana	%	100	100	100	100	100%	ST	BPBD

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤		
	100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤		
	90%	: Tinggi	T
	66% ≤		
	75%	: Sedang	S
	51% ≤		
	65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Meski sebagian besar indikator mencapai target, terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian khusus. Persentase PPNS yang aktif hanya mencapai 53,86% dari target, mengindikasikan perlunya evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Kemudian pembentukan relawan pemadam kebakaran (Redkar) di desa/kelurahan yang masih terbatas pada 35,25%, meskipun telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan penyediaan anggaran untuk pembentukan Redkar.

Pada aspek kebencanaan yang dikelola BPBD, terlihat hasil yang positif dengan persentase desa tangguh bencana mencapai 129,4% dan layanan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai 121,09%. Keberhasilan ini didukung oleh program penguatan kapasitas kawasan dan antusiasme masyarakat dalam mengikuti pelatihan DESTANA (Desa Tangguh Bencana). Pelayanan kedaruratan dan pasca bencana juga konsisten mencapai target 100%, menunjukkan kesiapan sistem penanganan bencana yang telah terstruktur dengan baik, didukung MoU dengan berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan layanan.

6. Sosial

Kinerja penyelenggaraan urusan sosial dilakukan oleh Dinsos PPPA dengan 8 indikator kinerja pembangunan daerah. Secara rinci kinerja pembangunan urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 42
Capaian Indikator Urusan Sosial

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2024 (%)	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial	%	15,19	13,76	14,17	24,83	175,23	ST	Dinsos PPPA
2	Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	%	100	102,55	100	119,47	119,47	ST	Dinsos PPPA
3	Persentase rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	%	100	115,55	100	165,74	165,74	ST	Dinsos PPPA
4	Persentase rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	%	100	111,58	100	89,05	89,05	ST	Dinsos PPPA
5	Persentase rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	%	100	117,95	100	123,86	123,86	ST	Dinsos PPPA
6	Persentase keluarga miskin dan rentan yang diintervensi dengan program bantuan sosial	%	54,50	48,31	53	44,78	84,49	ST	Dinsos PPPA
7	Persentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	ST	Dinsos PPPA
8	Persentase taman makan pahlawan dan monumen yang terpelihara dengan baik	%	100	100	100	100	100	ST	Dinsos PPPA

Sumber: Dinsos PPPA Kab. Banjarnegara

Keterangan:

91% ≤ 100%
76% ≤ 90%

: Sangat Tinggi
: Tinggi

ST
T

66% ≤ 75%	: Sedang	S
51% ≤ 65%	: Rendah	R
≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Terlihat terjadi peningkatan signifikan dalam pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan capaian 175.23%, jauh melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini berdampak langsung pada tingginya capaian rehabilitasi sosial, khususnya untuk penyandang disabilitas (119.47%) dan anak terlantar (165.74%), yang menunjukkan efektivitas peran PSKS dalam mendukung program-program kesejahteraan sosial di masyarakat.

Namun, di tengah keberhasilan tersebut, masih terdapat kesenjangan dalam penanganan kelompok rentan, tercermin dari capaian rehabilitasi sosial lanjut usia yang hanya mencapai 89.05% dan intervensi keluarga miskin sebesar 84.49%. Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam menjangkau kelompok sasaran, baik dari aspek pendataan maupun realisasi bantuan. Misalnya, dalam intervensi keluarga miskin dan rentan, kendala dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat kelurahan menjadi faktor yang berpengaruh, sehingga menyebabkan angka capaian masih di bawah ekspektasi meskipun penyaluran bantuan seperti PKH tetap berjalan.

➤ **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

1. **Tenaga kerja**

Kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja dilakukan oleh Disnaker PMPTSP dengan 4 indikator kinerja pembangunan daerah. Secara rinci kinerja pembangunan urusan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 43
Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja	%	65,04	100	100	100	100%	ST	Disnaker PMPTSP
2	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	7,6	33,7	7,6	14,6	192,11%	ST	Disnaker PMPTSP
3	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	30	33,01	29,3	55,96	190,99%	ST	Disnaker PMPTSP
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan BPJS Ketenagakerjaan)	%	76	81,82	67	66,67	99,51%	ST	Disnaker PMPTSP

Sumber: Disnaker PMPTSP Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing, terlihat dari capaian pelatihan berbasis kompetensi yang mencapai 192,11% dari target. Pelatihan ini membekali tenaga kerja dengan keahlian sesuai kebutuhan industri, yang berkontribusi langsung pada tingginya angka penempatan tenaga kerja, mencapai 190,99%. Sistem pencatatan tenaga kerja melalui layanan AK1 juga berperan dalam mempermudah penempatan tenaga kerja di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Dengan semakin banyaknya tenaga kerja terampil, peluang mereka untuk terserap di dunia kerja semakin besar.

Namun, tantangan masih ada dalam penerapan tata kelola kerja yang layak oleh perusahaan. Persentase perusahaan yang menerapkan prinsip ketenagakerjaan yang baik mencapai 99,51% dari target, menunjukkan masih adanya perusahaan yang belum sepenuhnya mematuhi regulasi terkait pengupahan, peraturan kerja, dan perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ketidakseimbangan ini berpotensi mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja serta menciptakan kondisi kerja yang kurang ideal.

2. Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak

Kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan oleh Dinsos PPPA dengan 7 indikator kinerja pembangunan daerah. Secara rinci kinerja pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 44

Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2024 (%)	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Anggaran responsif gender dalam APBD	%	1,39	2,287	1,37	1,89	137,96%	ST	Dinsos PPPA
2	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinsos PPPA
3	Persentase Kelompok Perempuan Rentan yang Terbentuk	%	38,13	27,34	30,94	30,94	100%	ST	Dinsos PPPA
4	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB	%	50,00	7,91	16,19	14,03	86,66%	T	Dinsos PPPA
5	Persentase ketersediaan data	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinsos PPPA

	berbasis gender di perangkat daerah								
6	Persentase Desa dan Kelurahan Layak Anak	%	31,29	27,76	28,42	31,29	110,10%	ST	Dinsos PPPA
7	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinsos PPPA

Sumber: Dinsos PPPA Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Berdasarkan evaluasi capaian indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RKPD 2024, terjadi peningkatan signifikan pada anggaran responsif gender dalam APBD yang mencapai 137.96%, menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Keberhasilan ini mendukung terbentuknya 10 kelompok perempuan rentan dengan capaian 100% yang tersebar di lokasi kemiskinan ekstrem, dimana kelompok ini telah difasilitasi dengan pelatihan pengolahan makanan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

Dalam aspek perlindungan, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan kinerja optimal dengan capaian 100%, didukung oleh ketersediaan data berbasis gender yang akurat melalui aplikasi SIGA di seluruh OPD. Pencapaian ini sejalan dengan pengembangan Desa dan Kelurahan Layak Anak yang melampaui target dengan capaian 110.10%, tersebar di 5 kecamatan dengan total 10 desa.

3. Pangan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Pangan diimplementasikan oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan 4 indikator kinerja program.

Tabel 2. 45
Capaian Indikator Urusan Pangan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2024 (%)	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	%	100	100	100	100	100%	ST	Distankan dan KP KP

2	Persentase tercukupinya kebutuhan pangan daerah	%	100	100	100	100	100%	ST	Distankan dan KP KP
3	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	100	100	100	0	0	SR	Distankan dan KP KP
4	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	85	89.33	100	97,67	97,67%	ST	Distankan dan KP KP

Sumber: Distankan dan KP KP Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤		
	100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤		
	90%	: Tinggi	T
	66% ≤		
	75%	: Sedang	S
	51% ≤		
	65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Terjadi peningkatan infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang didukung dengan tersedianya bantuan gabah untuk lumbung yang dikelola oleh kelompok tani di Kabupaten Banjarnegara dan terlaksananya kegiatan padat karya pangan. Selain itu, ketercukupan kebutuhan pangan daerah menunjukkan ketercapaian 100% yang didukung melalui ketersediaan cadangan pangan, kampanye pangan lokal, pelaksanaan *event* promosi, dan pelaksanaan pemanfaatan pekarangan.

Ketersediaan pangan ini didukung dengan pencapaian produk pertanian segar yang memenuhi keamanan dan mutu pangan yang sesuai dengan standar kelayakan. Namun, pada tahun 2024 pelaksanaan penanganan kerawanan pangan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran yang tidak mendukung terlaksananya program tersebut.

4. Pertanian

Kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Pertanian diimplementasikan oleh BPPKAD dengan 1 indikator kinerja program.

Tabel 2. 46
Capaian Indikator Urusan Pertanian

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2024 (%)	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase luas tanah pemkab yang bersertifikat	%	100	68,08	70	71,30	101,86%	ST	BPPKAD

Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤		
	100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤		
	90%	: Tinggi	T
	66% ≤		
	75%	: Sedang	S

51% ≤ 65%	: Rendah	R
≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pertanahan tahun 2024, terjadi peningkatan terhadap luas tanah yang bersertifikat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, 106embag telah terdapat 71,30% tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang telah bersertifikat atau sekitar 6.931.120 m² dari total luas tanah Pemkab seluas 9.720.339 m². Saat ini, proses persertifikatan tanah masih terus dilakukan dan dianggarkan setiap tahunnya.

5. Lingkungan hidup

Kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang lingkungan hidup diimplementasikan oleh DPKPLH dengan 10 indikator kinerja program.

Tabel 2. 47
Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2024 (%)	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase dokumen lingkungan hidup yang tersusun	%	100	80	100	100	100%	ST	DPKPLH
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	82,9	89.36	82,90	92	111%	ST	DPKPLH
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	58,85	42.68	58,53	51,24	88%	T	DPKPLH
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	65,17	42.39	65,17	42,18	65%	S	DPKPLH
5	Persentase Luasan RTH yang Tertangani	%	19,5	17.8	18,5	20	108%	ST	DPKPLH
6	Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan yang dikeluarkan	%	100	100	100	100	100%	ST	DPKPLH
7	Persentase masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengendalian lingkungan hidup	%	80	70	60	60	100%	ST	DPKPLH
8	Persentase masyarakat/lembaga sasaran yang mendapatkan sosialisasi/pembinaan untuk penghargaan lingkungan hidup	%	100	70	75	75	100%	ST	DPKPLH
9	Persentase jumlah aduan lingkungan yang ditangani	%	100	100	100	100	100%	ST	DPKPLH
10	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	34	77.64	33,5	72,32	216%	ST	DPKPLH

Sumber: DPKPLH Kab. Banjarnegara

Keterangan:

91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
76% ≤ 90%	: Tinggi	T
66% ≤ 75%	: Sedang	S
51% ≤ 65%	: Rendah	R

≤ 50%

: Sangat Rendah

SR

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, dari 10 indikator urusan lingkungan hidup sebanyak 8 indikator telah sesuai target, 1 indikator belum sesuai target yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) (88%) dan 1 indikator tidak tercapai yaitu indeks kualitas tutupan lahan (65%). Tersusunnya dokumen KLHS dengan capaian 100% telah menjadi fondasi penting dalam pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Hal ini terbukti efektif mendorong keberhasilan indikator lainnya, seperti terlihat dari pencapaian indeks kualitas udara yang melampaui target (111%) melalui pemantauan sistematis menggunakan metode *Passive Sampler* di empat lokasi strategis.

Namun, terdapat tantangan dalam pengelolaan lingkungan yang tercermin dari capaian indeks kualitas air yang hanya mencapai 88% dan indeks kualitas tutupan lahan yang lebih rendah di angka 65%. Kedua indikator ini memiliki keterkaitan erat, dimana penurunan kualitas tutupan lahan berdampak langsung pada kualitas air. Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan data yang belum terverifikasi serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal, terutama dalam pengelolaan lahan pertanian dan daerah aliran sungai.

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan oleh Dindukcapil dengan 5 indikator kinerja pembangunan daerah.

Tabel 2. 48
Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2024 (%)	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,3	98,34	99,3	99,982	100,69%	ST	Dindukcapi 1
2	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	44	58,73	42	75,246	179,16%	ST	Dindukcapi 1
3	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	97	98,68	97	99,610	102,69%	ST	Dindukcapi 1
4	Persentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan	%	100	100	100	100	100%	ST	Dindukcapi 1
5	Persentase data kependudukan yang ditampilkan dalam profil kependudukan	%	100	100	100	100	100%	ST	Dindukcapi 1

Sumber: Dindukcapil Kab. Banjarnegara

Keterangan: 91% ≤

100%

: Sangat Tinggi

ST

76% ≤ 90%	: Tinggi	T
66% ≤ 75%	: Sedang	S
51% ≤ 65%	: Rendah	R
≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Cakupan penerbitan KTP, penerbitan KIA, dan penerbitan akta kelahiran berada di atas target. Keberhasilan ini didukung oleh inovasi jemput bola perekaman KTP dan kerjasama dengan rumah sakit untuk penerbitan KIA bagi bayi baru lahir, serta penggunaan aplikasi Aksi Pandusaluring untuk pembuatan akta kelahiran di tingkat desa. Efektivitas pengelolaan data kependudukan tercermin dari pencapaian 100% dalam pemanfaatan informasi kependudukan oleh lembaga pengguna dan penyajian data dalam profil kependudukan. Hal ini menunjukkan sinergi yang baik antara sistem pendataan dan pemanfaatannya, dimana fasilitasi terhadap 20 lembaga pengguna (termasuk 3 perpanjangan PKS dan 17 pengajuan baru) telah mengoptimalkan penggunaan data kependudukan untuk penyusunan kebijakan dan anggaran. Ketersediaan data yang lebih cepat dari Dukcapil pusat juga berkontribusi pada penyajian profil kependudukan yang tepat waktu, menciptakan sistem administrasi kependudukan yang responsif dan efisien.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaraan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dimplementasikan oleh Dispermades PPKB dengan 5 indikator kinerja program.

Tabel 2. 49
Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2024 (%)	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	38,5	37,02	37,5	38,65	103,07%	ST	Disperma des PPKB
2	Jumlah kerjasama antar desa	Kerjasama	7	4	5	5	100%	ST	Disperma des PPKB
3	Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa	%	100	100	100	100	100%	ST	Disperma des PPKB
4	Jumlah BUMDes yang berkembang	Unit	9	18	7	45	642,86%	ST	Disperma des PPKB

5	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat	%	60	45	50	98,12	196,24%	ST	Disperma des PPKB
---	---	---	----	----	----	-------	---------	----	-------------------

Sumber: Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Capaian kinerja pada bidang pemberdayaan masyarakat desa pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat ini juga didukung oleh peran lembaga kemasyarakatan yang turut aktif melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Adanya peningkatan swadaya masyarakat dan kepemimpinan desa yang semakin efektif menjadi faktor pendukung berkembangnya BUMDes di Kabupaten Banjarnegara, dimana tercatat terdapat 45 BUMDes dengan strata berkembang, 82 BUMDes dengan strata pemula, dan 189 BUMDes dengan strata perintis. Perkembangan BUMDes membuka peluang untuk melaksanakan kerjasama antar desa di kabupaten Banjarnegara.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, dari 7 indikator urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana semua target telah tercapai, sebagaimana dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 50
Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2024 (%)	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100%	ST	Disperma des PPKB
2	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang	Kerjasama	2	3	2	3	150%	ST	Disperma des PPKB

	melakukan pendidikan kependudukan								
3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	78,09	81,24	77,09	76,75	99,56%	ST	Disperma des PPKB
4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,90	6,52	6,94	3,64	147,55%	ST	Disperma des PPKB
5	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	34,08	34,98	33,08	36	108,83%	ST	Disperma des PPKB
6	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	10	4,53	14	4,77	165,53%	ST	Disperma des PPKB
7	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Per 1000 orang	21,46	9,09	22,06	9,51	117,45%	ST	Disperma des PPKB

Sumber: Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤		ST
	100%	: Sangat Tinggi	
	76% ≤		T
	90%	: Tinggi	
	66% ≤		S
	75%	: Sedang	
	51% ≤		R
	65%	: Rendah	
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Berdasarkan data kinerja pembangunan daerah pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Banjarnegara, terlihat adanya pencapaian yang positif dalam pengelolaan data dan implementasi program. Cakupan penyediaan data mikro keluarga mencapai 100% melalui aplikasi *new* SIGA BKKBN, menunjukkan komitmen kuat dalam membangun basis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini diperkuat dengan adanya kerjasama pendidikan kependudukan dengan berbagai SMA yang mencapai 150% dari target, mengindikasikan upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang kependudukan sejak usia sekolah.

9. Perhubungan

Kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan 4 indikator kinerja pembangunan daerah.

Tabel 2. 51

Capaian Indikator Urusan Perhubungan

ST	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode 2023	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		RKP s/d Semester 2 Th 2024 (%)	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pemenuhan sarpras jalan di jalan kabupaten	%	40,5	40,01	39,50	46,94	118,84%	ST	Dinhub
2	Persentase cakupan pelayanan parkir	%	88	81,95	84	80,76	96,14%	ST	Dinhub
3	Persentase pertumbuhan jalur trayek	%	4	1	1	0,75	75%	S	Dinhub
4	Persentase kelayakan kendaraan bermotor	%	89	88,37	88,80	84,83	95,53%	ST	Dinhub

Sumber: Dinhub Kab. Banjarnegara

Keterangan:

91% ≤ 100%

: Sangat Tinggi

ST

76% ≤ 90%

: Tinggi

T

66% ≤ 75%

: Sedang

S

51% ≤ 65%

: Rendah

R

≤ 50%

: Sangat Rendah

SR

Capaian kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan beberapa indikator yang belum mencapai target optimal. Pada sektor pertumbuhan jalur trayek yang hanya mencapai 75% dari target, kendala utamanya adalah keterbatasan *database* angkutan yang belum optimal. Sementara itu, pada indikator kelayakan kendaraan bermotor yang mencapai 95,53% dari target, kendala utamanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan. Hal ini memiliki dampak berantai terhadap efektivitas penggunaan jalur trayek yang ada, karena kendaraan yang tidak layak berpotensi mengganggu kelancaran transportasi publik. Meski telah dilakukan berbagai upaya sosialisasi melalui media *online*, media suara, dan *WhatsApp gateway*, serta penghapusan biaya uji kendaraan, namun masih diperlukan penguatan koordinasi antar *stakeholder* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

10. Komunikasi dan informatika

Kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dilakukan oleh Dinkominfo dengan 3 indikator kinerja pembangunan daerah. Secara rinci kinerja pembangunan urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 52

Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	17,5	10	12,5	20,75	166%	ST	Dinkominfo
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinkominfo	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinkominfo
3	Persentase diseminasi informasi publik	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinkominfo

Sumber: Dinkominfo Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤								
	100%		: Sangat Tinggi					ST	
	76% ≤								
	90%		: Tinggi					T	
	66% ≤								
	75%		: Sedang					S	
	51% ≤								
	65%		: Rendah					R	
	≤ 50%		: Sangat Rendah					SR	

Layanan publik *online* dan terintegrasi telah melampaui target dengan capaian 166% dimana 11 dari 53 layanan telah terintegrasi secara *online*, didukung dengan penguatan keamanan melalui pemasangan antivirus dan *firewall* pada server aplikasi dan data *center*. Keberhasilan ini bersinergi dengan tercapainya 100% konektivitas internet pada seluruh OPD dan kecamatan, meskipun masih diperlukan optimalisasi *bandwidth* melalui peningkatan kualitas jaringan dari kabel STP ke *Fiber Optic* dan peningkatan kapasitas dari 100Mbps menjadi 1Gb pada 7 OPD. Diseminasi informasi publik juga mencapai kinerja optimal 100% dengan pengelolaan 16 media informasi pemerintah. Hal ini menunjukkan keberhasilan Dinkominfo dalam mengintegrasikan layanan publik, infrastruktur jaringan, dan komunikasi publik secara komprehensif.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilakukan oleh Disperindagkop UKM dengan 6 indikator kinerja pembangunan daerah.

Tabel 2. 53
Capaian Indikator Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2024 (%)	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Koperasi Aktif	%	48,21	39,59	39,59	39,05	98,64%	ST	Disperindagkop UKM
2	Persentase Koperasi yang bisa menilai kesehatanya	%	19,55	0	44,10	60	136,05%	ST	Disperindagkop UKM

3	Persentase jumlah koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	%	7,45	26,85	38,10	37,57	98,61%	ST	Disperindagkop UKM
4	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	%	10	6,74	80,58	79,19	98,28%	ST	Disperindagkop UKM
5	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	89,74	89,81	90,01	90,03	100,02%	ST	Disperindagkop UKM
6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,22	99,20	99,22	99,22	100%	ST	Disperindagkop UKM

Sumber: Disperindagkop UKM Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Dari sisi koperasi, tingkat keaktifan koperasi mencapai 98,64% dengan 173 koperasi aktif dari total 443 koperasi. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan koperasi dalam menilai kesehatannya yang justru melampaui target dengan capaian 136,05%, dimana 75 koperasi dari 125 koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam mampu melakukan penilaian kesehatan. Sementara itu, sektor UMKM menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan dengan capaian yang melebihi target. Persentase usaha mikro dan kecil yang mencapai 100% dari target, menunjukkan keberhasilan program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan UMKM melalui pelatihan, peningkatan kesadaran berwirausaha, dan pemanfaatan potensi lokal.

12. Penanaman modal

Kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal dilakukan oleh Disnaker PMPTSP dengan 5 indikator kinerja pembangunan daerah.

Tabel 2. 54

Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2024 (%)	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Peningkatan Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	%	1,20	1,90	1,2	0,3385	28,21%	SR	Disnaker PMPTSP
2	Persentase Peningkatan Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	%	4	14,77	1,5	48,04	3202,67%	ST	Disnaker PMPTSP
3	Persentase kenaikan/penurunan PMDN	%	3,5	1,90	3,5	0,3392	9,69%	SR	Disnaker PMPTSP
4	Persentase pelayanan perizinan yang diselesaikan	%	100	100	100	139	139%	ST	Disnaker PMPTSP
5	Persentase kegiatan usaha/ pelaku usaha yang dilakukan pengawasan/pembinaan	%	90	100	75	100	133,33%	ST	Disnaker PMPTSP

Sumber: Disnaker PMPTSP Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Berdasarkan evaluasi capaian indikator urusan penanaman modal RKPD 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam iklim investasi daerah, tercermin dari lonjakan nilai investasi dari Rp837.475.798.941 pada tahun 2023 menjadi Rp1.239.806.201.384 di tahun 2024. Hal ini didukung oleh penyediaan sarana prasarana serta kebijakan strategis, termasuk regulasi RTRW melalui Perda. Namun, meskipun jumlah investasi meningkat tajam hingga 3.202,667%, jumlah investor baru masih rendah dengan capaian hanya 28,21%, menandakan bahwa daerah memiliki daya tarik investasi yang kuat namun masih perlu pembenahan dalam hal sistem perizinan, terutama dalam optimalisasi layanan perizinan elektronik. Di sisi lain, efektivitas pelayanan perizinan dan intensitas pengawasan terhadap pelaku usaha menunjukkan capaian yang baik, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung kemudahan berusaha.

13. Kepemudaan dan olah raga

Kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga dilakukan oleh Dindikpora dengan 5 indikator kinerja pembangunan daerah.

Tabel 2. 55

Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase wirausaha muda	%	42	18,04	38	54	142,11%	ST	Dindikpora
2	Cakupan pembinaan olahraga	%	36		26	55	211,54%	ST	Dindikpora
3	Cakupan pembinaan atlet muda	%	36		35	37	105,71%	ST	Dindikpora
4	Persentase jumlah kejuaraan yang meraih medali tingkat provinsi	%	28		32	32	100%	ST	Dindikpora
5	Cakupan kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan di sekolah	%	60	100	50	100	200%	ST	Dindikpora

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Dari tabel di atas terlihat adanya perkembangan yang sangat positif di semua aspek dengan tingkat capaian yang melebihi target. Hal ini tercermin dari tingginya persentase wirausaha muda yang mencapai 142,11% dari target, menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi pemuda terutama dalam pengembangan usaha berbasis digital. Kemudian, pembinaan atlet muda yang mencapai 105,71% dari target bersinergi dengan perolehan medali tingkat provinsi yang mencapai 100% target, menunjukkan bahwa penambahan jenjang dan nomor perlombaan telah efektif dalam menghasilkan atlet-atlet berprestasi.

Keberhasilan ini didukung penuh oleh program kepramukaan yang mencapai 200% dari target, di mana seluruh satuan pendidikan dari PAUD hingga SMP telah mengintegrasikan kegiatan kepramukaan. Hal ini menciptakan fondasi karakter yang kuat bagi para pemuda, baik yang menekuni wirausaha maupun olahraga.

14. Statistik

Kinerja penyelenggaraan urusan statistik dilakukan oleh Dinkominfo dengan 1 indikator kinerja pembangunan daerah.

Tabel 2. 56

Capaian Indikator Urusan Statistika

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinkominfo

Sumber: Dinkominfo Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Kinerja pengelolaan data statistik menunjukkan hasil yang optimal dengan persentase ketersediaan data statistik sektoral mencapai target 100%. Pencapaian ini didukung oleh keberhasilan Kabupaten Banjarnegara dalam meraih peringkat 6 Nasional dengan nilai 2,98 yang melampaui target 2,10 pada evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ini, telah dilakukan reuiu pelaksanaan statistik sektoral serta penyusunan rencana monitoring, pembinaan, dan evaluasi yang akan diterapkan pada OPD sampel di tahun 2025. Upaya ini diperkuat dengan optimalisasi kinerja Tim Satu Data Daerah yang berperan penting dalam pengelolaan dan integrasi data statistik di tingkat daerah. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen kuat Dinkominfo dalam membangun sistem statistik daerah yang andal dan terintegrasi.

15. Persandian

Kinerja penyelenggaraan urusan persandian dilakukan oleh Dinkominfo dengan 1 indikator kinerja pembangunan daerah.

Tabel 2. 57

Capaian Indikator Urusan Persandian

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Aplikasi yang diasesmen Indeks KAMI	%	8,51	23,41	4,26	4,26	100%	ST	Dinkominfo

Sumber: Dinkominfo Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Status capaian 100% pada semester 2 tahun 2024 mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai sesuai perencanaan, meski masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan cakupan *assessment* pada aplikasi-aplikasi lainnya.

16. Kebudayaan

Kinerja penyelenggaraan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang kebudayaan diimplentasikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan 3 indikator kinerja program.

Tabel 2. 58
Capaian Indikator Urusan Kebudayaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2024 (%)	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase kelompok seni yang melakukan registrasi	%	15	22,76	8	15,09	188,63%	ST	Disparbud
2	Persentase Fasilitasi Event Seni dan Budaya yang dilaksanakan	%	10	37,14	57,14	47,8	83,65%	T	Disparbud
3	Persentase benda cagar budaya dipelihara	%	80	54	54	62,06	114,93%	ST	Disparbud

Sumber: Disparbud Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang kebudayaan tahun 2024, telah teregistrasi sejumlah 171 grup kesenian dari total 1.133 grup kesenian yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Angka tersebut masih sangat kecil sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan jumlah grup yang teregistrasi melalui penyediaan SOP terkait proses registrasi pengesahan grup kesenian. Selain itu, Pemerintah Daerah memfasilitasi sebanyak 22 *event* budaya dari 45 *event* yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Angka tersebut menunjukkan masih kurangnya intervensi atas penyelenggaraan *event* kesenian budaya yang dilakukan di Kabupaten Banjarnegara. Disisi lain, Pemerintah Daerah telah lebih memperhatikan pemeliharaan benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Banjarnegara sehingga semakin terjaga dan terpelihara.

17. Perpustakaan

Kinerja penyelenggaraan urusan perpustakaan dilakukan oleh Disarpus dengan 3 indikator kinerja pembangunan daerah.

Tabel 2. 59
Capaian Indikator Urusan Perpustakaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester2	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	4,27	6,39	45,16	72,50	160,54%	ST	Disarpus
2	Ketercukupan koleksi perpustakaan daerah	%	7,72	8,06	8,45	8,51	100,71%	ST	Disarpus
3	Persentase perpustakaan berstandar nasional perpustakaan	%	6,42	6,30	6,55	6,55	100%	ST	Disarpus

Sumber:

Disarpus Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Terjadi lonjakan signifikan jumlah pengunjung perpustakaan yang mencapai 160,54% dari target dengan total 53.478 pengunjung. Peningkatan ini didukung oleh ketersediaan gedung baru yang lebih representatif serta diperkuat dengan penambahan koleksi buku di perpustakaan daerah sebanyak 3.547 eksemplar yang terdiri dari 2.729 eksemplar buku konvensional dan 818 eksemplar buku digital. Selanjutnya mengenai upaya peningkatan kualitas layanan melalui pencapaian standar nasional perpustakaan, terdapat 53 perpustakaan yang telah terakreditasi dengan standar SNP (100% dari target). Keberhasilan ini menggambarkan adanya sinergi antara pengembangan infrastruktur fisik, pengayaan koleksi, dan peningkatan standar layanan yang berhasil mendorong minat masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan, baik secara langsung maupun digital.

18. Kearsipan

Kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan dilakukan oleh Disarpus dengan 3 indikator kinerja pembangunan daerah.

Tabel 2. 60
Capaian Indikator Urusan Kearsipan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase tata kelola kearsipan yang baik	%	100	80	100	100	100%	ST	Disarpus
2	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	%	31,8	9,09	9,09	9,09	100%	SR	Disarpus
3	Persentase penerbitan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	100	0	100	50	50%	SR	Disarpus

Sumber: Disarpus Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Tata kelola kearsipan telah mencapai target optimal 100% melalui berbagai kegiatan seperti penataan arsip dinas, penyusutan arsip, serta pemberdayaan kearsipan pada JIKN dan SIKN. Namun, dalam hal perlindungan dan penyelamatan arsip, meski realisasinya mencapai target yang ditetapkan, angka ini masih relatif rendah dari target akhir periode RPD 31,8%. Pelaksanaan pemusnahan arsip telah dilakukan di 3 OPD yaitu BPBD, Bawaslu dan KPAD, serta penyelesaian alih media arsip BP7. Sementara itu, untuk penerbitan ijin penggunaan arsip baru mencapai 50% dari target, dengan catatan bahwa SOP pendukung sudah tersedia namun belum dilengkapi dengan daftar arsip yang diperlukan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem kearsipan terutama dalam aspek perlindungan arsip dan standardisasi perijinan penggunaan arsip untuk mencapai target akhir yang telah ditetapkan.

➤ **Urusan Pilihan**

1. Kelautan dan perikanan

Kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Kelautan dan Perikanan diimplementasikan oleh Distankan dan KP KP dengan 4 indikator kinerja program.

Tabel 2. 61
Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2024 (%)	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase terpenuhinya fasilitas pengelolaan perikanan budidaya	%	100	100	100	100	100%	ST	Dintankan KP
2	Persentase produksi perikanan tangkap	%	100	91,88	100	100	100%	ST	Dintankan KP
3	Persentase pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil.	%	100	100	100	100	100%	ST	Dintankan KP
4	Persentase pembinaan dan pengawasan sumber daya perikanan	%	100	100	100	100	100%	ST	Dintankan KP

Sumber: Distankan dan KP KP Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator urusan pilihan kelautan dan perikanan tahun 2024, terjadi konsistensi dalam pencapaian urusan kelautan dan perikanan. Hal ini didukung dengan adanya bantuan benih ikan dan perahu sebagai upaya pemenuhan fasilitas pengelolaan perikanan budidaya. Selain itu, pemenuhan fasilitas tersebut diimbangi dengan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pelatihan olahan pangan berbahan dasar ikan yang digunakan sebagai pemberian makanan tambahan untuk posyandu di Kabupaten Banjarnegara.

2. Pariwisata

Kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pariwisata diimplementasikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan 5 indikator kinerja program.

Tabel 2. 62
Capaian Indikator Urusan Pariwisata

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2024 (%)	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Ketersediaan data koleksi museum	%	80	0	20	-	-		Disparbud
2	Persentase pembangunan obyek wisata	%	80	50	25	42,85	171,40%	ST	Disparbud
3	Persentase Peningkatan kunjungan wisata	%	13	5,23	3	1,14	38%	SR	Disparbud
4	Persentase peningkatan lama tinggal	%	1,1	1,1	1,1	1,1	100%	ST	Disparbud
5	Persentase peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku wisata	%	20	18	17	23	135,29%	ST	Disparbud

Sumber: Dinparbud Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator urusan pilihan pariwisata tahun 2024, terlihat bahwa persentase kunjungan wisata di Kabupaten Banjarnegara hanya meningkat sebesar 1,14%. Angka tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan peningkatan tahun-tahun sebelumnya. Rendahnya peningkatan kunjungan wisata ini juga dipengaruhi oleh peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024, baru terdapat 3 destinasi wisata yang dilakukan pembangunan sarana dan prasarannya. Selain itu, peningkatan kunjungan wisata dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku wisata melalui berbagai pembinaan sebagai upaya

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola wisata di Kabupaten Banjarnegara.

3. Pertanian

Kinerja penyelenggaran urusan pilihan Pertanian diimplementasikan oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan 9 indikator kinerja program.

Tabel 2. 63
Capaian Indikator Urusan Pertanian
Sumber: Distankan dan KP KP Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator urusan pilihan pertanian tahun 2024, seluruh indikator tercapai sesuai target yang ditunjukkan dengan tingkat ketercapaian hingga 100%. Ketercapaian tersebut didukung dengan adanya bantuan bibit buah-buahan, bantuan benih tanaman pangan, dan bantuan ternak. Selain itu, pada tahun 2024 telah dilakukan pembangunan RJIT, JUT, dan jalan produksi sebagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian dan peternakan di Kabupaten Banjarnegara. Pemenuhan sarana dan prasarana tersebut juga diimbangi dengan pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner dan terlaksananya pengadaan *stock buffer* obat-obatan serta pembinaan pada kelompok tani.

4. Perdagangan

Kinerja penyelenggaran urusan pilihan perdagangan diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dengan 7 indikator kinerja program. Secara rinci capaian kinerja pembangunan urusan perdagangan bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 64
Capaian Indikator Urusan Perdagangan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2024 (%)	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Pasar dalam kondisi baik	%	24	10	16	16	100%	ST	Dinperindagkop UKM
2	Persentase jumlah pedagang kaki lima yang terbina	%	100	80	80	80	100%	ST	Dinperindagkop UKM
3	Persentase jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tersedia	%	100	80	80	80	100%	ST	Dinperindagkop UKM
4	Persentase tingkat pertumbuhan nilai ekspor bersih perdagangan	%	5	5	5	5,05	101%	ST	Dinperindagkop UKM
5	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	94	71,59	88	68,33	77,65%	T	Dinperindagkop UKM
6	Persentase penyelenggaraan promosi perdagangan	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinperindagkop UKM
7	Persentase terjalannya kemitraan pelaku usaha yang diusulkan	%	50	0	50	-	-		Dinperindagkop UKM

Sumber: Dinperindagkop UKM Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Ketersediaan komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting mencapai target 100%, didukung oleh pemantauan harga melalui Aplikasi SIPINTER APIK di tiga pasar utama yaitu Pasar Kota Banjarnegara, Pasar Karangobar dan Pasar Mandiraja. Stabilitas ketersediaan barang ini berkontribusi pada pertumbuhan nilai ekspor bersih perdagangan yang melampaui target, mencapai 101% (5,05% dari target 5%). Peningkatan ekspor ini mengindikasikan efektivitas strategi pemasaran dan perbaikan yang telah dilakukan. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku hanya mencapai 77,65% dari target 88%, menunjukkan perlunya peningkatan standardisasi dan pengawasan peralatan perdagangan. Lebih kritis lagi, persentase terjalannya kemitraan pelaku usaha yang dimediasi menunjukkan 0% realisasi dari target 50% karena tidak adanya anggaran pendukung. Kedua hal ini dapat berdampak pada kepercayaan konsumen dan efisiensi rantai perdagangan.

5. Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Perindustrian diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dengan 3 indikator kinerja program.

Tabel 2. 65
Capaian Indikator Urusan Perindustrian

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase meningkatnya kemampuan sumber daya manusia wirausaha dan tenaga kerja industri kecil menengah tentang IPTEK sistem produksi	%	4,4	3,13	4,07	4,07	100%	ST	Dinperindagkop UKM
2	Persentase peningkatan kemampuan industri kecil menengah tentang penguasaan dan pemanfaatan alih teknologi	%	0,66	0,15	-	-	-		Dinperindagkop UKM
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Nilai	95	95	95	100	105,26%	ST	Dinperindagkop UKM

Sumber: Dinperindagkop UKM Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator urusan pilihan perindustrian tahun 2024, terjadi peningkatan dalam kemampuan sumber daya manusia wirausaha dan tenaga kerja industri kecil dalam penggunaan IPTEK sistem produksi. Pencapaian ini didukung melalui pembinaan terhadap 275 IKM (Industri Kecil Menengah) dengan memberikan pelatihan dan fasilitasi yang mampu meningkatkan kemampuan SDM dalam penggunaan IPTEK. Namun, peningkatan kemampuan SDM tentang IPTEK sistem produksi tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan industri kecil menengah dalam penguasaan

dan pemanfaatan alih teknologi. Hal ini menyebabkan industri kecil menengah di Kabupaten Banjarnegara belum secara penuh menguasai dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang mampu memberikan kemudahan dalam menjalankan industrinya. Hal ini diakibatkan tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan pelatihan dan pembinaan terhadap para pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Banjarnegara. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen pemerintah dalam memberikan fasilitasi bagi para pelaku industri kecil menengah untuk terus berkembang.

6. Transmigrasi

Kinerja penyelenggaraan urusan pilihan transmigrasi diimplementasikan oleh Disnaker PMPTSP dengan 1 indikator kinerja program.

Tabel 2. 66
Capaian Indikator Urusan Transmigrasi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase transmigran pendaftar yang diberangkatkan	%	7	0	0	0	0,00		Disnaker PMPTSP

Sumber: Disnaker PMPTSP Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Berdasarkan evaluasi capaian indikator urusan transmigrasi RKPD 2024, terlihat bahwa program transmigrasi di Kabupaten Banjarnegara belum dapat terlaksana secara optimal. Hal ini ditunjukkan dari persentase transmigran pendaftar yang diberangkatkan yang memiliki target 7% pada akhir periode RPD, namun realisasinya 0% karena tidak tersedianya anggaran. Kondisi ini mengindikasikan adanya kendala dalam aspek pembiayaan yang berdampak langsung pada pelaksanaan program transmigrasi. Ketiadaan dukungan anggaran ini perlu menjadi perhatian serius mengingat program transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan evaluasi dan perencanaan ulang terkait alokasi anggaran serta koordinasi yang lebih baik.

➤ Penunjang Urusan

1. Perencanaan

Kinerja penyelenggaraan penunjang urusan perencanaan diimplementasikan oleh Baperlitbang dengan 5 indikator kinerja program.

Tabel 2. 67
Capaian Indikator Urusan Perencanaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2024 (%)	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD/RPJMD/RKPD yang telah ditetapkan	%	100	48,3	100	100	100%	ST	Baperlitbang
2	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD/RPD ke dalam RKPD	%	>90	94,07	>90	96,30	107%	ST	Baperlitbang
3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD/RPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke dalam RKPD	3	>90	92,19	>90	100	111%	ST	Baperlitbang
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD	%	>90	95,3	>90	100	111%	ST	Baperlitbang
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ke dalam RKPD	%	>90	96,43	>90	90,24	100,27%	ST	Baperlitbang

Sumber: Baperlitbang Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Capaian kinerja pada unsur penunjang urusan perencanaan tahun 2024 secara rata-rata telah menunjukkan adanya peningkatan ketercapaian yang ditunjukkan dengan peningkatan persentase dari setiap indikator. Pada Kabupaten Banjarnegara telah tersedia regulasi yang mengatur dasar perencanaan sehingga dokumen perencanaan baik RPJPD, RPJMD/RPD, dan RKPD telah disusun dan ditetapkan tepat waktu. Selain itu, dengan adanya sinkronisasi dokumen RKPD dengan RPD, program yang tertuang dalam dokumen RKPD telah disesuaikan dengan program yang terdapat pada dokumen RPD.

2. Keuangan

Kinerja penyelenggaraan penunjang urusan keuangan diimplementasikan oleh BPPKAD dengan 7 indikator kinerja program.

Tabel 2. 68
Capaian Indikator Urusan Keuangan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100%	ST	BPPKAD
2	Persentase serapan dana transfer daerah	%	100	93,43	100	98,42	98,42%	ST	BPPKAD
3	Persentase Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100%	ST	BPPKAD
4	Persentase Penyusunan Penganggaran yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100%	ST	BPPKAD
5	Kesesuaian Program dalam APBD dengan yang ada di RKPD	%	>90	>90	>90	97,84	100%	ST	BPPKAD
6	Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100%	ST	BPPKAD
7	Persentase Pertumbuhan Pajak daerah	%	5	9,74	5	5,07	101,40%	ST	BPPKAD

Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Kabupaten Banjarnegara telah secara disiplin menyelesaikan penyusunan dan penyajian berbagai laporan seperti laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penganggaran daerah, dan laporan Barang Milik Daerah (BMD) tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk menjadi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran daerah dan sebagai bentuk upaya menjadi pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Banjarnegara telah mencapai target yaitu > 5%. Nilai pertumbuhan tersebut masih dapat ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat Kabupaten Banjarnegara akan kewajibannya dalam melaporkan dan membayarkan pajak yang dapat didukung dengan perbaikan aturan hukum dalam proses pemungutan pajak daerah. Selain itu, pertumbuhan pajak daerah dapat dioptimalkan melalui peningkatan lain-lain PAD yang sah.

3. Penelitian dan pengembangan

Kinerja penyelenggaraan penunjang urusan penelitian dan pengembangan diimplementasikan oleh Baperlitbang dengan 2 indikator kinerja program. Secara rinci capaian kinerja pembangunan urusan perencanaan tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 69
Capaian Indikator Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	40	60	25	100	400%	ST	Baperlitbang
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	40	31	25	100	400%	ST	Baperlitbang

Sumber: Baperlitbang Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator urusan penelitian dan pengembangan tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam pemanfaatan hasil kelitbangan, tercermin dari peningkatan persentase hingga 100%. Hal ini didukung dengan dilakukannya sebanyak 2 penelitian yang menghasilkan suatu laporan yang digunakan sebagai referensi dalam proses perencanaan pembangunan untuk tahun selanjutnya. Peningkatan jumlah penelitian ini diiringi dengan peningkatan inovasi yang terjaring di Kabupaten Banjarnegara melalui stimulasi dan fasilitasi yang mendukung pelaksanaan inovasi daerah. Namun, jumlah penelitian dan inovasi tersebut masih tergolong cukup rendah sehingga masih perlu adanya upaya peningkatan melalui kegiatan yang mampu menumbuhkan kembangkan kreativitas dan inovasi masyarakat daerah Kabupaten Banjarnegara.

4. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaraan penunjang urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan 6 indikator kinerja program.

Tabel 2. 70
Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	%	84	80,60	76	82,79	108,93%	ST	BKD
2	Persentase jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif	%	88	89,66	85	86,21	101,42%	ST	BKD
3	Persentase jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang terisi definitif	%	91	93,26	81	89,01	109,89%	ST	BKD
4	Persentase ASN berpredikat kinerja baik	%	100	99,98	100	99,90	99,90%	ST	BKD
5	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	70	56,42	50	64,78	129,56%	ST	BKD
6	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	80	61,11	60	52,64	87,73%	T	BKD
7	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam	20	36,43	20	34,47	172,35%	ST	BKD

Sumber: BKD Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan tahun 2024, dari seluruh ASN di Kabupaten Banjarnegara yang berjumlah 8.548 orang telah memenuhi target jumlah ASN dalam jabatan fungsional dan administratif. Namun, pada jabatan pimpinan tinggi masih terdapat kekosongan jabatan karena belum turunya izin pelantikan yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Selain itu, terjadi penurunan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi para pejabat ASN di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini juga berdampak pada berkurangnya rata-rata lama para pejabat ASN dalam memperoleh jam pelajaran yang diterima. Walaupun persentase pada tahun 2024 telah melampaui target, tetapi jumlah jumlah jam pelajaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

➤ Urusan Pengawasan

1. Inspektorat

Kinerja penyelenggaraan urusan pengawasan dilakukan oleh Inspektorat dengan 2 indikator kinerja pembangunan daerah.

Tabel 2. 71
Capaian Indikator Urusan Pengawasan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester	Status
					Target	Realisasi s/d semester 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemerinkasaan Internal dan Eksternal	%	92	96,66	94,77	96,85	103,63%	ST
	Insp Kabupaten	%	92	94,19	90,5	96,25	106,35%	ST
	Insp Provinsi	%	98	99,70	96	98,81	102,93%	ST
	BPK-RI	%	95	96,10	94	95,50	101,60%	ST
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	Level	3	3	3	3	100%	ST

Sumber: Inspektorat dan Bagian Pemotda Setda Kab. Banjarnegara

Keterangan:

91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
76% ≤ 90%	: Tinggi	T
66% ≤ 75%	: Sedang	S
51% ≤ 65%	: Rendah	R
≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Perolehan hasil kapabilitas APIP Kabupaten banjarnegara yang berada pada level 3 (*integrated*) yang berarti telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Selain itu, upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun BPK-RI menunjukkan adanya kenaikan tingkat penyelesaian dari tindak lanjut hasil pemeriksaan. Namun, masih terdapat beberapa objek pemeriksaan yang belum menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemantauan tindak lanjut, mengadakan Rakorwas, mengembangkan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan bukti tindak lanjut dan penatausahaannya, dan menyusun rencana aksi pada saat penyusunan konsep tindak lanjut.

➤ Pendukung Urusan

1. Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaraan pendukung urusan sekretariat daerah diimplementasikan dengan 3 indikator kinerja pembangunan daerah.

Tabel 2. 72
Capaian Indikator Pendukung Urusan Sekretariat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2024 (%)	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100%	ST	Setda
2	Persentase pengkoordinasian kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	%	100	100	100	100	100%	ST	Setda
3	Persentase peningkatan nilai evaluasi kelembagaan, pelayanan publik dan Kinerja	%	100	100	100	100	100%	ST	Setda

Sumber: Setda Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Capaian kinerja pendukung urusan sekretariat daerah tahun 2024 menunjukkan konsistensi ketercapaian dari tahun ke tahun dengan persentase capaian hingga 100%. Hal ini menunjukkan adanya pengkoordinasian dan evaluasi yang baik dalam pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia. Pengkoordinasian yang baik juga tercermin dengan dilaksanakannya pengawasan terhadap BUMD dan BLUD serta pengendalian dalam bidang perekonomian secara optimal. Namun, masih terdapat permasalahan yang menghambat dalam proses pengkoordinasian yaitu:

- 1) Adanya sengketa batas wilayah Desa Larangan Kecamatan Pagentan dengan Desa Jebeng Pimpitan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo sekitar 30 hektar. Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah dengan menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur hukum.
- 2) Belum optimalnya kerjasama yang dilakukan daerah akibat belum tersedianya sistem yang mendukung. Upaya tindak lanjut kedepannya adalah dengan melakukan inisiasi kerjasama dengan pihak luar negeri agar dapat mengenalkan potensi Kabupaten Banjarnegara secara global serta mampu membuka peluang kerjasama dalam berbagai bidang.

2. Sekretariat DPRD

Kinerja penyelenggaraan pendukung urusan sekretariat DPRD diimplementasikan dengan 5 indikator kinerja pembangunan daerah.

Tabel 2. 73

Capaian Indikator Pendukung Urusan Sekretariat DPRD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase capaian kinerja Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten	%	100	99,08	100	97,91	97,91%	ST	Sekretariat DPRD
2	Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan kegiatan pendalaman tugas DPRD dan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	%	100	100	100	100	100%	ST	Sekretariat DPRD
3	Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan kegiatan Publikasi dan dokumentasi Dewan, Penyelenggaraan Humas, Penyusunan Program Kerja DPRD dan Fasilitasi Tugas DPRD	%	100	100	100	100	100%	ST	Sekretariat DPRD
4	Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan dan fungsi Anggaran	%	100	95,5	100	100	100%	ST	Sekretariat DPRD
5	Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pembentukan Perda	%	100	100	100	110	110%	ST	Sekretariat DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Fungsi pengawasan dan anggaran berhasil mencapai target 100%, mencakup pembahasan KUA PPAS, APBD Murni dan perubahannya, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Yang lebih menggembirakan, fungsi pembentukan Perda bahkan melampaui target dengan capaian 110%, dimana dari target 10 Raperda berhasil diselesaikan 12 Raperda. Hal ini menunjukkan produktivitas DPRD yang tinggi dalam menghasilkan produk hukum untuk kepentingan daerah, yang didukung oleh kinerja optimal dari fungsi kesekretariatan dan tenaga ahli. Secara keseluruhan, meski terdapat sedikit kendala dalam program administrasi umum, namun hal tersebut tidak menghambat pencapaian kinerja utama DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggarannya. Ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD telah berhasil memberikan dukungan yang efektif bagi pelaksanaan tugas-tugas DPRD sepanjang tahun 2024.

1. Bakesbangpol

Kinerja penyelenggaraan pendukung urusan Kesatuan Bangsa dan Politik diimplementasikan dengan 5 indikator kinerja pembangunan daerah.

Tabel 2. 74

Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Ormas (yang terdaftar dikesbang) yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan/Idiologi Pancasila	%	25	25	25	25	100%	ST	Bakesbang pol
2	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	%	25	25	150 orang	2.819	704,75%	ST	Bakesbang pol
3	Persentase Cakupan ormas yang diberi Surat Keterangan keberadaan ormas	%	5	25	5	25	500%	ST	Bakesbang pol
4	Persentase orang yang mendapatkan pembinaan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	%	25	25	150 orang	2.500 orang	1666,66%	ST	Bakesbang pol
5	Persentase penanganan konflik	%	100	100	100	100	100%	ST	Bakesbang pol

Sumber: Bakesbangpol Kab. Banjarnegara

Keterangan:	91% ≤ 100%	: Sangat Tinggi	ST
	76% ≤ 90%	: Tinggi	T
	66% ≤ 75%	: Sedang	S
	51% ≤ 65%	: Rendah	R
	≤ 50%	: Sangat Rendah	SR

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya kinerja yang sangat baik dalam urusan kesatuan bangsa dan politik dengan semua indikator mencapai status "tercapai". Hal ini menunjukkan adanya koordinasi dan sinergi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di daerah. Capaian-capaian ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam menjaga kesatuan bangsa dan stabilitas politik, dengan memadukan unsur-unsur pendidikan, pencegahan, dan penanganan konflik. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada aspek politik dan keamanan, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat untuk pembangunan sosial-ekonomi di Kabupaten Banjarnegara.

➤ Urusan Kewilayahan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Kewilayahan fungsi Kecamatan diimplementasikan oleh Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara dengan 5 indikator kinerja pembangunan daerah, dengan capaian kinerja berikut:

Tabel 2. 75
Urusan Kewilayahan

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2023 (%)	Status
					Target	Realisasi s/d semester 2		
1.	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100,462	100	99,99	100	ST
	1. Kecamatan Banjarmangu	%	100	100	100	100	100	
	2. Kecamatan Banjarnegara	%	100	100	100	100	100	
	3. Kecamatan Batur	%	100	100	100	100	100	
	4. Kecamatan Bawang	%	100	100	100	100	100	
	5. Kecamatan Kalibening	%	100	100	100	100	100	
	6. Kecamatan Karangkoobar	%	100	95,5		100		
	7. Kecamatan Madukara	%	100	99,73	100	100	100	
	8. Kecamatan Mandiraja	%	100	110,03	100	100	100	
	9. Kecamatan Pagedongan	%	100	100	100	100	100	
	10. Kecamatan Pagentan	%	100	106,75	100	100	100	
	11. Kecamatan Pandanarum	%	100	100		99,8		
	12. Kecamatan Pejawaran	%	100	99,68	100	100	100	
	13. Kecamatan Punggelan	%	100	100	100	100	100	
	14. Kecamatan Purwanegara	%	100	100	100	100	100	
	15. Kecamatan Purwareja-Klampok	%	100	100	100	100	100	
	16. Kecamatan Rakit	%	100	100	100	100	100	
	17. Kecamatan Sigaluh	%	100	97,31	100	100	100	
	18. Kecamatan Susukan	%	100	97,24	100	100	100	
	19. Kecamatan Wanadadi	%	100	100	100	100	100	
	20. Kecamatan Wanayasa	%	100	103	100	100	100	
2.	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	74,73	87,5	87,5	87,5	T
	1. Kecamatan Banjarmangu	%	-	-	-	-	-	
	2. Kecamatan Banjarnegara	%	100	100	100	100	100	
	3. Kecamatan Batur	%	-	-	-	-	-	
	4. Kecamatan Bawang	%	100	0	-	-	-	
	5. Kecamatan Kalibening	%	100	-	-	-	-	
	6. Kecamatan Karangkoobar	%	0	0	-	-	-	
	7. Kecamatan Madukara	%	100	82,75	100	100	100	
	8. Kecamatan Mandiraja	%	100	100	100	100	100	
	9. Kecamatan Pagedongan	%	-	-	-	-	-	
	10. Kecamatan Pagentan	%	100	100	100	100	100	
	11. Kecamatan Pandanarum	%	100	100	-	-	-	
	12. Kecamatan Pejawaran	%	100	100	-	-	-	
	13. Kecamatan Punggelan	%	100	100	100	100	100	
	14. Kecamatan Purwanegara	%	100	-	-	-	-	
	15. Kecamatan Purwareja-Klampok	%	100	100	100	100	100	
	16. Kecamatan Rakit	%	100	-	-	-	-	
	17. Kecamatan Sigaluh	%	100	95,22	100	100	100	
	18. Kecamatan Susukan	%	100	93,5	-	-	-	
	19. Kecamatan Wanadadi	%	-	-	-	-	-	
	20. Kecamatan Wanayasa	%	100	0	0	0	0	
3.	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	50	33,33	33,33	33,33	SR
	1. Kecamatan Banjarmangu	%	-	-	-	-	-	
	2. Kecamatan Banjarnegara	%	100	-	-	-	-	
	3. Kecamatan Batur	%	-	-	-	-	-	
	4. Kecamatan Bawang	%	100	0	-	-	-	
	5. Kecamatan Kalibening	%	100	-	-	-	-	
	6. Kecamatan Karangkoobar	%	100	0	-	-	-	
	7. Kecamatan Madukara	%	100	-	-	-	-	
	8. Kecamatan Mandiraja	%	100	100	-	-	-	
	9. Kecamatan Pagedongan	%	100	-	-	-	-	
	10. Kecamatan Pagentan	%	100	0	0	0	0	
	11. Kecamatan Pandanarum	%	100	100	-	-	-	
	12. Kecamatan Pejawaran	%	100	100	-	-	-	
	13. Kecamatan Punggelan	%	100	-	-	-	-	
	14. Kecamatan Purwanegara	%	100	-	-	-	-	
	15. Kecamatan Purwareja-Klampok	%	100	-	100	100	100	
	16. Kecamatan Rakit	%	100	-	-	-	-	
	17. Kecamatan Sigaluh	%	100	-	-	-	-	
	18. Kecamatan Susukan	%	100	100	-	-	-	
	19. Kecamatan Wanadadi	%	100	-	-	-	-	
	20. Kecamatan Wanayasa	%	100	0	0	0	0	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2 Th 2023 (%)	Status
					Target	Realisasi s/d semester 2		
4.	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	99,23	100,00	100,00	100,00	ST
	1. Kecamatan Banjarmangu	%	100	100	100	100	100	
	2. Kecamatan Banjarnegara	%	100	100	100	100	100	
	3. Kecamatan Batur	%	100	100	100	100	100	
	4. Kecamatan Bawang	%	100	100	100	100	100	
	5. Kecamatan Kalibening	%	100	100	100	100	100	
	6. Kecamatan Karangkoobar	%	100	100	100	100	100	
	7. Kecamatan Madukara	%	100	100	100	100	100	
	8. Kecamatan Mandiraja	%	100	100	100	100	100	
	9. Kecamatan Pagedongan	%	100	100	100	100	100	
	10. Kecamatan Pagentan	%	100	100	100	100	100	
	11. Kecamatan Pandanarum	%	100	100	100	100	100	
	12. Kecamatan Pejawaran	%	100	100	100	100	100	
	13. Kecamatan Punggelan	%	100	100	100	100	100	
	14. Kecamatan Purwanegara	%	100	100	100	100	100	
	15. Kecamatan Purwareja-Klompok	%	100	100	100	100	100	
	16. Kecamatan Rakit	%	100	100	100	100	100	
	17. Kecamatan Sigaluh	%	100	84,67	100	100	100	
	18. Kecamatan Susukan	%	100	100	100	100	100	
	19. Kecamatan Wanadadi	%	100	100	100	100	100	
	20. Kecamatan Wanayasa	%	100	100	100	100	100	
5.	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	98,363	100	99,993	99,993	ST
	1. Kecamatan Banjarmangu	%	100	100	100	100	100	
	2. Kecamatan Banjarnegara	%	100	100	100	100	100	
	3. Kecamatan Batur	%	100	100	100	100	100	
	4. Kecamatan Bawang	%	100	100	100	100	100	
	5. Kecamatan Kalibening	%	100	100	100	100	100	
	6. Kecamatan Karangkoobar	%	100	100	100	100	100	
	7. Kecamatan Madukara	%	100	99,64	100	100	100	
	8. Kecamatan Mandiraja	%	100	100	100	100	100	
	9. Kecamatan Pagedongan	%	100	100	100	100	100	
	10. Kecamatan Pagentan	%	100	100	100	100	100	
	11. Kecamatan Pandanarum	%	100	100	100	99,86	99,86	
	12. Kecamatan Pejawaran	%	100	100	100	100	100	
	13. Kecamatan Punggelan	%	100	100	100	100	100	
	14. Kecamatan Purwanegara	%	100	100	100	100	100	
	15. Kecamatan Purwareja-Klompok	%	100	100	100	100	100	
	16. Kecamatan Rakit	%	100	100	100	100	100	
	17. Kecamatan Sigaluh	%	100	73,9	100	100	100	
	18. Kecamatan Susukan	%	100	93,72	100	100	100	
	19. Kecamatan Wanadadi	%	100	100	100	100	100	
	20. Kecamatan Wanayasa	%	100	100	100	100	100	

Sumber: Semua Kecamatan Kab. Banjarnegara

Keterangan: 91% ≤ 100% : Sangat Tinggi
76% ≤ 90% : Tinggi
66% ≤ 75% : Sedang
51% ≤ 65% : Rendah
≤ 50% : Sangat Rendah

ST
T
S
R
SR

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator urusan kewilayahan tahun 2024, indikator penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dari 20 kecamatan menunjukkan ketercapaian sesuai target. Pencapaian target tersebut didukung dengan kemampuan pegawai kecamatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan SOP yang berlaku dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara maksimal. Hal ini perlu di pertahankan dengan selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Indikator persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kabupaten Banjarnegara tercapai sesuai target melalui sinergi forkompimca dan para pimpinan kecamatan. Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tercapai melalui komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang aktif dengan pemerintahan desa sehingga pelaksanaan kegiatan terlaksana secara lancar dan tujuan dapat tercapai. Namun, terdapat faktor penghambat dalam

pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, yaitu terkendala pada SDM sehingga perlu adanya pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pada indikator pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan indikator penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, banyak kecamatan yang tidak dapat menyelenggarakan program tersebut dikarenakan tidak adanya anggaran. Selain itu, terdapat beberapa kecamatan yang tidak memasukan indikator tersebut di dalam Renstra PD dan pada urusan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum telah masuk dalam Satpol PP.

➤ Program dilaksanakan semua urusan dan OPD

Secara rinci kinerja program yang dilaksanakan semua urusan dan semua OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 76

Capaian Program yang Dilaksanakan Semua Urusan dan OPD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	Dindikpora
2	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinkes
3	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	DPUPR
4	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	DPKPLH
5	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	96,8	100	100	100%	ST	Baperlitbang
6	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	BPPKAD
7	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	Inspektorat
8	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinsos
9	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	Dispermades
10	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	Disperindagkop
11	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	BKD
12	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	97,92	100	88,6	88,6%	T	DintankanKP
13	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	DisnakerPMPTSP
14	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	Dinkominfo
15	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	Disparbud
16	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	Dishub
17	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	Dindukcapil

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	BPBD
19	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	SATPOL PP
20	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	BAKESBANGPOL
21	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	RSU HJ.LASMANAH
22	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	DISARPUS
23	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	SETDA
24	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	99,08	100	97,91	97,91%	ST	SETWAN
25	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	BANJARMANGU
26	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	BANJARNEGARA
27	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	BATUR
28	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	83	100	100	100%	ST	BAWANG
29	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	KALIBENING
30	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	99	100	100	100%	ST	KARANGKOBAR
31	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	97,79	100	100	100%	ST	MADUKARA
32	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	MANDIRAJA
33	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	PAGEDONGAN
34	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	PAGENTAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir periode RPD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD s/d Semester 2	Status	OPD
					Target	Realisasi s/d semester 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100		98,02			PANDANARUM
36	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	PEJAWARAN
37	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	PUNGCELAN
38	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	PURWANEGARA
39	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	PWJ-KLAMPOK
40	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	RAKIT
41	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	93,84	100	105,13	105,13%	ST	SIGALUH
42	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	101,47	100	100	100%	ST	SUSUKAN
43	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100%	ST	WANADADI
44	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	101	100	100	100%	ST	WANAYASA

Sumber:

Semua OPD se- Kab. Banjarnegara (OPD Kabupaten dan Kecamatan)

Keterangan:

91% ≤ 100%

: Sangat Tinggi

ST

76% ≤ 90%

: Tinggi

T

66% ≤ 75%

: Sedang

S

51% ≤ 65%

: Rendah

R

≤ 50%

: Sangat Rendah

SR

Berdasarkan hasil evaluasi semester 2 tahun 2024, dari 1 indikator program yang dilaksanakan oleh semua OPD (44 OPD) sebanyak 42 OPD telah tercapai sesuai target. Adapun 2 OPD sisanya masih belum sesuai target, yaitu Distankan dan KP KP yang sebesar 88,6% dan Sekretariat DPRD sebesar 97,91%. Sekretariat DPRD baru mencapai 97,91% dari target 100% dikarenakan pada sub kegiatan *medical check up* DPRD hanya tercapai 80% (dari target 50 orang, hanya 40 orang yang melaksanakan MCU), kemudian jumlah sub kegiatan terdapat 17 dan terdapat satu sub kegiatan yang capaiannya 80%.

Dengan melihat capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan urusan yang ada sampai dengan semester 2 Tahun 2024, dapat diketahui bahwa sudah ada status tingkat capaiannya sudah sesuai target. Namun demikian, masih banyak terdapat realisasi target indikator yang tidak tercapai atau belum sesuai dengan target. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian anggaran dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah agar dapat mencapai realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan

2.3 Permasalahan Daerah

Diantara permasalahan yang dihadapi daerah pada tahun anggaran sampai dengan semester 2 tahun 2024 adalah realisasi anggaran dan kegiatan belum dapat optimal. Permasalahan pembangunan daerah yang dijabarkan adalah indikator kinerja di setiap sasaran atau bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan target tahunan di dalam RPJMD, atau capaian tahun sebelumnya atau tren yang ada.

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Kemudian, permasalahan-permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- Urusan Wajib Layanan Dasar

- a. Pendidikan

- Jumlah guru yang tersedia pada jenjang pendidikan sekolah dasar masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan kebutuhan yang seharusnya dipenuhi.
 - Kesadaran orang tua yang belum sepenuhnya muncul dalam menyekolahkan anaknya yang berumur 5-6 tahun pada pendidikan PAUD serta penyebaran lembaga pendidikan PAUD yang belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara. Hal itu dibuktikan masih adanya beberapa Desa yang belum memiliki lembaga pendidikan PAUD formal.
 - Masih terdapat anak usia 7 - 15 tahun yang putus sekolah dikarenakan berbagai latar belakang penyebab.
 - Beberapa lembaga pendidikan TK di tahun 2024 ditutup sementara karena tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diakibatkan tidak ada peserta didik yang mendaftar.
 - Banyak sekolah yang belum menyusun program penanganan kekerasan, keamanan dan iklim, inklusivitas, belum maksimalnya tim pencegahan dan penanganan kekerasan sekolah di satuan pendidikan.

- b. Kesehatan

- Prevalensi stunting masih di bawah target, penyebabnya adalah selain kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang, juga disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, pola asuh, pelaksanaan PMBA yang belum sesuai standar. Pemberian PMT balita belum mampu memberi andil yang signifikan dalam menambah kenaikan Tinggi badan atau Panjang badan.

- Masih terdapat ibu hamil akses dimana ibu hamil melakukan kunjungan pertama (K1) umur kehamilan >12.
 - Pembinaan jejaring dan pemahaman masyarakat tentang tanda-tanda persalinan perlu ditingkatkan. Masih terdapat fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan persalinan namun belum sesuai standar.
 - Kepesertaan penduduk laki-laki dalam skrining kesehatan pada usia produktif belum optimal.
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Persentase jalan kabupaten yang memiliki sistem drainase belum tercapai karena anggaran hanya cukup untuk pemeliharaan.
 - Cakupan ketersediaan layanan penduduk berakses air minum belum tercapai target pada tahun 2024 dikarenakan adanya pertambahan penduduk setiap tahunnya sehingga menyebabkan proyeksi rumah tangga yang terlayani mengalami perubahan.
 - Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan berkualitas belum sesuai target.
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- Adanya alih fungsi lahan yang diperuntukkan untuk lahan perumahan.
 - Penanganan kawasan kumuh yang belum terkelola dengan baik
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- Usulan penambahan pos damkar selalu dilakukan di setiap tahapan perencanaan, namun untuk tahun 2024 belum mendapatkan alokasi.
 - Keterbatasan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan kebakaran.
 - Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam ikut menjaga kondusivitas wilayah dan ketenteraman dan keamanan lingkungan.
- f. Sosial
- Program penanganan PMKS yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat terbatas baik dari anggaran maupun cakupan PMKS jika dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada.
 - Belum optimalnya SDM Dinsos PPPA dalam melakukan pelayanan terhadap penanganan PMKS.
 - Belum Optimalnya koordinasi dengan stakeholder baik pusat maupun daerah.
- Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - Belum sinerginya Angkatan kerja yang ada dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja.
 - Terbatasnya fasilitas pelatihan yang tidak seimbang dengan animo pelatihan yang diinginkan bagi para pencari kerja.
 - Masih terdapatnya tenaga kerja yang belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan,
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - Peningkatan kapasitas SDM Forum anak masih sangat minim dan pendampingan kegiatan forum anak oleh OPD Dinsos PPPA sangat terbatas sehingga Forum anak belum bisa melaksanakan program kerjanya dengan maksimal terutama dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelapor dalam pencegahan kekerasan pada anak.
 - Perlunya pelaksanaan peningkatan kapasitas GSIB, mengingat kematian ibu dan bayi yang relatif masih tinggi khususnya di Kecamatan Pejawaran.
 - c. Pangan
 - Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya pengelolaan pangan.

- Adanya desa rentan terhadap kerawanan pangan, daerah rawan bencana dan kemiskinan.
 - Pola konsumsi pangan masyarakat masih belum ideal
 - Potensi pangan lokal belum ditangani secara optimal
- d. Pertanian
- Pada peta bidang tanah Pemkab, seringkali mendaftarkan tanah dengan lokasi yang sama dan sudah terbit sertifikatnya.
 - Pada saat identifikasi dan pemberkasan tanah belum sepenuhnya ditemukan bukti / asal usul kepemilikan tanah yang lengkap.
 - Belum tersedia anggaran yang cukup untuk pemberkasan tanah dan akomodasi pelaksanaan ukur dan penelitian tanah
 - Pengguna Barang (OPD) yang mencatat tanah tidak memahami lokasi dan batas tanah
 - Kepedulian OPD dalam melakukan proses pensertifkatan masih cukup rendah sehingga seringkali tidak ada pendampingan dari Pengguna Barang (OPD)
 - Desa tidak sepenuhnya memahami atas obyek yang dicatat oleh OPD
 - Terjadinya tumpang tindih pencatatan dengan pihak lain seperti desa, PT KAI dan instansi vertikal lainnya
 - Luas yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang berbeda dengan luas pada saat dilakukan pengukuran sehingga seringkali harus menambah biaya pendaftaran.
- e. Lingkungan hidup
- Penurunan kualitas air yang disebabkan oleh masih adanya air limbah dan sampah yang di buang ke sungai yang menyebabkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) menurun kualitasnya.
 - Permasalahan tata guna lahan yang digunakan tidak sesuai peruntukannya, seperti membuka lahan pertanian di lahan miring yang mengurangi kekuatan kontur tanah.
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Adanya perbedaan data base anak yang belum memiliki akta kelahiran dengan kondisi riil di masyarakat.
 - Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) belum optimal.
 - Kesadaran orang tua dalam pembuatan Akta Kelahiran masih kurang karena baru membuat Akte Kelahiran ketika membutuhkan dokumen tersebut.
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- Menurunnya kesetiakawanan dan solidaritas sosial sebagai daya pengerak pemberdayaan masyarakat desa;
 - Mindset masyarakat desa yang masih berorientasi pada hal-hal yang bersifat konsumtif ketika mendapatkan bantuan program dan kegiatan dari pemerintah maupun pihak lain;
 - Upaya untuk meningkatkan ekonomi produktif bagi pribadi/keluarga rendah, hal ini dipengaruhi oleh SDM yang rendah maupun gaya hidup yang tidak sesuai;
 - Kurangnya pemahaman aparat pemerintahan desa terhadap pengelolaan BUMDesa maupun lembaga ekonomi perdesaan lainnya sebagai wadah untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- Rendahnya pengetahuan dan minat masyarakat terutama pasangan usia subur yang sudah memiliki anak lebih dari tiga orang dan dengan latar belakang ekonomi kurang untuk ikut ber KB MOW dan MOP;

- Belum maksimalnya Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) dalam mendukung program Bangga Kencana;
 - Kurangnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang pentingnya ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera sangat besar dampaknya dalam menyumbang kasus terjadinya kenakalan remaja, pernikahan usia dini, tingginya kasus stunting, tingginya angka perceraian serta tingginya angka kematian ibu dan bayi;
 - Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang metode kontrasepsi.
- i. Perhubungan
- Perlunya pengadaan keandalan informasi mengenai *database* parkir;
 - Kurangnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan wajib akan pentingnya uji kendaraan;
 - Banyak KBWU yang sudah tua dan tidak adanya inspeksi penegakan disiplin kelayakan kendaraan bermotor;
 - Jumlah jalur yang stagnasi, karena bertambahnya kendaraan pribadi sehingga hanya mempertahankan jalur yang sudah ada.
- j. Komunikasi dan Informatika
- Aduan yang memerlukan kolaborasi lintas OPD sering menghadapi kendala berupa respon lambat sehingga proses penanganan terhambat;
 - SDM pada bidang informasi dan komunikasi publik belum memiliki staf khusus yang fokus menangani kanal aduan, sehingga masih mengoptimalkan staf seksi yang lain;
 - Perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung program diseminasi informasi kepada masyarakat untuk mencapai indikator kegiatan berupa layanan 16 media.
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- Rendahnya tingkat keaktifan koperasi dengan bukti bahwa lebih dari 60% atau 443 koperasi yang terdaftar, hanya 173 koperasi yang masih aktif
 - Koperasi yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian secara mandiri masih sangat minim.
- l. Penanaman modal
- Perkembangan jumlah investor di Kabupaten Banjarnegara mengalami penurunan dari capaian total tahun 2023 sebesar 16.279 investor turun menjadi 10.769 investor di tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yaitu belum optimalnya sarana dan prasarana seperti jalan, anggaran penyelenggaraan promosi dan temu bisnis serta mahalannya harga tanah.
- m. Kepemudaan dan Olahraga
- Realisasi di lapangan ada 16 cabang olahraga yang mengikuti popda tingkat kabupaten, karesidenan dan provinsi karenanya banyaknya cabang olahraga yang mengikuti sehingga tidak bisa memenuhi pembiayaan dengan maksimal dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.
 - Bertambahnya jenjang dan nomor olahraga yang diperlombakan sehingga berpengaruh pada jumlah atlet muda yang dibina menjadi bertambah banyak.
- n. Statistik
- Belum terlaksananya integrasi SDI Daerah ke SDI Pusat
 - Masih lambatnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data dalam mengumpulkan atau menyampaikan data statistik sektoral yang diminta Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - Belum memahaminya akan arti pentingnya data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan. Sehingga data yang dilaporkan hanya

sebatas untuk memenuhi permintaan data BDA belum merujuk kepada data prioritas.

o. Persandian

- Aplikasi pelayanan publik dan pemerintahan yang ada yang telah mendapat pengamanan melalui sertifikat elektronik sangat rendah;
- SDM yang menangani persandian terutama yang berkompeten dalam hal keamanan sistem informasi masih sangat kurang.

p. Kebudayaan

- Belum adanya SOP terkait proses registrasi pengesahan grup kesenian;
- Masih kurangnya intervensi atas penyelenggaraan *event* kesenian budaya yang dilakukan di Kabupaten Banjarnegara;
- Kurang optimalnya pemeliharaan benda cagar budaya.

q. Perpustakaan

- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan perpustakaan daerah (fasilitas layanan perpustakaan belum lengkap);

r. Kearsipan

- Belum semua OPD bisa melaksanakan penanganan arsipnya sesuai ketentuan dikarenakan minimnya pengetahuan tentang kaidah pengelolaan arsip, belum mengalokasikan anggaran untuk penanganan arsip dan belum menyediakan tenaga arsiparis.

• Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

- Pendapatan pembudidaya ikan, kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan dan nelayan masih belum optimal.
- Belum optimalnya produksi perikanan budidaya walaupun potensi lahan untuk budidaya tersedia.
- Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya hayati perikanan dipengaruhi penurunan kualitas perairan umum dan perilaku masyarakat di sekitar DAS yang belum menaati kaidah penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

b. Pariwisata

- Belum optimalnya pembinaan CHSE di destinasi wisata;
- Belum optimalnya pembinaan pelaku wisata yang mana dari total pelaku wisata sebesar 2.520, hanya 580 pelaku wisata yang terbina.

c. Pertanian

- Belum optimalnya pembinaan kelembagaan kelompok tani.

d. Perdagangan

- Perlunya peningkatan standardisasi dan pengawasan peralatan perdagangan;
- Rendahnya kualitas SDM bagi IKM dan UKM sehingga berpengaruh pada produk yang dihasilkan;
- Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha;
- Sistem birokrasi yang terlalu panjang mengakibatkan lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor, sehingga berdampak pada *high cost* bagi negara yang melakukan transaksi perdagangan. Efeknya, kepercayaan antara penjual dan pembeli akan makin menurun hingga mengurangi manfaat perdagangan internasional.

e. Perindustrian

- Industri kecil menengah di Kabupaten Banjarnegara belum secara penuh menguasai dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang mampu memberikan kemudahan dalam menjalankan industrinya.

f. Transmigrasi

- Animo masyarakat untuk bertransmigrasi tinggi namun tidak

- sebanding dengan kuota penempatan transmigrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,
- Belum optimalnya penempatan transmigrasi oleh pemerintah pusat karena kuota yang ada tidak sebanding dengan tingginya animo masyarakat untuk bertransmigrasi.
- Urusan Penunjang
 - a. Perencanaan
 - Masih lemahnya ketersediaan data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan dokumen perencanaan baik dari perangkat daerah maupun dari sumber data lainnya;
 - Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan Baperlitbanng;
 - Masih perlunya peningkatan kualitas pengendalian monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja.
 - b. Keuangan
 - Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban atas pembayaran pajaknya;
 - Belum optimalnya penegakan hukum/ pemberian sanksi dalam pembayaran pajak karena ketersediaan regulasi yang mengatur sanksi dan petugas penegakan;
 - Masih perlunya peningkatan ketetapan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah.
 - c. Pengawasan
 - Masih terdapat objek pemeriksaan yang belum menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan.
 - d. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 - Masih terjadi pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Masih terdapat pejabat yang belum melaksanakan diklatpim.
 - e. Penelitian dan Pengembangan
 - Masih banyak hasil kajian dan penelitian yang dilakukan secara parsial sehingga tidak komprehensif
 - Masih rendahnya penghargaan terhadap para inovator di daerah Kabupaten Banjarnegara.
 - Masih terbatasnya akses informasi kepada masyarakat tentang hasil kelitbangan Kabupaten Banjarnegara.
 - f. Administrasi Pemerintahan
 - Tidak semua perangkat daerah mengetahui proses penyusunan Kerjasama dan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah berada di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara, sehingga setiap penyusunan Dokumen Kerja Sama harus melibatkan Tim tersebut.
 - Belum terintegrasinya penggunaan sistem pengukuran kinerja dengan sistem perencanaan dan sistem penganggaran.
 - Belum semua perangkat daerah tertib dalam mengumpulkan berkas/dokumen evaluasi pelayanan publik, Survei Kepuasan Masyarakat, kematangan kelembagaan, analisis jabatan dan pengukuran kinerja perangkat daerah per triwulan.
 - Belum semua pimpinan perangkat daerah memberikan perhatian dalam mengoptimalkan data-data pendukung terkait kematangan kelembagaan, pengukuran kinerja, pelayanan publik.
 - Masih minimnya inovasi pelayanan publik.

2.3.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan permasalahan dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029, maka isu strategis pembangunan meliputi:

1. Masih tingginya kemiskinan dan pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan daerah di Kabupaten Banjarnegara. Tingginya jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta ketimpangan ekonomi antarwilayah. Capaian angka kemiskinan Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 sebesar 14,71% dengan jumlah penduduk miskin 137,68 jiwa. Meskipun tren angka kemiskinan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Banjarnegara masih berada di posisi lima terbawah dalam daftar Kabupaten termiskin di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kemiskinan ekstrem di tahun 2024 sebesar 1,09% atau 10.180 jiwa, indeks kedalaman kemiskinan tahun 2024 sebesar 2,38 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,61. Kedua indeks tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga masih menjadi masalah serius. TPT Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 sebesar 5,57%, TPT yang tinggi menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan kebutuhan tenaga kerja, terutama bagi angkatan kerja muda dan kelompok rentan lainnya.

2. Pemulihan perekonomian daerah yang berjalan lambat

Pemulihan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan tren positif, tetapi masih berjalan lambat dan menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor yang menyebabkan pemulihan ekonomi berjalan lambat diantaranya karena ketergantungan pada sektor primer yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi kontributor terbesar dalam PDRB, tetapi kontribusinya mengalami penurunan. Faktor lainnya yaitu daya beli masyarakat yang masih terbatas, ketimpangan investasi, dan ketidakseimbangan pemulihan antar sektor. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, perlu adanya kebijakan strategis seperti peningkatan investasi di sektor-sektor produktif, penguatan daya beli masyarakat, diversifikasi ekonomi, serta peningkatan kapasitas produksi lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

3. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) masih menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan daerah di Kabupaten Banjarnegara. Rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, serta kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan SDM. Akibatnya, produktivitas dan daya saing tenaga kerja di daerah masih rendah, sehingga sulit bersaing dalam dunia kerja maupun usaha.

IPM Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 sebesar 69,62 masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi bagian dari strategi mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masih tingginya prevalensi stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah (6,87 tahun) dan harapan lama sekolah (11,83 tahun) secara relatif menunjukkan masih rendahnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan merata menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di beberapa wilayah masih terdapat keterbatasan dalam hal akses jalan, transportasi, energi, air bersih, dan sarana telekomunikasi. Selain itu, kualitas infrastruktur yang ada sering kali belum sesuai dengan standar yang diperlukan, sehingga menghambat mobilitas, konektivitas antarwilayah, serta pelayanan dasar bagi masyarakat.

Pengetatan penggunaan dana transfer membuat Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pendapatan dari pendapatan lainnya maupun dengan mengoptimalkan peran pemangku kepentingan lainnya. Hal ini di antaranya untuk meningkatkan proporsi jalan dengan kondisi baik yang turun dari 72,17% di tahun 2023 menjadi 55,27% di tahun 2024 serta meningkatkan persentase penduduk dengan rumah layak yang memiliki akses air minum dan sanitasi.

5. Kurang optimalnya Kondusivitas Wilayah

Kondisi wilayah berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masih belum optimal, artinya kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Banjarnegara belum secara optimal mampu menjamin masyarakat tenang dalam melaksanakan aktivitas sosial maupun ekonomi. Faktor-faktor seperti masih adanya potensi gangguan ketertiban, tingkat kriminalitas, konflik sosial, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi kendala dalam mewujudkan situasi yang kondusif. Kondisi ini dapat berdampak pada rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan dan stabilitas daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah dan sinergis antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk meningkatkan kondusivitas wilayah.

6. Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan aspek pendukung (*enabler*) bagi peningkatan daya saing daerah. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal ditandai dengan masih adanya birokrasi yang kurang efektif, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta kurang transparannya pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Kurangnya sinergi antara pemerintah daerah dengan stakeholder lainnya, termasuk sektor swasta dan masyarakat, juga menjadi kendala dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, inovatif, dan akuntabel. Opini WTP perlu ditingkatkan dengan tidak adanya temuan yang berulang sedangkan SAKIP terus ditingkatkan agar perencanaan hingga pada pelaksanaan dapat terlaksana secara sinergis.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab kerangka ekonomi dan keuangan daerah menjelaskan tentang kondisi perekonomian dan keuangan daerah Kabupaten Banjarnegara. Kerangka ekonomi daerah memuat tentang kondisi ekonomi tahun lalu, serta perkiraan/ proyeksi tahun berjalan dan yang akan datang yaitu tahun 2025 dan 2026. Kerangka ekonomi ini mencakup indikator-indikator yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Kerangka keuangan daerah memuat kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian meliputi sumber-sumber pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perumusan kebijakan ekonomi daerah disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global, nasional, dan regional, analisis terhadap kebijakan ekonomi nasional yang berdampak pada daerah serta kebijakan ekonomi yang dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara 2025-2029.

3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2024, 2025, dan 2026 yang mencapai kisaran 3,2-3,3 persen menunjukkan suatu tren stabilitas ekonomi yang relatif moderat. Angka ini mengindikasikan bahwa ekonomi dunia bergerak dalam fase pemulihan pascapandemi dengan laju pertumbuhan yang konsisten. Stabilitas ini penting karena menandakan bahwa berbagai negara telah mulai beradaptasi dengan dinamika ekonomi global pasca guncangan besar yang terjadi selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 3. 1
Pertumbuhan Ekonomi Global

Pertumbuhan Ekonomi (Persen, yoy)	2024	Proyeksi	
		2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)
Dunia	3,2	3,3	3,3
Negara Maju	1,7	1,9	1,8
AS	2,8	2,7	2,1
Zona Euro	0,8	1,0	1,4
Jerman	-0,2	0,3	1,1
Prancis	1,1	0,8	1,1
Italia	0,6	0,7	0,9
Spanyol	3,1	2,3	1,8
Jepang	-0,2	1,1	0,8
Inggris	0,9	1,6	1,5
Kanada	1,3	2,0	2,0
Negara Maju Lainnya	2,0	2,1	2,3
Emerging Market dan Negara Berkembang	4,2	4,2	4,3
Emerging Market dan Asia Berkembang	5,2	5,1	5,1
China	4,8	4,6	4,5
India	6,5	6,5	6,5
Emerging dan Eropa Berkembang	3,2	2,2	2,4
Rusia	3,8	1,4	1,2
Emerging Latin dan Karibia	2,4	2,5	2,7

Brazil	3,7	2,2	2,2
Meksiko	1,8	1,4	2,0
Timur Tengah dan Asia Tengah	2,4	3,6	3,9
Saudi Arabia	1,4	3,3	4,1
Sub-Sahara Afrika	3,8	4,2	4,2
Nigeria	3,1	3,2	3,0
Afrika Selatan	0,8	1,5	1,6
ASEAN-5	4,5	4,6	4,5
Emerging market dan Ekonomi Negara Menengah	4,2	4,2	4,2
Negara Berkembang Berpendapatan Rendah	4,1	4,6	5,4

Sumber: IMF, *World Economic Outlook (WEO) Januari 2025*

Negara maju diproyeksikan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 1,7% pada tahun 2024 menjadi 1,9% pada tahun 2025 dan 1,8% pada tahun 2026. Namun, tren ini tidak merata di antara negara-negara maju. Amerika Serikat misalnya, diproyeksikan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 2,7% pada tahun 2025 menjadi 2,1% pada 2026. Beberapa alasan utama di balik tren ini adalah yang pertama adanya dampak kebijakan ketat, *Federal Reserve* mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi hingga 2025 untuk mengendalikan inflasi. Suku bunga acuan yang tinggi membebani konsumsi rumah tangga dan investasi meskipun inflasi mulai terkendali pada 2026. Kedua yaitu konsolidasi fiskal, Pemerintah AS mulai mengurangi defisit anggaran melalui konsolidasi fiskal. Hal ini membatasi belanja publik, termasuk program stimulus ekonomi yang sebelumnya mendorong pertumbuhan pada 2021-2024. Ketiga yaitu ketegangan geopolitik dan pasar global, Ketegangan geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina, terus memberikan dampak negatif pada harga energi global. Meskipun harga energi mulai stabil, ketidakpastian geopolitik masih memengaruhi pasar keuangan global, yang berdampak pada ekspor dan investasi.

Di sisi lain, Kelompok *Emerging Market* dan Negara Berkembang (EMDC) terus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi global, dengan kontribusi signifikan terhadap output dunia. Namun, tren pertumbuhan ekonomi relatif tetapi yaitu dari 4,2% pada 2024 menjadi 4,2% pada 2025 dan 4,3% pada tahun 2026. Penurunan ini mencerminkan kombinasi dinamika global dan tantangan domestik yang dihadapi oleh negara-negara di kelompok ini. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang pertama yaitu dampak kebijakan moneter ketat di negara maju, kebijakan moneter ketat di Amerika Serikat, Zona Euro, dan negara maju lainnya telah menaikkan suku bunga global. Hal ini berdampak pada negara berkembang melalui peningkatan biaya pinjaman internasional dan penurunan arus modal asing, terutama untuk negara-negara dengan tingkat utang tinggi. Kedua yaitu pelemahan permintaan ekspor, negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada ekspor, seperti di kawasan Asia dan Amerika Latin, menghadapi pelemahan permintaan dari negara maju yang sedang melambat. Hal ini mengurangi pendapatan ekspor dan menekan pertumbuhan ekonomi. Ketiga yaitu tantangan struktural domestik, banyak negara berkembang masih menghadapi tantangan struktural, seperti ketergantungan pada sektor primer (pertanian dan tambang), produktivitas rendah, dan infrastruktur yang belum memadai. Hal ini membatasi kemampuan negara-negara tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

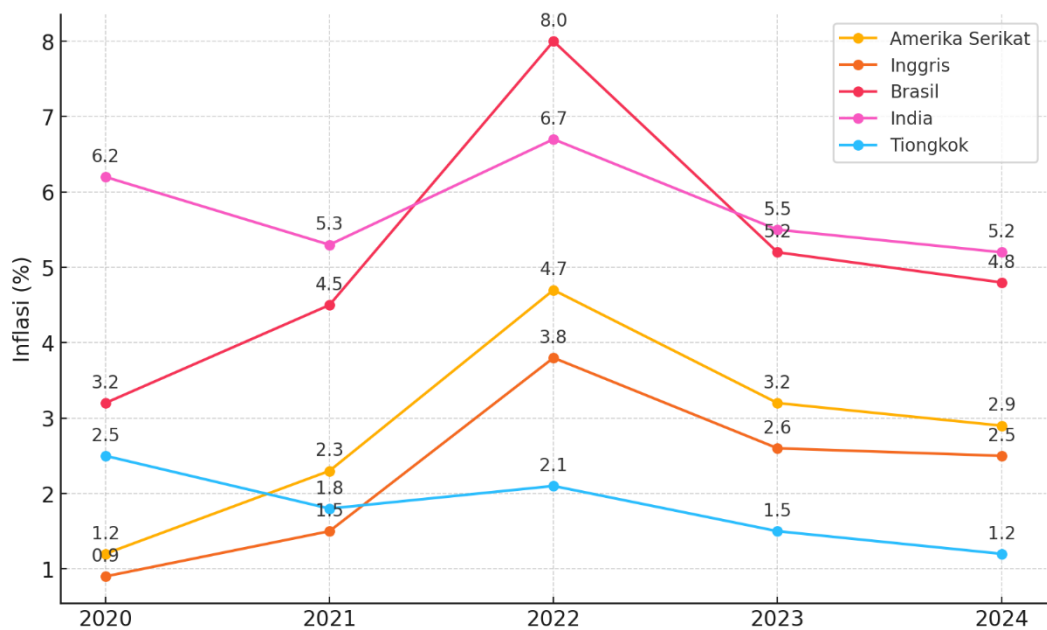
China diperkirakan tumbuh lebih lambat akibat masalah struktural di sektor properti dan perlambatan investasi. Namun, langkah-langkah stimulus fiskal yang diterapkan pemerintah membantu menjaga pertumbuhan di atas 4,5% pada 2026. Adapun India tetap menjadi pemimpin di kawasan Asia dengan proyeksi pertumbuhan 6,5% pada 2026, didukung oleh reformasi struktural, investasi besar dalam infrastruktur, dan penguatan konsumsi domestik.

Pertumbuhan di kawasan ASEAN-5, yang mencakup Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam, tetap stabil dengan proyeksi sebesar 4,5% pada tahun 2026, relatif tetap dengan tahun 2024 yang sebesar 4,5%. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan ini berhasil menjaga daya tahan ekonominya di tengah tantangan global. Indonesia sendiri diproyeksikan terus tumbuh positif, didukung oleh stabilitas domestik dan pemulihan sektor-sektor unggulan seperti manufaktur dan pariwisata.

Perubahan pola pertumbuhan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan keterkaitan erat dengan tren inflasi. Pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju menjadi respons terhadap tekanan inflasi yang terjadi pada 2024 akibat tingginya harga energi, komoditas, dan dampak gangguan rantai pasok global. Kebijakan seperti kenaikan suku bunga acuan oleh *The Federal Reserve*, *European Central Bank*, dan bank sentral lainnya telah memberikan dampak pada melambatnya aktivitas konsumsi dan investasi di berbagai negara maju, yang pada akhirnya turut menekan inflasi global.

Dalam *WEO Updates 2025*, inflasi global diperkirakan akan turun menjadi 4,2% pada tahun 2025 dan menjadi 3,5% pada tahun 2026, Amerika Serikat dan Inggris mengalami peningkatan inflasi yang signifikan pada tahun 2022, kemungkinan besar akibat gangguan rantai pasokan global dan kenaikan harga energi. Namun, proyeksi menunjukkan penurunan inflasi pada tahun 2024, mencerminkan efektivitas kebijakan moneter yang diterapkan untuk mengendalikan inflasi.

Brasil mengalami lonjakan inflasi pada tahun 2022, mencapai 8,0%, yang dapat disebabkan oleh faktor internal seperti ketidakstabilan politik dan fluktuasi mata uang. Meskipun inflasi menurun pada tahun-tahun berikutnya, tingkatnya tetap lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju. Inflasi di India tetap relatif tinggi sepanjang periode 2020-2024, dengan puncaknya pada tahun 2022. Faktor-faktor seperti harga pangan yang volatil dan tekanan permintaan domestik mungkin berkontribusi terhadap tren ini. Tiongkok berhasil menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil sepanjang periode tersebut, mencerminkan kontrol yang efektif terhadap harga dan kebijakan ekonomi yang stabil.



Sumber: IMF, World Economic Outlook (WEO) Januari 2025

Grafik 3.1
Inflasi di beberapa Negara

Secara keseluruhan, kondisi perekonomian global pada tahun 2025 mencerminkan ketidakpastian yang memerlukan langkah adaptif dari pemerintah di berbagai negara. Pemerintah perlu mencermati dinamika ini dalam merancang kebijakan ekonomi yang tanggap terhadap risiko global, sekaligus memanfaatkan peluang di sektor-sektor strategis seperti pariwisata dan UMKM. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah dapat lebih resilien dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

3.1.2. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mencapai 5,03% (*y-on-y*). Kondisi tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia memiliki ketahanan yang cukup baik di tengah masih tingginya ketidakpastian dan berbagai tantangan global yang masih membayangi, seperti fragmentasi geoekonomi, ketegangan geopolitik, hingga proyeksi ekonomi global yang tumbuh 3,3% pada 2025 dan 2026, dimana masih di bawah rata-rata historis.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi nasional sisi pengeluaran dari tahun 2020-2024, terlihat dinamika yang mencerminkan perubahan pola konsumsi dan investasi di Indonesia, serta pengaruh faktor domestik dan global terhadap ekspor dan impor. Konsumsi rumah tangga, sebagai kontributor utama dalam PDB, mencatat pertumbuhan yang stabil di kisaran 4–5% sejak 2022 hingga 2024. Pemulihan daya beli masyarakat setelah pandemi menjadi pendorong utama. Namun, tantangan inflasi yang terjadi sepanjang 2024 berpotensi membatasi pertumbuhan konsumsi lebih lanjut. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) menunjukkan lonjakan signifikan pada 2024 yang mencapai 12,48%. Lonjakan tersebut kemungkinan terkait dengan peningkatan aktivitas sosial, termasuk konteks tahun politik dan pemilihan umum.

Konsumsi pemerintah memperlihatkan dinamika yang menarik. Setelah kontraksi sebesar -4,42% pada 2022 akibat penurunan belanja pandemi, konsumsi pemerintah melonjak pada 2024 hingga 6,61%. Kenaikan tajam ini disebabkan oleh belanja modal dan operasional yang terkait dengan proyek strategis nasional, termasuk pembangunan infrastruktur dan penguatan layanan publik.

Investasi (PMTDB) tumbuh moderat di kisaran 3-4,61% yang cenderung terus meningkat, Peningkatan ini didorong oleh proyek-proyek infrastruktur besar dan meningkatnya minat investasi asing, khususnya di sektor energi terbarukan dan manufaktur. Namun, tingkat pertumbuhan yang relatif stagnan menunjukkan masih adanya hambatan struktural seperti birokrasi dan biaya logistik yang tinggi.

Kemudian hubungan antara ekspor dan impor juga menunjukkan dinamika kompleks dalam struktur perdagangan Indonesia. Penurunan ekspor pada 2023 dibarengi dengan kontraksi impor mencerminkan siklus ekonomi yang saling terkait, di mana penurunan permintaan global berdampak langsung pada volume perdagangan. Pemulihan pada 2024 menandakan bahwa Indonesia berhasil melakukan penyeimbangan ekonomi, memanfaatkan keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional sambil tetap menjaga stabilitas neraca perdagangan.

Tabel 3. 2
Pertumbuhan ekonomi Nasional Sisi Pengeluaran Tahun 2020-2024

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	-2,63	2,01	4,94	4,82	4,94
Konsumsi LNPRT	-4,21	1,62	5,66	10,03	12,48
Konsumsi Pemerintah	2,12	4,25	-4,42	3,02	6,61
Investasi (PMTDB)	-4,96	3,80	3,87	3,76	4,61
Ekspor	-8,42	17,99	16,23	1,34	6,51
Impor	-17,60	24,86	15,00	-1,60	7,95
PDB	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan ekonomi nasional dari sisi lapangan usaha selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal, termasuk pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi global. Dari tabel 3.3, terlihat bahwa pemulihan ekonomi Indonesia berlangsung bertahap dengan berbagai sektor mengalami pemulihan yang bervariasi. Sektor-sektor yang berorientasi pada mobilitas masyarakat, seperti transportasi, perdagangan, dan akomodasi, mengalami pemulihan pesat setelah pandemi. Sementara itu, sektor jasa keuangan dan asuransi serta *real estate* mengalami pertumbuhan lebih moderat. Secara keseluruhan, pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan yang relatif stabil di atas 5% sejak 2022. Sektor industri pengolahan dan perdagangan terus menjadi motor utama, sementara sektor jasa dan infrastruktur semakin berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Tantangan ke depan mencakup stabilitas harga komoditas, daya beli masyarakat, serta peningkatan investasi untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

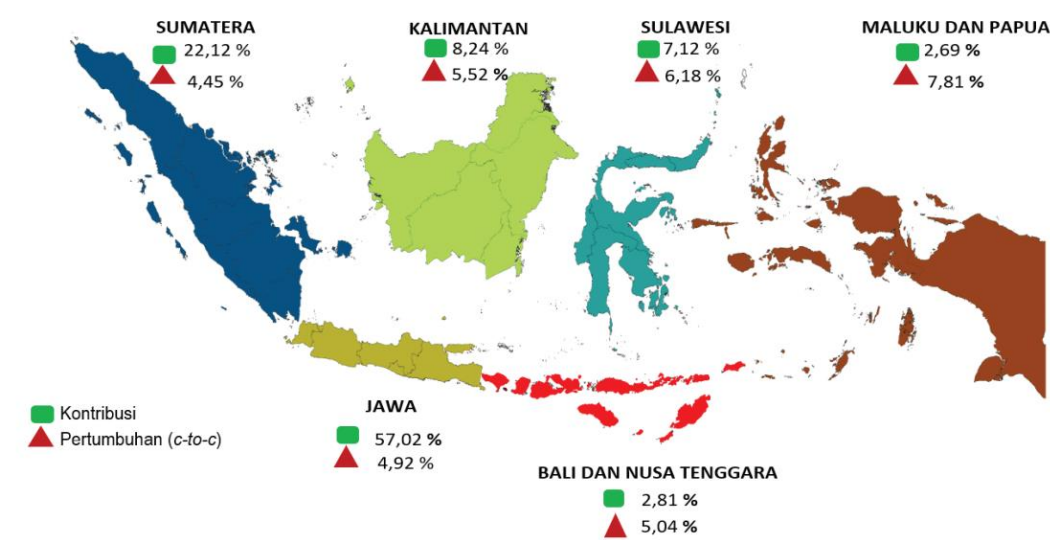
Tabel 3. 3
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,77	1,87	2,25	1,31	0,67
Pertambangan dan Penggalian	-1,95	4,00	4,38	6,12	4,90
Industri Pengolahan	-2,93	3,39	4,89	4,64	4,43
Pengadaan Listrik dan Gas	-2,34	5,55	6,61	4,91	4,77

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,94	4,97	3,23	4,90	1,56
Konstruksi	-3,26	2,81	2,01	4,91	7,02
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,79	4,63	5,53	4,85	4,86
Transportasi dan Perdagangan	-15,05	3,24	19,87	13,96	8,69
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,26	3,88	11,94	10,00	8,56
Informasi dan Komunikasi	10,61	6,82	7,73	7,59	7,57
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,25	1,56	1,93	4,77	4,74
Real Estate	2,32	2,78	1,72	1,43	2,50
Jasa Perusahaan	-5,44	0,73	8,77	8,24	8,38
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,03	-0,33	2,52	1,51	6,40
Jasa Pendidikan	2,61	0,11	0,55	1,77	3,75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,56	10,45	2,75	4,66	8,11
Jasa Lainnya	-4,10	2,12	9,47	10,52	9,80
PDB	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Adapun secara spasial, pada tahun 2024 seluruh wilayah di Indonesia melanjutkan perbaikan ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Maluku dan Papua, diikuti Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Jawa, dan Sumatera



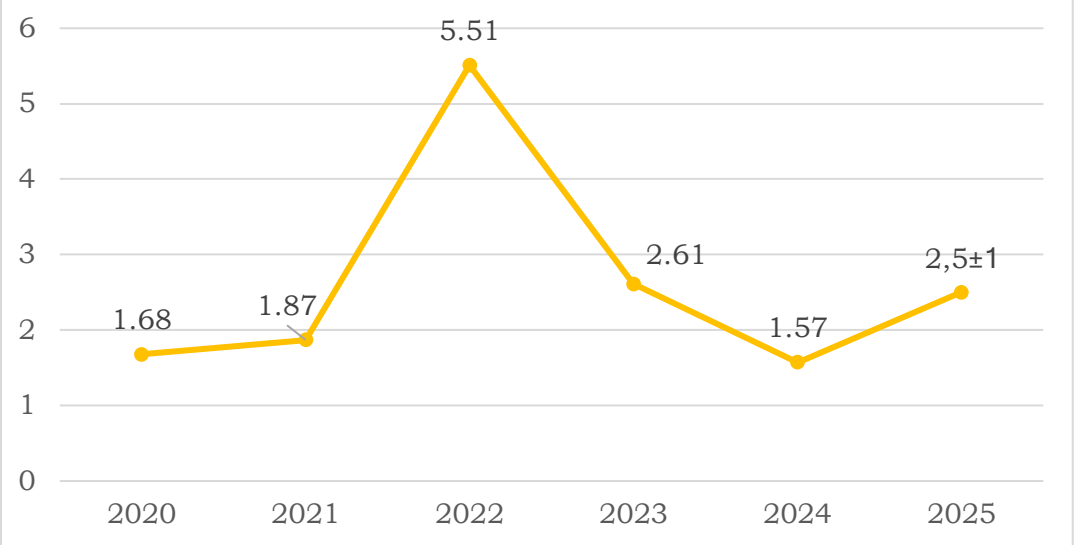
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3. 1

Peta Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB menurut Pulau, 2024

Sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi nasional selama periode 2020-2025 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020-2021, inflasi rendah (1,68%-1,87%) akibat melemahnya permintaan domestik selama pandemi Covid-19. Inflasi melonjak tajam pada tahun 2022 menjadi 5,51%, dipicu oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi, peningkatan konsumsi, serta kenaikan harga energi global akibat konflik geopolitik. Penurunan signifikan terjadi pada 2023 (2,61%) dan mencapai titik terendah pada 2024 (1,57%), mencerminkan efektivitas kebijakan moneter dalam menekan inflasi.

Namun, inflasi yang terlalu rendah perlu diwaspadai karena dapat mengindikasikan lemahnya aktivitas ekonomi. Pada 2025, inflasi diproyeksikan naik ke $2,51\pm 1\%$, sejalan dengan pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Stabilitas ini mencerminkan prospek ekonomi yang positif, tetapi perlu diimbangi dengan kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, pengendalian harga komoditas strategis, dan penguatan sektor pangan serta energi guna mengantisipasi tekanan eksternal.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.2.
Tingkat Inflasi Nasional Tahun 2020-2025

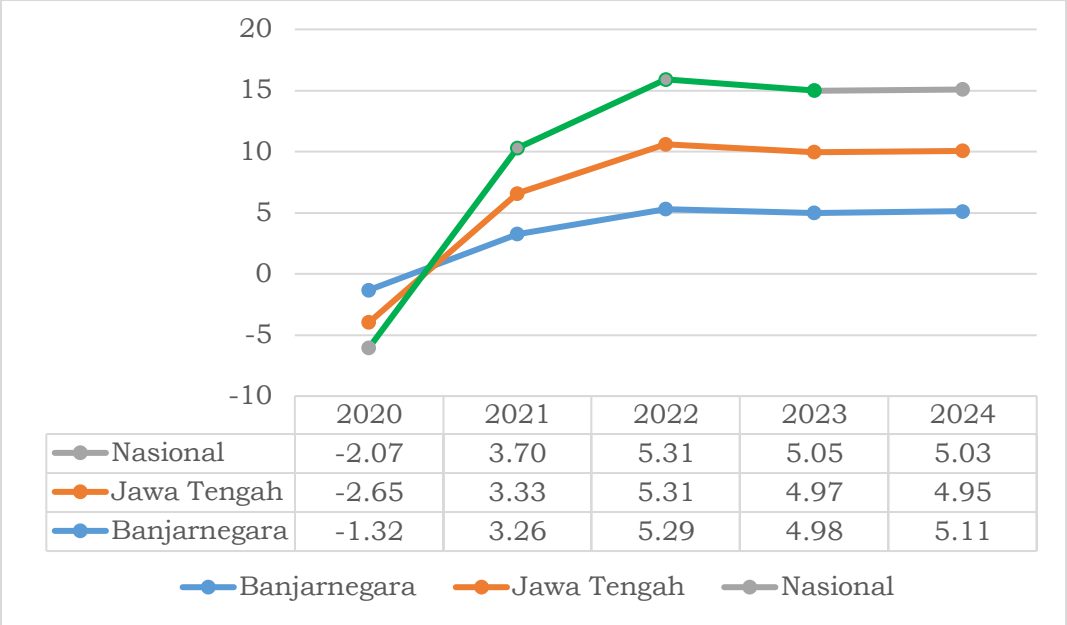
3.1.3. Kondisi Perekonomian Daerah

Sejalan dengan nasional, perekonomian Kabupaten Banjarnegara menunjukkan tren perbaikan pasca mengalami kontraksi akibat pandemi global yang berimbas pada turunnya laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020 hingga 2021. Pada grafik 3.3, dari tahun 2020-2024 menunjukkan dinamika yang menarik dalam perkembangan ekonomi di tiga tingkat wilayah yaitu Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional. Pada tahun 2020, dampak pandemi Covid-19 terlihat jelas dengan kontraksi ekonomi di semua wilayah. Jawa Tengah mengalami kontraksi paling dalam sebesar -2.65%, sementara Banjarnegara relatif lebih tahan dengan kontraksi -1.32%, dan ekonomi nasional mencatat penurunan sebesar -2.07%. Ketahanan Banjarnegara yang lebih baik ini disebabkan oleh struktur ekonominya yang lebih bertumpu pada sektor primer.

Memasuki tahun 2021, terlihat adanya pemulihan ekonomi yang signifikan di semua wilayah. Pertumbuhan nasional memimpin dengan 3.7%, diikuti Jawa Tengah dengan 3.33%, dan Banjarnegara dengan 3.26%. Pemulihan ini mencerminkan efektivitas kebijakan penanganan pandemi dan berbagai stimulus ekonomi yang diterapkan pemerintah. Momentum pemulihan ini mencapai puncaknya pada tahun 2022, di mana ketiga wilayah mencatat pertumbuhan yang hampir seragam di kisaran 5.3%. Keseragaman ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang solid dan merata, meski sebagian didorong oleh efek basis yang rendah dari tahun-tahun sebelumnya.

Tahun 2023 menandai fase normalisasi pertumbuhan ekonomi, dengan sedikit perlambatan di semua wilayah. Banjarnegara dan Jawa Tengah mencatat pertumbuhan sebesar 4.98% dan 4,97%, sementara tingkat nasional sedikit lebih tinggi di angka 5.05%. Perlambatan moderat ini merupakan hal yang wajar seiring dengan berkurangnya efek pemulihan pasca-pandemi.

Memasuki 2024, Banjarnegara kembali menunjukkan resiliensi dengan pertumbuhan 5,11%, melampaui Jawa Tengah (4,95%) dan Nasional (5,03%), yang kemungkinan disebabkan oleh penguatan fundamental ekonomi lokal, diversifikasi ekonomi, dan keberhasilan program ekonomi daerah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal di tengah tekanan ekonomi global. Pola pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjarnegara memiliki daya tahan dan adaptabilitas ekonomi yang baik, berhasil bangkit dari kontraksi pandemi dan mempertahankan momentum pertumbuhan yang relatif stabil bahkan dalam konteks tantangan ekonomi nasional dan regional.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3.3.

Laju Pertumbuhan PDRB (Atas Dasar Harga Konstan 2010) Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Kinerja perekonomian daerah selama tahun 2024 membaik di hampir seluruh lapangan usaha. Sektor-sektor utama yang menonjol adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Industri Pengolahan dan Perdagangan. Sektor Industri Pengolahan menampilkan kinerja yang stabil, dengan nilai ADHB sekitar 4.460 milyar rupiah pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 4.844 milyar rupiah pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan industri yang konsisten dan potensi pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Sektor-sektor lain seperti Konstruksi, Transportasi, dan Real Estate turut memberikan sumbangan yang berarti pada perekonomian daerah.

Menariknya, terdapat variasi nilai antara PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan, yang mencerminkan dinamika ekonomi dan dampak inflasi. Beberapa sektor seperti Jasa Pendidikan dan Kesehatan menunjukkan pertumbuhan yang stabil, mencerminkan investasi berkelanjutan di bidang pelayanan publik. Secara keseluruhan, struktur ekonomi daerah ini terlihat cukup diversifikasi, dengan keseimbangan antara sektor primer, sekunder, dan tersier, yang menandakan fondasi ekonomi yang kuat dan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan Tahun 2023-2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 4
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK)
Menurut Lapangan Usaha (milyar Rupiah) Tahun 2023-2024

Lapangan Usaha	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	2023	2024	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.788,45	8.326,34	4.631,63	4.807,56
Pertambangan dan Penggalian	1.387,69	1.465,99	790,59	835,03
Industri Pengolahan	4.460,04	4.844,15	2.438,36	2.544,98
Pengadaan Listrik dan Gas	8,36	8,93	6,51	6,90
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,20	11,02	8,14	8,32
Konstruksi	2.136,68	2.297,61	1.262,84	1.344,40
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.979,35	4.250,45	2.846,55	2.977,75
Transportasi dan Pergudangan	1.276,78	1.351,24	874,51	912,55
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	582,54	635,62	439,15	470,52
Informasi dan Komunikasi	850,27	921,27	864,90	931,73
Jasa Keuangan dan Asuransi	767,44	790,63	447,46	457,06
Real Estate	392,73	417,82	307,92	325,36
Jasa Perusahaan	110,08	121,99	69,10	74,91
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	808,56	892,85	523,66	565,31
Jasa Pendidikan	1.650,48	1.827,43	973,41	1.055,93
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	362,21	392,42	243,18	259,08
Jasa lainnya	620,46	675,46	446,46	474,44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	27.192,31	29.231,22	17.174,39	18.051,84

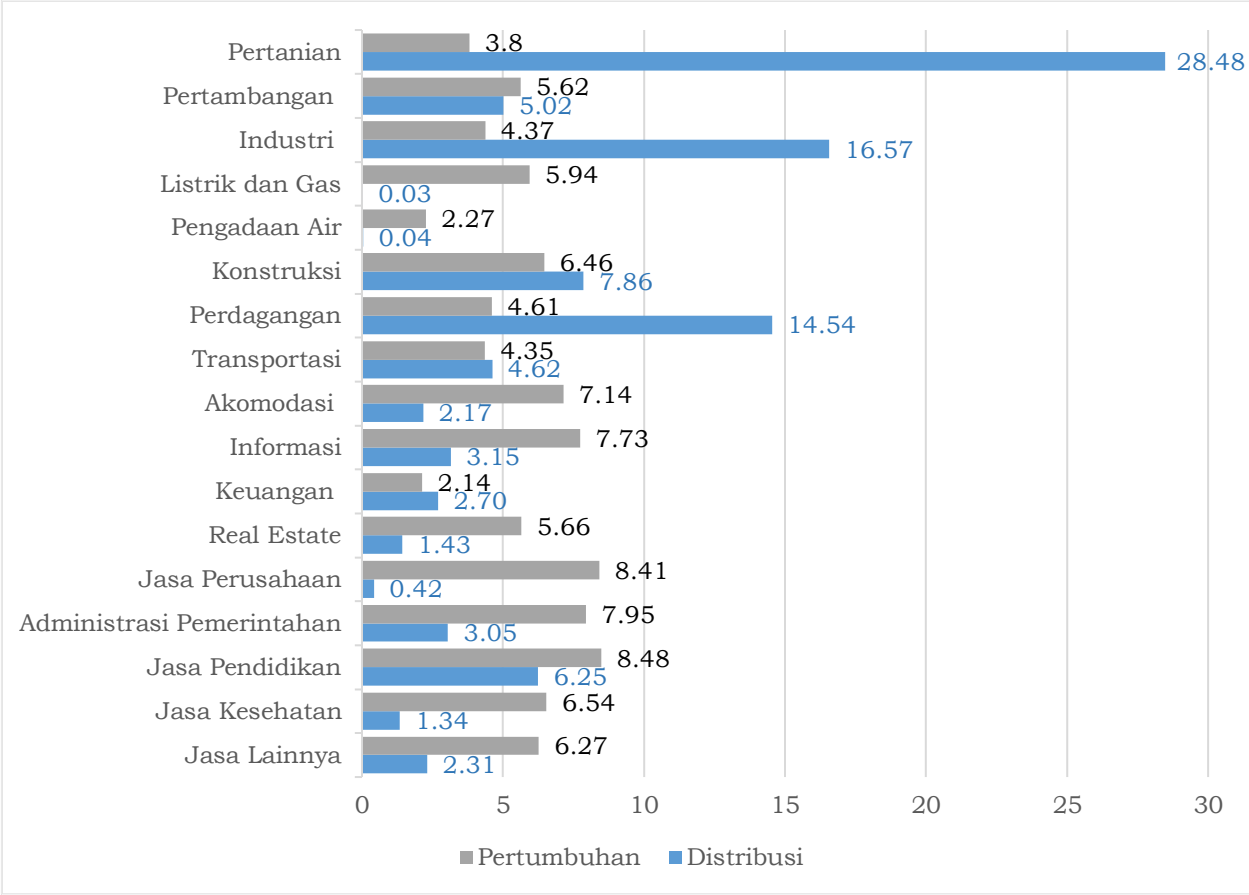
Sumber: BPS Kab. Banjarnegara

Dari sisi lapangan usaha (gambar 3.2.), sektor pertanian masih menjadi tulang punggung utama perekonomian daerah. Dengan kontribusi sebesar 28,48% namun pertumbuhan yang relatif rendah sebesar 3,8%, hal ini mengindikasikan bahwa daerah ini masih sangat bergantung pada sektor primer tradisional dengan tantangan produktivitas yang signifikan.

Sektor industri pengolahan menempati posisi strategis kedua dengan distribusi 16,57% dan pertumbuhan 4,37%. Angka ini menggambarkan proses

transformasi ekonomi yang perlahan namun konsisten menuju struktur ekonomi yang lebih modern, didorong oleh peningkatan investasi dan pengembangan infrastruktur industri. Sektor perdagangan turut mendukung dinamika ekonomi dengan kontribusi 14,54% dan pertumbuhan 4,61%, mencerminkan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis.

Sektor-sektor modern seperti informasi dan komunikasi menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan 7,73%, meskipun kontribusinya masih terbatas. Hal ini menandakan akselerasi transformasi digital yang mulai terjadi, namun masih memerlukan dukungan dan pengembangan lebih lanjut. Sektor keuangan dan jasa juga menampilkan pertumbuhan moderat, yang mengindikasikan ruang pengembangan inklusi keuangan yang masih sangat luas.



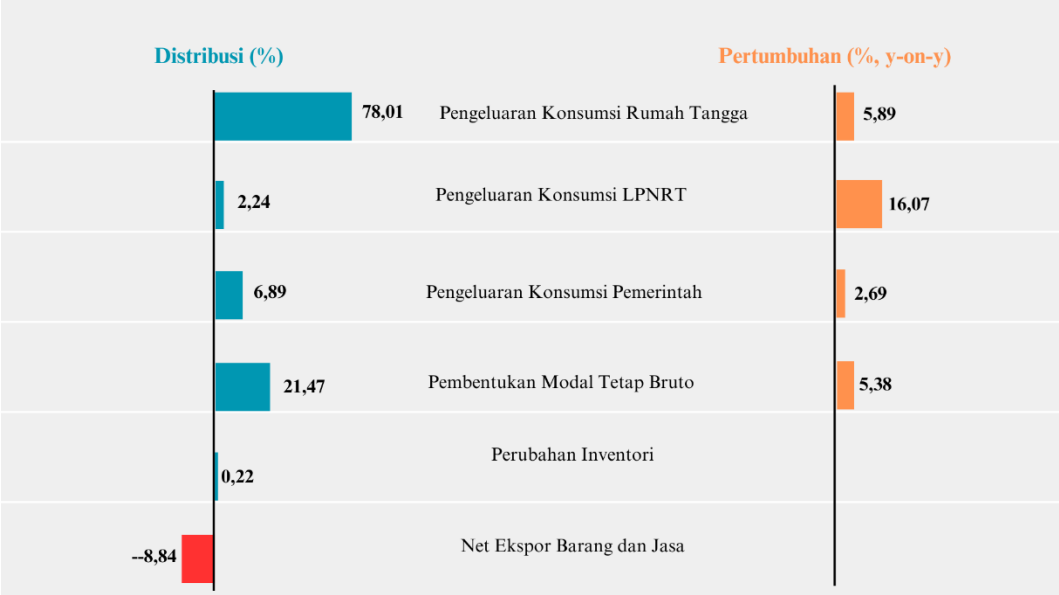
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3. 2
Distribusi dan Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

Dari sisi pengeluaran (gambar 3.3), perlambatan ekonomi Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 utamanya dipengaruhi oleh sektor net ekspor barang dan jasa yang mengalami kontraksi sebesar -8,84 persen. Hal ini menunjukkan bahwa impor masih lebih tinggi dibandingkan ekspor, yang dapat disebabkan oleh meningkatnya ketergantungan terhadap barang dan jasa dari luar daerah serta lemahnya daya saing produk ekspor lokal.

Komponen dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB di sisi pengeluaran tahun 2024 adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi melalui PMTB, meskipun terdapat tantangan pada sektor perdagangan luar negeri. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada PK-LPNRT (16,07 persen), diikuti oleh konsumsi rumah tangga (5,89 persen) dan PMTB (5,38 persen).

Di sisi lain, meskipun konsumsi pemerintah masih tumbuh, pertumbuhannya lebih lambat dibanding komponen lainnya, yang dapat mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan pengeluaran pemerintah daerah.



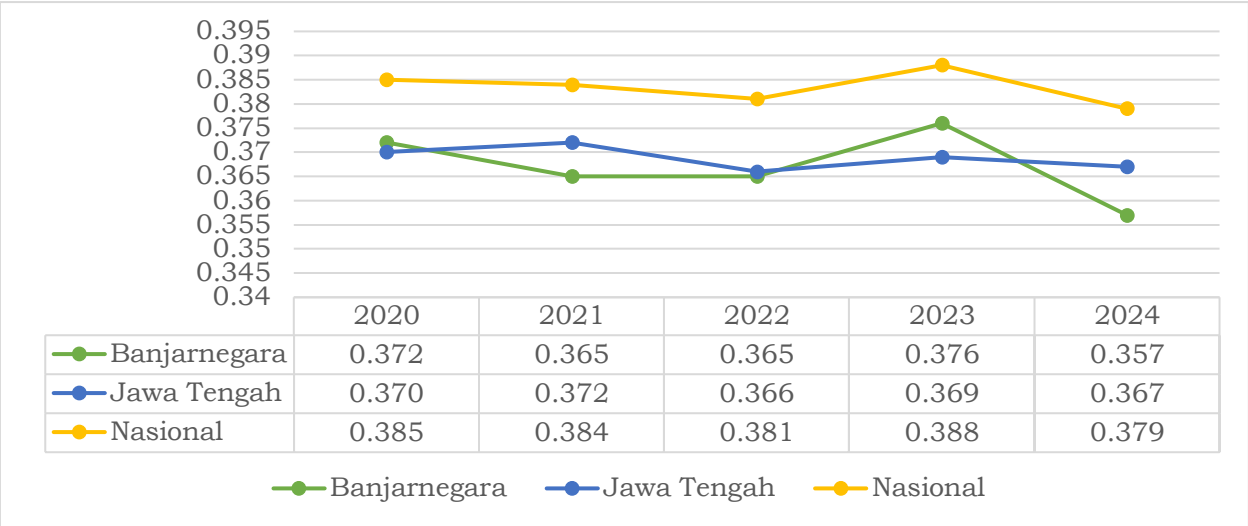
Sumber: BPS Kab. Banjarnegara

Gambar 3. 3
Distribusi dan Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran
di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

Dari sisi pemerataan, ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Banjarnegara masih berada pada ketimpangan moderat. Sehingga secara umum, tidak begitu terjadi ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Banjarnegara. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah indeks Gini. Ukuran kesenjangan dalam indeks gini besarnya antara nol dan satu (satu). Indeks gini memiliki nilai 0 (nol) yang mewakili tingkat ekuitas yang ideal. Semakin tinggi nilai Gini, semakin besar tingkat ketimpangan.

Di Kabupaten Banjarnegara, indeks gini cenderung mengalami sedikit fluktuasi, tetapi menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penguatan sektor ekonomi berbasis desa, program bantuan sosial, dan peningkatan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, sektor pertanian dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi di daerah ini kemungkinan semakin diperkuat, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan mempersempit kesenjangan ekonomi.

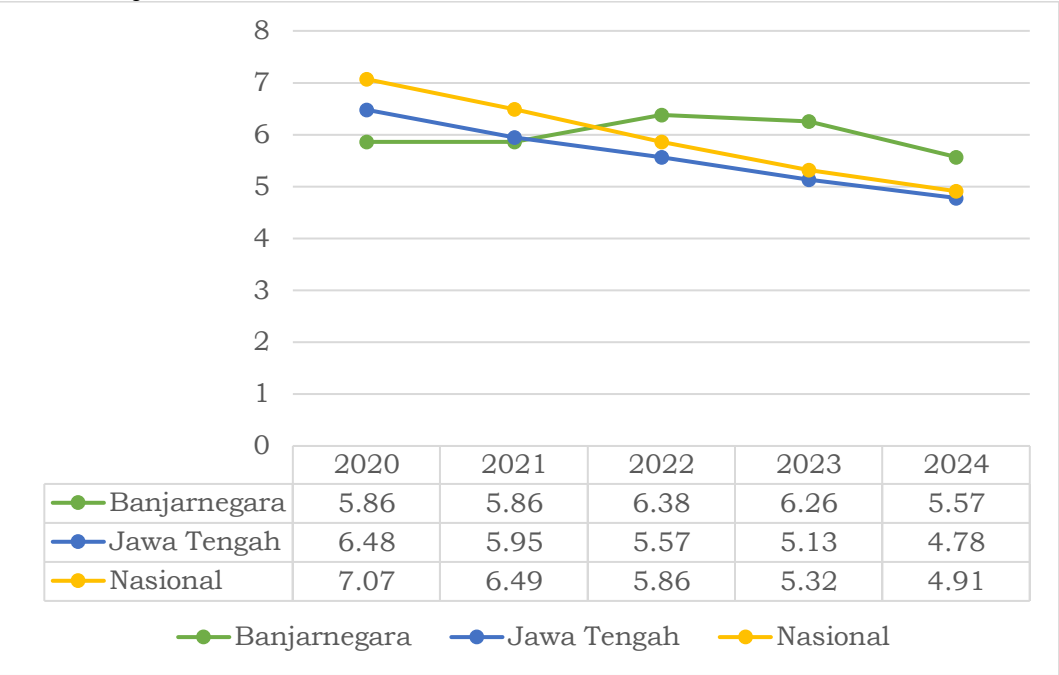
Ketika dibandingkan dengan tingkat nasional, pola di Banjarnegara dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa dinamika ekonomi di daerah tidak selalu mengikuti pola nasional secara langsung. Ketimpangan nasional yang menurun pada tahun 2024 bisa disebabkan oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang lebih merata serta penguatan kebijakan sosial-ekonomi yang lebih inklusif. Namun, kenaikan ketimpangan pada 2023 bisa disebabkan oleh tekanan ekonomi global, seperti inflasi dan dampak krisis pangan yang membuat kelompok ekonomi bawah lebih rentan.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3.4.
Perkembangan Indeks Gini Tahun 2020 - 2024

Meskipun terdapat perbaikan ekonomi, namun dampaknya terhadap pengurangan pengangguran terbuka masih terbatas. Data perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Banjarnegara dan Jawa Tengah menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari 2020 hingga 2024. TPT di Banjarnegara cenderung menurun lebih cepat dibandingkan Jawa Tengah, dari 5,86% di 2020 menjadi 5,57% di 2024. Penurunan ini dapat dijelaskan oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan kebijakan pemerintah yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Sektor informal yang dominan di Banjarnegara juga berperan dalam menyerap tenaga kerja. Meski demikian, TPT Banjarnegara masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah, mengindikasikan adanya tantangan struktural, seperti keterbatasan infrastruktur dan akses pasar tenaga kerja, yang perlu diperhatikan untuk mengurangi pengangguran lebih lanjut.



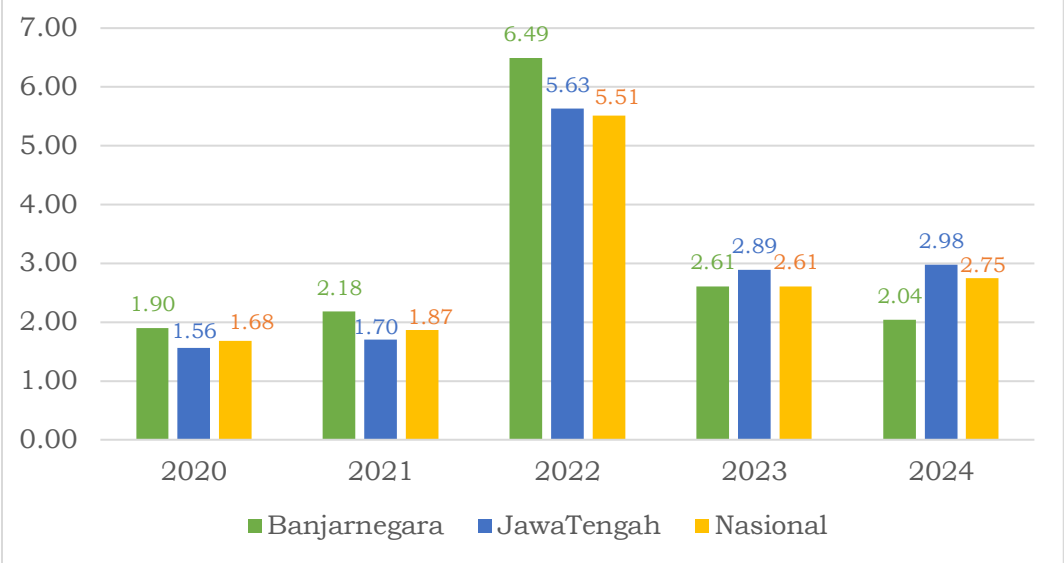
Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3.5.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 - 2024

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi daerah adalah dari nilai inflasi. Tingkat inflasi menunjukkan perubahan, baik

peningkatan maupun penurunan, dari satu periode ke periode lainnya atau dari tahun ke tahun. Inflasi menjadi salah satu indikator yang memiliki keterkaitan erat dengan harga barang dan jasa yang diperlukan oleh penduduk di suatu wilayah. Secara umum, inflasi diartikan sebagai penurunan daya beli mata uang terhadap harga barang dan jasa. Ketika inflasi meningkat, harga barang dan jasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan nilai mata uang. Inflasi berhubungan langsung dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat serta dapat memengaruhi daya beli mereka.

Inflasi nasional mengalami kenaikan dari 2,61% di tahun 2023 menjadi 2,75% di tahun 2024, sejalan dengan peningkatan inflasi di tingkat Jawa Tengah dari 2,89% di tahun 2023 menjadi 2,98% di tahun 2024. Di sisi lain, inflasi Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 tercatat sebesar 2,04% turun 0,57 poin dari inflasi pada tahun 2023. Faktor penetapan kenaikan harga BBM pada tahun 2022, sudah tidak memicu inflasi pada tahun 2024. Pemicu kenaikan harga pada tahun 2024 terbesar di Kabupaten Banjarnegara terutama disebabkan oleh komoditas pangan, seperti beras, cabai, dan minyak goreng. Faktor utama yang mempengaruhi adalah gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem seperti fenomena El Nino yang menyebabkan penurunan hasil panen. Hal ini diperparah dengan fluktuasi harga bahan bakar yang turut memengaruhi biaya produksi dan distribusi barang.



Sumber: Badan Pusat Statistik

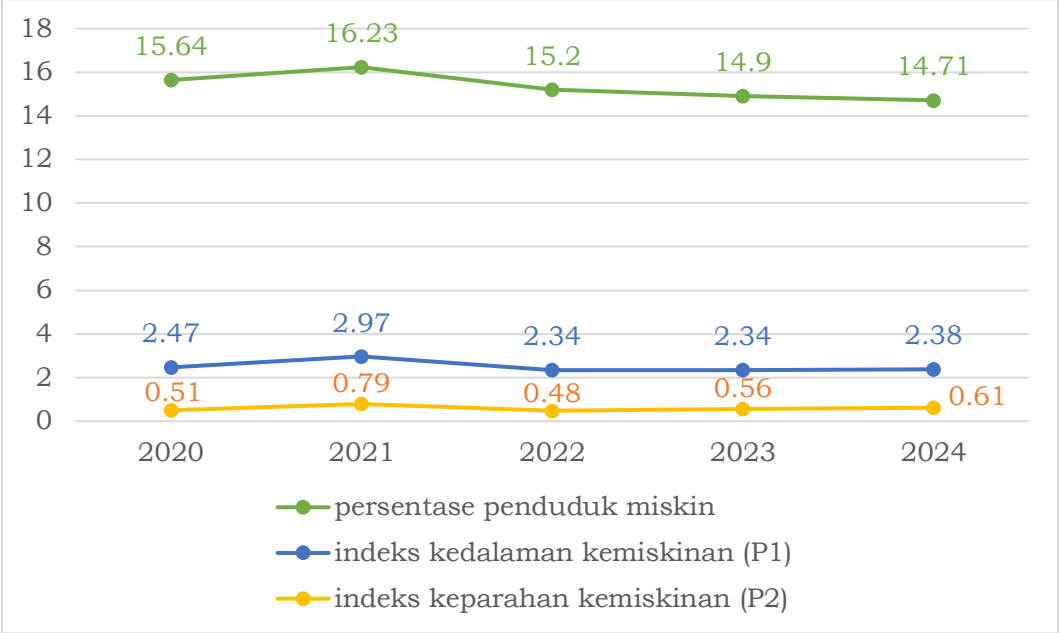
Gambar 3. 4

Inflasi Kabupaten Banjarnegara Dibandingkan Dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 - 2024

Dari sisi kemiskinan, Jumlah penduduk miskin turun dari 138,99 ribu jiwa pada tahun 2023 menjadi 137,68 ribu jiwa, sehingga proporsi penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara juga turun dari 14,90% pada tahun 2023 menjadi 14,71% pada tahun 2024. Namun, dinamika indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengungkapkan tantangan struktural yang lebih mendalam. Misalnya, pada 2021 terjadi peningkatan yang signifikan pada indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin bertambah, mereka juga berada dalam kondisi yang lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2024, meskipun persentase penduduk miskin sedikit menurun ke 14,71%, indeks kedalaman kemiskinan (P1) naik menjadi 2,38, sementara indeks keparahan kemiskinan (P2) juga meningkat menjadi 0,61. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil penduduk miskin mengalami tingkat

kesenjangan ekonomi yang semakin tajam. Lonjakan ini kemungkinan besar disebabkan oleh distribusi pendapatan yang tidak merata, dampak fenomena cuaca ekstrem seperti El Nino yang memengaruhi sektor agraris, atau ketidakseimbangan pemulihan ekonomi di tingkat mikro.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3.6.

Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 - 2024

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Secara global, proyeksi perekonomian untuk tahun 2025-2026 diperkirakan tumbuh stabil di kisaran 3,1%-3,5%, dengan kecenderungan melambat dibandingkan tahun sebelumnya akibat dinamika geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara. Di tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap berada di kisaran 4,9%-5,7% pada tahun 2026, didukung oleh pemulihan ekonomi pascapandemi yang semakin solid, stabilitas harga komoditas utama, serta konsistensi kebijakan moneter dan fiskal yang mendukung daya beli masyarakat. Stabilitasnya tingkat inflasi di Indonesia, yang diperkirakan akan berada di kisaran 2%-4%, juga akan menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan daya beli masyarakat.

Secara regional, Kabupaten Banjarnegara akan tetap bertumpu pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan perdagangan sebagai pondasi perekonomiannya. Meski demikian, tantangan berupa lemahnya daya saing daerah, keterbatasan infrastruktur konektivitas, serta tingginya ketergantungan pada sektor primer masih menjadi kendala utama yang perlu diatasi. Upaya pembenahan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, sangat penting untuk memperlancar distribusi hasil produksi, menekan biaya logistik, dan mendorong efisiensi ekonomi daerah.

Pada sektor pariwisata, pengembangan kawasan unggulan seperti Dieng menjadi prioritas, dengan fokus pada peningkatan fasilitas pendukung dan promosi destinasi berbasis keberlanjutan. Selain itu, penguatan sektor UMKM melalui program-program pemberdayaan seperti pengembangan jejaring pasar, pelatihan keterampilan, dan akses pembiayaan juga diharapkan dapat memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Stabilitas inflasi akan menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan peran pengeluaran rumah tangga sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Dengan pertumbuhan yang inklusif, diharapkan tingkat pengangguran dan kemiskinan

dapat terus ditekan, sekaligus menjadi stimulan dalam peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, penguatan daya saing sektor unggulan, peningkatan infrastruktur, serta dukungan terhadap kelompok ekonomi rentan akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara yang berkelanjutan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan melalui pengelolaan APBD yang baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus pendapatan dan pengeluaran daerah dalam bentuk APBD. Hal ini dimaksudkan agar terjadi percepatan pertumbuhan daerah dan efisiensi dari setiap kebijakan yang dibuat. Kebutuhan belanja pembangunan daerah tidak dapat lepas dari kapasitas keuangan daerah dimana pada dasarnya kapasitas tersebut ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Sedangkan analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, maka proses perencanaan sebagai basis penganggaran dalam pemerintahan daerah menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan berdasarkan kinerja. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka kebijakan keuangan dan kerangka pendanaan disusun secara terpadu melalui pendekatan keuangan dalam RPD Tahun 2023- 2026 dengan penekanan penganggaran kepada pos belanja/pengeluaran dengan kinerja terukur dari aktivitas dan program. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Kebijakan keuangan daerah terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 2026 yang bersumber dari pendapatan daerah dikaji secara komprehensif untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan, ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut:

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam RKPD Tahun 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian

serta dasar hukum penerimaannya. Penerimaan pendapatan daerah tahun 2026 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan penerimaan pendapatan tahun 2025. Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Trnnsfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kelompok pendapatan yang sepenuhnya menjadi kewenangan daerah untuk mengelolanya mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Pendapatn Asli Daerah (PAD) terdiri dari kelompok pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Pendapatan Transfer merupakan penyaluran pendapatan dari Pemerintah yang sifatnya sangat dinamis artinya memperhatikan penerimaan Pendapatan Negara, serta pemenuhan terhadap prioritas belanja yang ditentukan oleh Pemerintah. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini disajikan perkembangan masing-masing unsur pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2020-2024



Gambar 3. 5

Perkembangan Masing-Masing Unsur Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi beberapa aspek yaitu:

1. Optimalisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya pungutan pajak daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD. Sub sektor pajak bumi dan bangunan, hotel, restoran, dan tempat hiburan merupakan pos yang masih sangat potensial jika melihat perkembangan sektor tersebut di Kabupaten Banjarnegara pada saat ini. Dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan PAD beberapa strategi yang akan dilakukan antara lain:
 - a. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame.
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam tata kelola penerimaan PAD.

- c. Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Optimalisasi sumber pendapatan daerah lain yang sah, baik yang bersumber dari provinsi maupun pusat;
3. Optimalisasi kinerja BUMD;
4. Optimalisasi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
5. Mengembangkan alternative pembiayaan pembangunan.

Berikut ini disajikan gambaran pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara dalam APBD Tahun 2020-2024.

Tabel 3. 5
Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (Rupiah)

KODE	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN	1.994.604.106.561	2.086.059.742.250	2.044.546.403.305	2.154.562.362.640	2.340.245.993.457
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	271.999.439.888	361.184.263.870	332.946.400.219	384.834.335.352	430.776.074.334
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	87.998.313.990	106.278.716.461	123.232.926.993	131.419.557.757	132.160.024.508
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	16.589.489.104	24.707.701.210	31.167.385.785	32.983.845.779	264.812.325.940
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.290.379.441	17.259.412.303	18.112.778.934	21.421.057.648	22.924.652.924
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	152.121.257.353	212.938.433.896	160.433.308.507	199.009.874.168	10.879.070.962
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.719.953.264.985	1.708.530.720.433	1.684.274.856.914	1.750.381.790.752	1.897.092.029.498
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.633.849.889.603	1.626.640.585.379	1.593.758.070.388	1.648.625.871.102	1.746.203.537.167
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	86.103.375.382	81.890.135.054	90.516.786.526	101.755.919.650	150.888.492.331
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.651.401.688	16.344.757.947	27.325.146.172	19.346.236.536	12.377.889.625
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.651.401.688	16.344.757.947	27.325.146.172	19.346.236.536	12.377.889.625
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan asli daerah mencakup pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selama kurun waktu tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan dari 271.999.439.888 menjadi 430.776.074.334. Pendapatan transfer mencakup pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Selama kurun waktu tahun 2020-2024 pendapatan transfer mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 1.719.953.264.985 tahun 2020 menjadi 1.897.092.029.498 pada tahun 2024. Pencapaian target dana transfer pemerintah pusat sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat kepada daerah, sehingga sangat sulit untuk dipastikan pencapaiannya. Perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami fluktuasi dengan kecenderungan naik dari sebesar 2.651.401.688 pada tahun 2020 menjadi 12.377.889.625 pada tahun 2024.

3.2.1.1. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan Tahun 2026 mendasarkan pada realisasi pendapatan daerah tahun 2020-2024 serta anggaran tahun 2025, pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.2.402.994.935.211,- pada tahun 2026 dan menjadi sebesar Rp.2.625.083.042.975,- pada tahun 2030. Beberapa asumsi yang mendasari peningkatan pendapatan daerah adalah sebagai berikut.

- 1. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target dalam RPJMN tahun 2025-2029 berada pada angka diatas 4,5-5%.
- 2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara tumbuh sesuai dengan target RPJMD berada pada angka di atas 5%.
- 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan naik rata-rata 7,54%.
- 4. Dana Transfer diproyeksikan naik rata-rata 1%. Kenaikan berasal dari dana transfer yang bersifat block grant. Untuk dana spesifik grant masih diproyeksikan sama dengan tahun 2025.
- 5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan turun seiring dengan berakhirnya kegiatan UPLAND. Untuk proyeksi pendapatan hibah sifatnya insidental berbasis program yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat.

Secara detail proyeksi pendapatan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 6
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026

Uraian	Anggaran 2025	RKPD 2026
PENDAPATAN	2.330.604.028.000	2.402.994.935.211
PENDAPATAN ASLI DAERAH	409.754.026.000	440.584.335.478
Pendapatan Pajak Daerah	157.788.470.000	169.796.911.586
Hasil Retribusi Daerah	219.580.394.000	232.305.037.371
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.760.000.000	26.291.633.090
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.625.162.000	12.190.753.431
PENDAPATAN TRANSFER	1.844.738.221.000	1.900.432.174.733
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.754.045.401.000	1.765.412.966.092
Pendapatan Transfer Antar Daerah	90.692.820.000	135.019.208.641
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	76.111.781.000	61.978.425.000

Pendapatan Hibah	28.513.281.000	12.000.000.000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	47.598.500.000	49.978.425.000

Sumber: BPPKAD Kabupaten Banjarnegara

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kebijakan belanja daerah tahun 2026 disusun untuk mencapai target-target pembangunan daerah dalam RPD Tahun 2023-2026 melalui pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dengan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan menekankan pada efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar maupun bukan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan dilaksanakan untuk meningkatkan pembangunan daerah sesuai potensi.

Klasifikasi belanja daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja transfer yang digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban pemerintah kabupaten ke desa proporsinya fluktuatif namun cenderung meningkat. Sedangkan belanja tidak terduga proporsinya cenderung turun hal ini disebabkan oleh sifat belanja ini yang sifatnya respon terhadap kejadian yang di luar perkiraan. Secara rinci realisasi belanja daerah Kabupaten Banjarnegara tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 7
Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
5.1	Belanja Operasi	1.259.046.892.519	1.344.038.014.010	1.422.892.577.443	1.496.793.103.676	1.648.678.055.190
5.1.01	Belanja Pegawai	827.241.565.328	816.467.236.902	822.165.098.279	860.598.828.833	968.930.096.077
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.433.531.055	454.676.014.419	460.739.268.016	485.754.204.183	544.550.887.906
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0	202.222.224	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	30.246.917.201	64.128.276.592	124.972.787.105	142.069.272.436	129.815.223.207
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.124.878.935	8.766.486.097	15.015.424.043	8.168.576.000	5.381.848.000
5.2	Belanja Modal	348.505.249.709	294.844.828.809	191.794.043.374	238.397.698.407	235.196.246.888
5.2.01	Belanja Modal Tanah	117.722.300	341.529.000	2.093.268.000	0	11.962.468.203
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.425.419.090	46.568.895.498	51.750.636.616	64.110.186.058	87.106.724.079
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.186.677.468	49.020.896.250	69.077.600.844	117.409.209.690	86.285.377.085
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	247.092.540.257	194.089.691.735	61.669.040.480	44.502.570.419	38.960.492.936
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.682.890.594	4.823.816.326	7.203.497.434	12.375.732.240	10.174.252.385
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0	0	706.932.200
5.3	Belanja Tidak Terduga	37.594.817.867	22.654.563.455	9.705.855.737	3.288.493.930	7.819.955.344
5.4	Belanja Transfer	385.385.437.400	380.481.891.100	414.818.453.850	437.525.399.500	467.400.233.500

5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.714.442.000	11.040.471.500	13.609.639.250	12.937.698.500	17.873.797.500
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	373.670.995.400	369.441.419.600	401.208.814.600	424.587.701.000	449.526.436.000
	Total Belanja	2.030.532.397.495	2.042.019.297.374	2.039.210.930.404	2.176.004.695.513	2.359.94.490.922

Sumber: BPPKAD Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan belanja daerah Kabupaten Banjarnegara menunjukkan angka yang cenderung meningkat dalam kurun waktu tahun 2020-2024. Tercatat realisasi 2.030.532.397.495 pada tahun 2020 menjadi 2.359.094.490.922 pada tahun 2024. Belanja operasi meningkat dari sebesar Rp.1.259.046.892.519,00 pada tahun 2020 menjadi Rp.1.648.678.055.190,00 pada tahun 2024. Belanja modal menunjukkan penurunan dari sebesar Rp.348.505.249.709,00 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 235.196.246.888,00 pada tahun 2024. Belanja tidak terduga menurun dari Rp.37.594.817.867,00 pada tahun 2020 menjadi Rp.7.819.955.344,00 pada tahun 2024.

3.2.2.1. Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja pada tahun 2026. Belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama diproyeksikan sebesar Rp.1.586.983.999.948,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 8

Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026

Uraian	2026
Belanja Wajib Pegawai	1.053.818.628.575
Belanja Wajib Transfer	435.898.213.780
Belanja Mengikat	97.267.157.593

Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh rencana belanja daerah yang lebih besar bila dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, di dalamnya mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SILPA). Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk meningkatkan kinerja BUMD melalui penyertaan modal dan menutup defisit belanja daerah. Terkait belum ditetapkannya peraturan daerah tentang penetapan modal, maka investasi pemerintah atas BUMD masih belum dianggarkan.

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Banjarnegara menunjukkan penurunan dari sebesar Rp.88.211.343.324,- pada tahun 2020 menjadi Rp.52.668.790.294,- pada tahun 2024. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya.

Pengeluaran pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Banjarnegara menunjukkan penurunan dari sebesar Rp.10.900.000.000,- menjadi Rp.0,- yang digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah.

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan cenderung fluktuatif. Dari sebesar Rp.77.311.343.324,00 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.52.668.790.294,00 pada tahun 2024. Berikut perkembangan lengkap pembiayaan netto dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2026 memproyeksikan besaran SiLPA sebesar Rp.10.000.000.000,- dengan kebijakan pembiayaan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA) tahun sebelumnya digunakan untuk menutup defisit belanja daerah
2. Meningkatkan kinerja BUMD melalui penyertaan modal.

Berikut ini realisasi pembiayaan Kabupaten Banjarnegara tahun 2020-2024:

Tabel 3. 9
Anggaran Pembiayaan Kabupaten Banjarnegara tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	88,211,343,324	41,384,263,390	84,518,650,266	134,454,123,167	52,668,790,294
Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)	88,157,618,246	41,384,263,390	84,518,650,266	74,454,123,167	52,668,790,294
Pencairan Dana Perimbangan	0	0	0	0	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir	53,725,078	0	0	0	0
Penerimaan Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank BUMD	0	0	0	60,000,000,000	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10,900,000,000	1,000,000,000	15,400,000,000	60,343,000,000	0
Penyertaan Modal Daerah	10,900,000,000	1,000,000,000	15,400,000,000	343,000,000	0
Pembayaran Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank BUMD	0	0	0	60,000,000,000	0
Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	77,311,343,324	40,384,263,390	69,118,650,266	74,111,123,167	52,668,790,294

Sumber: BPPKAD Kabupaten Banjarnegara

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 dan tahun pertama pentahapan RPJMD Tahun 2025-2029 dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045. Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 saat ini sedang disusun sampai tahap rancangan.

Selain itu, RKPD Tahun 2026 juga disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RKP Tahun 2026, dan program strategis nasional.

4.1.1. Perspektif Rancangan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029

Sebagai bagian dari pelaksanaan tahun pertama dalam rangkaian RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 juga perlu memperhatikan visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 saat ini sedang disusun. Berdasarkan rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 terdapat visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera”

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada di dalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi yaitu “Maju” dan “Sejahtera”, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pernyataan Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera	Maju	Maju dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti menjadi lebih baik; berkembang; dan telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi. Maju dimaknai sebagai kondisi yang menggambarkan kemampuan daerah untuk mengembangkan sosial dan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maju ditunjukkan dengan tingginya daya saing, meningkatnya modernitas, terciptanya lingkungan yang inovatif, masyarakat yang mandiri dan tangguh, serta adanya kemampuan dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, baik secara fisik maupun rohani.

	Sejahtera	Sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kondisi aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala kesukaran sedang makmur dapat diartikan serba kecukupan. Secara lebih luas, sejahtera memiliki makna terpenuhinya aspek-aspek fisik, spiritual, emosional, intelektual, ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis, sehingga sejahtera merupakan suatu keadaan hidup yang berkualitas.
--	-----------	---

Dalam upaya mewujudkan visi “*Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera*” akan dilakukan melalui misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah difokuskan pada pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi secara vertikal maupun dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk sektor swasta dan masyarakat, perlu dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif dan efisien.

Dari sisi kuantitas, pembangunan infrastruktur akan diperluas untuk menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah yang masih tertinggal dalam akses layanan dasar. Ini mencakup peningkatan jaringan jalan dan jembatan untuk memperlancar mobilitas, pengembangan sistem transportasi umum yang lebih efisien, serta pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara dari sisi kualitas, pembangunan infrastruktur akan mengedepankan keawetan dan ramah lingkungan. Selain itu, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur yang sudah ada akan menjadi prioritas agar tetap berfungsi secara optimal dan tidak mengalami penurunan kualitas yang dapat menghambat pelayanan publik dan aktivitas ekonomi.

Dengan adanya peningkatan dalam kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih produktif, konektivitas yang lebih baik, serta akses layanan publik yang lebih merata, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah, menciptakan peluang usaha, serta meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu berkembang dan bersaing. Untuk mencapainya diperlukan pengembangan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, industri kreatif, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peningkatan akses terhadap permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan teknis akan diberikan kepada pelaku usaha agar mampu meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam bisnis mereka.

Selain itu, penguatan konektivitas pasar dan digitalisasi ekonomi akan menjadi prioritas dalam memperluas jangkauan pemasaran produk lokal. Pemerintah daerah akan mendorong pemanfaatan teknologi dan platform digital untuk memperkenalkan serta memasarkan produk unggulan daerah kepada pasar yang lebih luas. Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pasar rakyat, juga akan menjadi bagian dari strategi dalam memperkuat rantai pasok ekonomi daerah.

3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial

Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, misi ini berfokus pada peningkatan mutu layanan, pemerataan akses, serta penguatan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci bagi masa depan generasi yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, memperkuat kompetensi tenaga pendidik, serta memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain akses pendidikan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas juga diperlukan.

Pembangunan dan pemerataan fasilitas kesehatan akan terus dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh layanan medis dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, program kesehatan preventif dan promotif akan diperkuat, termasuk kampanye hidup sehat, layanan imunisasi, serta peningkatan gizi masyarakat untuk mencegah stunting dan penyakit kronis, serta memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan fasilitas yang memadai. Dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, berbagai program perlindungan sosial akan dioptimalkan, termasuk jaminan kesehatan bagi kelompok rentan, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta dukungan bagi penyandang disabilitas dan lansia.

4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Seiring semakin tertekannya daya dukung dan daya tampung lingkungan karena pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, pemanfaatan sumber daya alam maupun aktivitas perekonomian lainnya maka diperlukan konsep pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian alam, dan kesejahteraan masyarakat. Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, keberlanjutan sumber daya, serta mitigasi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim.

Kelestarian sumber daya alam menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menjamin kehidupan generasi mendatang. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sumber daya alam akan diarahkan

pada praktik yang berkelanjutan, seperti pemanfaatan energi terbarukan, konservasi lahan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta berketahanan terhadap bencana. Hal ini juga selaras dengan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang mendorong pembangunan rendah karbon dan peningkatan efisiensi energi.

Untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah akan menjadi prioritas utama. Peningkatan sistem pengelolaan limbah, baik limbah domestik maupun industri, akan diterapkan guna mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Selain itu, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap industri serta aktivitas yang berpotensi mencemari lingkungan akan dilakukan secara ketat guna memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang telah ditetapkan.

5. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Transparan

Pemerintahan yang baik dan transparan merupakan fondasi utama dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Misi ini bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik akan terus diperkuat. Pemerintah daerah akan memastikan bahwa setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat secara partisipatif. Pemanfaatan teknologi informasi akan diperluas dalam rangka meningkatkan keterbukaan data dan mempermudah akses informasi publik, termasuk memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat guna memastikan bahwa setiap keluhan dan masukan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Pelayanan publik akan diarahkan pada pemberian layanan yang cepat, efektif dan berorientasi pada masyarakat. Digitalisasi layanan pemerintahan akan terus dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan administrasi maupun perizinan. Selain itu, reformasi birokrasi akan dilakukan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan akan terus dilakukan guna menciptakan pelayanan yang profesional, responsif, serta memudahkan masyarakat.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan dan sasaran dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

Tujuan: Terwujudnya Banjarnegara Maju dan Sejahtera

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
2. Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan
3. Meningkatnya infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 maka dirumuskan arah kebijakan.

Arah kebijakan ini merupakan implementasi bagaimana sasaran pembangunan dapat tercapai melalui serangkaian strategi perencanaan pembangunan. Keterkaitan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjarnegara tahun 2025-2029 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Terwujudnya Banjarnegara Maju dan Sejahtera	1 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	1 Peningkatan layanan pendidikan
		2 Peningkatan layanan kesehatan
		3 Peningkatan layanan kesejahteraan sosial
		4 Peningkatan keberdayaan masyarakat
		5 Peningkatan toleransi antar penduduk
		6 Peningkatan kesiapsiagaan bencana
	2 Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	1 Pengembangan dan penguatan UMKM serta pelaku usaha ekonomi lainnya
		2 Pengembangan diversifikasi ekonomi
		3 Peningkatan promosi investasi
		4 Peningkatan produktivitas pertanian
		5 Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
		6 Pengelolaan sampah dan limbah
		7 Pengembangan energi terbarukan
		8 Peningkatan kualitas lingkungan hidup
	3 Meningkatnya infrastruktur yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1 Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan
		2 Pengembangan sistem transportasi
		3 Peningkatan infrastruktur layanan dasar
		4 Penataan ruang untuk menunjang pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan
	4 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	1 Peningkatan kualitas layanan publik
		2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		3 Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
		4. Pengembangan sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan alternatif

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029

Masing-masing tujuan dan sasaran seperti yang tercantum dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 telah diukur dengan indikator tujuan dan sasaran beserta target yang akan dicapai tahun 2026 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 2

Keterkaitan Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
Terwujudnya Banjarnegara Maju dan Sejahtera	Angka Kemiskinan			%	13,92 – 13,77
	PDRB per Kapita			Rp Juta	30,63
		Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,98
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	15,68
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	10,43
			Indeks Risiko Bencana	Angka	100,80-100,40
		Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,25 – 6,00
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,50 – 5,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	69,92
		Meningkatnya infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Pembentukan Modal Tetap Bruto per PDRB	%	22,65
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64,44
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,49

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029

Pada beberapa indikator makro Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 sebagaimana tabel di atas terdapat perubahan target berdasarkan hasil kesepakatan dengan Provinsi Jawa Tengah pada rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan (Rakortekbang) untuk penyelarasan dan mendukung kinerja indikator makro Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Indikator makro tersebut sebagai berikut Persentase Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Prevalence of Undernourishment, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029, maka ditetapkan arah kebijakan tahunan yang menjadi acuan dalam penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Berdasarkan rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, arah kebijakan tersebut seperti yang tercantum pada gambar dibawah ini:



Gambar 4. 1
Tema Pembangunan Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2026-2030

Berdasarkan arah kebijakan tahunan di atas, maka dapat dirumuskan tema RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 yaitu “Pembangunan Pondasi dan Perencanaan Strategis” yang selaras dengan RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 3
Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2026

Tema RKP Tahun 2026	Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	Tema RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026
“Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”	“Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”	“Pembangunan Pondasi dan Perencanaan Strategis”

Sumber: Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara, 2025

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita.

Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Adapun prioritas nasional sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4
Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun indikasi sasaran pembangunan nasional tahun 2026 sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,80 – 6,30 persen;
- 2) GNI per kapita sebesar 5.870;

- 3) Penurunan Intensitas GRK sebesar 37,14 persen;
- 4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 76,67;
- 5) Indeks Modal Manusia sebesar 0,57;
- 6) Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5 persen;
- 7) Rasio Gini sebesar 0,377-0,380.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Berdasarkan Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, pembangunan Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan untuk “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”. Tahun 2026 ini juga diarahkan untuk “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah” dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
 - a. Pelayanan publik yang merata dan inklusif;
 - b. Penguatan kualitas perencanaan berbasis Satu Data Indonesia, berorientasi kinerja, serta berbasis risiko dan riset;
 - c. Penguatan meritokrasi melalui pemetaan kebutuhan jabatan berdasarkan kompetensi dan kineja didukung dengan peningkatan akurasi data kepegawaian;
 - d. Penguatan pengembangan kompetensi dan integritas melalui pemetaan kompetensi berbasis tujuan pembangunan daerah;
 - e. Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal akan menjadi prioritas serta pemetaan risiko dan titik rawan korupsi serta peningkatan kapabilitas APIP;
 - f. Pelaksanaan analisis evaluasi produk hukum yang diimplementasikan pada penyusunan kebijakan daerah, pengawasan produk hukum serta penguatan jaringan dokumentasi informasi hukum;
 - g. Penguatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan;
 - h. Kelembagaan pangan efektif;
 - i. Pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
 - j. Meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
 - k. Pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
 - l. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
 - m. Penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
 - n. Sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; serta
 - o. Perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas; serta
 - p. Penguatan kelembagaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan:
 - a. Peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan;
 - b. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;
 - c. Peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
 - d. Peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - e. Peningkatan produksi pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - f. Peningkatan pertumbuhan penanaman modal;

- g. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
 - h. Peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah;
 - i. Peningkatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - j. Peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana;
 - k. Peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana;
 - l. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
 - m. Mendorong produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
 - n. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
 - o. Mendorong kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
 - p. Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan termasuk integrasi kegiatan Posyandu untuk mendukung SPM; serta
 - q. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter:
- a. Pemantapan identifikasi pemetaan SMK dengan potensi lokal, pengembangan dan penguatan kerja sama DUSI serta rintisan SMK Unggulan;
 - b. Pencapaian Wajib Belajar (WAJAR) 13 tahun dengan pemerataan akses layanan pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta evaluasi dan pelaksanaan SMK *Boarding* dan Semi *Boarding*;
 - c. Pemerataan mutu layanan pendidikan dengan pemenuhan biaya operasional sekolah dan revitalisasi sarpras pendidikan;
 - d. Penguatan pendidikan karakter dengan meningkatkan kapasitas guru dalam pencegahan serta penanganan *bullying*;
 - e. Penguatan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi serta pemantauan perijinan penyelenggaraan pendidikan;
 - f. Pemerataan akses layanan kesehatan melalui identifikasi perencanaan pengembangan layanan kesehatan lanjutan dan primer;
 - g. Pengembangan program rekrutmen dan seleksi untuk SDM Kesehatan;
 - h. Pemetaan dan penyempurnaan regulasi dan atau kebijakan daerah;
 - i. Pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di setiap kabupaten/kota serta inisiasi penyelesaian faktor risiko;
 - j. Pemetaan dan pemberian jaminan pembiayaan kesehatan;
 - k. Pemetaan regulasi terkait tata kelola sumber daya finansial;
 - l. Pemetaan dan pengembangan Sistem Kesehatan Daerah;
 - m. Penyediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat;
 - n. Peningkatan perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
 - o. Peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kebudayaan;
 - p. Pemetaan kerjasama lintas sektor dan kemitraan potensial dalam pemajuan kebudayaan;
 - q. Penguatan pondasi pembangunan olahraga melalui partisipasi aktif berolahraga di masyarakat dan satuan pendidikan; mobilisasi olahraga masyarakat dan pendidikan secara masif; peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan sarpras olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan;
 - r. Penguatan tata kelola literasi melalui koordinasi antar stakeholder; pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat; peningkatan kapasitas SDM perpustakaan; peningkatan sarpras perpustakaan;

- s. Pemetaan potensi sumber arsip untuk melengkapi khazanah arsip;
- t. Peningkatan penyadaran, partisipasi dan penguatan kewirausahaan pemuda pada sektor pertanian;
- u. Peningkatan pemerataan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial;
- v. Peningkatan pembangunan berbasis gender;
- w. Peningkatan ketahanan keluarga;
- x. Peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, IKU Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

- 1) Tingkat Kemiskinan sebesar 8,70-8,53 persen;
 - 2) Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 92,00;
 - 3) Indeks Integritas Nasional sebesar 81,78;
 - 4) Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 86,46 – 89,50;
 - 5) Otonomi Fiskal Daerah sebesar 65,72 persen;
 - 6) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 6,00 persen;
 - 7) Indeks Modal Manusia sebesar 0,61;
 - 8) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71 - 4,27 persen.
- 4.2.3. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan atau rapat penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2026 sehingga terjadi sinergitas bahwa pokok-pokok pikiran DPRD mendukung sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026. Berdasarkan rapat dengar pendapat yang dilaksanakan dengan mitra kerja dan TAPD serta hasil penjangkaran aspirasi melalui pelaksanaan reses anggota DPRD sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 yang bertema “Pembangunan Pondasi dan Perencanaan Strategis dalam Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera” diperoleh rumusan makro Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas SDM merupakan salah satu penyebab kemiskinan dan pengangguran. IPM Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 sebesar 69,62 masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi bagian dari strategi mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masih tingginya prevalensi stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah secara relatif menunjukkan masih rendahnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan pelayanan kesehatan dan akses pendidikan yang berkualitas serta merata menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

Pemenuhan akses Pendidikan yang berkualitas serta merata dapat dilakukan melalui Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan;
- b. Memperkuat pengendalian mutu pendidikan;
- c. Meningkatkan kualitas cakupan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- d. Meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung kemajuan budaya dan pelestarian cagar budaya;
- e. Meningkatkan kualitas Kabupaten Layak Anak.

Pemenuhan akses pelayanan kesehatan dengan cara :

- a. Memperkuat kualitas dan kuantitas SDM tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - b. Pembangunan infrastruktur pusat kesehatan dan rumah sakit pratama;
 - c. Memperkuat dukungan fasilitas kesehatan dan obat-obatan
2. Momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 belum didapatkan. Pertumbuhan ekonomi masih belum secara inklusif meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Banjarnegara yang hanya sebesar 4,71, tentunya dibutuhkan investasi yang besar untuk menggerakkan perekonomian daerah. Dengan adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan ada transformasi kegiatan ekonomi dari sektor ekstraktif (pertanian dan pertambangan) ke sektor manufaktur maupun tersier. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi sektor-sektor potensial seperti industri, pariwisata, perdagangan, serta jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan Penguatan perekonomian daerah, dengan fokus pada:
 - a. Meningkatkan skala promosi dan kerja sama investasi;
 - b. Mengembangkan pariwisata berbasis kerakyatan;
 - c. Memperluas akses jaringan pemasaran UKM secara digital;
 - d. Meningkatkan kualitas kelembagaan pertanian dan perikanan;
 - e. Meningkatkan penanganan panen dan pasca panen pertanian dan perikanan;
 - f. Menguatkan kelembagaan pariwisata;
 - g. Menguatkan industri kreatif dalam pengembangan pariwisata;
 - h. Meningkatkan kerja sama di bidang pemasaran dengan pelaku usaha wisata;
 - i. Memfasilitasi peningkatan inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual.
3. Pembangunan infrastruktur menjadi pilar penunjang konektivitas dan sarana dalam mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas dalam kerangka pembangunan perekonomian daerah. Peningkatan akses melalui peningkatan kualitas jalan, khususnya pada jalur strategis perekonomian dan sosial, serta peningkatan jumlah perumahan yang layak, air minum dan sanitasi yang layak dan aman, sistem pengelolaan persampahan yang terpadu, pengelolaan sumber daya air, serta keselamatan transportasi perlu secara sinergis melalui pendekatan skala prioritas untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan meningkatkan produktivitas ekonomi.
 Peningkatan kualitas infrastruktur daerah, difokuskan pada:
 - a. Meningkatkan kualitas pemeliharaan jalan;
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana keselamatan jalan raya;
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - d. Fasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi.
4. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan aspek pendukung bagi peningkatan daya saing daerah. Perbaikan tata kelola, regulasi, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan literasi digital masyarakat, dan evaluasi kelembagaan perlu mendapat perhatian agar pemerintah dapat melakukan *delivery* pelayanan kepada masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Opini WTP perlu ditingkatkan dengan tidak adanya temuan yang berulang sedangkan SAKIP terus ditingkatkan agar perencanaan hingga pada pelaksanaan dapat terlaksana secara sinergis.

Peningkatan tata kelola pemerintahan difokuskan pada:

- a. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah;
 - b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. Meningkatkan kualitas akuntabilitas pemerintah daerah;
 - d. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
5. Jumlah penduduk miskin turun dari 138,99 ribu jiwa pada tahun 2023 menjadi 137,68 ribu jiwa, sehingga proporsi penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara juga turun dari 14,90% pada tahun 2023 menjadi 14,71% pada tahun 2024 (untuk tahun 2024, garis kemiskinan di Banjarnegara adalah sebesar Rp 398.344,- per kapita/bulan). Indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*)/P1 pada tahun 2024 naik dari 2,34 menjadi 2,38, yang berarti jarak pengeluaran masyarakat miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan secara negatif. Dari sisi ketimpangan masyarakat miskin, indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*)/P2 menunjukkan kenaikan dari 0,56 pada tahun 2023 menjadi 0,61 pada tahun 2024, yang berarti terjadi kenaikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Strategi quick win dengan menyasar pada kantong-kantong kemiskinan ekstrem telah menurunkan angka kemiskinan di Banjarnegara secara agregat. Meski begitu, angka pengangguran belum menunjukkan perbaikan, sehingga diperlukan dorongan aktivitas ekonomi yang inklusif agar pertumbuhan ekonomi juga dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih optimal.
- Peningkatan Kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cara mengurangi angka kemiskinan yang difokuskan pada:
- a. Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru;
 - b. Memperkuat kelembagaan kesejahteraan sosial;
 - c. Meningkatkan peran para pemangku kepentingan dalam program-program pengentasan kemiskinan.
6. Peningkatan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - b. Pemulihan sarana dan prasarana fisik serta pemulihan psikososial bagi korban bencana di wilayah pasca bencana secara terpadu;
 - c. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di daerah rawan bencana.

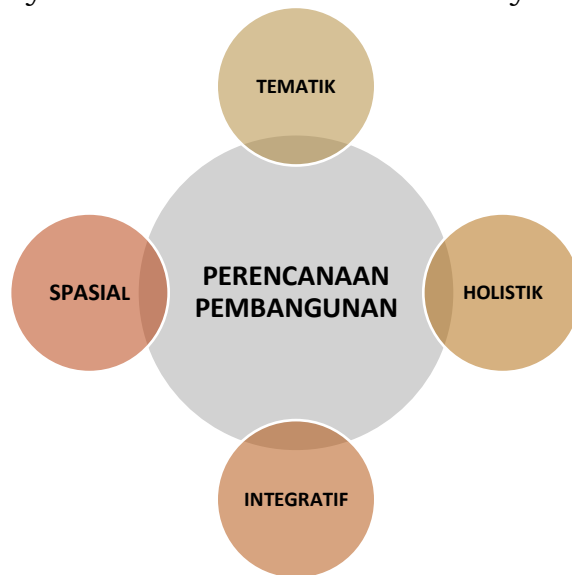
4.2.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026

Perencanaan pembangunan Kabupaten Banjarnegara disusun menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas (*top down* dan *bottom up*). Selain itu, RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) untuk mengoptimalkan peran *non state actors* dalam pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan investasi swasta, merangkul dan memberdayakan masyarakat, serta mendorong inovasi dan solusi baru untuk percepatan capaian pembangunan. Serta untuk mengoptimalkan peran dan partisipasi *stakeholders* dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara perencanaan pusat dan daerah.

Prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Banjarnegara secara rinci diuraikan sebagai berikut:

- a. Tematik: Terdapat tema prioritas pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026;
- b. Holistik: penjabaran tema dan program ke dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 yang komprehensif mulai dari hulu hingga hilir;

- c. Integratif: keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 yang dilihat dari peran berbagai pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan;
- d. Spasial: penjabaran program Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.



Gambar 4. 2
Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjarnegara memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta sinkronisasi prioritas dan arah kebijakan antara pusat, provinsi dan daerah.

Tahun 2026 merupakan tahun pertama periode RPJMD Tahun 2025-2029, arah pembangunan akan diarahkan pada pembangunan pondasi dan perencanaan strategis dalam mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera. Prioritas pembangunan pada tahun 2026 ditujukan untuk:

1. Peningkatan akses masyarakat pada layanan dasar yang berkualitas;
2. Pengembangan sektor unggulan potensial dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif;
3. Revitalisasi jalan, jembatan, dan sistem transportasi yang mendukung konektivitas ekonomi, serta pengembangan infrastruktur digital untuk menunjang perekonomian;
4. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan digitalisasi pelayanan.

Target sasaran makro pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 yang akan dicapai antara lain meliputi:

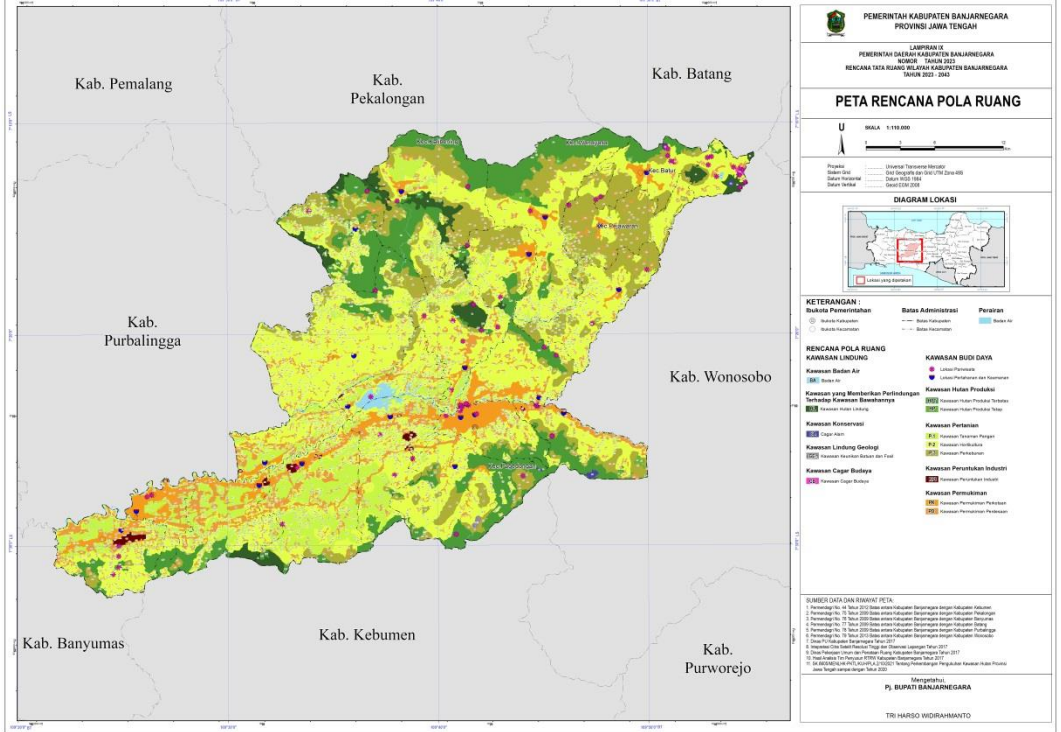
1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,25% - 6,00%;
 2. Angka Kemiskinan sebesar 13,92% - 13,77%;
 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,50% - 5,00%;
 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,98.
- 4.3. Rencana Pengembangan Wilayah Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, rencana pengembangan ekonomi wilayah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara dibagi menjadi 8 (delapan) wilayah pengembangan yang meliputi:

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, rencana pengembangan ekonomi wilayah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara dibagi menjadi 8 (delapan) wilayah pengembangan yang meliputi:

- I. Wilayah pengembangan I dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Banjarnegara, meliputi: Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Bawang, Kecamatan Madukara, dan Kecamatan Sigaluh.
 - a. Kecamatan Banjarnegara, sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Kecamatan Bawang, sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Kawasan Sentra Produksi Perikanan Rajapurbawa sebagai kawasan minapolitan dan pariwisata yang berkelanjutan;
 - c. Kecamatan Madukara, sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - d. Kecamatan Sigaluh, sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- II. Wilayah pengembangan II dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Purwareja Klampok, meliputi: Kecamatan Purwareja Klampok dan Kecamatan Susukan. Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
 - a. Kecamatan Purwareja Klampok sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Kecamatan Susukan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- III. Wilayah Pengembangan III dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Batur, meliputi Kecamatan Batur.
 - a. Kecamatan Batur sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Kawasan Sentra Produksi Agropolitan Jakabaya sebagai kawasan agropolitan dan pariwisata yang berkelanjutan
- IV. Wilayah Pengembangan IV dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Kalibening, meliputi Kecamatan Kalibening dan Kecamatan Pandanarum.
 - a. Kecamatan Kalibening sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
 - b. Kecamatan Pandanarum sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
- V. Wilayah Pengembangan V dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Purwanegara, meliputi Kecamatan Bawang, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Rakit, dan Kecamatan Wanadadi. Diarahkan sebagai Kawasan Sentra Produksi Perikanan Rajapurbawa sebagai kawasan minapolitan dan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan arahan pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, perikanan, pertanian, energi, dan pariwisata.
 - a. Kecamatan Bawang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
 - b. Kecamatan Mandiraja sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
 - c. Kecamatan Purwanegara sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
 - d. Kecamatan Rakit sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
 - e. Kecamatan Wanadadi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- VI. Wilayah Pengembangan VI dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Punggelan, meliputi Kecamatan Punggelan.
 - a. Kecamatan Punggelan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
- VII. Wilayah Pengembangan VII dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Wanayasa, meliputi Kecamatan Karangobar dan Kecamatan Wanayasa. Diarahkan sebagai Kawasan Sentra Produksi Agropolitan Jakabaya sebagai kawasan agropolitan dan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan arahan pengembangan pertanian, energi dan pariwisata.
 - a. Kecamatan Karangobar sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
 - b. Kecamatan Wanayasa sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- VIII. Wilayah Pengembangan VIII dengan pusat pelayanan lingkungan, meliputi
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Beji di Kecamatan Banjarmangu
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Kebutuhjurang di Kecamatan Pagedongan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Kebondalem di Kecamatan Bawang
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Pagentan di Kecamatan Pagentan

e. Pusat Pelayanan Lingkungan Tunggoro di Kecamatan Sigaluh



Sumber: DPUPR Kabupaten Banjarnegara
Gambar 4. 3

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Banjarnegara

4.4. Inovasi Daerah

Dalam proses pembangunan di Kabupaten Banjarnegara diperlukan berbagai bentuk inovasi daerah yang pada prinsipnya akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kepuasan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi penguatan inovasi daerah yaitu dengan pengembangan sistem inovasi. Pengembangan sistem inovasi merupakan agenda nasional yang harus dijalankan, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam peraturan bersama Menteri Riset Dan Teknologi Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 dan No. 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dinyatakan bahwa pemerintah menyikapi tuntutan peningkatan produktivitas daya saing nasional maupun daerah yang mensyaratkan inovatif melalui strategi dan program yang terarah dan dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi. Peraturan Bersama tersebut mengamanatkan bahwa setiap Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka penguatan inovasi daerah, Kabupaten Banjarnegara telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Inovasi pembangunan daerah diperlukan sebagai upaya mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Inovasi dalam pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah, kinerja pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Kinerja inovasi daerah dalam daya saing daerah dapat dilihat dari Indeks Daya Saing Daerah berikut ini:

Tabel 4. 4

Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks
2020	3,06
2021	3,00
2022	2,83
2023	3,05
2024	3,05

Sumber: BRIN, 2020-2024

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelaporan inovasi daerah ini dinilai dan menghasilkan indeks inovasi daerah. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks	Keterangan
2020	539	Inovatif
2021	41,91	Inovatif
2022	41,77	Inovatif
2023	42,90	Inovatif
2024	46	Inovatif

Sumber: Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara, 2020-2024

Dalam Roadmap SIDA Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022-2026, terdapat beberapa inovasi daerah Kabupaten Banjarnegara yang masuk dalam “Top 99 Inovasi Pelayanan Publik” pada tahun 2019 inovasi “Oce Oke” (One Clinet One Kader), yaitu Siasat Keren Cegah Tiga Terlambat dan Empat Pantuan dari Puskesmas Pejawaran dan “Tugas Pencegahan Kecurangan Proses Penilaian Pendidikan Dasar” dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) yang merupakan sistem pengendali mutu dengan mencegah kecurangan guru atau siswa di jajaran Dindikpora Kabupaten Banjarnegara. Selain itu terdapat beberapa inovasi yang diikuti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021, meliputi:

1. OCe Oke (One Client One Kader) *Siasat Keren Cegah 3 Terlambat Dengan 4 Pantauan*, yang merupakan inovasi dari Kepala Puskesmas Rakit 2 (sebelumnya Kepala Pukesmas Pejawaran), Khusnul Khotiman, S.Si.T., M.Kes. Inovasi ini diikuti pada kategori khusus karena sebelumnya, tahun 2019, pernah menerima penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB);
2. Birokrat Merdeka Berkarya dengan SAJAMISABU (Satu Amanah Jabatan ASN (Jadi Apapun) Minimal Menghasilkan Satu Karya Buku Baru) oleh Muhamad Mu’iz Raharjo, S.STP., M.Si, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program Baperlitbang. Inovasi ini masuk dalam kategori umum karena belum pernah diikuti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) sebelumnya;
3. MENAMBANG MATAHARI, hasil inovasi di bidang pertanian tanaman rendah (terutama kentang) dari Jumhan Slamet yang merupakan seorang Pengelola Pemerintahan Kecamatan Pejawaran. Merupakan inovasi yang dicetuskan tahun 2018 dalam rangka membantu para petani kentang yang mengalami penurunan produktivitas pada waktu itu, dan masih diterapkan sampai sekarang;
4. Lahir Sehat Trisuka Kudapat, Ora Ragat, adalah inovasi di bidang administrasi yang merupakan pelayanan paripurna untuk setiap bayi lahir

- di RSUD mendapatkan 3 Surat Lahir (Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga) dari Muh. Ibnu Sina, S.Psi., M.Psi, Psikolog dari RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
5. PERISAI EMAS, cegah komplikasi dengan 3 indikator warna, oleh Malika Lina Afifa, A.Md. Keb., yang merupakan seorang Bidang Pelaksana Lanjutan dari Puskesmas Batur 2. Inovasi di bidang kesehatan ini adalah inovasi pemberdayaan masyarakat dengan mengikutsertakan kader dalam mendeteksi kasus kehamilan baik yang beresiko maupun tidak beresiko;
 6. HALLO MAMA, yaitu metode rujukan kasus persalinan dengan menggunakan telepon khusus “HALLO MAMA” guna mempercepat pemberian pelayanan dengan memutus birokrasi proses rujukan serta meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam menerima rujukan. Hasil inovasi Umi Setya Utami, Pengadministrasi Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara ini dilengkapi dengan telepon online khusus melalui nomor 08112612341, SPO rujukan, jaringan SIMRS yang terintegrasi, ruangan khusus kegawatdaruratan persalinan dan ambulance khusus rujukan persalinan;
 7. CETING MBAK KENES (Cegah Stunting Dengan Praktek Pemberian Makanan Bayi Dan Anak Melalui Pemantauan Oleh Kelompok Nenek Pendukung ASI), oleh Widyawati Ardianingsih, Nutrisionis Pelaksana Lanjutan, Plt. Kepala Tata Usaha Puskesmas Banjarmangu 2;
 8. KAMSIDA (Komitmen Resik Husada), yaitu inovasi yang mengedepankan metode kemitraan dari semua unsur dalam rangka menegakkan 5 pilar STBM, oleh Umi Rofiqoh, A.Md., K., L., yang merupakan Sanitarian UPTD Puskesmas Karangkobor;
 9. AJA MAGIZ (Aksi Jitu Atasi Masalah Gizi), hasil inovasi Eka Sulistiyah, Nutrisionis pelaksana (Pegawai Dengan Perjanjian Kontrak/PDPK) Puskesmas Pagentan 2, yaitu sebuah inovasi di bidang kesehatan oleh UPTD Puskesmas Pagentan 2. Inovasi ini menggunakan sebuah Buku Pemantauan AJA MAGIZ, dengan aksi JITU (Jadwal Kontrol, Ingatkan makanmu, tuliskan makananmu) untuk mengatasi masalah gizi ibu Hamil KEK dan Balita dengan Status Gizi Kurang/Buruk.

Terdapat sejumlah inovasi yang sudah terlaksana untuk mendukung program pembangunan daerah di Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

Tabel 4. 6
 Hubungan Prioritas Daerah Tahun 2026 dengan Inovasi di Kabupaten Banjarnegara

Prioritas Daerah	Bentuk Inovasi
Peningkatan akses masyarakat pada layanan dasar yang berkualitas	Pemetaan Populasi Kunci dalam Rangka Pencegahan Infeksi Baru HIV AIDS di Banjarnegara
	SI-ERAH (Sistem Informasi Elektronik Resep Anna Lasmanah) di RSUD Hj. Anna Lasmanah banjarnegara
	Digitalisasi Visite Dokter Guna meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
	SI PEPES KOI "Sinergitas Pencegahan Dan Penanganan Stunting Kolaborasi Linsek” (Lintas Sektor) Untuk Mewujudkan Masyarakat Bebas Stunting Di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara
	Ternak Panda Lima Sebagai Upaya Percepatan Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Banjarnegara

Prioritas Daerah	Bentuk Inovasi
	Sistem Informasi Guru dan Tenaga Kependidikan Daerah (SIGTKD) Terpadu untuk Perbaikan Tata Kelola dan Layanan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Banjarnegara
	Mendongkrak Prestasi Atlet Pelajar Melalui Distance Training Center Di Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara
Pengembangan sektor unggulan potensial dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif	Optimalisasi Promosi Dan Pemasaran Pariwisata Berbasis Media Digital Terintegrasi Melalui Smart Wisata Bara Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara
	Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Potensi Agroedu Wisata Seakong Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara
Revitalisasi jalan, jembatan, dan sistem transportasi yang mendukung konektivitas ekonomi, serta pengembangan infrastruktur digital untuk menunjang perekonomian	Si Mata Petruk (Sistem Informasi Monitoring, Analisis, Targeting, dan Asistensi Pembangunan Infrastruktur)
	Membangun Data/Informasi Kebinamargaan dengan "Pojok Si Bima" (Sistem Informasi Bina Marga) untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi di Kabupaten Banjarnegara
Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan digitalisasi pelayanan	SIP RAI UMIKEMBAR (Sistem Informasi Pelayanan Gerai Usaha Mikro, Kecil, Menengah Banjarnegara) untuk meningkatkan daya saing produk UMKM Di Kabupaten Banjarnegara
	Integrasi Sistem Informasi Kecamatan dan Sistem Informasi Desa dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara
	Sinergitas Forkom Germas Untuk Mendukung Akselerasi PHBS Di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara
	Klinik LKPM sebagai pusat layanan,konsultasi dan informasi investasi di Kab.Banjarnegara
	SIMAPAN (Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan) Untuk Akselerasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Banjarnegara
	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Rakyat Daerah Di Kabupaten Banjarnegara Pada Era Digitalisasi
	WARKOM MAKARYO (Warung Komunikasi Makaryo) Untuk Meningkatkan Prosentase Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pekerjaan Di Kabupaten Banjarnegara

Prioritas Daerah	Bentuk Inovasi
	SIULAN MASTER (Sistem Informasi Usulan Layanan Sosial Masyarakat Terpadu) Untuk Peningkatan Layanan Masyarakat Miskin Dan Rentan Pada Puskesmas Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara
	Pembuatan Sistem Informasi Surat Keterangan Pembayaran Gaji PNS Guna Akselerasi Serta Efektivitas Pelayanan Gaji Dan Kasda Di Kabupaten Banjarnegara
	Meningkatkan Pemahaman Pelaku pbj Melalui Layanan Konsultasi Online (Lakon PBJ) Di Kabupaten Banjarnegara
	Peningkatan Kualitas Penerapan Tata Keprotokolan Melalui Pembuatan Buku Panduan, Praktek Dan Jaringan Keprotokolan (BUNDA PRAJA) Kabupaten Banjarnegara
	"SIAP BANJARNEGARA" Strategi Peningkatan Layanan Administrasi Kepegawaian Melalui Integrasi Layanan Digital Kabupaten Banjarnegara
	Peningkatan Pelayanan Pensiunan melalui OPEN Cantik (Kolaborasi Penggunaan E-File dan SIMPEG ASN yang Cepat, Nyaman, Terintegrasi dan Komprehensif)
	"Strawberi" Strategi Pengawasan Berbasis Resiko Kabupaten Banjarnegara
	Sistem Informasi Dan Manajemen Terpadu Administrasi Aparatur Di RSUD Hj.Anna Lasmanah Banjarnegara

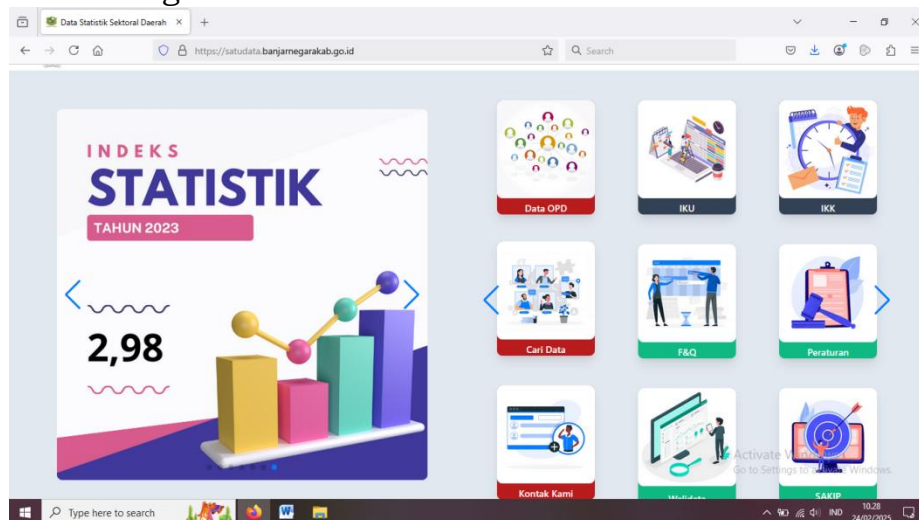
Sumber: Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

4.5. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Dalam proses pembangunan baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan, dukungan tata kelola data sangat penting dalam menghasilkan kebijakan pembangunan berbasis bukti. Tata kelola data pembangunan tersebut diwujudkan melalui Satu Data Indonesia. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan amanat Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data, yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah. Data yang dihasilkan dari penyelenggaraan statistik sangat diperlukan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pembangunan serta pengambilan keputusan berbasis data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperabel atau mudah dibagipakaikan antar pengguna data yang sesuai dengan kebijakan.

Prinsip-prinsip SDI dibangun agar penerapan tata kelola data yang telah dicanangkan pada tujuan SDI dapat dicapai. Dalam implementasinya, data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu, diantaranya adalah memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/atau kode induk. Keempat prinsip ini harus dipenuhi agar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pelaksanaan pembangunan.

Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Banjarnegara diatur dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Daerah yang selanjutnya telah diterbitkan buku petunjuk teknis penyelenggaraan statistik sektoral. Untuk menghasilkan data dan informasi yang berkualitas, Kabupaten Banjarnegara telah menggunakan Portal Satu Data Indonesia yang telah terhubung dengan Portal Data Daerah yang bisa diakses di <https://satudata.banjarnegarakab.go.id/>. Pada portal satu data, masyarakat luas dapat mengakses data-data sektoral Kabupaten Banjarnegara dengan mudah dan gratis.



Sumber: Satu Data Banjarnegara, 2025

Gambar 4. 4

Portal Satu Data Kabupaten Banjarnegara

Dalam penyelenggaraan SDI, BPS Kabupaten Banjarnegara berperan sebagai pembina data, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara berperan sebagai walidata, dan Organisasi Perangkat Daerah lain sebagai produsen data. Untuk melaksanakan tugasnya Walidata berkoordinasi dengan pembina data untuk menetapkan data prioritas, standar data, dan metadata. Adanya Data yang berkualitas dapat mendukung percepatan pembangunan daerah.

4.6. Penyelenggaraan Pengendalian Pemerintah Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah dihadapkan dengan berbagai tantangan baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah. Berbagai tantangan tersebut menekankan urgensi pengendalian pembangunan dalam mengawal pencapaian sasaran pembangunan. Pelaksanaan pengendalian bertujuan untuk memberikan perbaikan kontinu atas proses pembangunan. Aktivitas pengendalian juga dilakukan untuk memastikan kebermanfaatan pelaksanaan pembangunan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan pengendalian pemerintah daerah di Kabupaten Banjarnegara didukung dengan tersedianya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penguatan pelaksanaan SPIP, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menerbitkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Peraturan tersebut menjadi acuan pelaksanaan pengelolaan risiko dan pengendalian risiko di lingkungan Kabupaten Banjarnegara. Selama tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah melakukan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko baik untuk Perangkat Daerah dan Instansi.

Di Kabupaten Banjarnegara telah terdapat wadah penanganan pengaduan masyarakat dalam bentuk aplikasi wbs.banjarnegarakab.go.id/app/Auth/LoginController sebagai terjemahan dari Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah yang diarahkan pada 12 kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Peningkatan Pelayanan BLUD; Penataan Organisasi; Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD. Dengan 42 sub kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD; Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD; Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan; Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana; Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi; Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD; Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD; Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang diarahkan pada 4 kegiatan yaitu

1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 15 sub kegiatan meliputi Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Sekolah; Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah; Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar; Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan; Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan; Pembangunan Ruang Kelas Baru; Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan; Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun sebesar 76 unit
- Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat sebesar 38 ruang
- Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia sebesar 12.000 paket
- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan sebesar 50 unit
- Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik sebesar 8.000 peserta didik
- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi sebesar 2.400 orang
- Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah sebesar 617 Satuan Pendidikan
- Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS sebesar 618 Satuan Pendidikan
- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan sebesar 7 dokumen
- Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan sebesar 3 dokumen
- Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah sebesar 4 ruang
- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat sebesar 66 Unit
- Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan sebesar 1.234 orang
- Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar sebesar 617 orang

- Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat sebesar 20 ruang
- Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia sebesar 50 paket

2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 21 sub kegiatan meliputi Pembangunan Perpustakaan Sekolah; Pembangunan Laboratorium; Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula; Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Sekolah; Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah; Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama; Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan; Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan; Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan; Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik; Pembangunan Ruang Kelas Baru; Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun sebesar 3 ruang
- Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun sebesar 4 ruang
- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun sebesar 14 unit
- Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat sebesar 15 ruang
- Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat sebesar 3 ruang
- Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat sebesar 7 ruang
- Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat sebesar 5 ruang
- Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat sebesar 3 ruang
- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat sebesar 3 unit
- Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia sebesar 31245 Paket
- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan sebesar 10 unit
- Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik sebesar 11.000 peserta didik
- Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik sebesar 4.000 peserta didik
- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi sebesar 1.500 orang

- Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan sebesar 100 satuan pendidikan
 - Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS sebesar 100 satuan pendidikan
 - Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan sebesar 100 orang
 - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan sebesar 7 dokumen
 - Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang Dilaksanakan sebesar 1 dokumen
 - Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah sebesar 6 ruang
 - Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan sebesar 300 orang
 - Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia sebesar 5 paket
- 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Kegiatan ini dilaksanakan dengan 8 sub kegiatan meliputi Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD; Pengadaan Mebel PAUD; Pengadaan Perlengkapan PAUD; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD; Pengelolaan Dana BOP PAUD; Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD; Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan; Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.
- Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun sebesar 130 unit
 - Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia sebesar 20 paket
 - Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia sebesar 90 paket
 - Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi sebesar 1186 Orang
 - Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP sebesar 717 satuan pendidikan
 - Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD sebesar 717 orang
 - Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang Dilaksanakan sebesar 5 dokumen
 - Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan sebesar 300 orang
 - Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat sebesar 30 unit
 - Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia sebesar 40 paket

4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 6 sub kegiatan meliputi Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan; Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan; Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan; Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik; Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik sebesar 4.500 peserta didik
- Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP sebesar 21 satuan pendidikan
- Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan sebesar 3.038 Orang
- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat sebesar 3 unit
- Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar sebesar 450 peserta didik
- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan sebesar 1 unit

b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Dengan 2 sub kegiatan yaitu Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar 4 dokumen
- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar 4 laporan

c. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 300 peserta didik.

d. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Hj. Anna Lasmanah dan diarahkan pada 4 kegiatan yaitu

1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 10 sub kegiatan meliputi Pembangunan Puskesmas; Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan; Pengembangan Puskesmas; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga; Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun sebesar 6 Unit
- Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas sebesar 4 unit
- Jumlah Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya sebesar 3 unit
- Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan sebesar 12 unit
- Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar sebesar 1 unit
- Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan sebesar 2 paket
- Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas sebesar 250469 Keluarga
- Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan sebesar 1 paket

2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 28 sub kegiatan meliputi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV; Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan; Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya; Pengelolaan Surveilans Kesehatan; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA; Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular; Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat; Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional; Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat; Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya; Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal); Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria; Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar sebesar 14500 Orang
- Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar sebesar 14900 Orang
- Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar sebesar 14700 Orang
- Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar sebesar 61000 Orang
- Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar sebesar 85000 Orang
- Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar sebesar 672323 Orang
- Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar sebesar 142400 Orang
- Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar sebesar 325624 Orang
- Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar sebesar 15765 Orang
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar sebesar 2997 Orang
- Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar sebesar 10525 Orang
- Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar sebesar 18879 Orang
- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar sebesar 6 dokumen
- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebesar 6 dokumen
- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga sebesar 6 dokumen
- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan sebesar 6 dokumen
- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan sebesar 6 dokumen
- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya sebesar 1 dokumen

- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan sebesar 12 dokumen
 - Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sebesar 20 orang
 - Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sebesar 1 dokumen
 - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebesar 4 dokumen
 - Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan sebesar 12 paket
 - Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat sebesar 9 dokumen
 - Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya sebesar 1 dokumen
 - Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) sebesar 1 laporan
 - Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria sebesar 12 orang
 - Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak sebesar 6 dokumen
- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan meliputi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan sebesar 40 dokumen
- 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan meliputi Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya; Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan; Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya sebesar 61 unit
 - Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan sebesar 61 unit
 - Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan sebesar 2 dokumen

- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

- 1) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan meliputi Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar; Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
 - Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar 9 dokumen
 - Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sebesar 315 orang
 - Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar 2000 dokumen
 - 2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan meliputi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
 - Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya sebesar 200 orang
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan diarahkan pada 3 kegiatan yaitu
- 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan meliputi Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
 - Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sebesar 12 dokumen
 - 2) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan meliputi Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
 - Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga sebesar 100 dokumen

- 3) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan meliputi Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) sebesar 100 dokumen

- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan diarahkan pada 3 kegiatan yaitu

- 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan meliputi Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 1 dokumen

- 2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan meliputi Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat sebesar 1 dokumen

- 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan meliputi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) sebesar 1 dokumen.

3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

- 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 6 sub kegiatan yaitu Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan; Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan; Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan; Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan; Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi; Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

c. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 5 sub kegiatan yaitu Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan; Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan; Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan ; Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Presentase jalan yang memiliki system drainase yang memadai sebesar 3,36 persen

d. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Dengan 5 sub kegiatan yaitu Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota; Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota; Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sebesar 11,5 persen.

e. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota. Dengan 11 sub kegiatan yaitu Pengelolaan Leger Jalan; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan; Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa; Penggantian Jembatan; Rekonstruksi Jalan;

Pemeliharaan Berkala Jalan; Rehabilitasi Jembatan; Pembangunan Jembatan; Pemeliharaan Berkala Jembatan; Survey Kondisi Jalan/Jembatan; Rehabilitasi Jalan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sejumlah 80,5 persen.
- Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola sebanyak 1 dokumen.
- Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun sebanyak 1 dokumen.

f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi. Dengan 2 sub kegiatan yaitu Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi; Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Prosentase Tersedianys penyedia jasa kontruksi yang bersertifikat sebesar 80 persen.
- Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih sebesar 50 orang.

g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota; dan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota sebanyak 2 dokumen
- Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang sejumlah 1 laporan

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang sejumlah 1 dokumen.

h. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 6 sub kegiatan yaitu Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan; Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan; Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 100 orang.
 - Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun sebesar 1 dokumen.
 - Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan sebesar 500 Liter/Detik.
 - Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun sebesar 500 Liter/Detik.
 - Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara sebesar 200 Unit.
 - Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan sebesar 500 SR.
- i. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 2 sub kegiatan yaitu Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman; Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).
- Kegiatan itu dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun. 10 M³/Hari
 - Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sejumlah 100 orang.
4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Pengembangan Perumahan
- Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu
- 1) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan sebesar 2 dokumen.
- 2) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar 50 unit rumah.
- b. Program Kawasan Permukiman
- Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan dengan target 1000 Ha.

- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki sebesar 50 Unit Rumah
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan. Dengan 2 sub kegiatan yaitu Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian; Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian sebesar 5 lokasi.
 - Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang sebesar 1 laporan.
- e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil sebesar 1 laporan.
5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Penanggulangan Bencana
Program ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diarahkan pada 4 kegiatan yaitu
- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan meliputi Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana).
 - 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 6 sub kegiatan meliputi Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota; Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota; Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota; Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana

Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota; dan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan meliputi Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota; Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota; Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit.

4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan meliputi Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota; Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota; dan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota.

b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang diarahkan pada 3 kegiatan yaitu

1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 sub kegiatan yaitu Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia; dan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota sebesar 14 dokumen
- Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 12 dokumen
- Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebesar 97 orang
- Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan sebesar 1236 laporan

2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan yaitu Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah; dan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebesar 5 laporan

- Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP sebesar 92 laporan
 - Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebesar 92 laporan
- 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda sebesar 13 laporan
- c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang diarahkan pada 3 kegiatan yaitu
- 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 sub kegiatan yaitu Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota; Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri; dan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar 365 laporan
 - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran sebesar 365 dokumen
 - Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait sebesar 15 unit
 - Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran sebesar 4 dokumen
- 2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat; dan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya sebesar 200 orang
 - Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya sebesar 72 desa/kelurahan

3) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis sebesar 12 unit

6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

1) Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang sebesar 5 dokumen

2) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 sub kegiatan yaitu Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota; Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota; Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota; Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 60 orang.
- Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 20 orang.
- Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 80 keluarga.

b. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 12 sub kegiatan yaitu Penyediaan Makanan; Penyediaan Sandang ; Penyediaan Alat Bantu; Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial; Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat; Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu

Identitas Anak; Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar; Pemberian Layanan Data dan Pengaduan; Pemberian Layanan Kedaruratan; Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga; Pemberian Layanan Rujukan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 275 Orang
- Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 75 orang
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 110 orang
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 40 orang
- Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 220 orang
- Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 35 orang
- Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 15 orang
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 15 orang
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 15 orang
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 20 orang
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 40 orang
- Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 40 orang

2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 8 sub kegiatan yaitu Pemberian Layanan Kedaruratan; Penyediaan Permakanan; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial; Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA; Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga; Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga; Pemberian Layanan Rujukan; Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 15 orang
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 10 orang
- Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 15 orang

- Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 15 orang
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 15 orang
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 15 orang
- Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 10 orang
- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota sebesar 5 dokumen

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 4 sub kegiatan yaitu Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga; Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata sebesar 195255 Orang
- Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota sebesar 52155 Keluarga
- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 96861 Keluarga
- Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 80 Orang

d. Program Penanganan Bencana

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 sub kegiatan yaitu Penyediaan Makanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi; Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan; Pelayanan Dukungan Psikososial.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 400 orang
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 400 orang
- Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 75 unit
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 75 orang
- Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 75 orang

2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana; Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 2 kampung
- Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 41 orang

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota sebesar 1 TMP 8 Monumen Makam

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK). Dengan 1 sub kegiatan yaitu Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro sebesar 1 dokumen

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi. Dengan 2 sub kegiatan yaitu Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi; dan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n sebesar 60 orang.
- Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja sebesar 6 unit

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Informasi Pasar Kerja. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Job Fair/Bursa Kerja untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja, sebesar 4000 Orang

d. Program Hubungan Industrial

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan sebesar 2 laporan

- 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilakukan dengan 3 sub kegiatan yaitu Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Perselisihan yang Dicegah, sejumlah 12 perkara
- Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan, sejumlah 12 perkara
- Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi, sejumlah 1 Asosiasi dan Serikat Pekerja

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diarahkan pada 3 kegiatan yaitu:

- 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 1 dokumen
- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 54 Dokumen

- 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 10 dokumen

3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas sebesar 24 orang.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan sebesar 12 orang.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 10 dokumen

2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan sebesar 2 lembaga
- Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 3 dokumen

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia sebesar 1 dokumen

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 6 dokumen

2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 1 orang
- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 2 dokumen

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA sebesar 24 orang

2) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan sebesar 43 orang

3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 2 sub kegiatan yaitu Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya; dan Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia sebesar 2 unit
- Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia sebesar 3 unit

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang diarahkan pada 3 kegiatan yaitu

1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia sebesar 1 laporan

2) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50 ton

3) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebesar 3 laporan

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

1) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

2) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota sebesar 1 laporan

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota sebesar 2 dokumen

4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun sebesar 1 dokumen

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut sebesar 1 dokumen

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 1000 Ha.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan sebesar 2 dokumen.

e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 2 sub kegiatan yaitu Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup; Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan sebesar 1 Dokumen
 - Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH sebesar 1 dokumen
- f. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

g. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Sampah. Dengan 4 sub kegiatan yaitu Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan; Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan; Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah; Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat sebesar 1 kelompok.
 - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada sebesar 1 dokumen.
 - Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah sebesar 2 laporan.
 - Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional sebesar 1 ton.
5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diarahkan pada 3 kegiatan yaitu

- 1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan yaitu Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan; Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk; dan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

2) Penataan Pendaftaran Penduduk

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan untuk mencapai indikator kinerja Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia.

3) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pelayanan Pencatatan Sipil dengan 1 sub kegiatan yaitu Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan sebesar 6 layanan.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan sebesar 1 dokumen

2) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut

- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar 4 laporan
- Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat sebesar 3 laporan

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penyusunan Profil Kependudukan. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain.

Program ini untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun sebanyak 1 dokumen

6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Penataan Desa. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi sebesar 3 unit

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Fasilitasi Kerja Sama antar Desa. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebesar 4 dokumen

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Dengan 8 sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa; Fasilitasi Penyusunan Profil Desa; Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa; Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD; Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa; dan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebesar 801 dokumen
- Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa sebesar 1 dokumen
- Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun sebesar 1 dokumen
- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa sebesar 3 dokumen
- Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas sebesar 266 Orang

- Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa sebesar 45 desa
 - Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan sebesar 3 dokumen
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 5 sub kegiatan yaitu Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa; Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; dan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sebesar 1 dokumen
 - Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebesar 3 lembaga
 - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebesar 8 Dokumen
 - Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebesar 3 laporan
 - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sebesar 36 dokumen
7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Penduduk
- Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

- 1) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK Tingkat Kabupaten/Kota sebesar 1 dokumen

- 2) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 sub kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga; Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga; Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB; dan Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga sebesar 912 laporan
- Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga sebesar 480 Laporan
- Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian
- Lapangan dan Pelayanan KB sebesar 200 dokumen
- Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan sebesar 12 dokumen sebesar 12 dokumen

- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diarahkan pada 4 kegiatan yaitu

- 1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 6 sub kegiatan yaitu Pengendalian Program KKBPK; Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana; Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok); Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang; Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal; dan Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK sebesar 2 laporan
- Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sebesar 200 laporan

- Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) sebesar 200 laporan
 - Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang sebesar 5 dokumen
 - Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang Dilaksanakan sebesar 1 dokumen
 - Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja sebesar 5 organisasi
- 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- Kegiatan ini dilaksanakan 1 sub kegiatan yaitu Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) sebesar 17115 Orang
- 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan ini dilaksanakan 5 sub kegiatan yaitu Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya; Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP; Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya; Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan.
- Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya sebesar 330 laporan
 - Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 6648 Orang
 - Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP sebesar 6 laporan
 - Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya sebesar 4 laporan
 - Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan sebesar 10000 Orang
- 4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan yaitu Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB; dan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB sebesar 1 dokumen
- Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sebesar 54 dokumen

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kegiatan ini dilaksanakan 5 sub kegiatan yaitu Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga); Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS); Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA); Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA); Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) sebesar 2 laporan
- Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) sebesar 32 laporan/dokumen
- Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia sebesar 25 unit

- Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) sebesar 50 orang
 - Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) sebesar 2 laporan
- 2) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kegiatan ini dilaksanakan 3 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS); Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita); dan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebesar 6 organisasi
- Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebesar 10 laporan
- Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan sebesar 50000 laporan

8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yang diarahkan pada 11 kegiatan yaitu
 - 1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota; Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota; dan Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator sebagai berikut:

- Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota sebesar 7 laporan
- 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 sub kegiatan yaitu Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan; dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
- Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator sebagai berikut:
- Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia sebesar 3792 Unit
 - Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara sebesar 33 unit
 - Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara sebesar 3681 Unit
- 3) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
- Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator sebagai berikut:
- Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang sebesar 1 unit
 - Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara sebesar 4 unit
- 4) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator sebagai berikut:
- Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebesar 4 dokumen
 - Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 2 laporan
- 5) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 sub kegiatan yaitu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator sebagai berikut:

- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia sebesar 9 unit
- Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar 9105 Dokumen
- Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar 5 laporan
- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara sebesar 9 unit

6) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 5 sub kegiatan yaitu Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota; Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota; Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota; Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

7) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum; dan Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator sebagai berikut:

- Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebesar 2 laporan
- Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebesar 2 laporan

8) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota; dan Penyediaan Angkutan Umum

untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator sebagai berikut:

- Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia sebesar 8 Unit
- 9) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 2 dokumen
- 10) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.

9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 8 sub kegiatan yaitu Pelayanan Informasi Publik; Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik; Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan sebesar 3 permohonan
- Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah sebesar 9 rekomendasi
- Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis sebesar 12 media
- Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan sebesar 170 orang

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

- 1) Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa sebesar 1 dokumen

2) Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan yaitu Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda; Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota; dan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda sebesar 1 laporan
- Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota sebesar 44 perangkat daerah
- Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas sebesar 44 perangkat daerah

10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan sebesar 100 Unit Usaha

b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan sebesar 75 Unit Usaha

c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan

Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian sebesar 125 orang

d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha sebesar 60 Unit Usaha

e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Dengan 4 sub kegiatan yaitu Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro; Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro; Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro; dan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro sebanyak 60 unit usaha

f. Program Pengembangan UMKM

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan.

11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. Dengan 2 sub kegiatan yaitu Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik; Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, sebanyak 1000 Pelaku Usaha
- Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, sebanyak 151 Pelaku Usaha

b. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 3 sub kegiatan yaitu Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya; Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha; Pengawasan Penanaman Modal.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya sebesar 12 Kegiatan Usaha
- Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebesar 332 Pelaku Usaha
- Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ;serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebesar 21 Kegiatan Usaha

12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

- 1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- 2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan sebesar 250 orang
- Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya sebesar 68 orang

- Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan sebesar 5 dokumen
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang diarahkan pada 3 kegiatan yaitu
- 1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - 3) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga. untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan sebesar 3.000 orang
 - Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan sebesar 60 orang
 - Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan dari 2 organisasi
 - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan sebesar 2 dokumen
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya sebesar 1 organisasi

13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan sebesar 100%.

14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik sebanyak 1 laporan.

15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang diarahkan pada 3 kegiatan yaitu

1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan sebesar 200 orang

2) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya dan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan sebesar 1 objek
- Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan sebesar 30 sertifikat

3) Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat untuk mencapai indikator sebagai berikut:

- Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan sebesar 15 objek.

b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya. Program ini untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan sebesar 25 objek.

16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 sub kegiatan meliputi Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan; Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; dan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan sebesar 25 perpustakaan
- Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya sebesar 51 perpustakaan
- Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar 80 orang
- Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan sebesar 1250 eksemplar

2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan meliputi Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat sebesar 10 lokus.

17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang diarahkan pada 3 kegiatan yaitu

1) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis; dan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan sebesar 520 berkas
- Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan sebesar 600 berkas

2) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN untuk mencapai indikator kinerja Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN sebesar 8 pengguna.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang diarahkan pada 3 kegiatan yaitu

1) Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun untuk mencapai indikator kinerja Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan sebesar 3000 berkas

2) Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip untuk mencapai indikator kinerja Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip sebesar 750 arsip.

18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penatagunaan Tanah

Program ini diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota sebesar 400 laporan

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu

Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia sebesar 4 unit

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

1) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas sebesar 4 kelompok

2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 5 sub kegiatan yaitu Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar 1 dokumen
- Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar 3 unit
- Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan sebesar 1 dokumen
- Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar 3 unit
- Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan sebesar 1 dokumen

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota. Untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota sebesar 10 Pelaku Usaha

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha

Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar 1 ton

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang diarahkan pada 3 kegiatan yaitu

1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sebesar 12 laporan

2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota sebesar 3 dokumen

3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 sub kegiatan yaitu Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota; Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota; Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota sebesar 2 dokumen
- Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) sebesar 8 lokasi
- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara sebesar 15 unit
- Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Dengan 4 sub kegiatan yaitu Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata

Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri; Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri; Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota; dan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri sebesar 12 dokumen
- Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri sebesar 6 dokumen
- Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri sebesar 8 kegiatan
- Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri sebesar 24 promosi

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif; dan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif sebesar 120 orang
- Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata sebesar 120 orang

2) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif sebesar 120 orang

3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang diarahkan pada 5 kegiatan yaitu:

1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sebesar 3 laporan

2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman; dan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman sebesar 2 dokumen
- Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman sebesar 2 dokumen

3) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil sebesar 1 laporan

4) Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar, sebesar 1 laporan

5) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia sebesar 1 laporan

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang diarahkan pada 3 kegiatan yaitu:

1) Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya sebesar 3 laporan

2) Pembangunan Prasarana Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 6 sub kegiatan yaitu Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani; Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit; Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya; Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani; Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara sebesar 15 unit
- Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara sebesar 1 unit
- Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara sebesar 6 unit
- Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara sebesar 20 unit
- Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi sebesar 7 unit
- Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi sebesar 1 unit

3) Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang diarahkan pada 4 kegiatan yaitu:

1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan sebesar 20 wilayah

2) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM sebesar 3 laporan

3) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner, sejumlah 3 laporan

4) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan sebesar 100 Ha

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Dengan 3 sub kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa; Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa; Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebesar 5 unit
- Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebesar 3 unit
- Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian sebesar 5 unit

4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan sebesar 5 unit
- Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar 23 unit

- 2) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
 - Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan sebesar 1 dokumen
- b. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu
 - 1) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut:
 - Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota sebesar 12 laporan
 - 2) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut:
 - Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% sebesar 1 laporan
- c. Program Pengembangan Ekspor
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Peningkatan Citra Produk Ekspor untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
 - Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi sebesar 20 produk
- d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan. Dengan 2 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang; dan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
 - Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang sebanyak 3.575 unit
 - Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina sebanyak 300 orang
- e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diarahkan pada 1 kegiatan

yaitu Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Dengan 2 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota; dan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota sebesar 100 UMKM
- Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa Akomodasi sebesar 50 UMKM

5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Dengan 4 sub kegiatan yaitu Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri sebesar 1 dokumen
- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat sebesar 1 dokumen
- Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri sebesar 1 dokumen

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebesar 1 dokumen
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
 - Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas sebesar 1 dokumen

6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
 - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar 1 laporan

D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. SEKRETARIAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang diarahkan pada 4 kegiatan yaitu:
 - 1) Administrasi Tata Pemerintahan
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan yaitu Penataan Administrasi Pemerintahan; Pengelolaan Administrasi Kewilayahan; Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
 - Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan sebesar 4 dokumen
 - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan sebesar 1 dokumen
 - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah sebesar 2 dokumen
 - 2) Fasilitasi Kerja Sama Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri; Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri sebesar 20 dokumen
- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama sebesar 3 laporan

3) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan yaitu Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah; Fasilitasi Bantuan Hukum; Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

4) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual; Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial; Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang diarahkan pada 4 kegiatan yaitu:

1) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan yaitu Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD; Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.

2) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan yaitu Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan; Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup; Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

3) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan yaitu Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan; Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan; Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

4) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan yaitu Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

2. SEKRETARIAT DPRD

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD yang diarahkan pada 7 kegiatan yaitu

1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan yaitu Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; Penyelenggaraan

Kajian Perundang-Undangan; dan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik.

Kegiatan ini untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar 10 dokumen
- Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan sebesar 1 dokumen
- Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi sebesar 1 dokumen

2) Pembahasan Kebijakan Anggaran

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 6 sub kegiatan yaitu Pembahasan KUA dan PPAS; Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Pembahasan APBD; Pembahasan APBD Perubahan; Pembahasan Laporan Semester; Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

Kegiatan ini untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS sebesar 1 dokumen
- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebesar 1 dokumen
- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD sebesar 1 dokumen
- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan sebesar 1 dokumen
- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester sebesar 1 dokumen
- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sebesar 1 dokumen

3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 5 sub kegiatan yaitu Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum; Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur; Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat; Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian; Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Kegiatan ini untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum sebesar 5 laporan
- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur sebesar 5 laporan
- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar 5 laporan
- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian sebesar 5 laporan
- Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebesar 1 dokumen

4) Peningkatan Kapasitas DPRD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 5 sub kegiatan yaitu Pendalaman Tugas DPRD; Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat; Penyusunan Program Kerja DPRD; Publikasi dan Dokumentasi DPRD.

Kegiatan ini untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD sebesar 6 dokumen
 - Jumlah Tenaga Ahli Fraksi sebesar 8 orang
 - Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat sebesar 7 dokumen
 - Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD sebesar 1 dokumen
 - Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD sebesar 5 dokumen
- 5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD; dan Pelaksanaan Reses. Kegiatan ini untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun sebesar 1 dokumen
 - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses sebesar 3 dokumen
- 6) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengawasan Kode Etik DPRD untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD sebesar 2 laporan
- 7) Fasilitasi Tugas DPRD
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD; Penyusunan Laporan Kinerja DPRD; Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah; Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.
Kegiatan ini untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebesar 4 dokumen
 - Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun sebesar 1 laporan
 - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah sebesar 12 dokumen
 - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD sebesar 4 dokumen

E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. PERENCANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program ini diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan. Dengan 2 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota; dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota sebesar 2 Berita Acara
 - Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sebesar 3 dokumen
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan diarahkan pada 3 kegiatan yaitu

1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 sub kegiatan meliputi Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebesar 5 dokumen
- Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan sebesar 12 laporan
- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebesar 1 dokumen
- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia sebesar 1 laporan

2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan meliputi Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD); dan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebesar 5 dokumen
- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebesar 2 dokumen

3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 sub kegiatan meliputi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; dan Koordinasi Pelaksanaan

Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur sebesar 1 laporan
- Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur sebesar 1 laporan
- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan sebesar 3 laporan
- Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan sebesar 1 laporan

2. KEUANGAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 7 sub kegiatan meliputi Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD; dan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun sebesar 2 dokumen
- Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun sebesar 2 dokumen
- Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi sebesar 44 dokumen
- Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi sebesar 44 dokumen
- Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebesar 2 dokumen
- Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sebesar 4 dokumen
- Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 44 orang

2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 5 sub kegiatan meliputi Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah; Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD; Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK); dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah sebesar 12 dokumen
 - Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD sebesar 4 dokumen
 - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya sebesar 5 dokumen
 - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar 13 laporan
 - Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 44 orang
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 5 sub kegiatan meliputi Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah; Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran; Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota; dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah sebesar 12 laporan
- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah sebesar 4 laporan

- Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi sebesar 44 laporan
 - Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebesar 2 dokumen
 - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah sebesar 4 dokumen
- 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 5 sub kegiatan meliputi Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah; Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan; Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; dan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah sebesar 1 laporan
 - Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sebesar 4 laporan
 - Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebesar 4 laporan
 - Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota sebesar 4 laporan
- 5) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan meliputi Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 44 orang.
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan 6 sub kegiatan yaitu Penyusunan Standar Harga; Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; Pengamanan Barang Milik Daerah; Penilaian Barang Milik Daerah; Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
- Jumlah Standar Harga yang Disusun sebesar 2 dokumen
 - Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebesar 1 dokumen
 - Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah sebesar 214 laporan
 - Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah sebesar 1 laporan

- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 312 laporan
 - Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sebesar 36 laporan
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Dengan 12 sub kegiatan yaitu Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Penetapan Wajib Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; Penagihan Pajak Daerah; Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah sebesar 5 dokumen
- Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah sebanyak 4 laporan
- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 130 unit
- Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah sebanyak 12 laporan
- Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah sebanyak 12 laporan
- Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya sebanyak 14.000 objek pajak
- Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 4000 dokumen
- Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah sebanyak 750 layanan
- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sebanyak 5 dokumen
- Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sebanyak 3 dokumen
- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah sebanyak 12 laporan
- Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebanyak 4 laporan

3. KEPEGAWAIAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Kepegawaian Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah yang diarahkan pada 4 kegiatan yaitu

- 1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 sub kegiatan meliputi Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, Fasilitasi Lembaga Profesi ASN, dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
 - Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK sebesar 1 dokumen
 - Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian sebesar 1 dokumen
 - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian sebesar 2 dokumen
- 2) Mutasi dan Promosi ASN
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan meliputi Pengelolaan Mutasi ASN, Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, dan Pengelolaan Promosi ASN.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
 - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah sebesar 4 dokumen
 - Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN sebesar 6 dokumen
 - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN sebesar 2 dokumen
- 3) Pengembangan Kompetensi ASN
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan meliputi Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
 - Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan sebesar 11 orang
- 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan meliputi Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai dan Pembinaan Disiplin ASN.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
 - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebesar 12 dokumen
 - Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan sebesar 6 orang
 - Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan sebesar 10 orang

4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

1) Pengembangan Kompetensi Teknis

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan meliputi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan

Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi sebesar 785 orang
- 2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
- Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan meliputi Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan sebesar 2 laporan.

5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dan diarahkan pada 4 kegiatan yaitu

- 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Kegiatan ini dilaksanakan 1 sub kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
 - Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat sebesar 1 dokumen.
- 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Kegiatan ini dilaksanakan 1 sub kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum; Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
 - Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum sebesar 1 dokumen
 - Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 dokumen
 - Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar 1 dokumen
- 3) Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
 - Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi sebesar 1 dokumen.

F. URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. INSPEKTORAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini dilaksanakan oleh Inspektorat yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 7 sub kegiatan yaitu Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah; Reviu Laporan Kinerja; Reviu Laporan Keuangan; Pengawasan Desa; Kerja Sama Pengawasan Internal; dan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 8 laporan
- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 9 laporan
- Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja sebesar 45 laporan
- Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan sebesar 2 laporan
- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa sebesar 32 laporan
- Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk sebesar 1 kesepakatan
- Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP sebesar 2 dokumen

2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani sebesar 6 laporan
- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebesar 14 laporan

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini dilaksanakan oleh Inspektorat yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; dan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun sebesar 3 rekomendasi
- Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun sebesar 3 rekomendasi

2) Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 sub kegiatan yaitu Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi; Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 44 perangkat daerah
- Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi sebesar 44 perangkat daerah
- Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebesar 3 kegiatan
- Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas sebesar 44 perangkat daerah

G. UNSUR KEWILAYAHAN

1. KECAMATAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini dilaksanakan oleh kecamatan yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu

1) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.

2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha; Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan; dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini dilaksanakan oleh Kecamatan yang diarahkan pada 2 kegiatan yaitu:

1) Kegiatan pemberdayaan kelurahan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan yaitu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan; Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan; Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan Evaluasi Kelurahan.

2) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini dilaksanakan oleh Kecamatan yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dengan 2 sub kegiatan yaitu Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan ; dan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh Kecamatan.

- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program ini dilaksanakan oleh Kecamatan yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ini dilaksanakan oleh Kecamatan yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dengan 7 sub kegiatan yaitu Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa; Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa; Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa; Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

H. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:
 - Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan sebesar 100 orang
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Program ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Dengan 2 sub kegiatan yaitu Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah; dan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun sebesar 10 dokumen

- Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sebesar 10 laporan

c. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dengan 2 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; dan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebesar 200 orang
- Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebesar 2 laporan

d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diarahkan pada 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdapat 2 (dua) jenis indikator yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk memberi gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Secara lengkap penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada Tabel 6.1. Sedangkan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing ditetapkan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat pada tabel 6.2.

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) RKPD Tahun 2026 mempedomani target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 - 2029, yakni sebagai berikut:

Tabel 6. 1

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Persentase Kemiskinan	%	13,92 – 13,77
2	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	30,63
3	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,98
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	15,68
5	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	10,43
6	Indeks Risiko Bencana	Angka	100,80 – 100,40
7	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,25 – 6,00
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,50 - 5,00
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	69,92
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto per PDRB	%	22,65
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64,44
12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,49

Sumber: RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029

6.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026

Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Banjarnegara tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. 2
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN	OPD
			2026	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
	Persentase peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	73,93	Dindikpora
	Persentase jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	94	Dindikpora
	Persentase Anak Tidak Sekolah (ATS) yang melanjutkan di PKBM	%	34,82	Dindikpora
	Persentase jumlah anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,18	Dindikpora
	Literasi SD	%	72,77	Dindikpora
	Numerasi SD	%	62,21	Dindikpora
	Persentase jumlah anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,18	Dindikpora
	Literasi SMP	%	80,9	Dindikpora
	Numerasi SMP	%	70,3	Dindikpora
	Persentase guru yang lulus PPG	%	51,5	Dindikpora
	Rata-rata guru PNS yang lulus uji kompetensi	%	16,39	Dindikpora
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			
	Rasio tempat tidur terhadap populasi		0,53	Dinkes
	Persentase puskesmas memiliki SPA sesuai standar	%	40	Dinkes
	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat, BMHP dan vaksin essensial	%	100	Dinkes
	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	Dinkes

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN	OPD
			2026	
	Persentase Ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	Dinkes
	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	Dinkes
	Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	Dinkes
	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	Dinkes
	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	Dinkes
	Persentase usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	Dinkes
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	Dinkes
	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	Dinkes
	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	%	100	Dinkes
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TSR)	%	90	Dinkes
	Persentase orang terduga TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	Dinkes
	Cakupan ODHIV ditemukan dan mulai pengobatan ARV	%	90	Dinkes
	Persentase orang yang resiko tertular HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	Dinkes
	Persentase Desa/Kel Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	25	Dinkes
	Kab/kota sehat	%	100	Dinkes
	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat	%	50	Dinkes
	Persentase laboratorium kesmas tingkat 2 yang dikembangkan sesuai standar	%	100	Dinkes
	Kabupaten/kota dengan eliminasi malaria	%	100	Dinkes
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	Dinkes
	Persentase puskesmas yang memiliki kesiapsiagaan penanggulangan KLB	%	100	Dinkes

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN	OPD
			2026	
	dan krisis kesehatan akibat bencana (SKDR)			
	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana (RHA)	%	100	Dinkes
	Cakupan kepesertaan aktif JKN PBI Pemda	%	33,2	Dinkes
	Persentase laboratorium kesmas tingkat 2 yang dikembangkan sesuai standar	%	100	Dinkes
	Persentase desa/kelurahan yang memiliki unit pelayanan kesehatan	%	38	Dinkes
	Persentase puskesmas dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis	%	11	Dinkes
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	100	Dinkes
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi SDM Kesehatan sesuai standar	%	70	Dinkes
	Persentase RS dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	Dinkes
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	65	Dinkes
	Persentase KLB Keracunan Pangan yang tertangani	%	100	Dinkes
	Persentase Industri Pangan Rumah Tangga yang mendapat rekomendasi izin edar PIRT	%	100	Dinkes
	Cakupan desa/kel dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif	%	60	Dinkes
	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan	%	100	RSUD Hj. Anna Lasmah Banjarnegara
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Rasio penanganan jalan dalam kondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat	%	21	DPUPR
	Indeks prasarana fisik irigasi kewenangan kabupaten	Nilai	41,99	DPUPR
	Indeks prasarana non-fisik irigasi kewenangan kabupaten	Nilai	63,83	DPUPR
	Persentase bangunan gedung aset daerah yang memenuhi standar teknis	%	18	DPUPR
	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	92,5	DPUPR
	Persentase penduduk berakses air minum	%	98,8	DPUPR

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN	OPD
			2026	
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	78,73	DPUPR
	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	66,62	DPUPR
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman			
	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	%	20	DPKPLH
	Persentase ketersediaan PSU di perumahan	%	20	DPKPLH
	Persentase meningkatnya pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	DPKPLH
	Persentase penanganan rumah korban bencana	%	20	DPKPLH
	Persentase perbaikan rumah layak huni di luar kawasan permukiman kumuh	%	30	DPKPLH
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
	Persentase penanganan gangguan trantibum dalam satu Kabupaten/Kota	%	100	Satpol PP
	Persentase penegakkan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota	%	100	Satpol PP
	Persentase peningkatan kualitas pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	%	100	Satpol PP
	Persentase pencegahan pengendalian pemadaman penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	%	100	Satpol PP
	Persentase peningkatan kualitas inspeksi peralatan proteksi kebakaran	%	100	Satpol PP
	Persentase peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	%	100	Satpol PP
	Persentase penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	%	100	Satpol PP
	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	%	41,73	BPBD
	Persentase kejadian bencana yang tertangani	%	100	BPBD
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pasca bencana	%	100	BPBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN	OPD
			2026	
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	Dinsos PPPA
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya luar panti	%	100	Dinsos PPPA
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar di luar panti	%	100	Dinsos PPPA
	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	Dinsos PPPA
	Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	%	100	Dinsos PPPA
	Persentase keluarga miskin dan rentan yang di intervensi dengan program bantuan sosial	%	41,18	Dinsos PPPA
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial	%	24,83	Dinsos PPPA
	Persentase taman makam pahlawan dan monumen yang terpelihara dengan baik	%	100	Dinsos PPPA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	260	Disnaker PMPTSP
	Persentase Pencari Kerja/ penganggur yang mendapatkan pekerjaan/ ditempatkan	%	57,5	Disnaker PMPTSP
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu rencana tenaga kerja	%	46,66	Disnaker PMPTSP
	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan jaminan sosial	Orang	78	Disnaker PMPTSP
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Persentase anggaran responsif gender dalam APBD	%	1,89	Dinsos PPPA
	Persentase kelompok perempuan rentan yang terbentuk	%	38,13	Dinsos PPPA

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN	OPD
			2026	
	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB	%	28,42	Dinsos PPPA
	Persentase ketersediaan data berbasis gender di perangkat daerah	%	100	Dinsos PPPA
	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu (Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan sesuai standar oleh petugas terlatih)	%	100	Dinsos PPPA
	Persentase Desa dan Kelurahan Layak Anak	%	34,89	Dinsos PPPA
	Cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu (Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan sesuai standar oleh petugas terlatih)	%	100	Dinsos PPPA
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
	Angka Kecukupan Energi (AKE) (Kkal/Kapita/Hari)	kkal/kapita/hari	1900	Distankan KP
	Angka Kecukupan Protein (AKP) (Gram/Hari)	gram/hari	830	Distankan KP
	Persentase desa rentan rawan pangan yang diintervensi	%	80	Distankan KP
	Persentase kecamatan yang diberi intervensi pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangannya	%	50	Distankan KP
	Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	%	85	Distankan KP
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
	Persentase penyelesaian sengketa tanah yang menjadi kewenangan kabupaten	%	100	DPKPLH
	Persentase penatagunaan tanah yang terlaksana	%	100	DPKPLH
	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	%	20	DPKPLH
	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terlaksana	%	35	DPKPLH
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
	Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang dilaksanakan	%	60	DPKPLH

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIA N SETIAP TAHUN	OPD
			2026	
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tervalidasi	%	100	DPKPLH
	Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan yang dikeluarkan	%	100	DPKPLH
	Persentase kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengendalian lingkungan hidup	%	70	DPKPLH
	Persentase sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata	%	80	DPKPLH
	Persentase luasan RTH yang tertangani	%	100	DPKPLH
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	73	DPKPLH
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Rasio kepemilikan Kartu Keluarga	%	99,5	Dindukcapil
	Rasio penduduk ber akta kelahiran	%	60	Dindukcapil
	Rasio penerbitan akta kematian	%	NA	Dindukcapil
	Rasio data kependudukan yang dimutakhirkan	%	100	Dindukcapil
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	38,7	Dispermades PPKB
	Persentase kerjasama antar desa	%	15,41	Dispermades PPKB
	Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa	%	100	Dispermades PPKB
	Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	%	90,98	Dispermades PPKB
	Presentase BUMDes yang berkembang	%	19,01	Dispermades PPKB
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat	%	96.99	Dispermades PPKB
	Persentase pengembangan ekonomi desa	%	12,5	Dispermades PPKB
	Persentase desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna	%	3,76	Dispermades PPKB
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana			
	Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	77,59	Dispermades PPKB
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	6,2	Dispermades PPKB
	Cakupan anggota Kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga	%	58,15	Dispermades PPKB

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN	OPD
			2026	
	Remaja, Bina Keluarga Lansia) yang ber-KB			
	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	%	20	Dispermades PPKB
	Persentase kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal yang melakukan pendidikan kependudukan	Dok	5	Dispermades PPKB
	Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	Dispermades PPKB
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten	%	89,4	Dinhub
	Persentase cakupan layanan parkir	%	83,1	Dinhub
	Persentase kelayakan kendaraan bermotor	%	44,96	Dinhub
	Persentase pertumbuhan trayek	%	0,5	Dinhub
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			
	Persentase kelancaran akses data center	%	100	Dinkominfo
	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	65	Dinkominfo
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	87.85	Disperindagkop UKM
	Presentase Usaha Mikro dan Kecil yang mengimplementasikan hasil pelatihan	%	33	Disperindagkop UKM
	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	78,61	Disperindagkop UKM
	Persentase KSP/USP yang bisa menilai kesehatanya	%	51,2	Disperindagkop UKM
	Persentase koperasi yang diberikan fasilitasi pelatihan	%	53,02	Disperindagkop UKM
	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	79,19	Disperindagkop UKM
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
	Persentase peningkatan jumlah investor	%	1,5	Disnaker PMPTSP
	Persentase penyelesaian kendala perijinan	%	45	Disnaker PMPTSP
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	139	Disnaker PMPTSP

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN	OPD
			2026	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi	%	56	Dindikpora
	Jumlah perolehan medali pada event olahraga regional dan nasional	%	35	Dindikpora
	Jumlah kegiatan pengembangan kepramukaan yang diselenggarakan setiap tahun	%	100	Dindikpora
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			
	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi oleh walidata	%	100	Dinkominfo
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			
	Persentase aplikasi yang diasesmen dengan ITSA	%	14,89	Dinkominfo
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	%	2	Disparbud
	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat / mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	4,8	Disparbud
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan			
	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	5,69	Disarpus
	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	6,92	Disarpus
	Persentase perpustakaan berstandar nasional perpustakaan	%	7.29	Disarpus
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			
	Tingkat ketersediaan arsip	%	75,03	Disarpus
	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip perangkat daerah	%	11,36	Disarpus
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			
	Jumlah produksi perikanan tangkap		785,25	Distankan KP
	Jumlah produksi perikanan budidaya		42.545,7 7	Distankan KP
	Jumlah wilayah anak sungai yang terawasi sumber daya kelautan dan perikanannya (anak sungai)		7	Distankan KP
	Angka konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun)		30,2	Distankan KP
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			
	Jumlah tamu wisatawan mancanegara	Orang	6000	Disparbud

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIA N SETIAP TAHUN	OPD
			2026	
	Jumlah tamu wisatawan nusantara	Orang	2145000	Disparbud
	Persentase kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang terpelihara	%	75	Disparbud
	Persentase pelaku pariwisata yang aktif dan tervalidasi	%	25	Disparbud
	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	51	Disparbud
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
	Produktivitas tanaman pangan (ton/Ha):			Distankan KP
	Padi (Ton/Ha)	Ton/Ha	6,9	Distankan KP
	Jagung (Ton/Ha)	Ton/Ha	6,9	Distankan KP
	Kedelai (Ton/Ha)	Ton/Ha	1,3	Distankan KP
	Ubi Kayu (Ton/Ha)	Ton/Ha	29,9	Distankan KP
	Ubi Jalar (Ton/Ha)	Ton/Ha	27,35	Distankan KP
	Produktivitas hortikultura dan perkebunan (ton/Ha):			Distankan KP
	Cabai (Ton/Ha)	Ton/Ha	3,2	Distankan KP
	Kentang (Ton/Ha)	Ton/Ha	18,3	Distankan KP
	Durian (Ton/Ha)	Ton/Ha	5.500	Distankan KP
	Salak (Ton/Ha)	Ton/Ha	812.200	Distankan KP
	Kopi (Ton/Ha)	Ton/Ha	3.425	Distankan KP
	Kelapa Deres (Ton/Ha)	Ton/Ha	9.250	Distankan KP
	Kelapa Dalam (Ton/Ha)	Ton/Ha	16.925	Distankan KP
	Teh (Ton/Ha)	Ton/Ha	3.725	Distankan KP
	Tembakau (Ton/Ha)	Ton/Ha	425	Distankan KP
	Persentase luas lahan baku sawah dengan indeks pertanaman lebih besar/sama dengan 200	%	80	Distankan KP
	Penambahan luas lahan pertanian yang mendapatkan fasilitas irigasi dan jalan usaha tani (Ha)	Ha	50	Distankan KP
	Rasio luas lahan terdampak yang tertangani	%	80	Distankan KP

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN	OPD
			2026	
	Cakupan bina kelompok tani		Kenaikan kelas kemampuan poktan P > L: 6%, L > M: 6%, M > U: 1%. Cakupan bina kelembagaan, petani: 30%, penyuluhan: 30%	Distankan KP
	Terlayannya kesehatan hewan / ternak besar dan kecil secara menyeluruh	%	10	Distankan KP
	Tersedianya produk ternak yang asuh	%	100	Distankan KP
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	20	Disperindagkop UKM
	Persentase pelaku usaha perdagangan yang terbina	%	0,22	Disperindagkop UKM
	Persentase fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	%	<5	Disperindagkop UKM
	Peningkatan komoditas potensial ekspor	%	2	Disperindagkop UKM
	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	71	Disperindagkop UKM
	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi /dilaksanakan	%	5	Disperindagkop UKM
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	%	43,83	Disperindagkop UKM
	Persentase jumlah pemantauan dan pengawasan perijinan berusaha sektor industri dengan jumlah ijin usaha yang diterbitkan	%	100	Disperindagkop UKM
	Tersedianya informasi secara lengkap dan terkini		100	Disperindagkop UKM
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			
	Persentase transmigran yang diberangkatkan	%	5	Disnaker PMPTSP

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN	OPD
			2026	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
	Sekretariat Daerah			
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	Sekretariat Daerah
	Efektivitas kerja sama daerah	%	100	Sekretariat Daerah
	Persentase fasilitasi kebijakan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	%	100	Sekretariat Daerah
	Persentase produk hukum yang dihasilkan	%	81	Sekretariat Daerah
	Persentase fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perekonomian serta Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	%	100	Sekretariat Daerah
	Tingkat Kematangan UKPBJ		09-Sep	Sekretariat Daerah
	Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan	%	85	Sekretariat Daerah
	Sekretariat DPRD			
	Persentase raperda yang ditetapkan sesuai dengan Propemperda	%	100	Sekretariat DPRD
	Persentase capaian fasilitas Tugas DPRD	%	100	Sekretariat DPRD
	Ketepatan Penetapan Pembahasan APBD Tahun n+1	%	100	Sekretariat DPRD
	Persentase capaian fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah	%	100	Sekretariat DPRD
	Persentase capaian fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	%	100	Sekretariat DPRD
	Persentase capaian fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	%	100	Sekretariat DPRD
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
	Perencanaan			
	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	Baperlitbang
	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang Perekonomian dan SDA	%	100	Baperlitbang
	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	Baperlitbang
	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	Baperlitbang
	Keuangan			

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN	OPD
			2026	
	Persentase penetapan APBD sesuai ketentuan	%	100	BPPKAD
	Persentase kesesuaian program dalam APBD dengan RKPD	%	97	BPPKAD
	Persentase serapan belanja daerah	%	97	BPPKAD
	Persentase serapan dana transfer	%	98,5	BPPKAD
	Persentase OPD yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD sesuai standar	%	33	BPPKAD
	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	%	100	BPPKAD
	Persentase pemanfaatan BMD	%	90	BPPKAD
	Persentase luas tanah pemerintah kabupaten yang bersertifikat	%	76	BPPKAD
	Persediaan peningkatan pajak dan retribusi daerah	%	6,5	BPPKAD
	Kepegawaian			
	Persentase pemenuhan pegawai sesuai dengan pemetaan kebutuhan ASN	%	90	BKD
	Persentase jabatan struktural yang terisi secara efektif	%	91	BKD
	Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	%	100	BKD
	Pendidikan dan Pelatihan			
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	65	BKD
	Penelitian dan Pengembangan			
	Persentase riset yang mendukung perekonomian daerah	%	50	Baperlitbang
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
	Inspektorat Daerah			
	Persentase <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> sesuai standar	%	60	Inspektorat
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal	%	96,95	Inspektorat
	Persentase penanganan PWKKND sesuai standar	%	75	Inspektorat
	Persentase kegiatan pengawasan sesuai PKPT	%	100	Inspektorat
	Persentase kegiatan antikorupsi yang dilaksanakan sesuai kebijakan antikorupsi	%	65	Inspektorat
	UNSUR KEWILAYAHAN			
	Kecamatan Banjarmangu			
	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	%	100	Kecamatan Banjarmangu
	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	%	100	Kecamatan Banjarmangu

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN	OPD
			2026	
	Persentase penanganan konflik di wilayah	%	100	Kecamatan Banjarnangu
	Persentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	Kecamatan Banjarnangu
	Kecamatan Banjarnegara			
	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	%	100	Kecamatan Banjarnegara
	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	%	100	Kecamatan Banjarnegara
	Persentase penanganan konflik di wilayah	%	100	Kecamatan Banjarnegara
	Persentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	Kecamatan Banjarnegara
	Kecamatan Batur			
	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	%	100	Kecamatan Batur
	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	%	100	Kecamatan Batur
	Persentase penanganan konflik di wilayah	%	100	Kecamatan Batur
	Persentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	Kecamatan Batur
	Kecamatan Bawang			
	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	%	100	Kecamatan Bawang
	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	%	100	Kecamatan Bawang
	Persentase penanganan konflik di wilayah	%	100	Kecamatan Bawang
	Persentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	Kecamatan Bawang
	Kecamatan Kalibening			
	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	%	100	Kecamatan Kalibening
	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	%	100	Kecamatan Kalibening
	Persentase penanganan konflik di wilayah	%	100	Kecamatan Kalibening
	Persentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	Kecamatan Kalibening
	Kecamatan Pagedongan			
	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	%	100	Kecamatan Pagedongan
	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	%	100	Kecamatan Pagedongan
	Persentase penanganan konflik di wilayah	%	100	Kecamatan Pagedongan
	Persentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	Kecamatan Pagedongan
	Kecamatan Purwanegara			

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN	OPD
			2026	
	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	%	100	Kecamatan Purwanegara
	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	%	100	Kecamatan Purwanegara
	Persentase penanganan konflik di wilayah	%	100	Kecamatan Purwanegara
	Persentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	Kecamatan Purwanegara
	Kecamatan Sigaluh			
	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	%	100	Kecamatan Sigaluh
	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	%	100	Kecamatan Sigaluh
	Persentase penanganan konflik di wilayah	%	100	Kecamatan Sigaluh
	Persentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	Kecamatan Sigaluh
	Kecamatan Pejawaran			
	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	%	100	Kecamatan Pejawaran
	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	%	100	Kecamatan Pejawaran
	Persentase penanganan konflik di wilayah	%	100	Kecamatan Pejawaran
	Persentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	Kecamatan Pejawaran
	Kecamatan Pagentan			
	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	%	100	Kecamatan Pagentan
	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	%	100	Kecamatan Pagentan
	Persentase penanganan konflik di wilayah	%	100	Kecamatan Pagentan
	Persentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	Kecamatan Pagentan
	Kecamatan Purwareja Klampok			
	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	%	100	Kecamatan Purwareja Klampok
	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	%	100	Kecamatan Purwareja Klampok
	Persentase penanganan konflik di wilayah	%	100	Kecamatan Purwareja Klampok
	Persentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	Kecamatan Purwareja Klampok
	Kecamatan Mandiraja			
	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	%	100	Kecamatan Mandiraja

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN	OPD
			2026	
	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	%	100	Kecamatan Mandiraja
	Persentase penanganan konflik di wilayah	%	100	Kecamatan Mandiraja
	Persentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	Kecamatan Mandiraja
	Kecamatan Wanayasa			
	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	%	100	Kecamatan Wanayasa
	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	%	100	Kecamatan Wanayasa
	Persentase penanganan konflik di wilayah	%	100	Kecamatan Wanayasa
	Persentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	Kecamatan Wanayasa
	Kecamatan Karangobar			
	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	%	100	Kecamatan Karangobar
	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	%	100	Kecamatan Karangobar
	Persentase penanganan konflik di wilayah	%	100	Kecamatan Karangobar
	Persentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	Kecamatan Karangobar
	Kecamatan Punggeln			
	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	%	100	Kecamatan Punggeln
	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	%	100	Kecamatan Punggeln
	Persentase penanganan konflik di wilayah	%	100	Kecamatan Punggeln
	Persentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	Kecamatan Punggeln
	Kecamatan Pandanarum			
	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	%	100	Kecamatan Pandanarum
	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	%	100	Kecamatan Pandanarum
	Persentase penanganan konflik di wilayah	%	100	Kecamatan Pandanarum
	Persentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	Kecamatan Pandanarum
	Kecamatan Wanadadi			
	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	%	100	Kecamatan Wanadadi
	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	%	100	Kecamatan Wanadadi
	Persentase penanganan konflik di wilayah	%	100	Kecamatan Wanadadi
	Persentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	Kecamatan Wanadadi

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN	OPD
			2026	
	Kecamatan Rakit			
	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	%	100	Kecamatan Rakit
	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	%	100	Kecamatan Rakit
	Persentase penanganan konflik di wilayah	%	100	Kecamatan Rakit
	Persentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	Kecamatan Rakit
	Kecamatan Madukara			
	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	%	100	Kecamatan Madukara
	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	%	100	Kecamatan Madukara
	Persentase penanganan konflik di wilayah	%	100	Kecamatan Madukara
	Persentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	Kecamatan Madukara
	Kecamatan Susukan			
	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	%	100	Kecamatan Susukan
	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	%	100	Kecamatan Susukan
	Persentase penanganan konflik di wilayah	%	100	Kecamatan Susukan
	Persentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	Kecamatan Susukan
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
	Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Persentase masyarakat dan Ormas yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan/Idiologi Pancasila	%	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	%	5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase cakupan Ormas yang diberdayakan dan diawasi	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase masyarakat dan Ormas yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	%	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			Semua Perangkat Daerah

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN	OPD
			2026	
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	Semua Perangkat Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	Semua Perangkat Daerah
	BOR	%	72	RSUD Hj. Anna Lasmah Banjarnegara
	LOS	Hari	3	RSUD Hj. Anna Lasmah Banjarnegara
	TOI	Hari	3	RSUD Hj. Anna Lasmah Banjarnegara
	BTO	Kali	50	RSUD Hj. Anna Lasmah Banjarnegara
	GDR		0,025	RSUD Hj. Anna Lasmah Banjarnegara
	NDR		0,015	RSUD Hj. Anna Lasmah Banjarnegara
	Rasio biaya operasional penunjang terhadap pendapatan	%	86,84	RSUD Hj. Anna Lasmah Banjarnegara
	Persentase pemenuhan SPM layanan umum dan administrasi	%	100	RSUD Hj. Anna Lasmah Banjarnegara
	Persentase kemampuan pendapatan membiayai seluruh belanja	%	78,1	RSUD Hj. Anna Lasmah Banjarnegara
	Persentase pertumbuhan pendapatan	%	13,96	RSUD Hj. Anna Lasmah Banjarnegara
	Peningkatan pendapatan retribusi pasar	%	2	Disperindagkop UKM
	Nilai penataan organisasi	Nilai	54,5	Sekretariat Daerah

Sumber: RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 sekaligus bagian dari tahun pertama pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026. Selain hal tersebut, RKPD juga menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari para pelaku pembangunan dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 ini.

BUPATI BANJARNEGARA,

AMALIA DESIANA